BADAN POM



LAPORAN KINERJA
BBPOM di Jakarta
Tahun 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI BESAR POM DI JAKARTA

TAHUN 2024

1500533 HALOBPOM
@bpom.jakarta
@BPOMJakarta
082211267771
021-84304046
021-84304048
bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua oleh Allah, Tuhan Semesta Alam.



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk **Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2024**. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan kepemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2024 untuk periode rencana strategis 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 24 Februari 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM JAKARTA

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF



IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta selanjutnya disebut BBPOM di Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki area pengawasan pada Provinsi DKI Jakarta. Dalam mengemban tugas fungsinya, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta” dengan capaian sebesar 99,52% dengan kategori “Cukup”. Dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian 100,41%
   b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 96,09%
   c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 101,49%
   d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 93,08%
   e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian 106,53%
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sama, dengan capaian sebesar 100,11% pada kategori “Sangat Baik”.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian 103,54% dengan kategori ““Sangat Baik”. Dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
   a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 102,88
   b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 107,15
   c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 100,59%



4. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 102,32% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
    a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 102,40%
    b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 100,13%
    c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100,84%
    d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 112,47%
    e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 96,65%
    f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 100,82%
    g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 100,00%
    h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian 105,26%
5. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 100,23% dengan kategori “sangat baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
    a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian 100,03%
    b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian 100,87%
    c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian 100,00%
    d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan capaian 100,00%
6. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 120,00% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:



a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 120%
b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 120%

7. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan IKU yang sama memperoleh capaian sebesar 105,86% pada kategori “Sangat Baik”
8. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal”, dengan capaian sebesar 101,07% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
   a. Indeks RB BBPOM di Jakarta dengan capaian 101,75%
   b. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta dengan capaian 99,23
   c. Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian 102,22%
9. Sasaran strategis “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal” dengan capaian sebesar 95,95% dengan kategori “Cukup”.
10. Sasaran strategis “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”, dengan capaian sebesar 111,84% dengan kategori “Sangat Baik. Dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
    a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian 103,68%
    b. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal dengan capaian 120%.
11. Sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel”, dengan capaian sebesar 108,76% dengan kategori “Sangat Baik”. Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
    a. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta dengan capaian 101,85
    b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 104,13%
    c. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara 114,57%
    d. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri 114,47%

Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp 50.625.276.000 (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan nilai Automatic Adjustment anggaran yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 1.896.011.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sebelas ribu



rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 48.680.482.932 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga persentase serapan anggaran dengan Automatic Adjustment sebesar 96,16% dan tanpa Automatic Adjustment sebesar 99,93%. Perhitungan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,01 sampai 0,29.



HIGHLIGHT KINERJA



HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik baik internal maupun eksternal, Balai Besar POM Jakarta melakukan langkah-langkah inovasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) UMKM Jaw@ra (UMKM Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman untuk Masyarakat)

   Program pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat bahan alam yang bersifat terintegrasi dan berkolaborasi bersama lintas sektor untuk memiliki legalitas izin edar BPOM dengan memberdayakan tenaga pendamping kewirausahaan yang tersedia di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Inovasi ini mendapat apresiasi sebagai Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024



2) Jak Konek (Jakarta KIE Online dan Elektronik)

   Strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi penting, memfasilitasi dialog interaktif dan konstruktif, dan memperkuat keterlibatan *pentahelix* melalui pemanfaatan teknologi. Inisiatif ini mampu mengefisienkan anggaran sampai dengan Rp. 5.854.500.000

3) Sultan Betawi (Konsultasi dan Layanan Informasi Sertifikasi Bersama BBPOM Wilayah DKI Jakarta)

   BBPOM di Jakarta membuka loket layanan informasi dan sertifikasi agar lebih dekat kepada Masyarakat di Mall Pelayanan Publik yang beralamat di (Jl HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan- Lt.3) setiap hari Selasa

4) Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta): Layanan Verifikasi Pemasukan Obat dan Makanan Melalui Jasa Pengangkutan untuk Keperluan Pribadi Melalui Kiriman



Pos, yang merupakan sinergi pengawasan pemasukan obat dan makanan dengan Bea dan Cukai Pasar baru, yang dilakukan secara online

5) Monas : Mobil Laboratorium Jajanan Anak Sekolah merupakan layanan pengajuan kunjungan mobil laboratorium keliling untuk pengawasan jajanan anak sekolah. MONAS akan berkunjung ke sekolah, melakukan pengujian cepat (rapid test) terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dicurigai mengandung 4 bahan berbahaya (Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow), dan memberikan layanan informasi dan edukasi tentang Keamanan Pangan.

6) Monstera (*Moleculer Testing on Pathogenic Bacteria*) merupakan inovasi pengembangan metode uji *screening* deteksi bakteri patogen pada sampel obat dan makanan dengan memanfaatkan teknologi *real time* PCR yang mempersingkat waktu uji semula 5 hari menjadi 2 hari. Inovasi ini memperoleh apresiasi pada Lomba Inovasi Teknologi Pengujian Tahun 2024 sebagai Juara III.


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

Ernawati Puji Rahayu, S.Si., M.Si.

SEBAGAI

JUARA III LOMBA INOVASI TEKNOLOGI PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

Deteksi Listeria Monocytogenes dan Listeria Spp dalam Produk Naget Ayam dengan cara *Real Time Polimerase Chain Reaction* (RT-PCR)

Jakarta, 25 November 2024

Kepala Badan POM Republik Indonesia

TARUNA IKRAR

BBPOM di Jakarta berupaya terus menerus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan diharapkan dapat mencapai sasaran strategis yang lebih optimal pada tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang

BBPOM di Jakarta Berikan Edukasi Keamanan Pangan di World Food Safety Day (WFSD) 2024



“Keamanan pangan merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan langsung berdampak pada kehidupan dan kesehatan dari mulai lahir sampai akhir hidup sehingga keamanan pangan menjadi hal sangat penting untuk kita semua”, ujar Rizka Andalusia dalam kegiatan peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia atau *World Food Safety Day* (WFSD) 2024 yang bertempat di One Satrio, CBD Kuninga, BPOM melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan edukatif seputar "*World Food Safety Day - Food Safety: Prepare for the Unexpected*".

Kunjungan Peserta Pelatihan Bangladesh Food Safety Authority (BFSA) Dalam Rangka Penguatan Keamanan Pangan ke Balai Besar POM di Jakarta

Kunjungan ini bertujuan untuk memahami praktik dalam inspeksi, regulasi, dan koordinasi keamanan pangan pada Balai Besar POM di Jakarta, juga untuk mengidentifikasi area di mana *Bangladesh Food Safety Authority (BFSA)* dapat meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik. Dalam kunjungan ini turut serta pula perwakilan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA (Japan International Cooperation Agency) yang diwakili oleh Mr. Atushi Koyama sebagai *Team Leader JICA- STIRC Project.* Menteri Sekertaris Kabinet Bangladesh Mr. Mohammed Mahbub Hossain. dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan mereka ke Balai Besar POM di Jakarta adalah untuk mempelajari sistem pengawasan Obat dan Makanan pada tingkat Provinsi dan akan menerapkannya di Bangladesh



Dukung Ekosistem Digital di DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta Luncurkan Inovasi JAKKONEK



Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan yang lebih adaptif dan efektif sesuai dengan perkembangan teknologi terkini di era disrupsi digital serta sebagai upaya membangun ekosistem digital di provinsi DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta membangun inovasi **JAKKONEK-Strategi Digitalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam Pengawasan Obat dan Makanan** untuk Mendukung Ekosistem Digital di Provinsi DKI Jakarta, telah diselenggarakan *talk show* dengan tema “Strategi Digitalisasi KIE Obat dan Makanan dalam Mendukung UMKM Berdaya Saing di provinsi DKI Jakarta” sekaligus peluncuran inovasi JAKKONEK.



Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Pengujian Sampel Uji Pihak Ketiga Melalui Online Balai Besar POM di Jakarta

Terdapat 3 jenis layanan pendaftaran yaitu Pendaftaran layanan tatap muka dengan pilihan lokasi di kantor Balai Besar POM di Jakarta serta lokasi Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Pemaparan OQ Jak ini disampaikan oleh Astrada Dyna Ersya, S.Si., M.Biotech selaku Kepala Bagian Tata Usaha BBPOM di Jakarta dan inisiator inovasi. Selain OQ Jak, inovasi lain BBPOM di Jakarta yang diperkenalkan pada kegiatan ini adalah LAILA 24 yaitu Layanan Informasi dan Pengaduan melalui WhatsApp disempurnakan dengan penambahan chatbot *Artificial Intelligence*.



Penyidik BBPOM di Jakarta Sita Kosmetik Impor Ilegal Senilai Miliar-An Rupiah



Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya berhasil menyita 423.135 kemasan Kosmetik impor tanpa izin edar dengan perkiraan nominal Rp 3,624,411,450 di sebuah bangunan di Jakarta Barat. Kosmetik ilegal tersebut dijual online melalui situs e-commerce. Ratusan ribu produk tersebut selanjutnya menjadi barang bukti untuk dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Peredaran Kosmetik impor tanpa izin edar merupakan bentuk tindak pidana di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka (10) Paragraf 11 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan/atau Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Balai Besar POM di Jakarta Bersama Polri dan TNI Berantas Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

Penyidik Balai Besar POM di Jakarta, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari Polda Metro Jaya dan TNI, berhasil mengungkap praktik penjualan kosmetik ilegal secara online. Operasi gabungan yang dilakukan pada 24 Oktober 2024 ini berhasil mengamankan sejumlah besar produk kosmetik ilegal yang disimpan di gudang 4 (empat) lantai di wilayah Jakarta Barat. Produk yang diamankan antara lain adalah kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dengan merk Lameila dan SVMY asal Tiongkok beserta kosmetik lainnya dengan total 158 item (152.744 pieces) dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 2,2 miliar rupiah.





Penghargaan yang Diperoleh BBPOM di Jakarta Selama Tahun 2024

Penghargaan atas pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium s/d TW III tahun 2024 tertinggi ke-8 dengan nilai 88,47% (1 Oktober 2024)



Penghargaan UPT dengan implementasi regionalisasi terbaik, sebagai anggota region terbaik ke-2 (1 Oktober 2024)





Penghargaan atas dedikasi dan komitmennya secara proaktif mengimplementasikan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Lam Indonesia) memberikan pendampongan untuk naik kelas, sehingga berhasil menibgkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam (10 Desember 2024)



Penghargaan sebagai Terbaik 1 untuk Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi tahun 2024 (30 Januari 2025)



Penghargaan sebagai terbaik ke-2 pegawai berprestasi nasional diberikan kepada "Ernawati Puji Rahayu, S.Si, M.Si" (30 Januari 2025)





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 2
HIGHLIGHT KINERJA 6
DAFTAR TABEL 14
DAFTAR GAMBAR 19
BAB I 24
1.1. LATAR BELAKANG 24
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 25
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 26
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 27
1.5. PERMASALAHAN UTAMA 34
BAB II 38
2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 38
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN 55
2.3. PERJANJIAN KINERJA 57
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 61
2.5. METODE PENGUKURAN 59
BAB III 63
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 63
3.2. SASARAN STRATEGIS I 69
3.3. SASARAN STRATEGIS II 112
3.4. SASARAN STRATEGIS III 130
3.5. SASARAN STRATEGIS IV 170
3.7. SASARAN STRATEGIS V 227
3.8. SASARAN STRATEGIS VI 270
3.9. SASARAN STRATEGIS VII 285
3.10. SASARAN STRATEGIS VIII 295
3.11. SASARAN STRATEGIS IX 314
3.12. SASARAN STRATEGIS X 323
3.13. SASARAN STRATEGIS XI 337
3.14. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 347
3.15. REALISASI ANGGARAN 353
3.16. EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN 358

BAB IV 363
4.1. KESIMPULAN.....363
4.2. SARAN 364

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 3
Tabel 2. Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 28
Tabel 3. Hasil Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta 34
Tabel 4. *Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta* 44
Tabel 5. Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 57
Tabel 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 63
Tabel 7. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan 59
Tabel 8. Predikat Kinerja Organisasi Berdasarkan NPSS 60
Tabel 9. Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan61
Tabel 10. Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan 62
Tabel 11. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 64
Tabel 12. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 202467
Tabel 13. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 69
Tabel 15. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 72
Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta tahun 2024 75
Tabel 17. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 77
Tabel 18. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 78
Tabel 19. Kriteria Sampling terhadap Pangan Olahan 78
Tabel 20. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 81
Tabel 21. Analisis Efisiensi Anggaran untuk Makanan Tahun 2024 84
Tabel 22. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 86
Tabel 23. *Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024* 87
Tabel 24. Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Target Oersentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 91
Tabel 25. *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Baik Secara Internal Maupun Eksternal* 94
Tabel 26. *Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2024* 95
Tabel 27. *Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023* 99
Tabel 28. Efisiensi Anggaran Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 BBPOM di Jakarta 101
Tabel 29. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 102
Tabel 30. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Pangan Fortifikasi Tahun 2024 103
Tabel 31. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 Untuk Kategori Fortifikasi 106
Tabel 32. Efisiensi Anggaran Dalam Capaian Target Pangan Fortifikasi yang Memuhi Syarat Tahun 2024 BBPOM di Jakarta 109



Tabel 33. Tindak Lanjut Hasiil Rekomendasi Sebelumnya 111
Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Terkait Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 112
Tabel 35. Kriteria Indeks Persepsi 114
Tabel 36. Nilai Capaian Kinerja Terkait Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 117
Tabel 37. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 121
Tabel 38. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 128
Tabel 39. Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 130
Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian 2023 serta Target 2024 Setelah Reviu Renstra 133
Tabel 41. Desk Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023 137
Tabel 42. *Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024* 140
Tabel 43. Kateori Indeks Kepuasan 142
Tabel 44. Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Mkananan 145
Tabel 45. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 148
Tabel 46. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 152
Tabel 47. *Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024* 153
Tabel 48. Kriteria Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta 154
Tabel 49. Nilai Indeks Kepuasan dari Responden Tahun 2024 157
Tabel 50. Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat per Tahun 2024 159
Tabel 51. Nilai SKM per Unsur dan Unit Layanan Tahun 2024. 161
Tabel 52. Realiasai, Target dan Capaian Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM Jakarta 163
Tabel 53. Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 165
Tabel 54. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 168
Tabel 55. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024170
Tabel 56. Realisasi, Target dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi 173
Tabel 57. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan* 176
Tabel 58. *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya* 177
Tabel 59. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 178
Tabel 60. Realisasi, Target dan Capaian Kinerja Hasil Inspeksi 180



Tabel 61. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 182
Tabel 62. Tindak LanjutRekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 184
Tabel 63. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 185
Tabel 64. Realisasi, Target dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertfikasi 188
Tabel 65. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kerling Jakarta Tahun 2024 195
Tabel 66. Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 197
Tabel 67. Realisasi, Target, Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 199
Tabel 68. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan 201
Tabel 69. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 202
Tabel 70. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 203
Tabel 71. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2024 204
Tabel 72. Realisasi, Target dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 206
Tabel 73. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta 208
Tabel 74. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 209
Tabel 75. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 210
Tabel 76. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta 211
Tabel 77. *Penilaian Kinerja UPP BPOM* 213
Tabel 78. Realisasi, Target dan Capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta215
Tabel 79. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 218
Tabel 80. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 220
Tabel 81. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta* 221
Tabel 82. Realisasi, Target dan Capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan 223
Tabel 83. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 227
Tabel 84. Pengukuran tingkat efektivitas KIE 228
Tabel 85. Realisasi, Target dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta 232
Tabel 86. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 240
Tabel 87. *Realisasi Kegiatan Terkait PJAS Tahun 2024* 243
Tabel 88. Realisasi, Target, Capaian Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Jakarta 245



Tabel 89. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 246
Tabel 90. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 248
Tabel 91. Realisasi desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 249
Tabel 92. Realisasi Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2024 252
Tabel 93. Realisasi, Target dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta 254
Tabel 94. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 257
Tabel 95. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Sebelumnya 258
Tabel 96. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas* 259
Tabel 97. Realisasi Kegiatan PasarAman Berbasis Komunitas Tahun 2024 262
Tabel 98. Realisasi, Target dan Capaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di Lingkungan BBPOM di Jakarta 264
Tabel 99. Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja BBPOM Jakarta 266
Tabel 100. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 268
Tabel 101. *Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024* 270
Tabel 102. *Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 Beserta Kategorinya* 272
Tabel 103. *Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Target Persentase yang Diperiksa dan DIuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta Tahun 2024* 273
Tabel 104. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya 276
Tabel 105. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 276
Tabel 106. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 280
Tabel 107. Analisis Efisiensi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 281
Tabel 108. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya 284
Tabel 109. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2024 Terkait Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di BIdang Obat dan Makanan 285
Tabel 110. Capaian Penindakan Kejahatan di Wilayah DKI Jakarta 286
Tabel 111. *Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja terkait penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan* 286
Tabel 112. Realisasi, Target dan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 288
Tabel 113. *Tindak lanjut perbaikan kinerja penindakan* 293
Tabel 114. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 Beserta Kategorinya 299
Tabel 115. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 304
Tabel 116. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 305
Tabel 117. Tingkat Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022-2024 306
Tabel 118. Tabulasi Perkiraan Capaian Terhadap Target 2024 Sesuai Rencana Strategis 308



Tabel 119. *Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024* 314
Tabel 120. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 318
Tabel 121. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 323
Tabel 122. *Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024* 325
Tabel 123. Analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 tahun 2023 327
Tabel 124. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya* 330
Tabel 125. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 330
Tabel 126. Target Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Berdasarkan Realisasi 2024 dan Target 2024 334
Tabel 127. Bobot Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator 338
Tabel 128. *Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024* 341
Tabel 129. Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sebelum, Setelah dan pada PK 2024 343
Tabel 130. *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya* 346
Tabel 131. Revisi DIPA BBPOM di Jakarta Tahun 2024 353
Tabel 132. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan 355
Tabel 133. Rincian realisasi anggaran per Indikator 357
Tabel 134. Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja 361
Tabel 135. Tingkat Efisiensi Anggaran 361



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Jakarta 27
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta Berdasarkan Gender 29
Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta Berdasarkan Strata Pendidikan 29
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta 31
Gambar 5. Sarana Produksi yang Diawasi oleh BBPOM di Jakarta 32
Gambar 6. Sarana Distribusi yang Diawasi oleh BBPOM di Jakarta 32
Gambar 7. Draft Revisi Peta Stretegi BSC Level II Balai Besar/Balai POM 40
Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 44
Gambar 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Jakarta 58
Gambar 10. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Jakarta 59
Gambar 11. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Jakarta (Lanjutan) 60
Gambar 12. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta 71
Gambar 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 sesuai RPMJN BBPOM di Jakarta 71
Gambar 14. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Setara 73
Gambar 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta Tahun 2020-2024 80
Gambar 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Jakarta dengan Target Jangka Menengah 81
Gambar 17. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 82
Gambar 18. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 88
Gambar 19. *Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan RPJMN* 88
Gambar 20. Capaian Perubahan Target Tahun 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 beserta Kategorinya 89
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024 dengan UPT BPOM Lainnya 90
Gambar 22. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta antara tahun 2020-2024 97
Gambar 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024 BBPOM di Jakarta 98
Gambar 24. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 99
Gambar 25. Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta antara Tahun 2020-2024 105
Gambar 26. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan RPJMN 106
Gambar 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuh Syarat dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara 107
Gambar 28. Grafik Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 115



Gambar 29. Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Jakarta 116
Gambar 30. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan RPJMN117
Gambar 31. Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2023 dengan Balai lain yang sejenis/setara 118
Gambar 32. *Grafik Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan* 130
Gambar 33. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta 132
Gambar 34. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta 133
Gambar 35. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 dengan Balai Lain 134
Gambar 36. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta 143
Gambar 37. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya 144
Gambar 38. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 145
Gambar 39. Perbandingan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan Balai lain yang sejenis/setara 146
Gambar 40. Grafik Indeks Kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di BBPOM Jakarta 155
Gambar 41. Grafik Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap Layanan Pulbik BBPOM di Jakarta 161
Gambar 42. *Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024* 162
Gambar 43. *Perbandingan indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan Balai lain yang sejenis/setara* 163
Gambar 44. *Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2024 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024* 173
Gambar 45. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan UPT lain yang sejenis/setara dan target nasional 174
Gambar 46. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2024 dengan tahun 2020-2024 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 180
Gambar 47. *Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 dengan Balai Lainnya* 181



Gambar 48. Persentase Realisasi Tahun 2024 Keputusan Penilaian Sertifikasi Terhadap Target Tahun 2024 185
Gambar 49. *Persentase Keuputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di BBPOM di Jakarta* 187
Gambar 50. Grafik Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu 188
Gambar 51. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2023 dengan tahun 2020-2022 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 198
Gambar 52. *Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan Balai lain* 199
Gambar 53. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2024 dengan tahun 2020-2024 dan target akhir Periode Renstra RPJMN 2020-2024 205
Gambar 54. Grafik Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 206
Gambar 55. Indeks Pelayanan Publik BBPOMdi Jakarta Tahun 2024 213
Gambar 56. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya 214
Gambar 57. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 214
Gambar 58. Perbandingan indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 dengan Balai lain yang sejenis/setara 215
Gambar 59. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta* 221
Gambar 60. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik* 222
Gambar 61. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik* 223
Gambar 62. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta 229
Gambar 63. Indikator pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 229
Gambar 64. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta Tahun 230
Gambar 65. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta 231
Gambar 66. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja BBPOM di Jakarta dengan Kinerja Unit Kerja Kerja Lain yang Sejenis/Setara Terkait Efektivitas KIE Obat dan Makanan 232
Gambar 67. Grafik Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Jakarta 243
Gambar 68. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM Jakarta 244
Gambar 69. Grafik Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Jakarta 245
Gambar 70. *Grafik Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta* 253
Gambar 71. *Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Desa Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 dan 2024* 254



Gambar 72. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Unit Kerja Lain yang Sejenis dan Target Nasional 255
Gambar 73. Grafik Jumlah Pasar Aman Bebrasi Komunitas di BBPOM di Jakarta 263
Gambar 74. Perbandingan realisasi presentase capaian tahapan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 dan 2024 264
Gambar 75. Perbandingan realisasi jumlah jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan Balai Lainnya 265
Gambar 76. *Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan DIuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta* 271
Gambar 77. Grafik Persentase Sampel Obat dan Makanan yang DIperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta 271
Gambar 78. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 272
Gambar 79. Grafik Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta 278
Gambar 80. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Jakarta 279
Gambar 81. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional 280
Gambar 82. *Perbandingan capaian indikator kinerja efektivitas penindakan BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024* 287
Gambar 83. Grafik Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 288
Gambar 84. Grafik Indeks RB BBPOM di Jakarta 297
Gambar 85. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 298
Gambar 86. *Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra* 299
Gambar 87. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024 307
Gambar 88. Grafik Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra 308
Gambar 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Terkait Nilai SAKIP Tahun 2024 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara 309
Gambar 90. Grafik Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024 316
Gambar 91. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta 317
Gambar 92. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta di Jakarta tahun 2024 dengan Balai lain 318
Gambar 93. Perbandingan realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 324
Gambar 94. Grafik Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP BBPOM di Jakarta 324
Gambar 95. *Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 dengan Balai lain yang sejenis/setara* 325
Gambar 96. Grafik Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal BBPOM di Jakarta 332



Gambar 97. *Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara* 333
Gambar 98. *Grafik Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Jakarta yang Terdapat dalam Dokumen Renstra* 334
Gambar 99. Grafik Nilai Kinerja BBPOM di Jakarta 339
Gambar 100. Nilai IKPA BBPOM Jakarta tahun 2024 pada aplikasi OMSPAN 339
Gambar 101. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada IKU Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta 340
Gambar 102. Grafik Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta 342
Gambar 103. Grafik Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta(Sebelum & Sesudah Reviu) 342
Gambar 104. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta dengan Balai Lain 344
Gambar 105. Realisasi Belanja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 358



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan pengendalian aspek keamanan, mutu, serta khasiat dan manfaat obat dan makanan 15 sepanjang product life cycle yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui tiga pilar yaitu pengawasan oleh pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang aman dapat terwujud jika tiga pilar tersebut menjalankan peran pengawasan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik diharapkan dapat melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Jakarta melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman melalui program Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi. Selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta selaku Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. Tugas Balai Besar POM di Jakarta

   Melaksanakankan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Balai Besar POM di Jakarta

   a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
   c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
   d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
   e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
   f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
   g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
   h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
   i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
   l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari Kepala Balai, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional. Perkuatan koordinasi internal dilaksanakan melalu penugasan Ketua Tim pada 4 kelompok fungsi yaitu Pengujian, Pemeriksaan, Informasi dan Komunikasi serta Penindakan. Struktur organisasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut:



1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sumber daya manusia, fasilitas pendukung, anggaran, kondisi geografis dan demografi serta sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diawasi. Berikut penjelasan



mengenai aspek strategis yang dimaksud:

a. Lingkungan Internal

Aspek strategis dari segi lingkungan internal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis beban kerja pada aplikasi SIREN SDM per Desember 2024, persentase pemenuhan SDM Balai Besar POM di Jakarta adalah sebesar 68.64% dengan kebutuhan pegawai sebanyak 169 orang. Terdapat *gap* jumlah kebutuhan sebanyak 53 orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Jakarta	Struktural	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
4	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
5	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
6	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33.33%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	23	22	1	95.65%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	56	34	22	60.71%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	57	25	32	43.86%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	8	-8	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	Fungsional	0	3	-3	100%
12	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	3	1	2	33.33%
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	2	2	0	100%
14	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
16	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
17	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
19	Pelaksana	Pelaksana	0	1	-1	100%
20	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
21	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%
22	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	3	-3	100%
23	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	0	1	-1	100%
24	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	0	2	-2	100%
25	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
26	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
27	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
28	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
29	Arsiparis Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
30	Arsiparis Mahir	Fungsional	2	0	2	0%
31	Arsiparis Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
32	Arsiparis Terampil	Fungsional	2	0	2	0%
33	Penata Laksana Barang Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
34	Perencana Ahli Madya	Fungsional	1	0	1	0%
35	Perencana Ahli Muda	Fungsional	2	0	2	0%
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
37	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
38	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
39	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Pelaksana	0	0	0	100%
TOTAL			**169**	**116**	**53**	**68.64%**

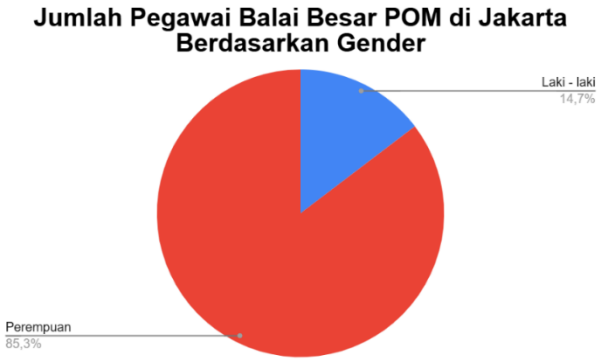
Tabel 3. *Analisis Beban Kerja Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024*

Selain itu, masih terdapat pegawai di BBPOM Jakarta yang masih menduduki jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori Keterampilan (jenjang Terampil, Mahir dan Penyelia) sebanyak 13 orang. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), kebutuhan PFM jenjang Keterampilan tidak diperhitungkan kebutuhannya dan bagi pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) kategori Keterampilan yang masih menduduki jabatan tersebut, wajib

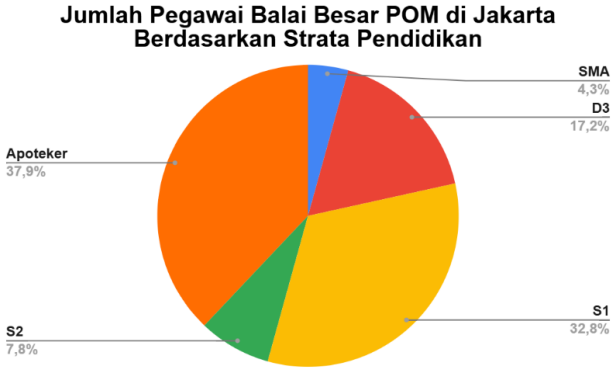


ditingkatkan kompetensinya untuk memperoleh ijazah Sarjana atau Diploma IV paling lama 10 tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

Berdasarkan gender, pegawai Balai Besar POM Jakarta terdiri dari 100 orang perempuan dan 16 orang laki-laki sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 berikut:



Berdasarkan strata pendidikan, jumlah distribusi pegawai Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari Gambar 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan pendidikan non-sarjana sebanyak 23%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang berbasis saintifik seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan



kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, untuk dapat menduduki jabatan fungsional tersebut minimal pendidikan pegawai adalah S1 (Sarjana). Hal ini menjadikan pegawai yang saat ini telah menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Pendidikan di bawah tingkat Sarjana, secara bertahap telah ditingkatkan pendidikannya.

2. Sumber Daya Lainnya

   Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki satu bangunan gedung dengan total luas tanah sekitar 2.750,00 m^2 dan luas bangunan sekitar 2.404,00 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Balai Besar POM di Jakarta juga memiliki Laboratorium Uji BSL2 yang telah mendapat nomor NAR dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuanny

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

   Fitur unggulan Balai Besar POM di Jakarta diantaranya adalah: (1) mobil laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017; (2) digitalisasi nomor antrian terkait layanan konsultasi tatap muka sejak tahun 2020; (3) program UMKM Jawara dan Kerling Jakarta sejak tahun 2021; (4) fitur inovatif Laron Baja sejak tahun 2020; (5) layanan Sultan Betawi di Mall Pelayanan Publik Jakarta Selatan sejak tahun 2021; serta (6) UPT Balai Besar/Balai POM yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.



b. Lingkungan Eksternal

Aspek strategis dari segi lingkungan eksternal Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

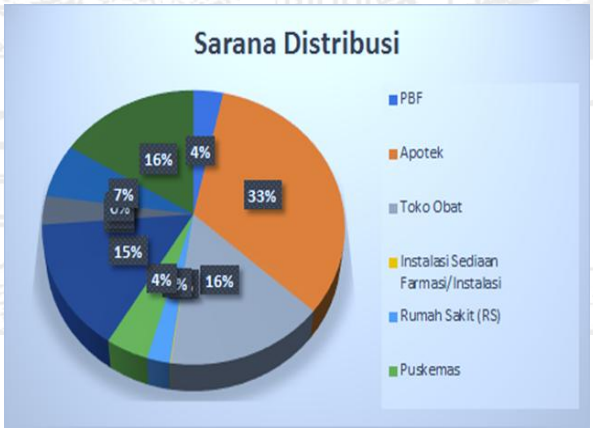
1. Kondisi Geografis dan Demografis

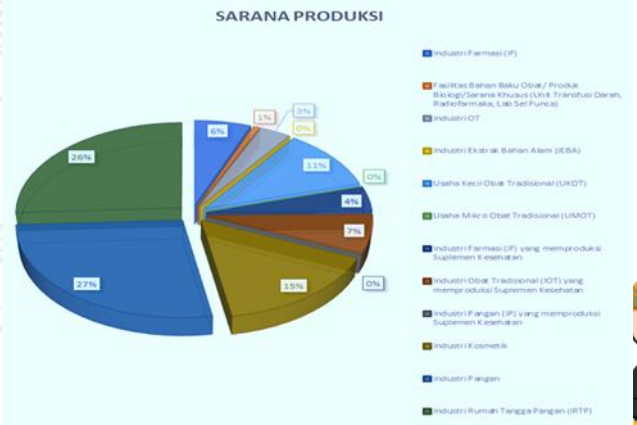


Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' LS dan 106°48' LS dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 662,33 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk sekitar 11,34 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sekitar 16.165 jiwa/km^2 pada tahun 2024. Adapun peta wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 4.

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 berikut:







Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 4 berikut

KEKUATAN	KELEMAHAN
- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komperehensif mencakup *premarket* dan *postmarket* - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Memiliki *roadmap* Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - Integrasi pelayanan publik dengan pemerintah daerah melalui mal pelayanan publik dan program inovasi kerling jakarta - Fasilitas laboratorium yang memadai dan telah terakreditasi ISO IEC 17025 : 2017 - Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media *online*, cetak dan media sosial - Kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan termasuk aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum, - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 dan ISO SNI 37001:2016	- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana kantor belum optimal - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum terintegrasi secara optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes - Adanya peraturan yang berbenturan pada saat pengajuan permohonan notifikasi kosmetika



PELUANG	TANTANGAN
- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan *e-commerce* ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara *online* - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Jakarta memiliki penduduk yang telah melek teknologi dan aktif menggunakan media sosial sehingga lebih mudah menyebarkan informasi terkait Obat dan Makanan	- Semakin maraknya penjualan obat dan makanan *online* - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Berkembangnya modus operandi pelanggaran di bidang obat dan makanan yang lebih kompleks - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Rantai birokrasi di pemerintah daerah yang memperlambat gerak koordinasi - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk *lifestyle* yang belum memiliki ketentuan pengawasan yang jelas - Peningkatan daya saing pelaku usaha sehingga menambah jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang harus diawasi - Meningkatnya penyebaran informasi *hoax* terkait obat dan makanan - Pengetahuan produsen pangan fortifikasi yang terbatas - Memastikan pelaku usaha memahami untuk melaporkan perubahan terhadap aspek apapun pada produk terapetik, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan formulasi, metoda, manufaktur, spesifikasi untuk obat dan bahan baku - Modus operandi pelanggaran norma dan etika terkait penyuapan dan gratifikasi semakin beragam

Tabel 4. *Hasil Analsis Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Jakarta*



1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. Pencegahan *Stunting* untuk Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045

   Badan POM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

   Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* (purna jual) dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

   Tindak lanjut terhadap isu ini dimonitor melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Balai Besar POM di Jakarta dengan direktif penugasan pada Indikator Kinerja Utama tambahan persentase keterlibatan UPT dalam Program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tren penjualan produk Obat dan Makanan secara daring

   Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk illegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

   Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak



aman. Selain itu diperlukan peningkatan penggalangan kerjasama pengawasan dengan pihak *marketplace* dan jasa logistik. Saat ini, telah dilaksanakan diskusi, sosialisasi dan tukar informasi untuk membangun jejaring serta penandatanganan MoU dengan Asosiasi Jasa Logistik (Aprindo) dan *Indonesian E-Commerce Association* (IDEA).

3. Informasi hoaks terkait Obat dan Makanan

   Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui intensifikasi pemanfaatan media sosial dengan jargon Kata BPOM, konten di media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, Car Free Day, talkshow, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM Mobile, dan penyebaran informasi melalui website BPOM.

4. Maraknya pelanggaran pada peredaran Obat dan Makanan

   Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan beredarnya produk Obat-Obat Tertentu (Tramadol dan THP) yang dijual pada rantai distribusi yang tidak seharusnya, misal di sarana distribusi kosmetika dan toko online. Selain itu, marak pula Peredaran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) pada depot jamu dan Gerobak Obat. Masih terdapat pula sarana pelayanan kefarmasian yang mengedarkan produk Obat namun belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan.

5. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan *Online Single Submission*

   Adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan *OSS* dapat memudahkan perizinan berusaha, namun memiliki tantangan pemastian kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan. Hal ini disebabkan tidak dipersyaratkannya verifikasi lapangan untuk Cara Produksi yang Baik (CPB) di awal pengajuan izin usaha. Oleh karenanya, dibutuhkan perkuatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan 6 Kota Administrasi dan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dengan pemenuhan tool pengawasan dan beberapa kegiatan pendukung, seperti pemberdayaan petugas melalui pelatihan.



6. Implementasi Instruksi Presiden No.3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Kurangnya *awareness* masyarakat terhadap *Antimicrobial Resistence*

Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih menjadi permasalahan kesehatan yang dapat berdampak pada kekebalan/resistensi mikroba terhadap antibiotik. Perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan kerjasama dengan sarana pelayanan kefarmasian untuk mencegah konsumsi antibiotik tanpa resep.

8. Implementasi program Reformasi Birokrasi

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dalam rangka memenuhi predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu: "**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan mengacu pada misi Badan POM. telah ditetapkan misi Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan



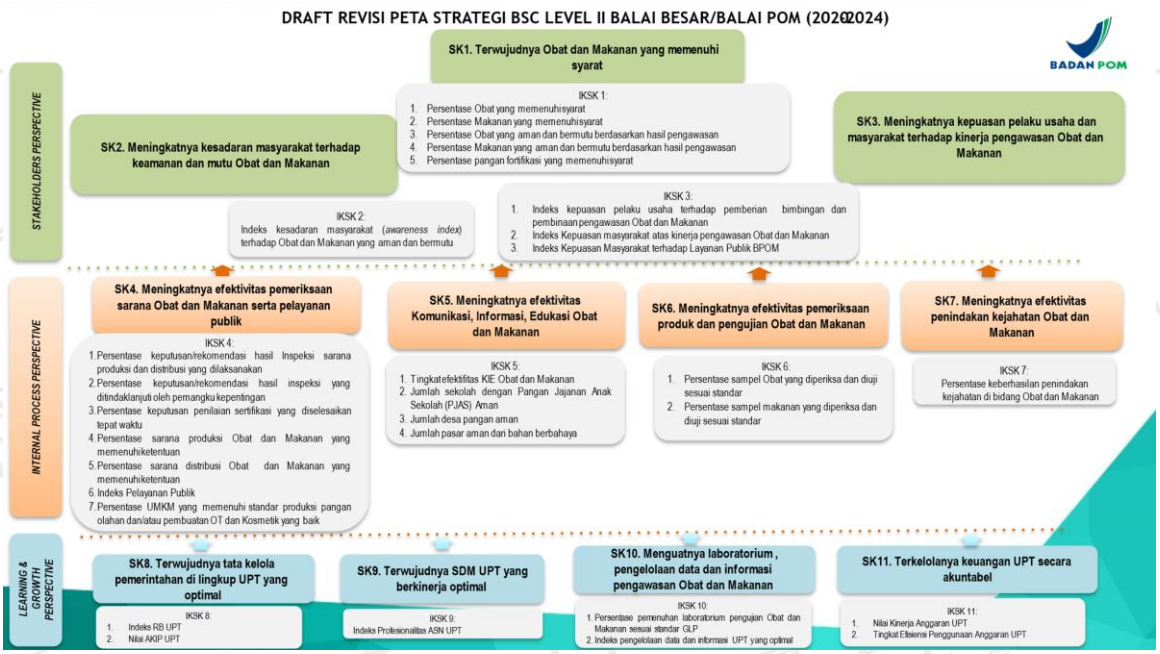
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customers & Stakeholders*, maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta sebagai berikut:





Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala Badan POM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2020-2024), diharapkan Balai Besar POM di Jakarta dapat mencapai sasaran strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis Badan POM sehubungan dengan Balai Besar POM di Jakarta menetapkan 11 sasaran strategis dengan 28 indikator yang dilengkapi dengan target kinerja pada tahun 2024. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam Tabel 5 berikut:

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5



Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	85
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
	Indeks kepuasan masyarakat atas	72	74.98	76.65	78.33	80.01



Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Balai Besar POM di Jakarta	kinerja Pengawasan Obat dan Makanan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	98
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80



Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,3	4,55	4,9
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	100
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	95
Internal Process						
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	96.7
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36



Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	91.41
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	83.66
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	93,42
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	91.5

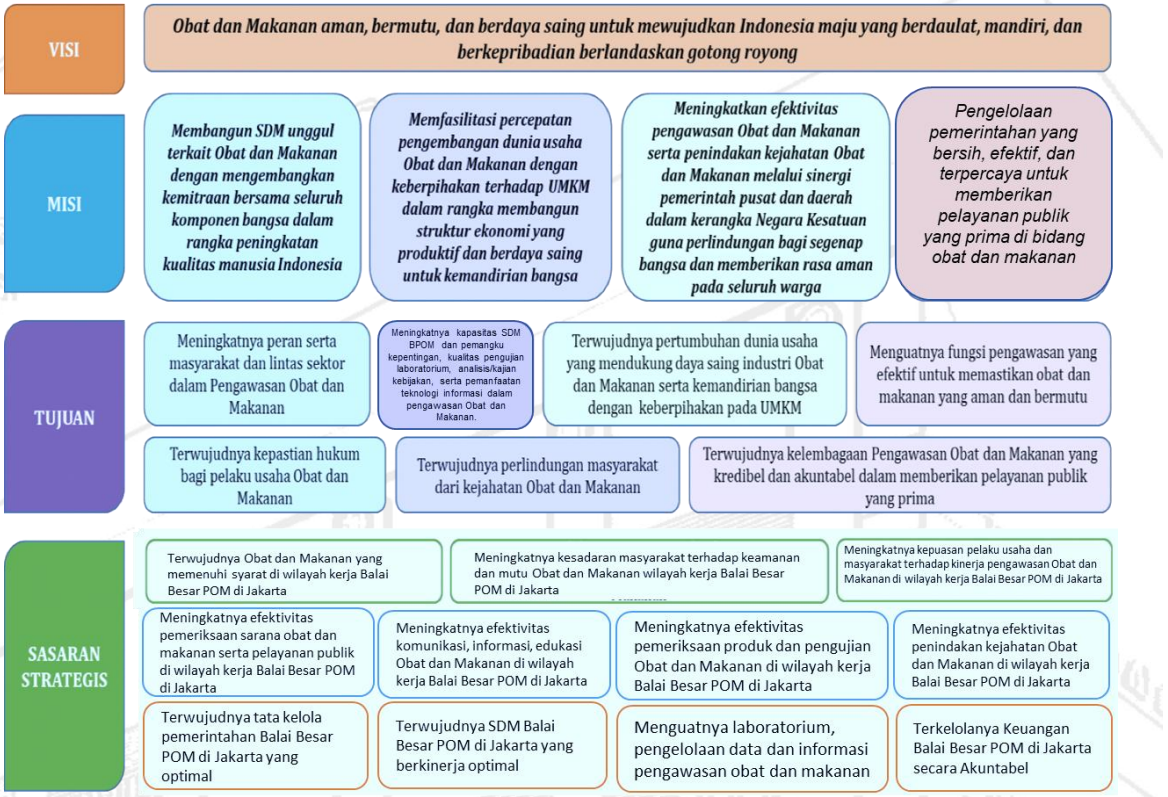


Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
berkinerja optimal						
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	88
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	89.9
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	96,03
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	86
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	60

Tabel 5. *Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta*



Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdasarkan renja dapat dijelaskan pada Gambar 8 sebagai berikut:



2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta HK.02.02.11A.11A5.12.23.418 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.5
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91.9
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95.2
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.25
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90.9
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.7
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Indeks Pelayanan Publik	4.9
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
5		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.7



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115
		Jumlah desa pangan aman	36
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91.41
		Nilai AKIP UPT	83.66
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.5
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.9
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.03
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Tabel 6. *Rencana Kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024*

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh BBPOM di Jakarta.

Berdasarkan Reviu Renstra 2020-2024 sebagai implikasi perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dilakukan penyesuaian target untuk sasaran dan indikator existing dengan mengacu pada tupoksi K/L, realisasi tahun 2020, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024.

Atas reviu target kinerja BBPOM di Jakarta dan berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.01.02.2.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 yang selanjutnya diimplementasikan dalam penyusunan Dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan penyesuaian terhadap target Indikator Tahun 2021-2024.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 hal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan



BPOM Tahun 2024 bahwa terdapat Indikator Baru di Tahun 2024 yang berasal dari Direktif Penugasan sebelumnya di Tahun 2023 dengan dasar penetapan target mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor PR.06.02.25.2523.12.23.1060 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian data reviu Target Indikator Direktif penugasan pada perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2024.

Sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/101/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 bahwa perlu dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Atas hal tersebut BBPOM di Jakarta telah melakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta telah dilakukan penambahan Indikator Kinerja Utama yang berasal dari Direktif Penugasan sebelumnya di Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Realisasi capaian indikator “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 82%, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 87.48%, dengan persen capaian sebesar 106.68%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 target belum dapat disetujui yang awalnya diusulkan adalah 83% dengan memperhatikan realisasi 2023 telah mencapai 87,48%. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal 87,50%.

2. Realisasi capaian indikator “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 96%, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 92,9%, dengan persen capaian sebesar 96,77%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM menyetujui usulan target yang diusulkan Balai Besar POM di Jakarta yaitu sebesar 96,5%.

3. Realisasi capaian indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 82%, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 78,34% dengan persen capaian sebesar 95,54%. Berdasarkan hal tersebut, %.



Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM menyetujui usulan target yang diusulkan Balai Besar POM di Jakarta yaitu sebesar 83%.

4. Realisasi capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 84%, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 92,45%, dengan persen capaian sebesar 110,06%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 target belum dapat disetujui yang awalnya diusulkan adalah 80%, untuk itu target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal 92,50%.

5. Realisasi capaian indikator "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 90%, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 80,59%, dengan persen capaian sebesar 89,54%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 80%. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 85%.

6. Realisasi capaian indikator "Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 89, BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 91,89, dengan persen capaian sebesar 103,25%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 91. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 91,90.

7. Realisasi capaian indikator "Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 88,8. BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 97,4, dengan persen capaian sebesar 109,68%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target



diusulkan adalah 89,9. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 95,20.

8. Realisasi capaian indikator “Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 78,33 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 80.1 dengan persen capaian sebesar 102.26%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 80,1. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 80,16.

9. Realisasi capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 92 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 94,71 dengan persen capaian sebesar 102,95%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 98. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 95,25.

10. Realisasi capaian indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 91 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 91,85 dengan persen capaian sebesar 100,93%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target dapat disetujui dengan dengan target diusulkan adalah 93.

11. Realisasi capaian indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 82 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 90,87 dengan persen capaian sebesar 110,82%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 85. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 90,90.

12. Realisasi capaian indikator “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar



89 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 96,95 dengan persen capaian sebesar 108,93%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 91. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 98,70.

13. Realisasi capaian indikator "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 65 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 73,93 dengan persen capaian sebesar 113,74%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 70. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 74.

14. Realisasi capaian indikator "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 78 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 79,96 dengan persen capaian sebesar 102,51%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target disetujui yaitu tetap 80.

15. Realisasi capaian indikator " Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 4,55 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 4,84 dengan persen capaian sebesar 106,37%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 4,65. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 4,9.

16. Realisasi capaian indikator " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik" pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 79 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 79 dengan persen capaian sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target



diusulkan adalah 81. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 100

17. Indikator “Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota” merupakan indikator baru pada tahun 2024 dengan reviu target dari pengampu yaitu sebesar 95.
18. Realisasi capaian indikator “ Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 95,8 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 95,86 dengan persen capaian sebesar 100,06%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 96,87. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 96,7.
19. Realisasi capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman” usulan target indikator disetujui sesuai dengan target RO yaitu 115.
20. Realisasi capaian indikator Jumlah desa pangan aman” usulan target indikator disetujui sesuai dengan target RO yaitu 36.
21. Realisasi capaian indikator “ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” usulan target indikator disetujui sesuai dengan target RO yaitu 6.
22. Realisasi capaian indikator “ Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” usulan target indikator disetujui sesuai reviu Biro Perencanaan yaitu 100.
23. Realisasi capaian indikator “ Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” usulan target indikator disetujui sesuai reviu Biro Perencanaan yaitu 100
24. Realisasi capaian indikator “ Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” usulan target indikator disetujui sesuai reviu Roren yaitu 65.



25. Realisasi capaian indikator “Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta” usulan target indikator disetujui sesuai reviu Roren yaitu 91,41.

26. Realisasi capaian indikator “ Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 81 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 82,34 dengan persen capaian sebesar 101,65%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 82. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 83,66.

27. Indikator “Nilai Pengelolaan Kearsipan” merupakan indikator baru pada tahun 2024 dengan reviu target dari pengampu yaitu sebesar 93,42.

28. Realisasi capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 84,75 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 90,92 dengan persen capaian sebesar 107,28%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 85. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 91,50.

29. Realisasi capaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP” pada Tahun 2023 dengan target indikator sebesar 87 BBPOM di Jakarta memperoleh realisasi sebesar 86,28 dengan persen capaian sebesar 99,17%. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM memberikan reviu target pada tahun 2024 yang mana target belum dapat disetujui dengan awalnya target diusulkan adalah 92. Untuk itu, target diusulkan di atas realisasi yaitu minimal menjadi 88.

30. Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal” telah memiliki target nilai maksimal 3.

31. Indikator “Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta” memiliki capaian 98.71% pada Tahun 2023. Menimbang perubahan formulasi perhitungan IKPA dan EKA sebagai penyusun nilai NKA, reviu target dari roren disesuaikan semula 94,9 menjadi 89,9.



32. Indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa” merupakan indikator baru pada tahun 2024 dengan reviu target dari pengampu yaitu sebesar 96,03

33. Indikator “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara” merupakan indikator baru pada tahun 2024 dengan reviu target dari pengampu yaitu sebesar 86.

34. Indikator “Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri” merupakan indikator baru pada tahun 2024 dengan reviu target dari pengampu yaitu sebesar 60.

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Tabel Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1,	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	wilayah kerja UPT	04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2,	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,9
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,7
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4,9
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3,	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,7
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115
		03 - Jumlah desa pangan aman	36
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4,	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5,	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6,	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7,	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	91,9
8,	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,2
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,16
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95,25



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9,	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91,41
		03 - Nilai AKIP UPT	83,66
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	93,42
10,	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,5
11,	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,9
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,03
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60



2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan tiap triwulan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Jakarta. Berdasarkan surat Sekretaris Utama B-PR.07.2.21.05.24.353 tanggal 07 Mei 2024 tentang Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024 atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, terdapat perubahan tools penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang merupakan salah satu komponen dalam penilaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Pada TA 2024, Nilai EKA diukur dengan 2 komponen yaitu “efektivitas perencanaan anggaran” (capaian RO) dan “efisiensi perencanaan anggaran” (penggunaan SBK dan efisiensi SBK), di mana komponen efisiensi perencanaan anggaran dilakukan penilaian di akhir tahun pelaksanaan anggaran. Terkait hal tersebut, serta mempertimbangkan hasil evaluasi triwulan I Tahun 2024 capaian kinerja Unit Kerja di Lingkungan BPOM, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target NKA Unit Organisasi/Satker yang terdapat dalam dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024.

Sesuai dengan surat Kepala Balai Besar POM di Jakarta nomor PR.07.01.7A.06.24.109 tanggal 28 Juni 2024 perihal Permohonan Perubahan Target Indikator Kinerja Utama “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” dan “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2024. Berikut lampiran RAPK BBPOM di Jakarta Tahun 2024:



Tabel 7. *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024*

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	782.211.200
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	469.973.750
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	782.211.200
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	469.973.750
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	199.388.300
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,9	259.551.850
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,2	262.581.900



Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta		pengawasan Obat dan Makanan													
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,16	370.613.900
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,25	115.919.900
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	172.809.900
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	172.809.900
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	1.204.810.400
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	225.069.600
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	984.599.700
	15	Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	4,9	4,9	4,9	138.419.900
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	3,3	10	24,2	37,5	37,5	47	48	49	50	65,8	95,8	100	394.513.600

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
		pembuatan OT dan Kosmetik yang baik													
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	20	20	20	40	40	40	60	60	60	95	338.181.950
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	4.389.056.900
	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	20	20	40	55	55	70	70	70	90	115	969.243.000
	20	Jumlah desa pangan aman	0	0	20	25	40	40	45	70	70	80	85	36	1.355.988.000
	21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6	170.684.000
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.337.535.000
	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	5	10	20	30	50	60	70	80	90	95	100	1.087.030.300

Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	15	20	25	30	35	45	50	55	60	65	1.272.352.000
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	25	Indeks RB BBPOM di Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,41	6.100.708.950
	26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,66	7.585.495.050
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,42	25.935.450
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,5	10.252.990.770
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	2.462.606.500
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	157.495.500
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,9	6.166.950.750
	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,03	145.121.050



Sasaran Strategis		Indikator	Target Bulanan (kumulatif)												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	351.141.030
	34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	145.121.050
Total															51.319.096.000

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Jakarta sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capain setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\%Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Tabel 8. *Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan*

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran



Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan peredikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Tabel 9. *Predikat Kinerja Organisasi Berdasarkan NPSS*

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲



Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Tabel 10. *Pengukuran Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan*

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:



$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 berikut:

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

Tabel 11. *Tingkat Efisiensi Kinerja Suatu Kegiatan*



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Penetapan Kinerja Balai Besar POM di jakarta tahun 2024 memuat 3 (tiga) Perspective dengan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 34 (indikator kinerja) sesuai peta strategi OTK baru. Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) kegiatan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 (Periode Renstra 2020-2024) adalah 105,13% dengan kriteria capaian "ISTIMEWA". Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Jakarta merupakan rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP), yaitu: Stakeholder Perspective dengan NP 101,0%6 dengan kriteria "Sangat Baik", Internal Process Perspective dengan NP 107,10% dengan kriteria "Sangat Baik" dan Learning & Growth Perspective dengan NP 107,22% dengan kriteria "Sangat Baik" secara rinci NPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Perspective	% Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Stakeholder Perspective	101,06	**Sangat Baik**	
2	Internal Process Perspective	107,10	**Sangat Baik**	
3	Learning & Growth Perspective	107,22	**Sangat Baik**	
NPSS (NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS) TOTAL		105,13	**Istimewa**	

Tabel 12. *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024*

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan hasil rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP) dimana NP adalah hasil konsolidasi dari 11 Sasaran Strategis yang dihasilkan dari capaian 34 indikator kinerja. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: KP.17.21.11.24.349 tanggal 28 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024 maka indikator tersebut dikeluarkan dari perhitungan NPSS dikarenakan adanya perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu



adanya perubahan instrument bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja

Selanjutnya berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Nomor: PR-09.03.2.01.25.42, beberapa indikator kinerja dilakukan konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Indikator pada BBPOM di Jakarta yang dapat dikonversi yaitu pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100% dan realisasi 100% dan indikator Indeks Pengalolaan Data dan Informasi dengan target 3 dan realisasi kinerja 3 dapat dikonversi capaiannya menjadi 120%. Capaian kinerja masing-masing dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Output				Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,86	100,41	100,41	**Sangat Baik**
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,50	92,73	96,09	96,09	**Cukup**
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	84,24	101,49	101,49	**Sangat Baik**
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,50	86,1	93,08	93,08	**Cukup**
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,55	106,53	106,53	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***99,52***	***Cukup***
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masingmasing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	91,9	92	100,11	100,11	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***100,11***	***Sangat Baik***
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,2	97,94	102,88	102,88	**Sangat Baik**



Sasaran Strategis	Indikator	Output				Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,16	85,89	107,15	107,15	**Sangat Baik**
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,25	95,81	100,59	100,59	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					**103,54**	**Sangat Baik**
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					***101,06***	***Sangat Baik***
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	95,23	102,40	102,40	**Sangat Baik**
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,90	91,02	100,13	100,13	**Sangat Baik**
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	99,53	100,84	100,84	**Sangat Baik**
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	83,23	112,47	112,47	**Sangat Baik**
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	77,32	96,65	96,65	**Cukup**
	Indeks Pelayanan Publik	4,90	4,94	100,82	100,82	**Sangat Baik**
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100,00	100	100,00	**Baik**
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	95	100	105,26	105,26	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***102,32***	***Sangat Baik***
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,7	96,73	100,03	100,03	**Sangat Baik**
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115	116	100,87	100,87	**Sangat Baik**
	Jumlah desa pangan aman	36,00	36,00	100	100,00	**Baik**
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6,00	6,00	100	100,00	**Baik**

Sasaran Strategis	Indikator	Output				Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***100,23***	***Sangat Baik***
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	120,00	**Sangat Baik**
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100	120,00	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***120,00***	***Sangat Baik***
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masingmasing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	68,81	105,86	105,86	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***105,86***	***Sangat Baik***
INTERNAL PROCESS					***107,10***	***Sangat Baik***
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	91,41	93,01	101,75	101,75	**Sangat Baik**
	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,66	83,02	99,23	99,23	**Cukup**
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	93,42	95,49	102,22	102,22	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***101,07***	**Sangat Baik**
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	91,5	87,79	95,95	95,95	**Cukup**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***95,95***	**Cukup**
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	91,24	103,68	103,68	**Sangat Baik**
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	3	3	100	120,00	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***111,84***	**Sangat Baik**
Terkelolanya Keuangan BBPOM di	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	89,9	91,56	101,85	101,85	**Sangat Baik**

Sasaran Strategis	Indikator	Output				Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Capaian Penyesuaian	
Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,03	100	104,13	104,13	**Sangat Baik**
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	98,53	114,57	114,57	**Sangat Baik**
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	68,68	114,47	114,47	**Sangat Baik**
NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)					***108,75***	**Sangat Baik**
LEARNING & GROWTH					***107,22***	***Sangat Baik***
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)					***105,13***	**Istimewa**

Tabel 13. *Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024*

Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 diukur terhadap 34 indikator kinerja utama dari 34 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 24 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” (100% < x < 120%), 6 indikator mencapai kriteria “Baik” (=100%) dan 4 indikator mempunyai capaian “Cukup” (70% ≤ x < 100%).

Kriteria sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan



berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui kampanye masif di media sosial, penyuluhan, brosur, banner dan poster di tempat-tempat strategis serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian sasaran strategis I, yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil evaluasi terhadap obat yang disampling secara acak. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

Sampling dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat disampling sesuai dengan pedoman sampling tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi



ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\%\ Obat\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Total\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji} x\ 100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5	87,86	100,41	Sangat Baik

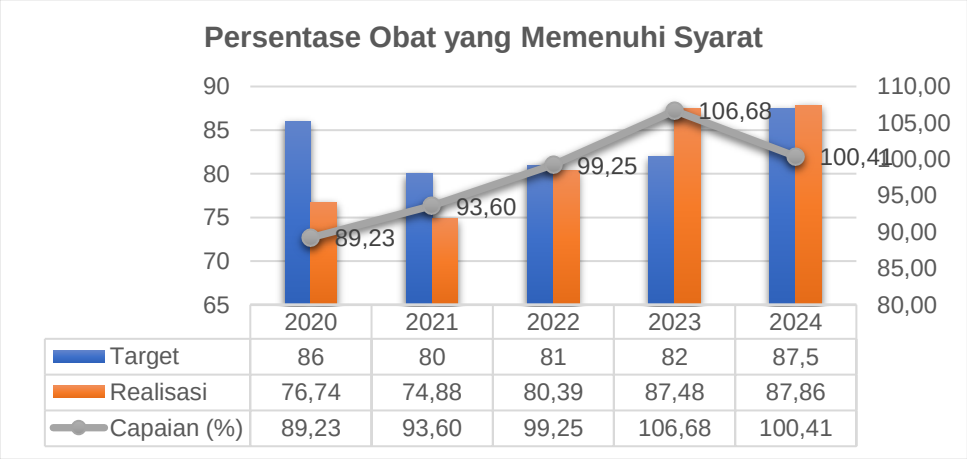
Tabel 14. *Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 87.86%, diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian 1639 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta, dengan hasil 1440 sampel MS (memenuhi syarat), 197 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 2 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 yaitu 100,41% dengan kriteria “Sangat baik”.



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan Gambar 12, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi obat yang memenuhi syarat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, target mengalami peningkatan menjadi 87,5%, sehingga presentase capaian obat yang memenuhi syarat menjadi turun. Namun demikian, presentase obat yang memenuhi syarat di wilayah DKI Jakarta sudah memenuhi target yang ditetapkan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86	80	81	82	87,5
Realisasi	76,74	74,88	80,39	87,48	87,86
Capaian (%)	89,23	93,60	99,25	106,68	100,41

Target presentase obat yang memenuhi syarat mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan cukup tinggi sebesar 90. Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, Balai Besar POM di Jakarta belum memenuhi target, maka target ini dinilai tidak mungkin dapat dicapai, sehingga dilakukan penyesuaian target pada reviu renstra tahun 2021 menjadi 83. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase obat yang memenuhi syarat dinaikkan menjadi 87,5. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 beserta kategorinya dijelaskan dalam Tabel 15 berikut:

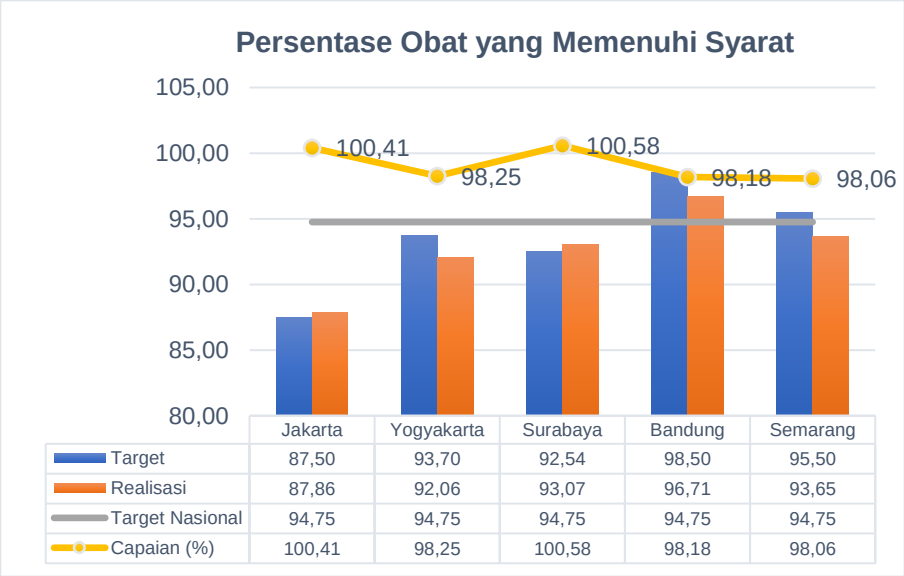
Di tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 6,27% dari tahun sebelumnya menjadi 100,41% . Turunnya capaian persentase obat yang

memenuhi syarat setiap tahunnya dari tahun 2020-2024 juga diiringi dengan semakin naiknya target yang ditetapkan dari tahun 2020-2024, terutama perubahan target di tahun 2023 yang mengalami penyesuaian cukup besar dari 82% menjadi 87,5%.

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 87,86% sudah mencapai taget jangka menengah 2024 yaitu 87,5% dan persentase capaian obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 100,41% dengan kriteria “tercapai”.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kategori Capaian
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,5	87,86	100,41	Tercapai/ Melampaui

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	87,50	93,70	92,54	98,50	95,50
Realisasi	87,86	92,06	93,07	96,71	93,65
Target Nasional	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
Capaian (%)	100,41	98,25	100,58	98,18	98,06

Gambar 14. *Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*

Berdasarkan Gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 yang paling tinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang paling rendah adalah BBPOM di Jakarta. Target yang ditetapkan untuk masing-masing BBPOM berbeda, sehingga nilai capaiannya juga berbeda. Presentase capaian terhadap target yang paling

tinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang paling rendah adalah BBPOM di Semarang. Hanya BBPOM Bandung yang realisasinya sudah memenuhi target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator presentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024, sudah mencapai target dengan kategori sangat baik. Komoditi obat, obat tradisional, kosmetik dan supleman kesehatan yang sudah tersampling sebanyak 1639 sampel dengan metode random sampling dari target sebanyak 1631 sampel. Metode ramdom sampling yang digunakan tahun 2024 ini, masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan menggunakan aplikasi random generator atau sejenisnya. Pada pelaksanaannya, sampling dilakukan secara acak di sarana dengan melakukan pendataan stok yang ada di sarana tersebut berdasarkan kategori atau kelas terapi.

Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya.

Banyaknya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak memenuhi syarat. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relative lebih baik.

Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat pengujian. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pengujian. Rincian sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

1) Sampel Obat dengan 17 sampel TMS (1 sampel TMS kadar Tripolidin, 1 sampel TMS Disolusi Klordiazepoksid, 3 sampel TMS ALT-AKK, 1 sampel rokok TMS Nikotin, dan 1 sampel cangkang kapsul TMS dan sisanya TMK penandaan);



2) Sampel Obat Bahan Alam dengan 38 sampel TMK dan 25 sampel TMS (6 sampel TMS ALT, 4 sampel TMS Kadar etanol, 2 sampel TMS Metanol, 1 sampel TMS Kadar Etilen glycol, 2 sampel TMS BKO-Natrium diklofenak, 2 sampel TMS Kafein, 5 sampel TMS AK.Enterobacteriaceae, 3 sampel TMS Clostridia)
3) Sampel obat kuasi 1 sampel TMS Kadar Metanol dan Etanol
4) Sampel suplemen kesehatan dengan 9 sampel TMK dan 4 sampel TMS (2 sampel TMS Kadar vitamin B kompleks, 1 sampel TMS Kadar Etanol, dan 1 sampel TMS Vitamin C); dan
5) Sampel kosmetik dengan 194 sampel TMK penandaan dan 4 sampel TMS (3 sampel TMS Metanol dan 1 sampel TMS ALT)

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar disebabkan TMK Penandaan. Untuk produk kosmetik, TMK yang paling banyak adalah klaim yang berlebihan misalnya “krim ini dapat memutihkan kulit” sedangkan untuk produk obat tradisional, TMK yang paling banyak adalah tidak mencantumkan peringatan/perhatian dalam kemasan misalnya “Tidak boleh digunakan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui”

Evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan secara terkoordinir oleh Region Semarang melalui link bit.ly https://linktr.ee/MRL_Semarang setiap bulannya sehingga bisa terpantau hasil pengujian sampel yang dikerjakan oleh laboratorium di regional. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui SIPT.

BBPOM di Jakarta telah melakukan intervensi untuk meningkatkan pemenuhan target indikator kinerja, antara lain:

1) Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
2) Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan



sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

3) Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industry farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB/CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
4) Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS (tidak memenuhi Syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
5) Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,86	100,41%	782.211.200	761.690.535	97,38%	1,03	0,03	100%	Efisien

Berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena nilai IE>1, presentase capaian output lebih besar dibanding presentase anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran



untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan capaian indikator persentase obat yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan kegiatan yang cukup efektif untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, namun masih perlu ditingkatkan intensifikasinya dan diperluas cakupannya.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat antara lain:

1) Adanya penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium BBPOM di Jakarta.
2) Peningkatan kompetensi personil merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Harus dapat dipastikan bahwa personil telah melakukan evaluasi penandaan secara tepat dan melakukan pengujian secara valid (akurat), sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya hasil pengujian yang salah (misalnya seharusnya memenuhi syarat tapi disimpulkan tidak memenuhi syarat karena pengujian kurang valid) dan hasil evaluasi penandaan yang kurang tepat (seharusnya memenuhi ketentuan namun disimpulkan tidak memenuhi ketentuan).
3) Kondisi alat laboratorium dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Laboratorium harus memastikan bahwa alat laboratorium yang digunakan sudah terkalibrasi / terverifikasi dan layak pakai sehingga memberikan hasil pengujian yang valid

G. Upaya peningakatan kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah cukup efektif untuk



memenuhi target indikator kinerja presentase obat yang memenuhi syarat di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya.

Peningkatan kinerja laboratorium dapat dilakukan melalui berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan sampel. Audit internal yang rutin serta evaluasi prosedur operasional juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan.

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Dalam laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.



No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kedaluwarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Tabel 19. *Kriteria Sampling terhadap Pangan Olahan*

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\textbf{\% Makanan MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ \textbf{x 100\%}$$

Keterangan :

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium
c. Sampel makanan mencakup sampel balai dan Loka



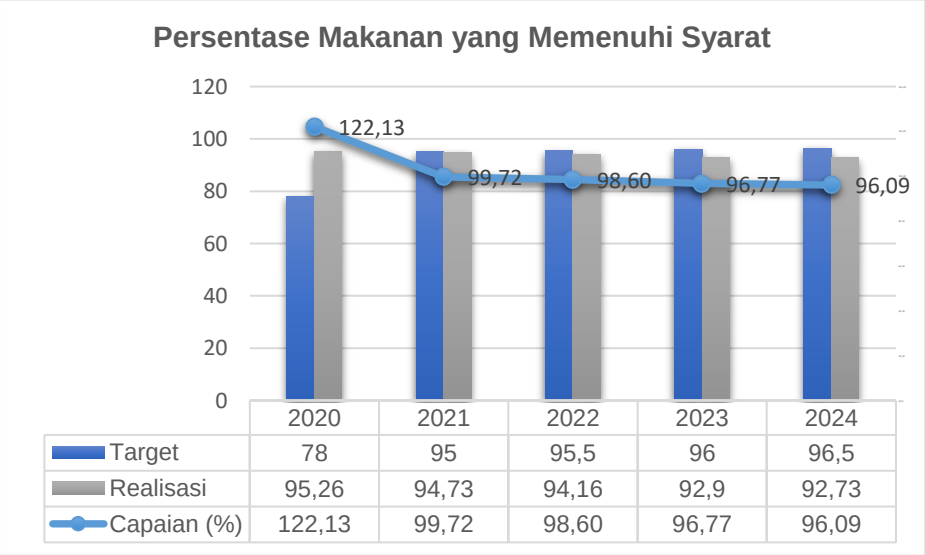
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,5	92,73	96,09	Cukup

Gambar 15. *Tabel. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 96,09%, diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian 757 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta, dengan hasil 1440 sampel MS (memenuhi syarat), 127 sampel TMS (tidak memenuhi syarat hasil uji dan atau tidak memenuhi ketentuan penandaan) dan 2 sampel Tanpa Izin Edar (TIE). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 yaitu 96,09% dengan kriteria “Cukup”.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



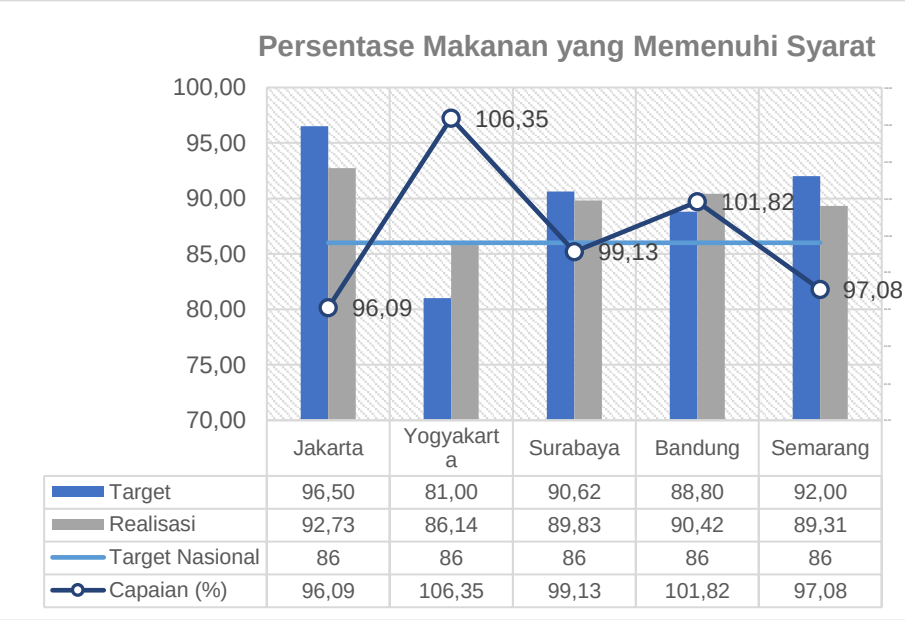
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	78	95	95,5	96	96,5
Realisasi	95,26	94,73	94,16	92,9	92,73
Capaian (%)	122,13	99,72	98,60	96,77	96,09

Realisasi Indikator Kinerja Utama “persentase makanan yang memenuhi syarat” Tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan. Hal ini



Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 92,73% masih di bawah target jangka menengah 2024 yaitu 96,50% dan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 96,09% dengan kriteria akan tercapai.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	96,50	81,00	90,62	88,80	92,00
Realisasi	92,73	86,14	89,83	90,42	89,31
Target Nasional	86	86	86	86	86
Capaian (%)	96,09	106,35	99,13	101,82	97,08

Berdasarkan grafik diketahui bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target nasional namun belum mencapai target tahunan. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta 96,09% (akan tercapai). Balai Besar POM di Surabaya 99,13% dan Balai Besar POM di Semarang 97,08% juga memperoleh kriteria “akan tercapai” seperti Balai Besar POM di Jakarta. Sedangkan Balai Besar POM di Yogyakarta 106,35% dan Balai Besar POM di Bandung 101,82% memperoleh kriteria “tercapai”. Pada tahun ini capaian Balai Besar POM di Jakarta paling rendah jika dibandingkan dengan Balai Besar POM di Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang. Namun jika dilihat lebih rinci, target yang ditetapkan Balai Besar POM di Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan balai lainnya sehingga mempengaruhi persentase capaian Balai Besar POM di Jakarta.



D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil sampling makanan yang dilakukan secara random oleh petugas sampling BBPOM di Jakarta tahun 2024, sebanyak 757 sampel seluruhnya telah dilakukan pengujian. Sebanyak 702 sampel memenuhi syarat (92,73%) dan terdapat 55 sampel tidak memenuhi syarat (7,26 %). Banyaknya sampel yang tidak memenuhi syarat penandaan maupun hasil uji laboratorium mempengaruhi presentase makanan yang memenuhi syarat. Target tahun 2024 ditetapkan 96,5% sedangkan realisasi BBPOM di Jakarta sebesar 92,73% sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan.

Sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 45 sampel tidak memenuhi syarat pengujian kimia atau mikrobiologi dan 10 sampel tidak memenuhi ketentuan Penandaan (TMK Penandaan). Adapun rincian sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

a. 1 sampel minyak wijen (TMS BHA)
b. 3 sampel teh kering dalam kemasan (TMS ALT dan AKK)
c. 1 sampel roti manis (TMS Angka E*nterobaceteriaceae* dan *S aureus*)
d. 2 sampel selai (TMS rasio BTP pengawet)
e. 7 sampel terdiri dari sampel non ekstrudat dan nugget (TMS Angka *Enterobacteriaceae*)
f. 1 sampel manisan buah (TMS sulfit, benzoat, sorbat, sakarin dan rasio BTP pemanis)
g. 3 sampel manisan buah (TMS siklamat dan rasio BTP pemanis)
h. 1 sampel selai buah (TMS benzoat)
i. 11 sampel madu (TMS HMF)
j. 3 sampel madu (TMS HMF dan enzyme diastase)
k. 3 sampel biji-bijian (TMS cemaran Cd)
l. 1 sampel marshmallow (TMS AKK)
m. 1 sampel udang olahan (TMS ALT)
n. 1 sampel udang olahan (TMS APM *E.Coli*)
o. 1 sampel ikan olahan (TMS *S. aureus*)
p. 2 sampel daging olahan (TMS nitrofurazone)
q. 2 sampel mie goreng dan minuman serbuk berperisa (TMS AKK)



r. 1 sampel gula merah (TMS Sulfit)

Hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM dengan dilengkapi laporan penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS). Tindak lanjut kepada produsen dilaksanakan untuk produsen yang berada di wilayah DKI Jakarta dengan cara pemeriksaan sarana produksi dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar sampel yang TMS diproduksi oleh perusahaan yang berada di luar wilayah DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian, petugas telah menerapkan metode sampling sesuai dengan pedoman sampling tahun 2024 dan menerapkan ISO 17025:2017 dalam proses pengujian sampel. BBPOM di Jakarta telah menerapkan penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS) untuk semua sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dapat dipastikan hasil yang dilaporkan memiliki hasil yang valid.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2024.

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,50	92,73	96,09%	469.973.750	456.349.454	97,10%	0,99	-0,01	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.01 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu



pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output dan input*, dalam bentuk anggaran.

Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sangat bergantung pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat didukung oleh program yang berbasis pada kebutuhan nyata, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi infrastruktur serta peralatan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional laboratorium. Selain itu, koordinasi yang baik antara unit kerja, pengawasan berkala, serta audit internal yang sistematis juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan perbaikan kinerja.

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat, antara lain:

a. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

b. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik *(GMP)* sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.



c. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

d. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase makanan yang aman dan bermutu di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya.

Peningkatan kinerja laboratorium dapat dilakukan melalui berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan sampel. Audit internal yang rutin serta evaluasi prosedur operasional juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya laporan kinerja ini, rekomendasi perbaikan sistem dan usulan program kegiatan disusun dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta di masa mendatang



3. Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium

c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
   a) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
   b) Produk kedaluwarsa
   c) Produk rusak
   d) Tidak memenuhi ketentuan penandaa
   e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS



Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\text{Obat MS} = \frac{\textit{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\textit{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} x100\%$$

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

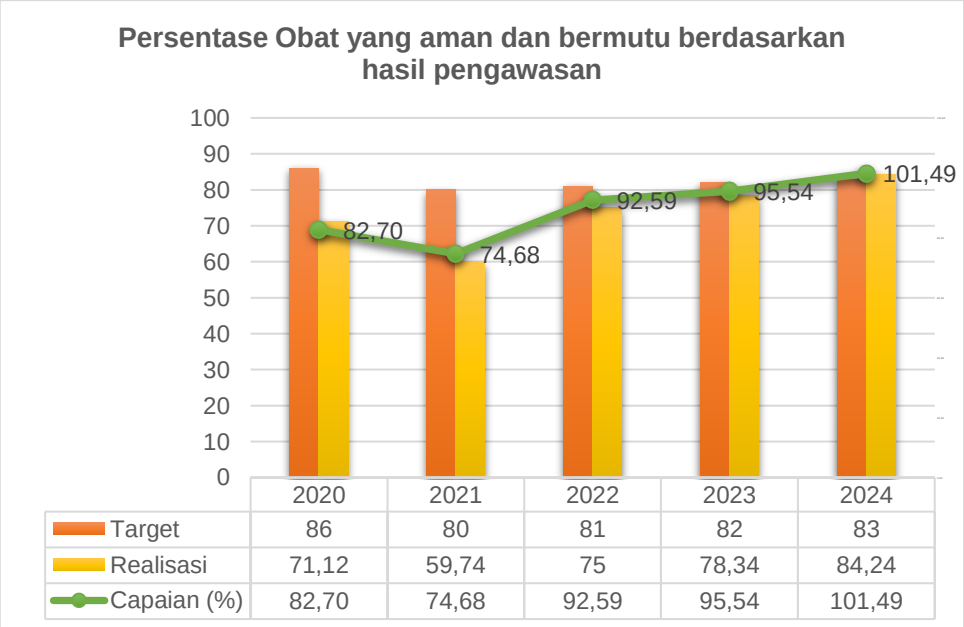
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	84,24	101,49	Sangat Baik

Gambar 18. *Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan*

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah 101,49% dengan kriteria “Sangat baik”.

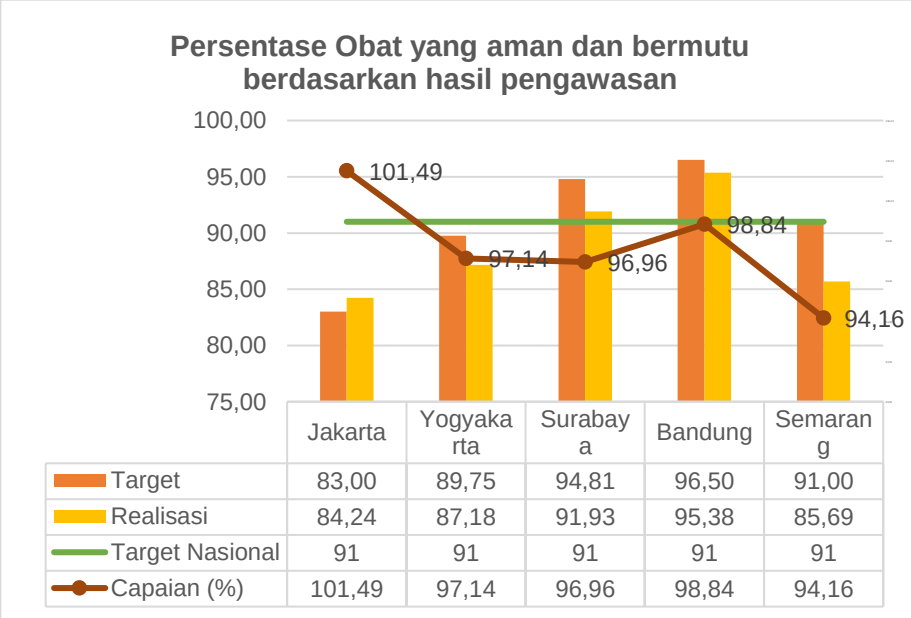
B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 19. *Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan tahun-tahun sebelumnya*

Berdasarkan Gambar 19, capaian presentase obat yang aman dan bermutu cukup fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Tahun 2024 ini, realisasi sudah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga capaiannya mencapai 101,49%.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	83,00	89,75	94,81	96,50	91,00
Realisasi	84,24	87,18	91,93	95,38	85,69
Target Nasional	91	91	91	91	91
Capaian (%)	101,49	97,14	96,96	98,84	94,16

Gambar 21. *Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2024*

Berdasarkan Gambar 21, dapat disimpulkan bahwa capaian presentase obat yang aman dan bermutu tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta serta yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Target yang ditetapkan untuk masing-masing unit berbeda-beda sehingga yang bisa dibandingkan adalah capaiannya terhadap target. Hanya BBPOM Surabaya dan Bandung yang realisasinya sudah mencapai target nasional.



D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampai tahun 2024 telah dilakukan sampling untuk komoditi obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan secara targeted (purposive) sebanyak 609 sampel dari target 608 sampel. Pelaksanaan sampling produk yang dilakukan secara purposive berdasarkan analisis risiko sesuai dengan kategori produk yang tertera pada pedoman sampling tahun 2024. Program regionalisasi laboratorium diterapkan dengan baik sesuai petunjuk teknis regionalisasi laboratorium tahun 2024, di bawah koordinasi Region Semarang.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada tahun 2024 sebesar 84,24% sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun, data ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih cukup banyak yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan, terutama kosmetik dan obat tradisional. Sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif, untuk itu diperlukan pengawasan *post-market* yang ketat guna melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan.

Dari 609 sampel *targeted* yang disampling, 1 sampel TIE, sehingga 608 sampel masuk laboratorium, yang memenuhi syarat sebesar 513 sampel (84,38%) dari sampel selesai uji. Terdapat 95 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sampel obat dengan 3 sampel TMS ALT dan AKK dan 1 sampel rok
2. Sampel obat tradisional dengan 16 sampel TMS (3 sampel TMS ALT, 3 sampel TMS *Angka Enterobacteriaceae*, 2 sampel TMS BKO Natrium diklofenak, sisanya TMK penandaan)
3. Sampel suplemen kesehatan dengan 1 sampel TMS (1 sampel TMS Vitamin B kompleks, 2 sampel TMK penandaan); dan
4. Sampel kosmetik dengan 40 sampel TMS (3 sampel TMS Metanol, sisanya TMK penandaan).

Sampel yang tidak memenuhi syarat sebagian besar disebabkan TMK Penandaan. Untuk produk kosmetik, TMK yang paling banyak adalah klaim



yang berlebihan misalnya “krim ini dapat memutihkan kulit” sedangkan untuk produk obat tradisional, TMK yang paling banyak adalah tidak mencantumkan peringatan/perhatian dalam kemasan misalnya “Tidak boleh digunakan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui”.

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Jakarta tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	84,24	101,49%	782.211.200	761.690.535	97,38%	1,04	0,04	100%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan nilai IE > 1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh penguatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan antara lain dengan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai perencanaan, peningkatan standar kompetensi dan ruang lingkup pengujian serta melakukan monitoring evaluasi kegiatan sampling dan pengujian secara rutin sehingga IKU Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada BBPOM di Jakarta dapat tercapai. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan/penurunan kinerja tergantung pada komitmen pelaku industri dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik terkait kualitas produk maupun penandaan dan legalitasnya. Banyaknya kosmetik



yang tidak memenuhi ketentuan penandaan menyumbang porsi terbesar persentase produk obat yang tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Hal ini disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif. Selain kosmetik, banyak juga ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sedangkan untuk komoditi lain relatif lebih baik. Juga masih ditemukan adanya produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat hasil uji, walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan ada produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan sekaligus tidak memenuhi syarat hasil uji. Banyaknya temuan tersebut di atas menyebabkan rendahnya realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, antara lain:

1. Intervensi pengawasan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi/kosmetik/obat tradisional untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP/Good Manufacturing Practice), sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan pemantauan secara berkesinambungan sehingga menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi
2. Selain pengawasan, juga pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional dan kosmetik. Hal ini telah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan secara rutin.
3. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan
4. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan



temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran di masa mendatang

5. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat (termasuk obat tradisional dan kosmetik) kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman dan berkualitas.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja laboratorium BBPOM di Jakarta di tahun mendatang, perlu dilakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan sampel. Audit internal yang rutin serta evaluasi prosedur operasional juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan.

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Dalam laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi



manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* / *purposive* di tahun berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi**.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\textbf{\% Makanan MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ \textbf{x 100\%}$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan ke-n.

$$\%\ B3 = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)}\ x\ 100\%$$

d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
e. Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
    1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
    2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
    3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.



g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

1. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
2. Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
3. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 117,20% dengan kriteria “sangat baik”.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	86,1	93,08	Cukup

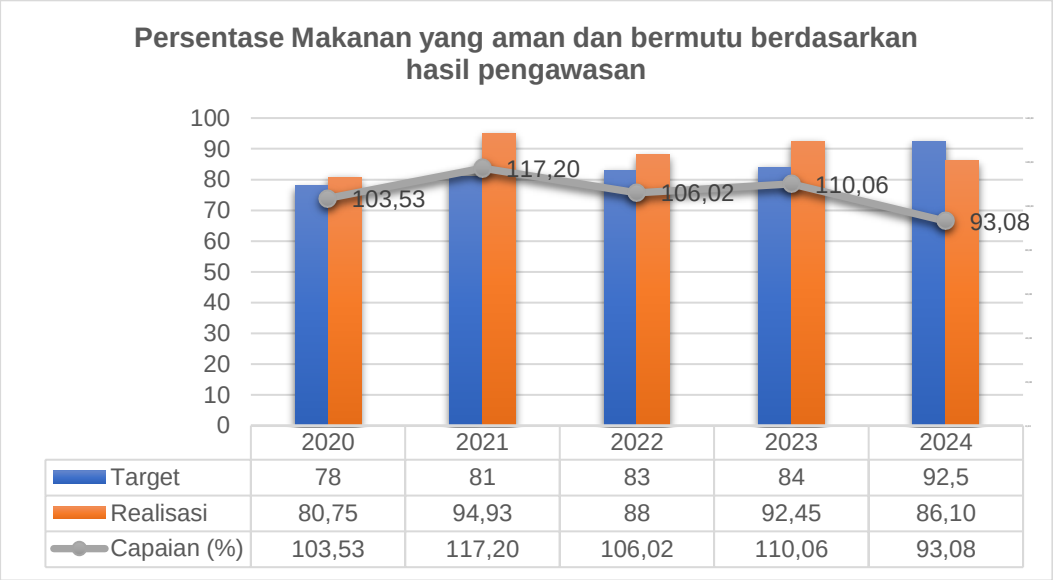
Tabel 26. *Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Jakarta Tahun 2024*

Capaian persentase capaian makanan yang aman dan bermutu hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 93,08% dengan kategori “Cukup”

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted.





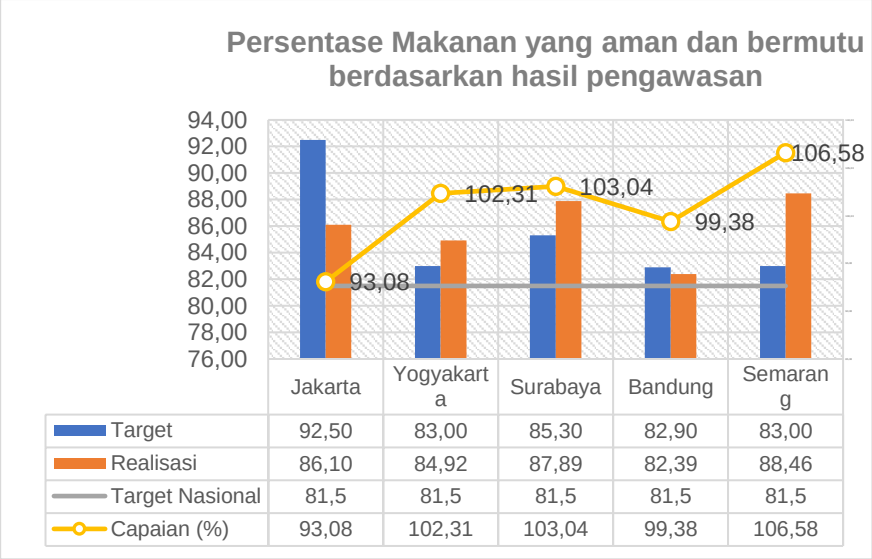
Gambar 22. *Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta*

Capaian pada tahun 2020 sebesar 103,53% mengalami peningkatan menjadi 117,20% pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami fluktuasi masing-masing menjadi 106,02%;110,06. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,98% dari tahun sebelumnya menjadi 93,08% dengan kriteria **"cukup"**. Turunnya capaian makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 ini juga diiringi dengan meningkatnya target tahunan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 92,5%. Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 86,10% masih dibawah target jangka menengah 2024 yaitu 92,50%.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta 93,08% dengan kriteria "cukup", begitu juga Balai Besar POM di Bandung 99,38% dengan kriteria sama. Sedangkan Balai Besar POM di Yogyakarta 102,31% , Balai Besar POM di Surabaya 103,04% dan Balai Besar POM di Semarang 106,58 memperoleh kriteria **"sangat baik"**. Capaian dari Balai Besar POM di Jakarta lebih rendah jika dibandingkan Balai Besar POM Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang.





Gambar . Perbandingan Persentase makanan yang aman dan bermutu di wilayah Jakarta Tahun 2024 dengan Balai lain yang Sejenis/Setara dan Target Nasional

Dari gambar diketahui bahwa realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target nasional namun belum mencapai target tahunan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sampel makanan aman dan bermutu diperoleh dari sampling pangan targeted sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sampel pangan targeted diperoleh dari:

a. Sampling pangan tertentu sebagai tindak lanjut kasus/masalah pangan, pendampingan UMKM, pangan spesifik lokal, laboratorium air, ruang kingkup akreditasi dan kemasan pangan
b. Sampling yang mendukung program nasional yaitu Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
c. Sampling pangan yang diduga mengandung DNA porcine
d. Sampling dalam rangka monitoring pemahit pada formalin

Dari 187 sampel targeted yang masuk laboratorium, seluruhnya sudah selesai dilakukan pengujian. Sampel yang memenuhi syarat sebanyak



161 sampel (86,10 %) dan sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 26 sampel (13,90%). Adapun rincian sampel tidak memenuhi syarat adalah :

a. 3 sampel AMIU (TMS Angka *Coliform*)
b. 1 sampel air baku (TMS Angka *Coliform*)
c. 1 sampel gula (TMS Sulfit)
d. 1 sampel makanan ringan non ekstrudat (TMS Sakarin)
e. 1 sampel manisan buah (TMS siklamat, benzoat dan rasio BTP Pemanis)
f. 1 sampel cincau (TMS APM *Escherichia coli*)
g. 7 sampel manisan buah (TMS benzoat dan siklamat)
h. 1 sampel manisan (TMS Sulfit, benzoat, siklamat)
i. 2 sampel keripik buah (TMS AKK)
j. 1 sampel es krim (TMS asam benzoate)
k. 1 sampel makanan non ekstrudat (TMS kuning FCF)
l. 1 sampel makanan ringan simulasi (TMS Angka *Enterobacteriaceae*)
m. 2 sampel umkm (TMS *Salmonella* dan *S. aureus*)
n. 1 sampel manisan buah (TMS As benzoate)
o. 1 sampel bumbu pecel (TMS ALT & AKK)
p. 1 sampel mie kering (TMS AKK), 1 sampel jelly (TMS siklamat dan sakarin)

Hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM dengan dilengkapi laporan penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS).

BBPOM di Jakarta selalu menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dengan memeriksa penerapan CPPOB di sarana produksi dan juga penerapan CPerPOB di sarana peredaran yang berada di wilayah kerja BBPOM Jakarta. Untuk sampel UMKM yang tidak memenuhi syarat, telah dilakukan pendampingan dan pembinaan supaya produk yang dihasilkan dapat memenuhi syarat baik itu penandaan maupun hasil uji laboratorium.



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,50	86,10	93,08%	469.973.750	456.349.454	97,10%	0,96	-0,04	75%	Tidak Efisien

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, nilai tingkat Efisiensi (TE) diperoleh sebesar -0.04 dengan capaian tingkat efisiensi 75% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dalam kegiatan pengawasan makanan yang aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jakarta sangat dipengaruhi oleh efektivitas program yang dijalankan. Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengujian laboratorium dan pemantauan peredaran pangan. Selain itu, sinergi dengan instansi terkait, industri, serta masyarakat dalam edukasi dan pemberdayaan konsumen juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian



kinerja, seperti keterbatasan anggaran yang berdampak pada kurang optimalnya pengujian laboratorium. Selain itu, tantangan dalam pengawasan produk pangan di pasar yang luas dan dinamis juga dapat menghambat efektivitas pengendalian risiko. Oleh karena itu, evaluasi program secara berkala, peningkatan infrastruktur laboratorium, serta penguatan kebijakan pengawasan yang adaptif menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan pangan yang aman dan bermutu.

Beberapa hal yang mendukung capaian persentase makanan yang aman dan bermutu antara lain :

a. Melakukan inspeksi dalam rangka verifikasi kesesuaian penerapan CPPOB di sarana produksi pangan yang berada di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
b. Melakukan pembinaan kepada UMKM yang hasil uji sampelnya TMS, mengikutsertakan UMKM tersebut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Jakarta
c. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sudah cukup efektif untuk memenuhi target indikator kinerja presentase makanan yang aman dan bermutu di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya.

Peningkatan kinerja laboratorium dapat dilakukan melalui berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan sampel.



Audit internal yang rutin serta evaluasi prosedur operasional juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya laporan kinerja ini, rekomendasi perbaikan sistem dan usulan program kegiatan disusun dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta di masa mendatang

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO3, NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO3 sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus berikut:

$$\%\ \text{Pangan Fortifikasi yang MS} = \frac{\textit{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\textit{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$



Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   a) Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
   b) Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   c) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
   a) Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
   b) Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
   c) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

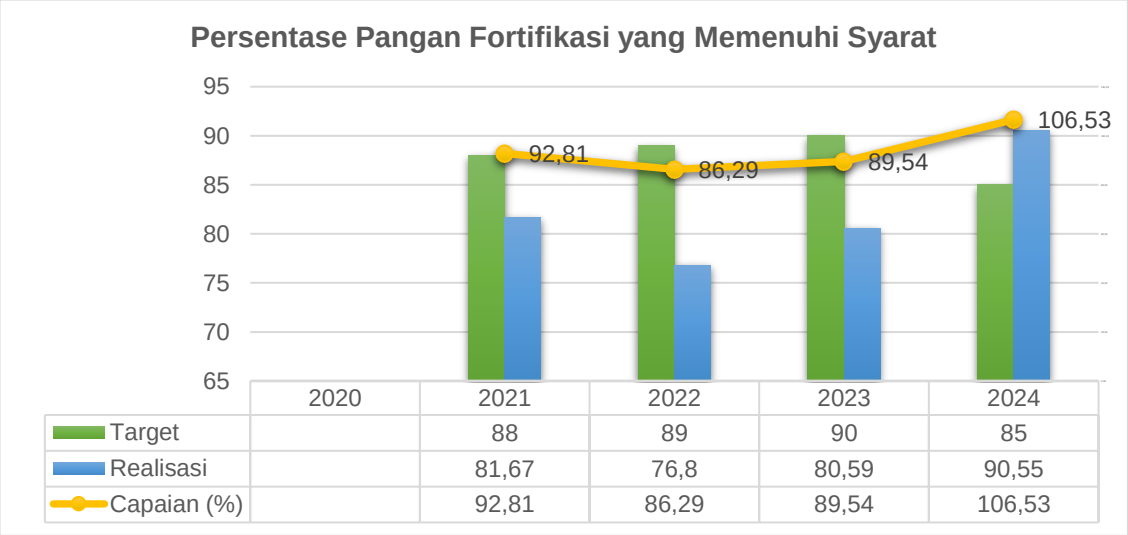
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	90,55	106,53	Sangat Baik

Gambar 25. *Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Jakarta*



Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 106,53% dengan kategori “Sangat Baik”

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target		88	89	90	85
Realisasi		81,67	76,8	80,59	90,55
Capaian (%)		92,81	86,29	89,54	106,53

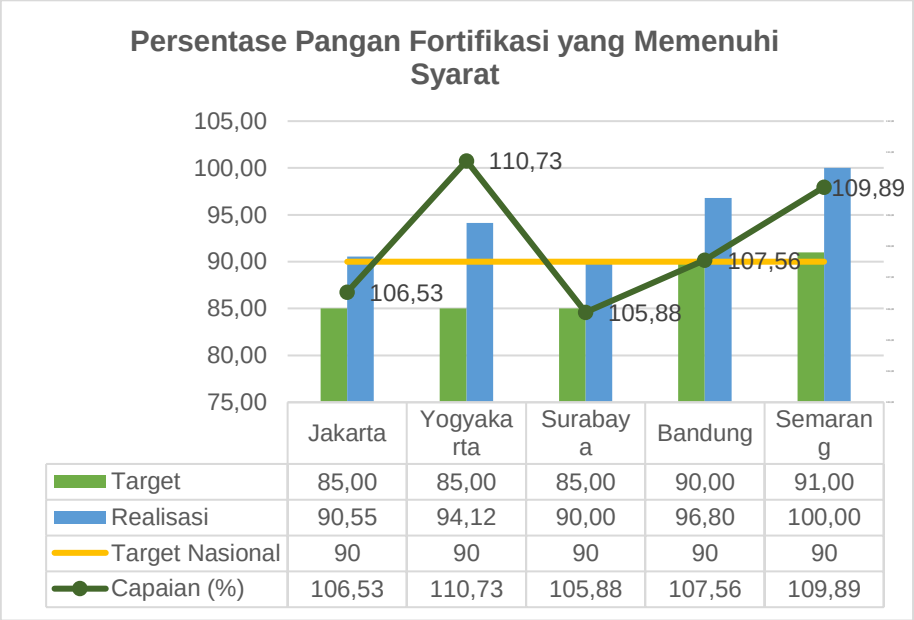
Gambar 26. *Perbandingan Realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya*

Indikator Kinerja Utama “persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” mulai ditetapkan di tahun 2021 dan mempunyai target berbeda setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 106,53% sudah melebihi target tahunan yang telah ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021-2024. Dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 85%, Balai besar POM di Jakarta sudah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	85,00	85,00	85,00	90,00	91,00
Realisasi	90,55	94,12	90,00	96,80	100,00
Target Nasional	90	90	90	90	90
Capaian (%)	106,53	110,73	105,88	107,56	109,89

Gambar 26. *Perbandingan Realisasi dengan unit lain*

Persentase realisasi tahunan untuk Balai Besar POM Jakarta pada tahun 2024 sebesar 90,55%, ini sudah melewati target Balai Besar POM di Jakarta dan target nasional. Persentase capaian 106,53% dengan kriteria “Sangat Baik”. Begitu juga Balai besar Yogyakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM Bandung dan Balai Besar POM Semarang dengan capaian masing-masing 110,73% ; 105,88% ; 107,56% ; 109,89%, memperoleh kriteria yang sama, yaitu “Sangat Baik”.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil evaluasi pengujian pangan fortifikasi tahun 2024 menunjukkan realisasi kinerja sebesar 90,55%. Realisasi kinerja ini di atas target tahun 2024 yaitu 85%. Dari 127 sampel, sebanyak 115 sampel memenuhi syarat (90,55%) dan 12 sampel tidak memenuhi syarat (9,45%). Sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 10 sampel garam TMS KIO3 dan 2 sampel minyak goreng sawit TMS Vitamin A.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain :



a. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
b. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
c. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
d. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,55	106,53%	199.388.300	187.258.644	93,92%	1,13	0,13	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,13 dengan capaian tingkat efisiensi100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “ Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah



bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja dalam pengawasan makanan yang difortifikasi di wilayah Jakarta sangat dipengaruhi oleh efektivitas program pengawasan serta tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar fortifikasi yang ditetapkan. Program yang menunjang keberhasilan mencakup pemantauan rutin terhadap sampel pangan fortifikasi, seperti garam beryodium, tepung terigu berzat besi, dan minyak goreng bervitamin A, dengan memastikan kadar zat gizi yang ditambahkan sesuai dengan standar yang berlaku. Peningkatan kapasitas laboratorium melalui modernisasi peralatan dan metode analisis juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi pengujian. Selain itu, edukasi dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam penerapan fortifikasi sesuai regulasi**.**

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Balai Besar POM terus berusaha untuk meningkatkan kinerja pengawasan fortifikasi yang beredar di Masyarakat. Dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas laboratorium, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha tetap tinggi. Selain itu, pemeliharaan dan kalibrasi rutin peralatan laboratorium harus terus dilakukan agar hasil uji tetap akurat dan dapat dipercaya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala juga menjadi faktor penting untuk memastikan tim pengawas dan analis laboratorium selalu memahami perkembangan metode uji terbaru serta regulasi yang berlaku. Dari sisi industri, pendekatan yang lebih proaktif seperti pendampingan teknis dan sistem audit berkala dapat mendorong



kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan fortifikasi sesuai standar. Digitalisasi sistem pengawasan juga harus terus dioptimalkan untuk mempercepat pelaporan dan analisis data, sehingga respons terhadap temuan ketidaksesuaian dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait, akademisi, dan organisasi kesehatan, perlu dipertahankan agar pengawasan tetap berbasis pada kajian ilmiah dan kebijakan yang tepat sasaran. Evaluasi rutin terhadap efektivitas program fortifikasi juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pangan dan kesehatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kinerja pengawasan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi menjamin keamanan serta mutu pangan fortifikasi yang beredar di pasaran.

Dengan adanya laporan kinerja ini, rekomendasi perbaikan sistem dan usulan program kegiatan disusun dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta di masa mendatang

SASARAN STRATEGIS II

Capaian sasaran strategis II, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

Indeks kesadaran masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam



memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Konsep pengukuran kesadaran (*awareness*) menggali seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat, ketertarikan (*interest*) menggali ketertarikan masyarakat untuk tahu dan mempelajari tentang keamanan produk, keinginan (*desire*) menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman, dan tindakan (*action*) menggali Tindakan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi produk dengan benar.

Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sejauh mana sumber informasi dan pengaruh sosialisasi/KIE dari BPOM terhadap peningkatan pengetahuan responden. Aspek pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap Obat dan Makanan aman mencakup pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Secara rinci aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi pengetahuan mengenai kemasan yang aman pada produk Obat dan Makanan, label yang terdapat pada produk, nomor izin edar Obat dan Makanan serta informasi kedaluwarsa pada Obat dan Makanan. Selain itu manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat, Obat Tradisional. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini dengan Cek KLIK, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya, dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian, bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam memilih produk



meliputi kemasan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, mengetahui dan memilih produk yang telah memiliki nomor izin edar serta penggunaan produk sebelum kedaluwarsa.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

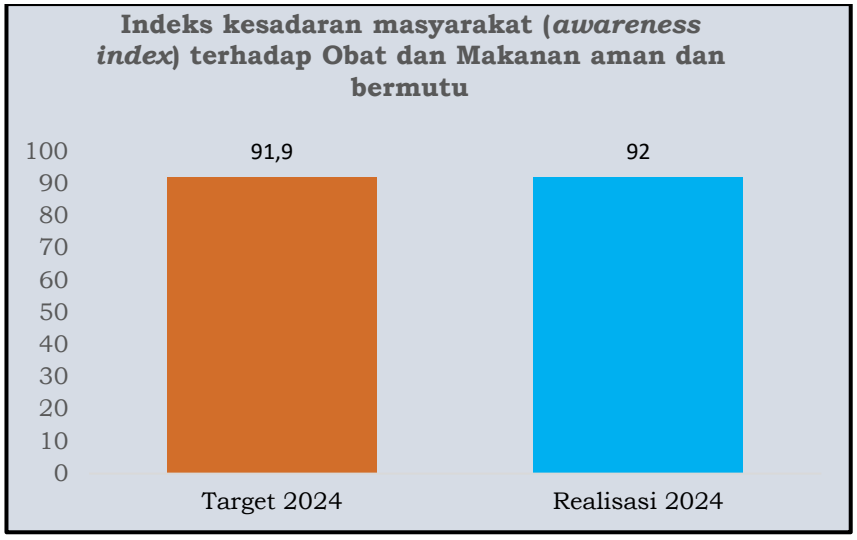
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) melalui survei dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur dengan metode pengumpulan data *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Kriteria yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 35:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	**≤ 45,00**
Kurang Baik	**45,01 – 60,00**
Cukup Baik	**60.01 – 75,00**
Baik	**75,01 – 90,00**
Sangat Baik	**≥ 90,01**

Tabel 35. *Kriteria Indeks Persepsi*





Gambar 28. *Grafik Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu*

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	91,9	92	100,11	Sangat Baik

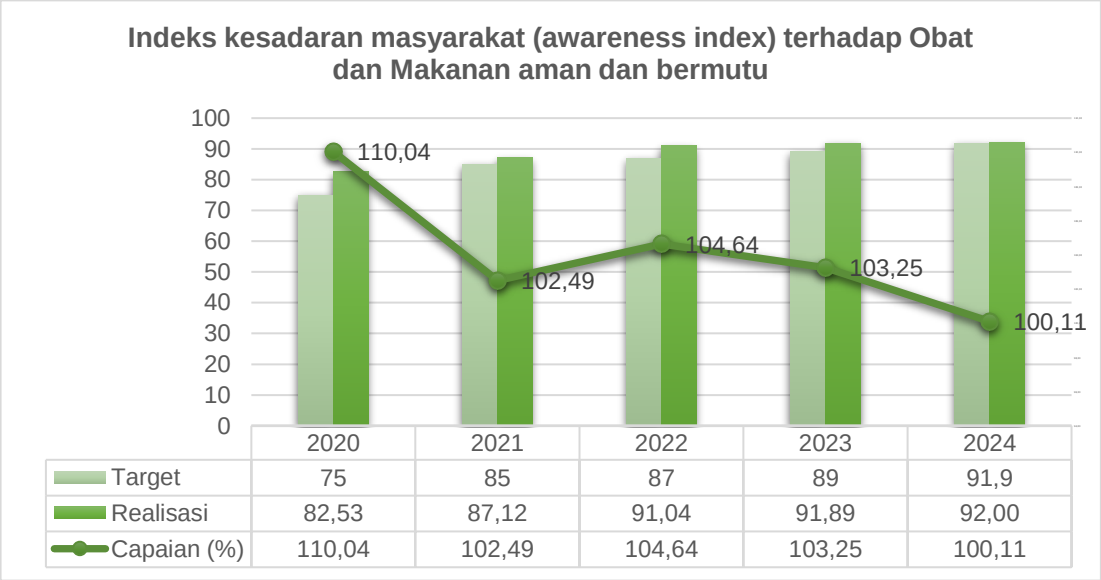
Tabel 34. *Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 2Terkait Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu*

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 92,00 dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,9 diperoleh capaian sebesar 100,11% (Sangat Baik). Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu secara nasional tahun 2024 diperoleh sebesar 88,09 (Kategori Baik) dengan target nasional sebesar 85,



maka realisasi sebesar 92,00 juga telah melampaui realisasi dan target secara nasional.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75	85	87	89	91,9
Realisasi	82,53	87,12	91,04	91,89	92,00
Capaian (%)	110,04	102,49	104,64	103,25	100,11

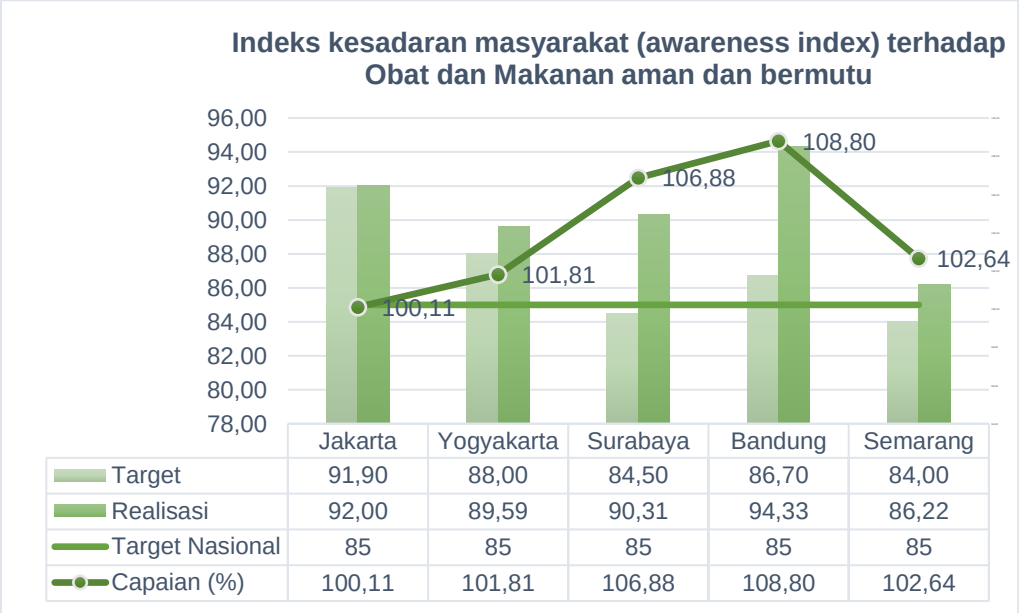
Gambar 29. *Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Jakarta*

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 82,53 pada tahun 2020; 87,12 pada tahun 2021; 91,04 pada tahun 2022; 91,89 pada tahun 2023; dan 92 pada tahun 2024. Selama tahun 2022-2023, nilai indeks ini merupakan tertinggi secara nasional.

Apabila dibandingkan dengan target, realisasi kinerja indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024 juga telah tercapai dan melampaui target secara berturut-turut sebesar 110,04%; 102,49%; 104,64%; 103,25%; dan 100,11%.



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	91,90	88,00	84,50	86,70	84,00
Realisasi	92,00	89,59	90,31	94,33	86,22
Target Nasional	85	85	85	85	85
Capaian (%)	100,11	101,81	106,88	108,80	102,64

Gambar 31. *Perbandingan indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta*

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta merupakan tertinggi kedua jika dibandingkan dengan unit kerja yang sejenis. Secara berurutan nilai indeks tahun 2024 adalah BBPOM di Bandung dengan 94,33 (Sangat Baik), BBPOM di Jakarta dengan 92,00 (Sangat Baik), BBPOM di Surabaya dengan 90,31 (Sangat Baik); BBPOM di Yogyakarta dengan 89,59 (Baik); dan BBPOM di Semarang dengan 86,22 (Baik). Jika dibandingkan dengan target masing-masing semua unit kerja diperoleh capaian kinerja yang melampaui target.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 antara lain:



a. Pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan secara massif kepada masyarakat. KIE dilaksanakan dengan berbagai metode baik metode tatap muka (langsung) maupun menggunakan media komunikasi (radio, media sosial, website, dan media cetak). Materi yang disampaikan juga bervariasi sesuai dengan tema kegiatan dan sasaran peserta, misalnya KIE terkait stunting yang dilaksanakan dalam rangka Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS) menyampaikan materi tentang keamanan pangan dan pangan fotifikasi. Untuk meningkatkan jangkauan informasi, dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Jakarta menggandeng tokoh masyarakat dan Kader Pramuka melalui kegiatan bersama SAKA POM, organisasi masyarakat seperti Salimah, Aisyiyah dan lainnya serta menjalin kemitraan dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi Obat dan makanan melalui videotron. Selain itu, telah dilakukan pula intensifikasi penggunaan media sosial sebagai salah satu media penyebaran informasi dengan sistem One Day One Post yang menyediakan informasi terkini bagi masyarakat.
b. Sinergi dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PPKUKM, pemerintah daerah, BPOM Pusat dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Sinergi juga dilakukan dengan pelaku usaha dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu melalui program pendampingan, pemberian bimtek, dan pembentukan forum komunikasi. BBPOM di Jakarta juga menggandeng kelompok masyarakat, komunitas, dan akademisi untuk memperoleh dukungan dalam menyebarluaskan informasi yang dilaksanakan salah satunya melalui Forum Konsultasi Publik.
c. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum melalui peningkatan pengawasan pre- dan post- market terhadap produk obat dan makanan yang beredar serta penindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh BBPOM di Jakarta.
d. Kemudahan akses informasi dan pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BBPOM di Jakarta yang dapat dijangkau baik secara tatap muka di kantor BBPOM di Jakarta, Mall Pelayanan Publik



DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta (setiap hari selasa), kanal media sosial, telepon, e-mail, dan kanal SP4N LAPOR.

e. Perubahan perilaku masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan dan tren konsumen cerdas dalam memilih produk yang aman dan bermutu seiring perkembangan media pemberitaan secara daring dan penggunaan platform media sosial

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	91,90	92,00	100,11 %	259.551.850	257.393.312	99,17%	1,01	0,01	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,01 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal dengan pemanfaatan media sosial dan media elektronik, efisiensi penggunaan anggaran dengan cara mengoptimalkan strategi digitalisasi KIE melalui inovasi Jak Konek sebagai sarana KIE digital yang terintegrasi dengan sistem informasi stakeholder dalam rangka meningkatkan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.



F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2023 antara lain:

a. Kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta. Unsur pentahelix meliputi pemerintah, pelaku usaha, komunitas/ masyarakat, akademisi, dan media. Penguatan kolaborasi salah satunya adalah dengan terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di DKI Jakarta. Selain itu, diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BBPOM di Jakarta mengenai pengawasan terpadu Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pengawasan pangan terpadu secara rutin, pendampingan fasilitasi UMKM bersama Dinas PPKUKM, pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan Dinas Kesehatan, KIE Obat dan Makanan dengan mengampanyekan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta pembentukan tim percepatan penurunan stunting.

b. Implementasi inovasi strategi digitalisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) JAKKONEK yang melibatkan teknologi, edukasi, dan kolaborasi yang terintegrasi dengan platform digital yang telah ada baik internal maupun eksternal secara online dan offline mulai dari Tingkat provinsi sampai dengan Tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta serta swasta/ pelaku usaha seperti asosiasi, komunitas, dan akademisi. Integrasi telah dilakukan diantaranya pada sistem Jakpreneur, Mall Pelayanan Publik (MPP) Virtual Provinsi DKI Jakarta, website/ digital library 26 sekolah/ madrasah di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan website Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dengan luasnya jangkauan KIE Obat dan Makanan melalui JAKKONEK ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan literasi digital yang outputnya adalah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.



c. Adanya program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah serta dengan membentuk kader-kader sebagai kepanjangan tangan BPOM dalam melakukan pengawasan secara mandiri pada kehidupan sehari-hari.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode mendatang antara lain:

a. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan
b. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS III

Capaian sasaran strategis III, yaitu meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian pelaku usaha terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Indeks Kepuasan Pelaku Usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelaku Usaha.

Dasar pelaksanaan survei mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2024.

Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisoner yang dapat diakses oleh peserta melalui link https://surveiprkom.pom.go.id

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,2	97,94	102,88	Sangat Baik

Tabel 39. *Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan*

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sampai akhir tahun 2024 sebesar 97,94 dan jika dibandingan dengan target tahun 2024 sebesar 95,2 maka capaian adalah 102,88 % dengan kriteria “sangat baik”. Jumlah kegiatan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan dan jumlah responden sebanyak 1187 (seribu seratus delapan pluh tujuh) responden. Jumlah kegiatan dan jumlah responden tersebut merupakan jumlah tertinggi jika didanding UPT lain di lingkungan Badan POM.



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



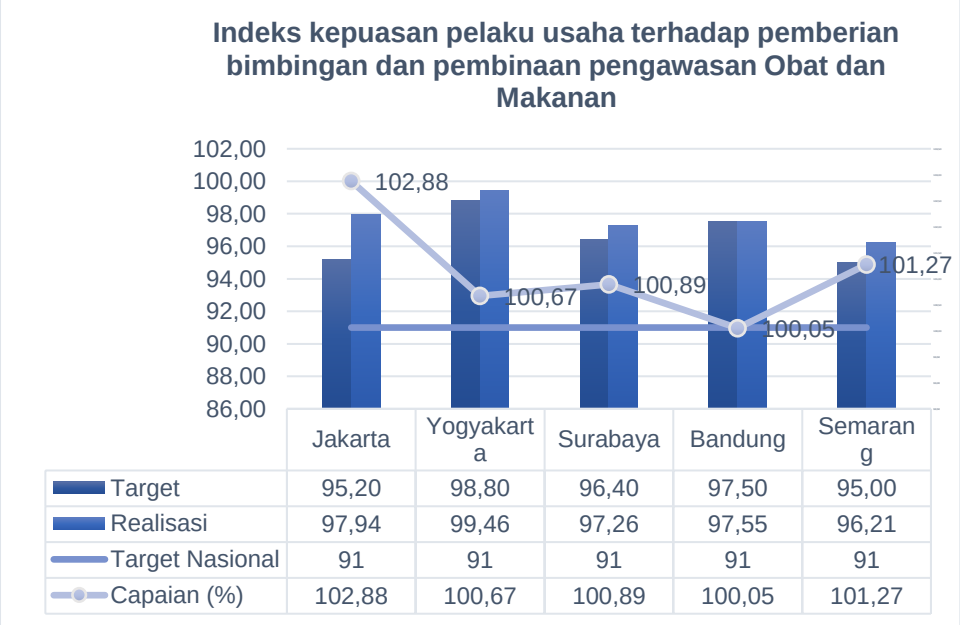
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	82	86,6	87,7	88,8	95,2
Realisasi	85,53	86,70	95,1	97,4	97,94
Capaian (%)	104,30	100,12	108,44	109,68	102,88

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan. Capaian tahun 2021 sebesar 100,12 % jika dibanding dengan tahun 2020 sebesar 104, 30% mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari 82 pada tahun 2020 menjadi 86, 6 di tahun 2021 jika dibandingan kenaikan target dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan tahun 2022 ke tahun 2023 yang naik sebesar 1,1. Namun relaisasi dari tahun 2021 sebesar 86,70 mengalami kenaikan jika disbanding realisasi tahun 2020 sebesar 85,53. Demikian juga capaian tahun 2024 sebesar 102,88 % mengalami penurunan jika dibanding capaian tahun 2023 sebesar 109, 68 %. Namun realisasi tahun 2024 sebesar 97,94 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 97,4, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari tahun 2023 sebesar 88,8 menjadi 95,2 di tahun 2024. Target realiasasai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemebrian bimibingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makannan tahun 2024 pada awal RPJMN ditetapakn sebesar 89,9 dan mengalami perubahan menjadi 95,2 karena dinilai capaian pada tahun 2023 cukup besar yaiti 109,68%, sehingga dengan kenaikan target tersebut realiasasi tahun 2024 diharapkan tetap dapat tercapai. Perhitungan capaian perubahan berdasarkan target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023 berserta kategori dijelaskan dalam tabel berikut:



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 yang paling tinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang paling rendah adalah BBPOM di Semarang. Target yang ditetapkan berbeda untuk masing-masing BBPOM sehingga capaian juga berbeda. Persentase capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang paling rendah adalah BBPOM di di Bandung dan semua melebihi target nasional.



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	95,20	98,80	96,40	97,50	95,00
Realisasi	97,94	99,46	97,26	97,55	96,21
Target Nasional	91	91	91	91	91
Capaian (%)	102,88	100,67	100,89	100,05	101,27

Gambar 33. *Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta*

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024 sebesar 95,2 yang lebih besar dari target tahun 2023 sebesar 88,8. Peningkatan target ini menjadi pemicu personil BBPOM di Jakarta untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam memberikan bimbingan dan pembinaan dengan lebih baik



b. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan bimtek, desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, desk registrasi, baik secara luring maupun daring.

c. Sampai akhir tahun 2024 telah dilakukan desk CAPA dan desk perbaikan dokumen CPPOB sebanyak dua kali pada tanggal 15 Maret 2024, dan tanggal 28 Juni 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 24 November 2024 yang diselenggarakan secara luring di kantor BBPOM di Jakarta.

d. BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2024 desk regsitrasi telah dilaksanakan sebanyak 12 (eman) secara luring di BBPOM di Jakarta

Bulan	Jumlah pelaku usaha	Jumlah NIE yang terbit
Januari 2024	51	134
Februari 2024	51	106
Maret 2024	29	86
April 2024	34	55
Mei 2024	14	125
Juni 2024	39	132
Juli 2024	29	97
Agustus 2024	48	89
September 2024	24	130
Oktober 2024	46	72
November 2024	50	93
Desember 2024	52	135
Total	465	1254



e. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendekatkan pelayanan melalui kegiatan kerling dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pelayanan bimbingan dan pembinaan.

f. BBPOM juga mengadakan kegiatan bimtek untuk mengatasi masalah yang ditemuan saat pengawasan rutin. Dengan kegiatan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam bidang obat dan makanan dan menjalin kerja sama.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 BBPOM di Jakarta :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,20	97,94	102,88%	262.581.900	212.662.998	80,99%	1,27	0,27	95%	Efisien

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena nilai IE>1, persentase capaian output lebih besar dibanding persentase anggaran. NIlai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,27 dengan capaian tingkat efisiensi 95 %

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha pada 2024 Balai Besar POM di Jakarta, melaksanakan desk CAPA untuk perbaikan hasil audit ataupun diskusi terkait perbaikan dokumen untuk pemenuhan dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB untuk berkomunikasi kepada pelaku usaha terhadap dokumen yang telah disampaikan melalui system e-sertifikasi CPPOB dan kegiatan telah dilakukan secara kontinu



b. Balai Besar POM di Jakarta mempunyai inovasi UMKM Jaw@ra yang melakukan fasilitasi UMKM secara bombastis yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga dengan adanya inovasi ini membuat banyak kegiatan bimtek, sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha. Selain itu UMKM Jaw@ra dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dan pembaharuan pada inovasi sehingga muncul bimtek-bimtek baru berkolaborasi dengan universitas dan kementrian dimana bimtek terkait peningkatan kapasitas UMKM yang menyebabkan UMKM merasa sangat puas.
c. Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk memperluas layanan terhadap UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha jika akan memerlukan pelayanan. Pada kegiatan ini dilakukan bimbingan sehingga diharapkan pelakuk usaha dapat memahami tata cara pendaftaran produk di Badan POM dan dapat memberikan feedback positif untuk penilaian kepuasan pelaku usaha.
d. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Jakarta yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

G. Upaya Peningkatan Kinerja

a. Perlu peningkatan upaya peningkatan kagiatan bimbingan dan pembinaan kepada palaku usaha sehingga dapat meingkatkan kepuasan pelaku ussaha
b. Perlu memperluas jaringan pelayanan kepada pelaku usaha dengan membuat inovasi yang dapat menjangkau keberadaan pelaku usahan
c. Perlu peningkatan kemampuan petugas baik teknis maupun non teknis dalam pelayanan pemberian bimbigan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha
d. Pengembangan Inovasi UMKM Jaw@ra ditahun 2025 yang melibatkan kegiatan Bimtek dan sosialisasi yang kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga pembiayaan BPOM mini



8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy,* dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

a. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa
b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi Kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu, dan ilegal yang beredar di Masyarakat
e. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online.* Desain sampling menggunakan *stratified random sampling.* Hasil survei ini digunakan sebagai



rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan. Pengukuran indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Puas	≤45,00
Kurang Puas	45.01 – 60.00
Cukup Puas	60.01 – 75.00
Puas	75.01 – 90.00
Sangat Puas	≥ 90.01

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,16	85,89	107,15	Sangat Baik

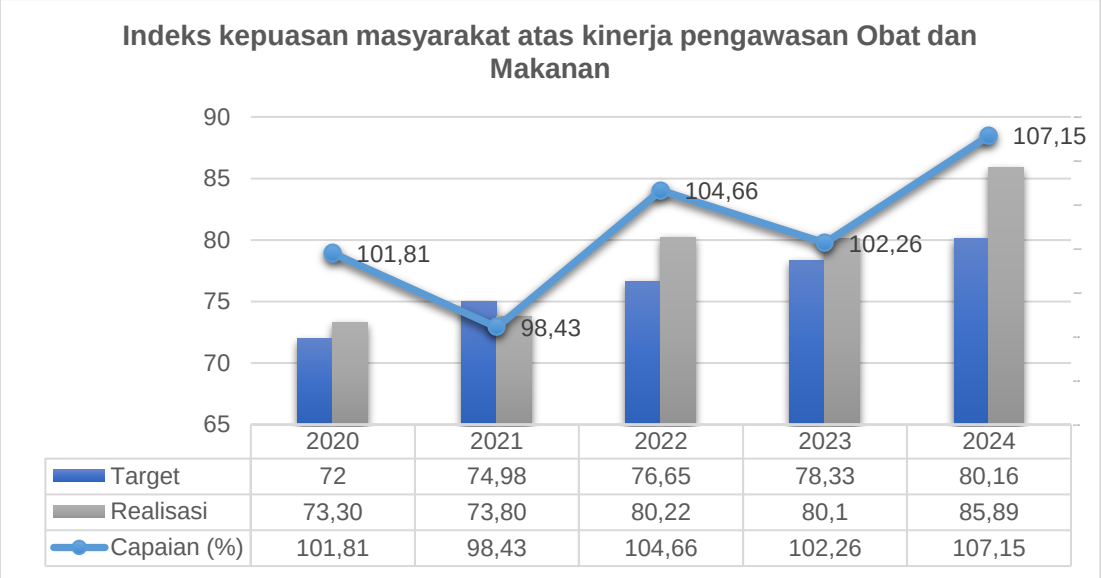
Tabel 42. *Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024*

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 diperoleh sebesar 85,89 (kategori Puas). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 80,16, maka diperoleh capaian sebesar 107,15% dengan kriteria tercapai/ melampaui. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 nasional adalah 83,97 dengan target nasional sebesar



80,45, sehingga dengan realisasi sebesar 85,89 maka telah melampaui baik target maupun realisasi secara nasional.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	72	74,98	76,65	78,33	80,16
Realisasi	73,30	73,80	80,22	80,1	85,89
Capaian (%)	101,81	98,43	104,66	102,26	107,15

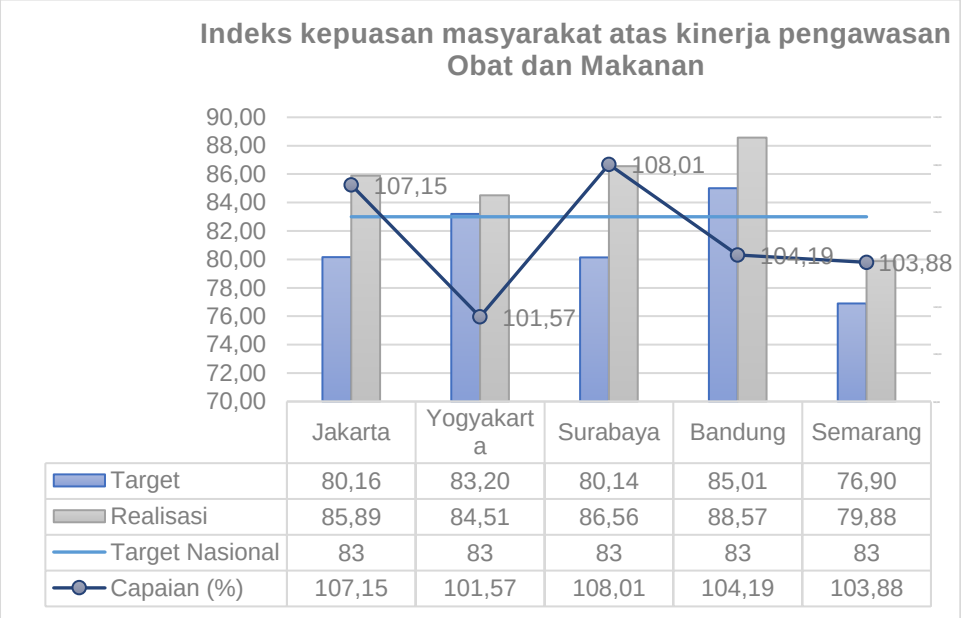
Gambar 37. *Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya*

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sepanjang tahun 2020-2024 secara berturut-turut adalah 73,3 (Cukup Puas); 73,80 (Cukup Puas); 80,22 (Puas); 80,10 (Puas); dan 85,89 (Puas). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 memiliki nilai dan peningkatan tertinggi. Capaian kinerja yang diperoleh sepanjang tahun 2020-2024 secara berturut-turut 101,81%; 98,43%; 104,66%; 102,26%; dan 107,15%.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Hasil indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Bandung dengan realisasi sebesar 88,57 (Puas), kemudian diikuti oleh BBPOM di Surabaya sebesar 86,56 (Puas), BBPOM di Jakarta sebesar 85,89 (Puas), BBPOM di Yogyakarta sebesar 84,51 (Puas), dan BBPOM di Semarang sebesar 79,88

(Puas). Apabila dibandingkan dengan target masing-masing UPT, semua telah melampaui target.



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	80,16	83,20	80,14	85,01	76,90
Realisasi	85,89	84,51	86,56	88,57	79,88
Target Nasional	83	83	83	83	83
Capaian (%)	107,15	101,57	108,01	104,19	103,88

Gambar 38. *Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Target nasional sebesar 83, hanya hasil indeks dari BBPOM di Semarang yang masih berada di bawah target nasional

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan peningkatan kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 antara lain:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta dengan ditandai adanya peningkatan indeks pelayanan publik BBPOM di Jakarta. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta, yaitu dengan peningkatan akses pelayanan publik baik secara tatap muka (kantor BBPOM di Jakarta, Mall Pelayanan Publik melalui Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) dan Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling)) maupun non tatap muka (melalui Whatsapp

dengan menyediakan Chatbot LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi Whatsapp) untuk akses layanan 24 jam, media sosial, dan None Sisi Vol II serta Laksa Betawi yang menyediakan akses layanan publik prioritas bagi kelompok rentan).

b. Penguatan pengawasan pre- dan post- market serta pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha untuk memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu. Pembinaan pelaku usaha dilakukan dengan pelaksanaan fasilitasi UMKM melalui pelaksanaan inovasi Jakfast dan UMKM Jawara yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah DKI Jakarta.
c. Peningkatan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu serta mengenai peran dan fungsi BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media baik secara tatap muka maupun non tatap muka.
d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan yang lebih profesional dan efektif dalam mendukung kinerja pengawasan BPOM.
e. Sinergi dan kolaborasi berbagai kegiatan pengawasan dan pembinaan terpadu dengan pemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di DKI Jakarta.
f. Monitoring dan evaluasi rutin dan berkala terhadap kinerja pengawasan dan identifikasi area perbaikan pada pengukuran kepuasan Masyarakat

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,16	85,89	107,15%	370.613.900	370.076.200	99,85%	1,07	0,07	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,07 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa



anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung sarana pelayanan publik, pengawasan pre- dan post- market, penindakan, dan sosialisasi tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta yang efektif dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/ kegiatan yang menunjang tercapainya Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 antara lain:

a. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tentang keamanan pangan terpadu meliputi Desa/ Kelurahan Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pada tahun 2024, telah dilakukan intervensi terhadap delapan kelurahan, 78 sekolah/ madrasah, dan dua pasar di Kota Administrasi Jakarta Barat. BBPOM di Jakarta juga telah menyelenggarakan advokasi lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam implementasi program prioritas nasional keamanan pangan tersebut.
b. Partisipasi BBPOM di Jakarta dalam Jakarta Fair (JFK) 2024 melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan membuka stan pada anjungan Pemprov DKI Jakarta Hall C1. Melalui partisipasi ini, BBPOM di Jakarta berupaya meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi serta edukasi terkait peran dan fungsi BPOM dan keamanan Obat dan Makanan.
c. Implementasi inovasi pelayanan publik Jak Prima yang mengintegrasikan layanan publik seperti None Sisi, Laksa Betawi, Sultan Betawi, LAILA, Senayan, dan Kerling Jakarta. Dengan adanya inovasi ini, memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses pelayanan publik BBPOM di Jakarta.



G. Upaya Peningkatan Kinerja

Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja pada periode mendatang antara lain:

a. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat.
b. Meningkatkan kegiatan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta melalui berbagai media.
c. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan Obat dan Makanan.
d. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial.
e. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat**.**

9. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimapelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka

Survei dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk



menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan survei diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM.

Survei dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan online dan diolah oleh aplikasi Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAPA APIP) (https://sapaapip.pom.go.id/)

Kriteria yang digunakan adalah:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,25	95,81	100,59	Sangat Baik

Tabel 47. *Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024*

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 diperoleh sebesar 95,81 dengan mutu pelayanan A kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target sebesar 95,25, maka diperoleh capaian sebesar 100,59% dengan kategori sangat baik. Nilai ini diperoleh dari 296 responden, degan rincian sebagai berikut:



No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki	108	36,5 %
		Perempuan	188	63,5 %
2	Pendidikan	≤ SMA/Sederajat	54	18,2 %
		DI/D2/D3	26	8,8 %
		D4/S1	121	40,9 %
		S2/Profesi/S3	95	32,1 %
3	Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	6	2,0 %
		Pegawai Swasta	162	54, 8 %
		Wiraswasta	91	30,7 %
		Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan	0	0%
		Lainnya	37	12,5 %
4	Usia	≤ 25 Tahun	36	12,2 %
		26 – 30 Tahun	58	19,6 %
		31 – 35 Tahun	60	20,3 %
		36 – 40 Tahun	35	11,8 %
		≥ 41 Tahun	107	36,1 %

Adapun pengolahan data SKM menggunakan aplikasi https://sapaapip.pom.go.id/ dan diperoleh hasil sebagai berikut:

(1) Nilai SKM per jenis layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	93.70	94.44	96.67	99.26	97.78	98.89	100.00	97.04	98.15	**97.33**
Sertifikasi Cara	97.62	96.43	97.22	96.43	96.43	96.43	96.43	97.62	97.62	**96.91**



Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Distribusi Yang Baik (CDOB)										
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)	95.83	100.00	95.83	100.00	95.83	100.00	100.00	95.83	100.00	**98.15**
Pengujian Obat dan Makanan	100.00	95.83	97.22	100.00	100.00	100.00	100.00	95.83	95.83	**98.30**
Pengaduan Masyarakat Dan Informasi Obat Dan Makanan	94.44	94.85	95.12	95.25	95.05	96.36	96.57	95.25	94.85	**95.30**
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap (CPOTB)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**100.00**
Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik	94.44	94.75	95.27	94.44	95.06	95.99	96.60	95.06	95.06	**95.19**

(2) Nilai SKM per unsur dan unita layanan

Unsur Layanan		2023	2024	Naik/Turun
U1	Persyaratan	92.97	94.64	1.67
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	92.69	94.98	2.29



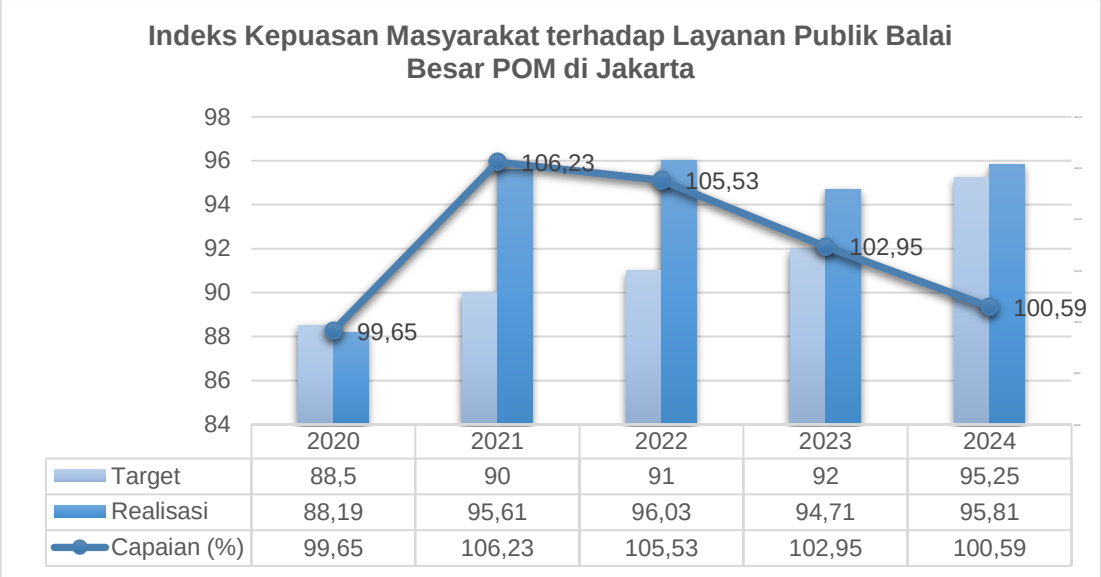
Unsur Layanan		2023	2024	Naik/Turun
U3	Waktu Penyeleseian	95.02	95.58	0.56
U4	Biaya/Tarif	94.63	95.96	1.33
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94.57	95.67	1.10
U6	Kompetensi Pelaksana	95.29	96.83	1.54
U7	Perilaku Pelaksana	96.79	97.23	0.44
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95.57	95.67	0.10
U9	Sarana dan Prasarana	94.85	95.67	0.82
Nilai SKM Unit Layanan		**94.71**	**95.81**	**1.10**

Berdasarkan hasil pengukuran SKM dapat diketahui bahwa tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu perilaku pelaksana dengan nilai 97,23, Kompetensi Pelaksana dengan nilai 96,83, dan biaya/ tarif dengan nilai 95,96. Sedangkan, tiga unsur dengan nilai terendah, yaitu Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai 94,64, persyaratan dengan nilai 94,98, dan waktu penyelesaian dengan nilai 95,58.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 secara berturut-turut sebesar 88,19 (Baik); 95,61 (Sangat Baik); 96,03 (Sangat Baik); 94,71 (Sangat Baik); dan 95,81 (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai indeks tahun 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Capaian kinerja indeks secara berturut-turut dari tahun 2020-2024 adalah 99,65%; 106,23%; 105.53%; 102,95%; dan 100,15





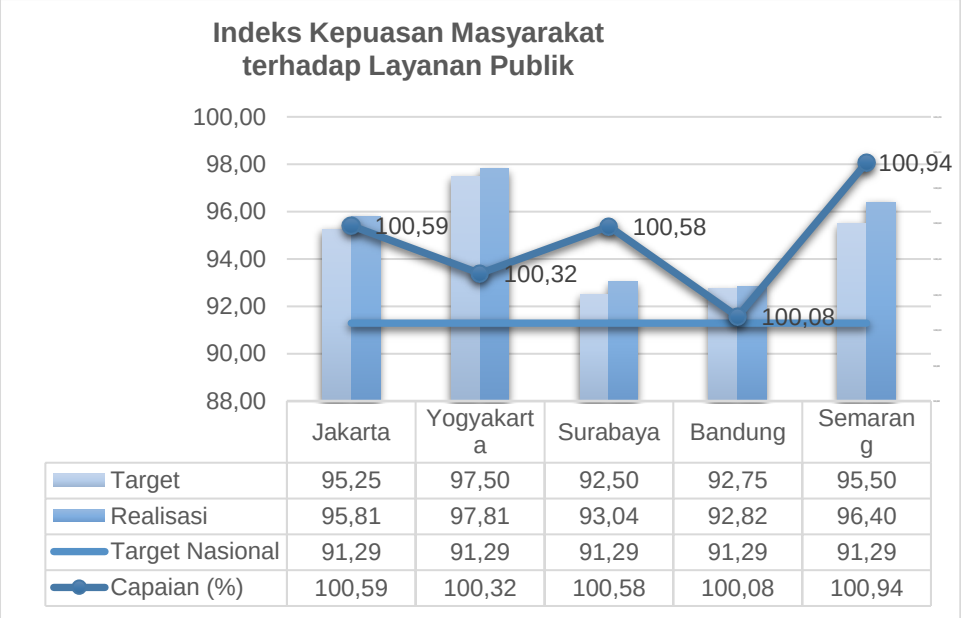
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	88,5	90	91	92	95,25
Realisasi	88,19	95,61	96,03	94,71	95,81
Capaian (%)	99,65	106,23	105,53	102,95	100,59

Gambar 41. *Grafik Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap Layanan Pulbik BBPOM di Jakarta*

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Realisasi indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 dari tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah BBPOM di Yogyakarta sebesar 97,81; BBPOM di Semarang dengan 96,40; BBPOM di Jakarta sebesar 95,81; BBPOM di Surabaya sebesar 93,04; dan BBPOM di Bandung sebesar 92,82. Semua realisasi masuk ke dalam kategori mutu layanan A, Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan target masing-masing semua capaian telah melampaui target dengan capaian tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Semarang sebesar 100,94% kemudian diikuti BBPOM di Jakarta sebesar 100,59%, BBPOM di Semarang sebesar 100,58%, BBPOM di Yogyakarta sebesar 100,32%, dan BBPOM di Bandung sebesar 100,08%.





	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	95,25	97,50	92,50	92,75	95,50
Realisasi	95,81	97,81	93,04	92,82	96,40
Target Nasional	91,29	91,29	91,29	91,29	91,29
Capaian (%)	100,59	100,32	100,58	100,08	100,94

Gambar 42. *Grafik Indeks Kepuasan Masyrakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jakarta*

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Berikut adalah beberapa faktor penyebab keberhasilan tersebut:

a. Kemudahan akses pelayanan publik secara online melalui LAILA 24 (Chatbot Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Whatsapp 24 jam), media sosial (Instagram, Facebook, X), zoom meeting dengan perjanjian (None Sisi Vol.2) serta melalui loket pelayanan terpadu di kantor BBPOM di Jakarta dan Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta serta penerapan inovasi OQJAK (Sistem Antrian Online BBPOM di Jakarta).

b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan publik, seperti pelatihan pelayanan publik prima dan pelatihan penanganan pengaduan menjadi upaya BBPOM di Jakarta untuk memastikan bahwa SDM pelayanan publik memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.



c. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional. Dengan mengimplementasikan berbagai kanal pelayanan informasi dan pengaduan melalui LAPOR!, telepon, email, whatsapp, media sosial, dan loket pelayanan publik, melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala dan dipublikasikan secara transparan, dan penerapan digitalisasi serta inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan, BPOM di Jakarta berupaya untuk terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,25	95,81	100,59%	115.919.900	99.327.344	85,69%	1,17	0,17	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,17 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung sarana pelayanan publik, pengembangan inovasi pelayanan publik, pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam menunjang keberhasilan capaian indeks terdapat program-program yang telah diterapkan diantaranya:

a. Digitalisasi pelayanan publik dengan menerapkan sistem layanan berbasis online untuk mempermudah akses masyarakat. Penerapan chatbot LAILA



24 (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Whatsapp 24 jam) memberikan akses yang mudah dan fleksibel bagi masyarakat pada layanan informasi dan pengaduan BBPOM di Jakarta, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat akan kemudahan akses pelayanan publik.

b. Sosialisasi pelayanan publik melalui berbagai metode dan media. Akses pelayanan publik dipublikasi baik melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang dilakukan maupun melalui media seperti media cetak, media luar ruang (videotron), media online, media sosial, dan subsite.
c. Kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektor berupa integrasi informasi pelayanan publik. Bentuk implementasinya adalah akses pelayanan publik yang terintegrasi pada Mall Pelayanan Publik Virtual Provinsi DKI Jakarta dan pada subsite Jakpreneur.
d. Pelaksanaan forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat terkait standar pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta sekaligus sebagai wadah aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada periode mendatang perlu dilakukan hal-hal berikut ini antara lain:

a. Melakukan sosialisasi/ pemberian informasi melalui media sosial, subsite, dan media lainnya secara berkala dan terjadwal tentang sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan publik.
b. Meningkatkan koordinasi antar fungsi yang terlibat dalam pelayanan publik seperti Fungsi Informasi dan Komunikasi, Sertifikasi, Penindakan, Pengujian, dan Tata Usaha melalui forum komunikasi internal yang dilakukan secara rutin dan terjadwal.
c. Peningkatan implementasi inovasi Jakkonek yang mengintegrasikan pelayanan publik BBPOM di Jakarta di berbagai platform stakeholder.



SASARAN STRATEGIS IV

Capaian sasaran strategis IV, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Diilaksanakan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

1) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2) Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen
3) Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
   a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
   c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
   d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UP
   e. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
      1) Pelaku usaha;
      2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)



A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	95,23	102,40	Sangat Baik

Tabel 55. *Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024*

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh capaian 102,40 dengan kategori "Sangat Baik".

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

   Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

   Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (100+100+80,95+100)/4

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = 95,23%

   Keterangan:

   Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

   Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

   A = 579/579 x 100%

   A =100%

c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT



Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100

B = 243/243 X 100

B = 100%

d. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

C = 17/21 X 100%

C = 80,95 %

e. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

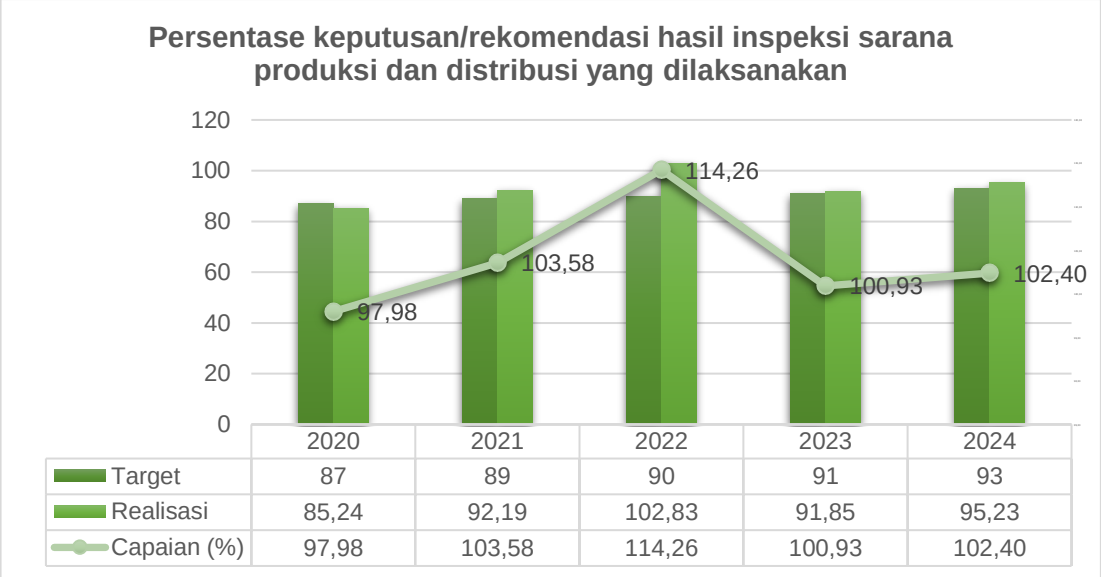
A = 75/75 X 100

A = 100%

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2020-2023 terjadi kenaikan realisasi indikator, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023 namun kembali terjadi kenaikan pada tahun 2024. Terjadi kenaikan target setiap tahun, namun BBPOM Jakarta selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

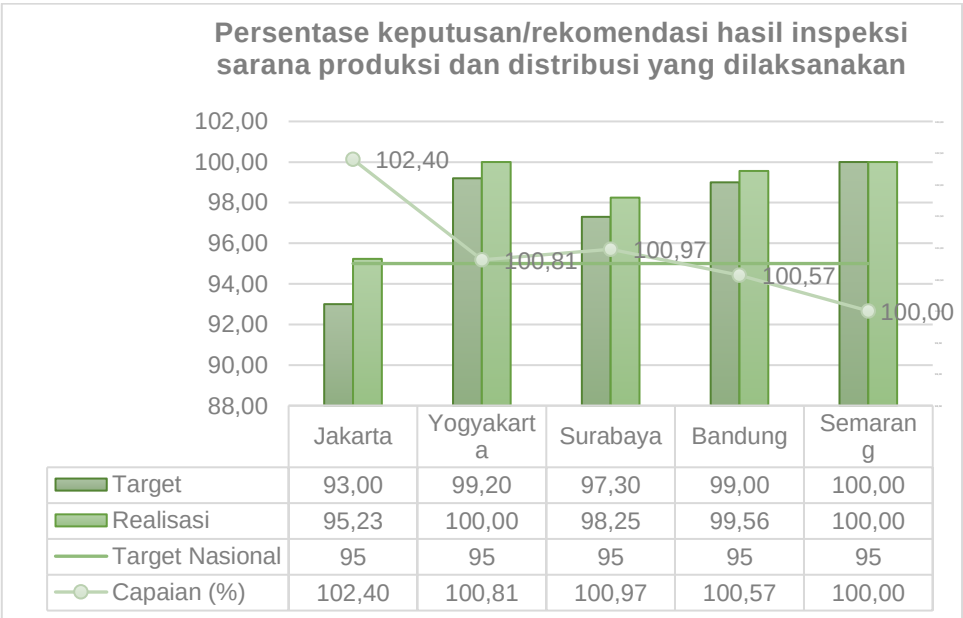




	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87	89	90	91	93
Realisasi	85,24	92,19	102,83	91,85	95,23
Capaian (%)	97,98	103,58	114,26	100,93	102,40

Tabel 56. *Realisasi, Target dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi*

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	93,00	99,20	97,30	99,00	100,00
Realisasi	95,23	100,00	98,25	99,56	100,00
Target Nasional	95	95	95	95	95
Capaian (%)	102,40	100,81	100,97	100,57	100,00

Gambar 45. *Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dengan UPT lain*

Berdasarkan grafik tersebut nampak bahwa target BBPOM Jakarta berada di bawah target nasional dan target balai lain. Namun demikian seluruh balai

tersebut, berhasil mencapai target yang ditetapkan. BBPOM Semarang secara optimis menetapkan target 100% dan dapat tercapai. Demikian juga dengan BBPOM Yogyakarta, seluruh keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dilaksanakan. BBPOM Jakarta menetapkan target tahun 2024 yaitu 93% beerdasarkan trend data tahun-tahun sebelumnya dan berhasil mencapai target.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan telah maksimalnya 3 faktor pendukung indikator tersebut, yaitu Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Ketiga faktor tersebut berada dalam kendali internal BBPOM di Jakarta sehingga mudah dikontrol dan dimaksimalkan.

Perbaikan masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu dengan meningkatkan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal sehingga diperlukan monitoring berkala dan upaya-upaya untuk mendorong pihak eksternal melaksanakan rekomendasi yang diterbitkan.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	95,23	102,40%	172.809.900	167.872.316	97,14%	1,05	0,05	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,05 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi



penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini antara lain karena adanya inovasi Roti Buaia, yaitu monitoring surat tindak lanjut hasil pengawasan, surat dari pusat/ UPT lain, surat dari pemangku kepentingan dan respon dari surat yang dikirimkan oleh BBPOM. Dengan inovasi ini, BBPOM Jakarta dapat mengindentifikasi bila terdapat surat tindak lanjut yang belum dibuat, memonitor surat permintaan pemeriksaan dari pusat/ UPT lain maupun dari pemangku kepentingan.

Kondisi pandemi Covid-19 mendorong penggunaan tools digital dalam dunia kerja. Saat pergerakan fisik dibatasi, pelaporan harus tetap dilakukan, sehingga muncul inovasi roti buaiya yang dapat diakses darimana saja. Adanya inovasi ini pada tahun 2021 berhasil mendongkrak realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sehingga naik dari 92,19% pada tahun 2021 menjadi 102,83% pada tahun 2022. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama dengan pusat dan UPT lain**.**

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan pusat dan UPT lain untuk menindaklanjuti keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang telah disampaikan.



11. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) pelaku usaha;
2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
3) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
4) Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,9	91,02	100,13	Sangat Baik

Tabel 59. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*



Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (82.04 % + 100 %) / 2

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 91,02 %

Keterangan:

A.Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Cara perhitungan:

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

A = 466/568 x 100%

A = 82,04 %

B.Persentase keputusan hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Cara perhitungan:

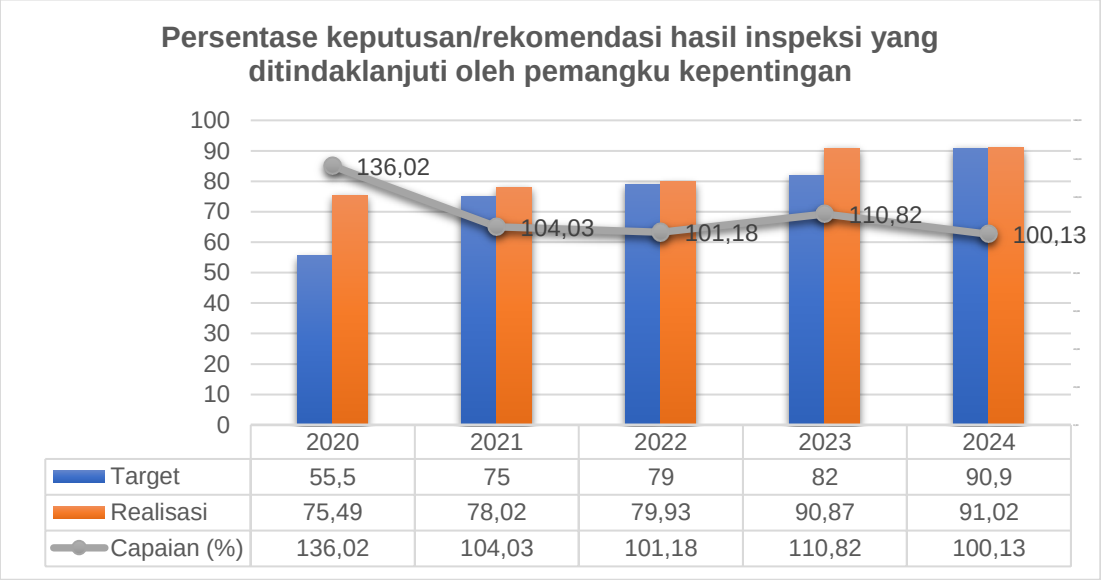
B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/ Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

B = 8/8 X 100%

B = 100 %



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	55,5	75	79	82	90,9
Realisasi	75,49	78,02	79,93	90,87	91,02
Capaian (%)	136,02	104,03	101,18	110,82	100,13

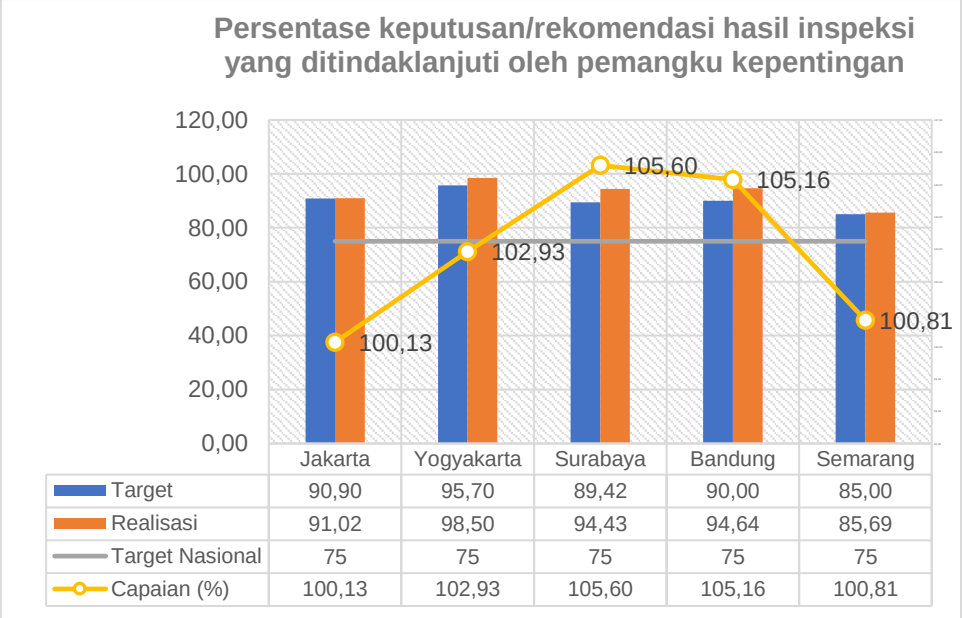
Tabel 60. Realisasi, Target dan Capaian Kinerja Hasil Inspeksi

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun 2020-2023 terjadi penurunan realisasi indikator, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2023 namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2024. Terjadi kenaikan target setiap tahun, namun BBPOM Jakarta selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Berdasarkan grafik tersebut nampak bahwa target BBPOM Jakarta berada di atas target nasional. Demikian juga dengan BBPOM di Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang. Realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Yogyakarta, yaitu 98,50% dan realisasi terendah oleh BBPOM di Semarang. Seluruh Balai berhasil mencapai target yang ditetapkan dan berkontribusi signifikan terhadap realisasi indikator secara nasional.





	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	90,90	95,70	89,42	90,00	85,00
Realisasi	91,02	98,50	94,43	94,64	85,69
Target Nasional	75	75	75	75	75
Capaian (%)	100,13	102,93	105,60	105,16	100,81

Gambar 47. *Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 dengan Balai Lainnya*

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian target ini karena seluruh keputusan hasil inspeksi telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Seluruh rekomendasi BBPOM Jakarta terkait IRTP ditindaklanjuti oleh Suku Dinas Kesehatan. Selain itu, sebagian besar keputusan hasil inspeksi telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.



No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,90	91,02	100,13%	172.809.900	167.872.316	97,14%	1,03	0,03	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,03 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini antara lain karena adanya inovasi Roti Buaia, yaitu monitoring surat tindak lanjut hasil pengawasan dan respon dari pelaku usaha. Dengan inovasi ini, BBPOM Jakarta dapat melakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang belum merespon surat tindak lanjut, Sebagian pelaku usaha belum melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan karena ketidakpahaman dan perlunya investasi serta waktu untuk perbaikan misal terkait perbaikan fisik bangunan, kalibrasi peralatan, dll.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala seperti desk capa untuk memfasilitasi pelaku usaha yang tidak memahami tindakan perbaikan hasil audit dan memberlakukan pemberian sanksi yang lebih berat bila tidak memberikan bukti tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai batas waktu yang telah ditentukan



12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
3. Izin Penerapan CPPOB untuk pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
4. Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
5. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel early warning system)
6. Verifikasi setelah diterbitkannya Izin Penerapan CPPOB untuk pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
7. Verifikasi setelah diterbikannya Sertfikat SMKPO (Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan) bagi sarana distribusi pangan olahan.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\textit{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \text{x}100\%$$



A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 64. *Realisasi, Target dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertfiikasi*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,7	99,53	100,84	Sangat Baik

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

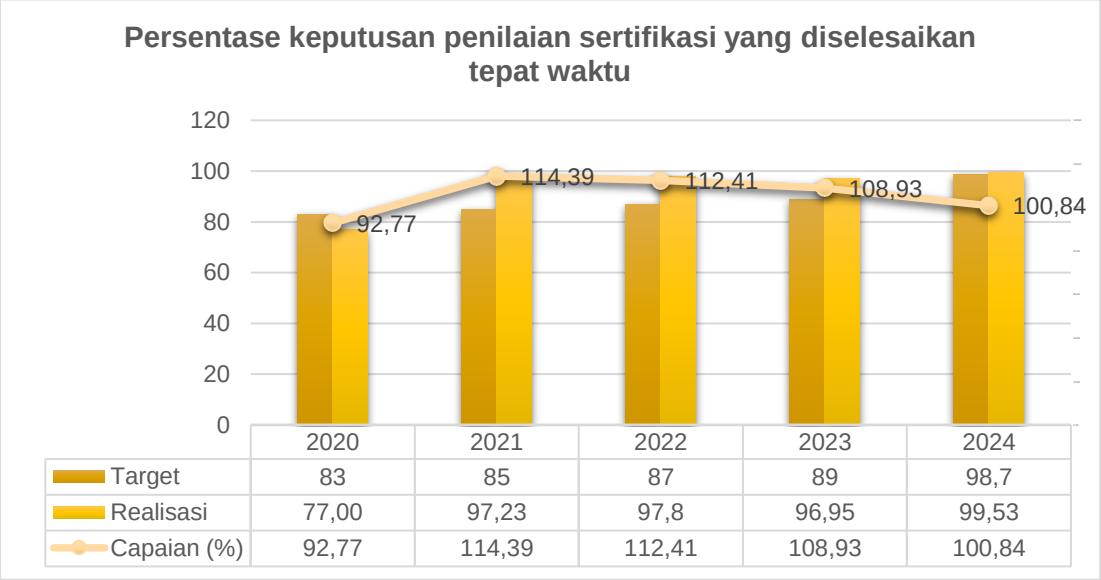
Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1178 (Seribu seratus tujuh puluh delapan). Sebanyak 1151 (seribu seratus lima puluh satu) merupakan keputusan dari permohonan yang diterima pada tahun 2024 dan 27 (dua puluh tujuh) merupakan keputusan dari permohonan tahun sebelumnya. Keputusan sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 1178 (Seribu seratus tujuh puluh delapan), sebanyak 1172 (seribu seratus tujuh puluh dua) keputusan memenuhi timeline yang telah ditetapkan dan 6 (enam) keputusan sertifikasi tidak tepat waktu.

Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai akhir tahun 2024 sebanyak 109 (seratus sembilan) dan semua diselesaikan tepat waktu.

Persentase capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah presentase realisasi dibanndingkan dengan persentase target. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 99,53 % dari target yang ditetapkan 98,70 %, jika dihitung terhadap target maka capaian sampai akhir tahun 2024 sebesar 100,84 % dengan kriteria “ sangat Baik ”.



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	83	85	87	89	98,7
Realisasi	77,00	97,23	97,8	96,95	99,53
Capaian (%)	92,77	114,39	112,41	108,93	100,84

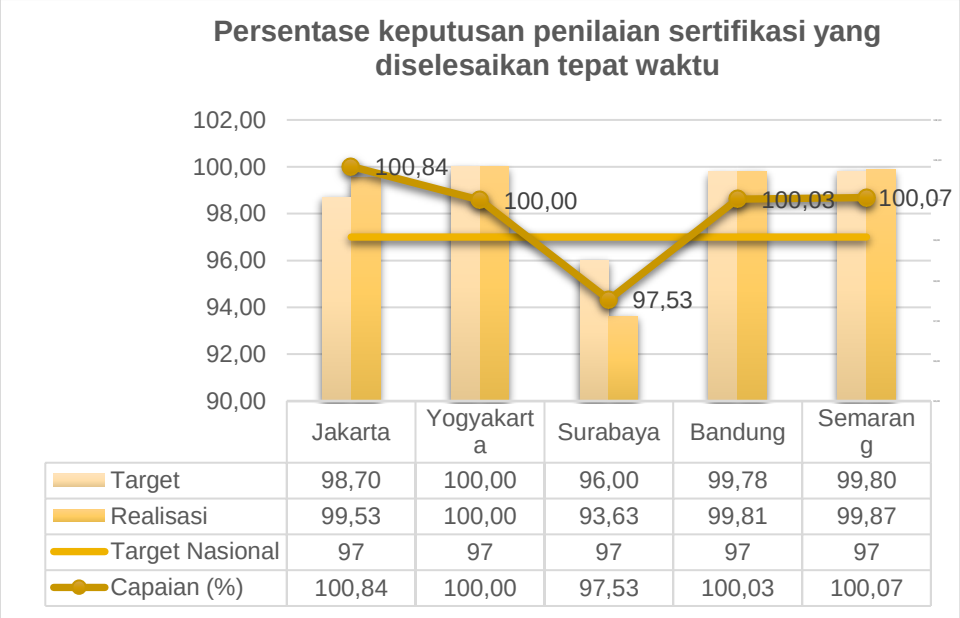
Gambar 49. *Persentase Keuputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di BBPOM di Jakarta*

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan, sedangkan capaian tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan yang kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan target setiap tahun dan pada tahun 2024 kenaikan target sangat signifikan.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 yang paling tinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang paling rendah adalah BBPOM di Surabaya. Target yang ditetapkan berbeda untuk masing-maisng BBPOM sehingga capaian juga berbeda. Persentase capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang paling rendah adalah BBPOM di Surabaya dan semua melebihi target nasional.





	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	98,70	100,00	96,00	99,78	99,80
Realisasi	99,53	100,00	93,63	99,81	99,87
Target Nasional	97	97	97	97	97
Capaian (%)	100,84	100,00	97,53	100,03	100,07

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

b. Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 2024 dapat melebihi target yang telah ditetapkan



c. Adanya kenaikan target realisasi yang signifikan dari tahun 2023 sebesar 89 (delapan puluh sembilan) persen menjadi 98,70 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh) persen tentunya berdampak signifikan terhadap capaian pada tahun 2024. Dibutuhkan usaha yang lebih keras untuk dapat mencapai target tersebut

d. Kolaborasi perijinan terpadu dengan pemerintah daerah terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu yang menyebabkan banyak kegiatan yang saling bersinggungan sehingga mempercepat pemenuhan perijinan yang dilakukan pelaku usaha

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 BBPOM di Jakarta :

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	99,53	100,84%	1.204.810.400	983.663.385	81,64%	1,24	0,24	95%	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena nilai IE>1, persentase capaian output lebih besar dibanding persentase anggaran. NIlai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,24 dengan capaian tingkat efisiensi 95 %

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024 yaitu :

a. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.



b. Inovasi JakPrima dimana Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (Desk CAPA) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Selain Desk CAPA dalama rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dala rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pelaksanaan desk CAPA dan desk CPPOB diselenggarakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan. Desk CAPA dan desk CPPOB selama tahun 2024 telah diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2024, dan tanggal 28 Juni 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 24 November 2024 yang diselenggarakan secara luring di kantor BBPOM di Jakarta.

c. Desk CAPA juga diselenggarakan bagi PBF karena adanya peraturan untuk proses sertifikasi CDOB bagi Pedagang Besar Farmasi (PBF) bahwa setelah dilakukan audit hanya diberi kesempatan perbaikan sebanyak maksimal dua kali dengan tenggang waktu masing-masing 40 hari kerja yang semula hanya dibatasi selama 12 bulan semua ketidaksesuaian harus telah diselesaikan oleh pelaku usaha yang berlaku mulai tahun 2023. Untuk mempercepat pemenuhan penyelesaian CAPA maka BBPOM di Jakarta mengupayakan dilakukan desk CAPA baik secara bersamaan dengan desk CAPA yang terjadwal ataupun dilakukan secara sendiri oleh petugas.



d. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta. Selain melakukan konsultasi secara umum terkait penerbitan izin edar obat dan makanan, pada kesempatan tersebut juga dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk diskusi dengan petugas terkait dokumen CPPOB agar dapat segera memenuhi ketentaun sehingga dapat segera diterbitkan Izin Pemenuhan CPPO

e. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

f. Dalam rangka peningkatan kompetensi petugas dalam pelayanan permohonana sertifikasi usaha di bidang pangan dan kosmetik selama tahun 2024 telah diselenggarakan pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar dan Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior

g. Adanya Inovasi Jak-konek dimana KIE digital berkolaborasi dengan portal yang dimiliki Pemerintah daerah sampai ke tingkat kelurahan sehingga masyarakat yang mengajukan perijinan sudah tahu persyaratan secara lengkap sehingga ketika memasukkan perijinan tidak banyak lagi kekurangan yang harus dipenuhi. Melalui Jak-Konek informasi bisa didapat pelaku usaha secara online dan dari mana saja

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang perlu dilakukan upaya

a. Perlu peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan maupun evaluasi CAPA sehingga dapat mempercepat penerbitan keputusan sehingga pada akhirnya bisa selesai tepat waktu

b. Perlu terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan temuan audit dengan cepat melalui desk CAPA

c. Perlu terus dilakukan monitoring penyelesaian perbaikan dan evaluasi perbaikan yang dapat mempercepat penerbitan Keputusan



d. Melakukan pelatihan untuk refreshing Jak-Officer sebagai perpanjangan tangan Balai Besar POM di Jakarta dalam pelayanan publik sehingga membantu Balai Besar POM di Jakarta menerangkan kepada pelaku usaha persyaratan perijinan BBPOM di Jakarta. Jak-Officer adalah tenaga pendamping kewirausahaan, Yenada CRO PTSP dan AJIB (Antar Jemput Ijin Bermotor)

13. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta.

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:

1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksanaan Sarana Produksi Kosmetika
3. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. SOP Makro

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\textit{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\textit{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$



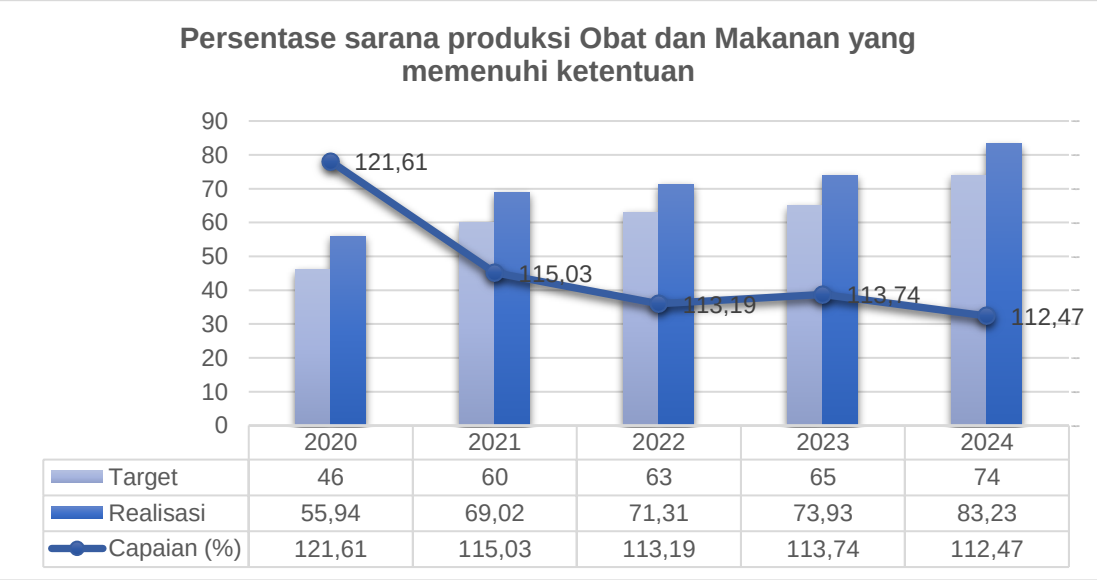
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yaitu 83,23 dengan capaian 112,47% dan masuk kategori “sangat baik”.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	83,23	112,47	Sangat Baik

Tabel 66. *Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024*

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	46	60	63	65	74
Realisasi	55,94	69,02	71,31	73,93	83,23
Capaian (%)	121,61	115,03	113,19	113,74	112,47

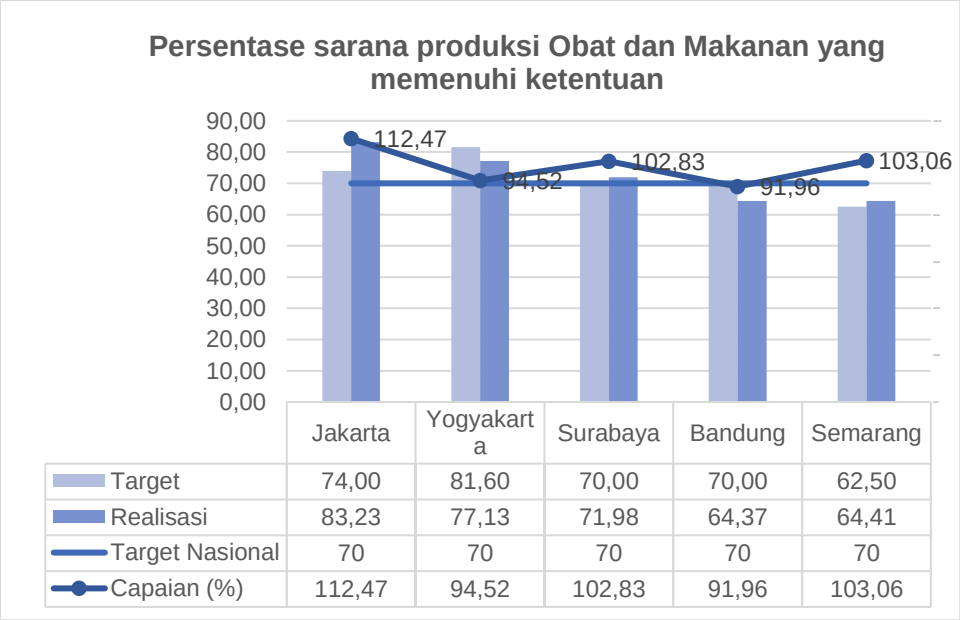
Tabel 67. *Realisasi, Target, Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan*

Berdasarkan grafik tersebut, selama tahun 2020-2024 terjadi kenaikan target, namun demikian BBPOM Jakarta selalu berhasil melampaui target. Realisasi indikator meningkat dari tahun 2020-2024. Capaian cenderung menurun, namun hal ini tidak mencerminkan penurunan kinerja karena sebenarnya target meningkat dan realisasi juga meningkat



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Pada grafik tersebut nampak bahwa realisasi paling tinggi dicapai oleh BBPOM di Jakarta, sedangkan realisasi terendah oleh BBPOM di Semarang. Realisasi BBPOM Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung berada di atas target nasional sedangkan BBPOM Semarang ada dibawah target nasional. Secara umum, beberapa UPT berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu BBPOM Jakarta, Surabaya dan Semarang. Capaian lebih dari 100% diraih oleh BBPOM Jakarta, Semarang dan Surabaya, sedangkan BBPOM di Yogyakarta dan Bandung belum mencapai target**.**



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	74,00	81,60	70,00	70,00	62,50
Realisasi	83,23	77,13	71,98	64,37	64,41
Target Nasional	70	70	70	70	70
Capaian (%)	112,47	94,52	102,83	91,96	103,06

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	18	16	2
2.	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3.	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4	4	0

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	9	6	3
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	15	11	4
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	1	1
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	7	7	0
9.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	3	3	0
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	
11.	**Industri Kosmetik**	**41**	**21**	**20**
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13.	Industri Pangan	146	130	16
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	71	64	7
TOTAL		**316**	**263**	**53**

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan tahun 2024 sejumlah 316 sarana yang terdiri dari 263 sarana memenuhi ketentuan dan 53 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sebagian besar sarana tidak memenuhi ketentuan adalah sarana kosmetik yaitu mencapai 50% dari total sarana produksi kosmetik yang diperiksa. Ketidaksesuaian Sebagian besar disebabkan ketidaksesuaian aspek CPKB. Selain itu juga terdapat 16 sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Sebagian besar ketidaksesuaian terkait dengan kondisi bangunan dan sanitasi hygiene.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan



anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	83,23	112,47%	225.069.600	223.663.385	99,38%	1,13	0,13	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,13 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian target indikator ini antara lain kepatuhan pelaku usaha terutama Sebagian besar industri pangan, IRTP, UKOT, IOT dan Industri Farmasi. Sarana industri pangan dan IRTP paling banyak diperiksa selama tahun 2024. Selain itu juga dilakukan peningkatan kompetensi petugas yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan Food Inspector secara internal dengan berkoordinasi dengan unit pusat dan PPSDM. BBPOM Jakarta juga memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam bentuk desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian tindakan perbaikan hasil pemeriksaan.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan yang berlaku harus selalu ditingkatkan dan diupdate sehingga kegiatan produksi



obat dan makanan dapat dilaksanakan sesuai kaidah GMP sehingga secara konsisten menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

14. Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian



$$\%\ \text{Sarana Distribusi MK} = \frac{\textit{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\textit{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \text{ X } 100\%$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	77,32	96,65	Cukup

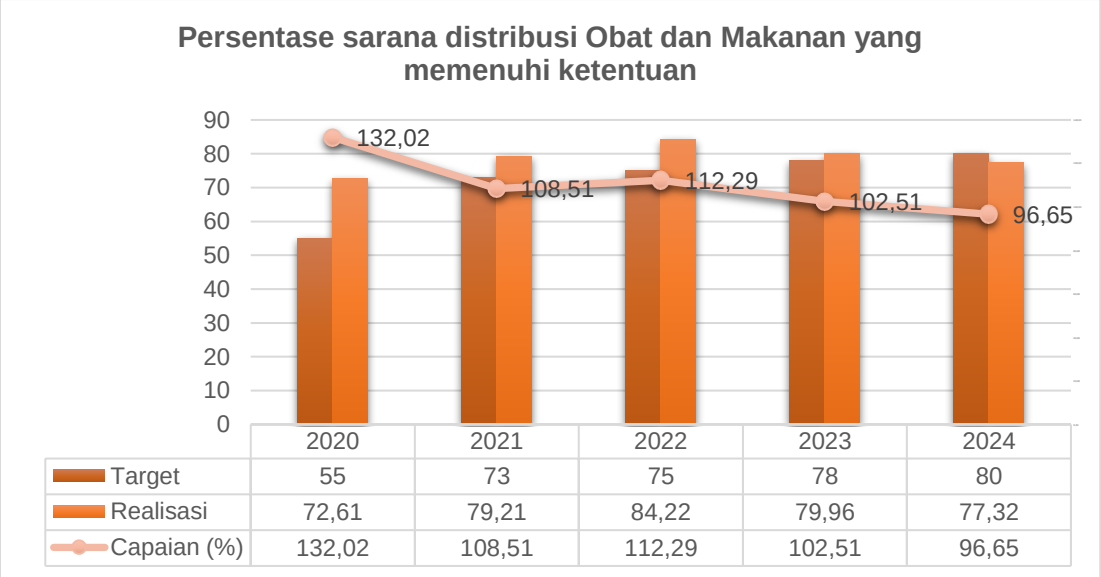
Tabel 71. *Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2024*

Realisasi tahun 2024 indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 80 dengan realisasi hanya 77,32 dan capaiannya 96,65% masuk dalam kategoari "Cukup" dikarenakan ada beberapa pemeriksaan yang menyebabkan Tidak Memenuhi Ketentuan meningkat yaitu tindak lanjut pengaduan, pemeriksaan kasus bersama BPOM Pusat, pemeriksaan saryanfar (klinik) dan tindak lanjut surat seperti PSK sarana.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan grafik dibawah ini indicator Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan selama tahun 2020-2024 terjadi kenaikan target, namun demikian BBPOM Jakarta selalu berhasil melampaui target. Realisasi indikator meningkat dari tahun 2020-2024. Capaian cenderung menurun, namun hal ini tidak mencerminkan penurunan kinerja karena sebenarnya target meningkat dan realisasi juga meningkat.

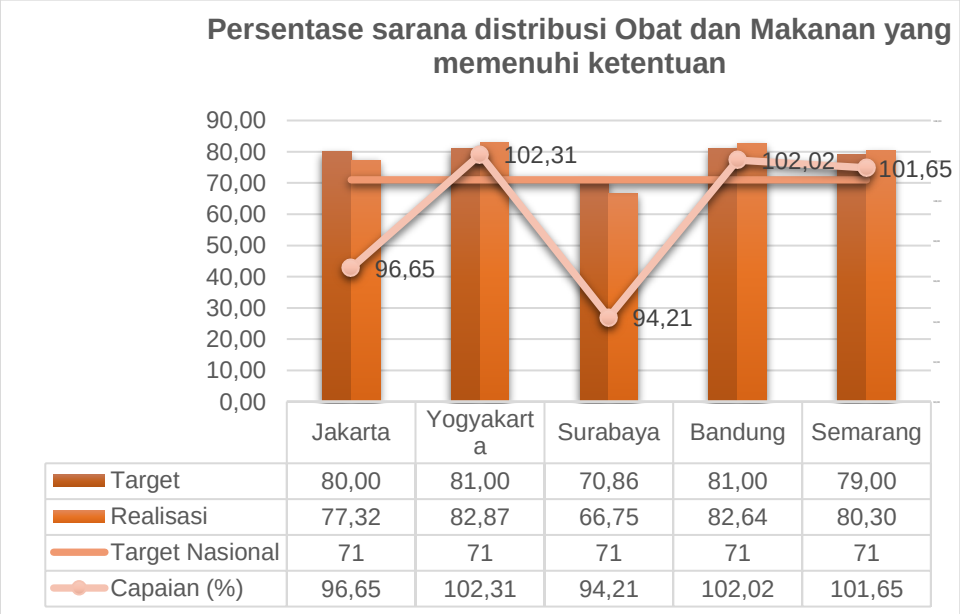




	2020	2021	2022	2023	2024
Target	55	73	75	78	80
Realisasi	72,61	79,21	84,22	79,96	77,32
Capaian (%)	132,02	108,51	112,29	102,51	96,65

Tabel 72. *Realisasi, Target dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan*

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	80,00	81,00	70,86	81,00	79,00
Realisasi	77,32	82,87	66,75	82,64	80,30
Target Nasional	71	71	71	71	71
Capaian (%)	96,65	102,31	94,21	102,02	101,65

Pada grafik tersebut nampak bahwa realisasi paling tinggi dicapai oleh BBPOM di Yogyakarta, sedangkan realisasi terendah oleh BBPOM di Surabaya. Realisasi BBPOM Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Bandung berada di atas target nasional sedangkan BBPOM Surabaya ada dibawah target nasional. Secara umum, beberapa UPT berhasil mencapai target yang



ditetapkan yaitu BBPOM Yogyakarta, Bandung dan Semarang, sedangkan BBPOM Jakarta dan Surabaya tidak berhasil mencapai target

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	107	62	45
2.	Apotek	112	60	52
3.	Toko Obat	42	32	10
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	7	7	0
5.	Rumah Sakit (RS)	72	64	8
6.	Puskemas	74	74	0
7.	Klinik	93	53	40
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	129	96	33
11.	Fasilitas Distribusi Suplemen	45	40	5
12.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	275	222	53
13.	Klinik Kecantikan	24	20	4
14.	Fasilitas Distribusi Pangan	422	354	68
TOTAL		**1402**	**1084**	**318**

Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2024 sejumlah 1402 sarana yang terdiri dari 1084 sarana memenuhi ketentuan dan 318 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sebagian besar sarana tidak memenuhi ketentuan adalah PBF, Apoek, Klinik, Distribusi Pangan, Distribusi Kosmetik dan Distribusi Obat Tradisional.



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	77,32	96,65%	984.599.700	951.442.825	96,63%	1,00	0,00	100%	Efisien

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini antara lain Tingginya jumlah sarana TMK karena adanya program intensifikasi pengawasan antara lain intensifikasi pengawasan OOT di apotek dan PBF, Intensifikasi Pengawasan Depot Jamu, Intensifikasi Pengawasan Lebaran dan Nataru, Kasus diversi obat di apotek dan PBF serta Intensifikasi



Pengawasan Kosmetika. Selain itu juga adanya surat permintaan tindak lanjut dari UPT Lain dan penelusuran.

BBPOM Jakarta berupaya memberikan pembinaan dalam bentuk pendampingan penyusunan CAPA bagi sarana-sarana yang memperoleh sanksi Penghentian Sementara Kegiatan, memberikan pembinaan secara langsung pada saat pemeriksaan sarana, koordinasi dengan lintas sektor utamanya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Binwasdal, dll. Selain itu BBPOM Jakarta juga memberikan sanksi yang tegas seperti pemusnahan produk tanpa izin edar, penghentian sementara kegiatan, dll.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan yang berlaku harus selalu ditingkatkan dan diupdate sehingga kegiatan produksi obat dan makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persamaan persepsi petugas dalam pola tindak lanjut juga dilakukan secara rutin dengan mengupdate peraturan-peraturan baru.

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%)
3) Sarana Prasarana (18%)
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan



Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Pelayanan Publik	4,9	4,94	100,82	Sangat Baik

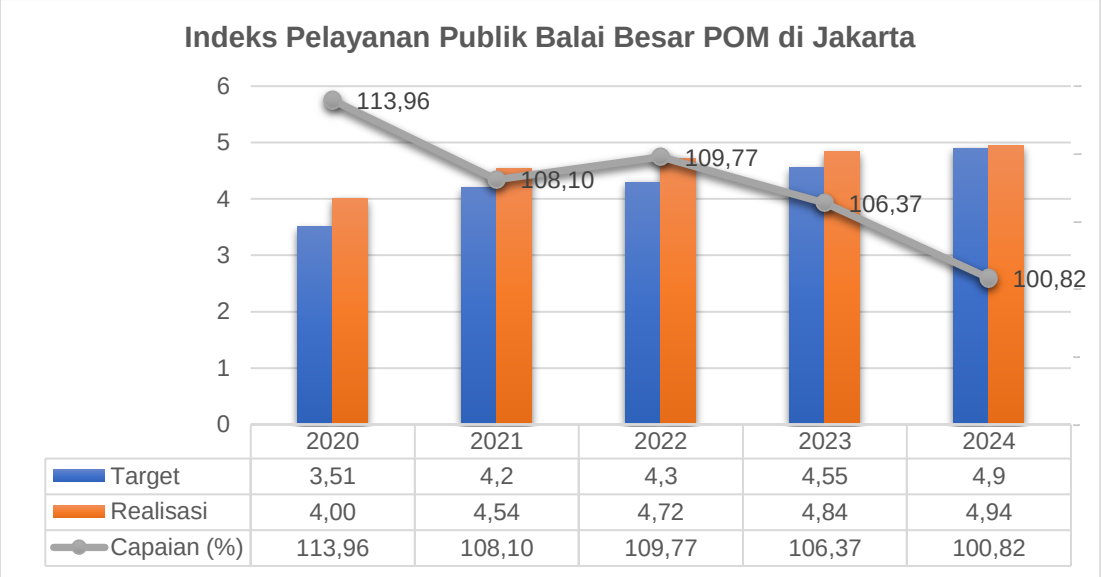
Tabel 76. *Realiasi Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di* Jakarta

Hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM tahun 2024 menghasilkan nilai Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta sebesar 4,94 (Pelayanan Prima) dengan kategori A, Pelayanan Prima. Jika dibandingkan dengan target indeks triwulan III sebesar 4,90, maka diperoleh capaian sebesar 100,82% dengan kategori kinerja Sangat Baik.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks pelayanan publik (IPP) di lingkup Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2024. Tahun 2020, nilai IPP diperoleh sebesar 4,00 (Baik), kemudian meningkat menjadi 4,54 pada tahun 2021, 4,72 (Pelayanan Prima) pada tahun 2022, 4,84 pada tahun 2023, dan 4,94 pada tahun 2024. Predikat pelayanan prima telah diperoleh sejak tahun 2021-2024 dengan nilai indeks yang terus meningkat, sehingga pada periode akhir RPJMN 2024 diperoleh nilai indeks tertinggi. Apabila dibandingkan dengan target capaian indeks telah melampaui dari tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 113,96%, 108,10%, 109,77%, 106,37%, dan 100,82%.

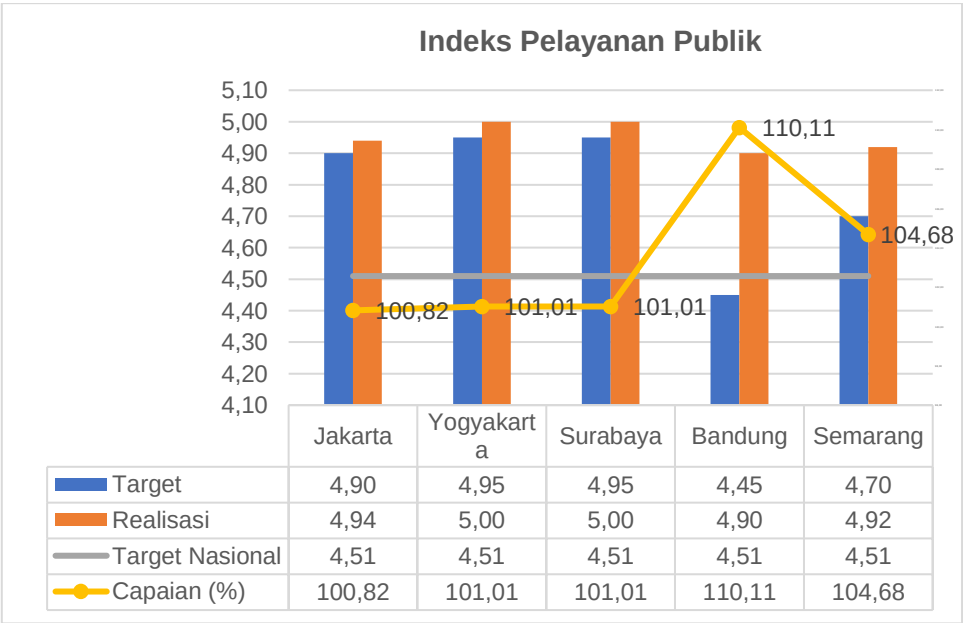




	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,51	4,2	4,3	4,55	4,9
Realisasi	4,00	4,54	4,72	4,84	4,94
Capaian (%)	113,96	108,10	109,77	106,37	100,82

Tabel 77. *Realisasi tahun-tahun sebelumnya*

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	4,90	4,95	4,95	4,45	4,70
Realisasi	4,94	5,00	5,00	4,90	4,92
Target Nasional	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Capaian (%)	100,82	101,01	101,01	110,11	104,68

Tabel 78. *Realisasi, Target dan Capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jakarta dan balai lainnya*

Hasil indeks pelayanan publik BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Surabaya menempati hasil tertinggi dengan nilai 5,00 (Pelayanan Prima). BBPOM di Jakarta menempati urutan ketiga tertinggi dengan nilai indeks 4,94 (Pelayanan Prima) kemudian disusul dengan BBPOM di Semarang sebesar



4,92 (Pelayanan Prima) dan BBPOM di Bandung sebesar 4,90 (Pelayanan Prima). Apabila dibandingkan dengan target nasional, hasil dari semua UPT telah melampaui target nasional. Capaian indeks jika dibandingkan dengan masing-masing target juga sudah melampaui target.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor terkait aspek penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) antara lain:

a. Aspek sarana dan prasarana unit pelayanan publik BBPOM di Jakarta sudah memadai dan sudah ramah kelompok rentan.
b. Kebijakan pelayanan telah disusun melalui tahapan forum konsultasi publik yang mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur, yaitu masyarakat pengguna layanan, praktisi/ akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan media massa.
c. Standar pelayanan publik dan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) telah dipublikasi baik pada media elektronik, non elektronik, media sosial, dan subsite.
d. Telah terdapat mekanisme yang dibangun dan di implementasi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai berupa pemberian reward dan punishment dengan mencakup 6 unsur, yaitu kinerja, kehadiran, kerja sama, inovatif/ kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.
e. Telah mengimplementasikan dan mengelola sistem informasi pelayanan publik baik secara elektronik dan non elektronik dan dilakukan pemutakhiran secara rutin pada subsite dan sistem informasi digital BBPOM di Jakarta, yaitu Jak Digital.
f. Telah tersedia sarana konsultasi dan pengaduan baik secara tatap muka maupun email, aplikasi Whatsapp, media sosial, website pengaduan mandiri dan telah terhubung dengan SP4N Lapor!



g. Telah mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang memiliki payung hukum dan sumber daya yang mendukung dan tertuang dalam SK Kepala BBPOM di Jakarta Nomor B-PI.06.01.71.01.24.33 tentang Inovasi Internal dan Layanan Publik BBPOM di Jakarta.

Adapun terdapat rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian internal terhadap peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta periode mendatang yaitu dengan optimalisasi pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite secara harian dan lengkap.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
15	Indeks Pelayanan Publik	4,90	4,94	100,82%	138.419.900	121.823.159	88,01%	1,55	0,55	92	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,55 dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 92%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung dengan pelaksanaan pelayanan publik secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti anggaran pelaksanaan forum konsultasi publik, publikasi standar pelayanan publik serta pengembangaan sarana prasarana dan inovasi pelayanan publik.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 antara lain:



a. Implementasi inovasi pelayanan publik yang lebih mendekatkan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dengan berbasis digital, antara lain LARON BAJA, LAILA (layanan whatsapp), dan Jak Digital (Jendela Akses Digital Data Library Balai Besar POM di Jakarta).
b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dalam menggunakan bahasa isyarat Tingkat dasar untuk mengakomodasi pelayanan publik bagi kelompok rentan, penanganan pengaduan, dan komunikasi advokasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan pengaduan.
c. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik termasuk pelayanan untuk kelompok rentan.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang dapat dilakukan implementasi dari rekomendasi yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian internal terhadap peningkatan indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta periode mendatang yaitu dengan optimalisasi pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite secara harian dan lengkap**.**

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Target tahun 2023 dihitung dari rata-rata target pendampingan UMKM Obat Tradisional, UMKM Kosmetika dan UMKM pangan olahan. Adapun target realisasi pendampingan UMKM obat tradisional tahun sebesar 100 % berupa kegiatan penetapan target, bimtek, sertifikasi dan monitoring evaluasi dan pelaporan. Target realisasi pendapingan UMKM kosmetika sebesar 100 % berupa penetapan target, bimtek, dan pelaksanaan pendampingan. Target realisasi pendampigan UMKM pangan olahan sebesar 100 % berupa penetapan target, pendampingan dan peneribtan Izin Penerapan CPPOB. Sehingga jika rata-rata dari ketiga jenis sarana maka target tahun 2023 adalah sebesar 100 %



Realisasi juga diperhitungkan dari rata-rata masing-masing capaian pendampingan masing-masing sarana. Tahun untuk UMKM untuk semua tahapaan yaitu penetapan target, bimtek, pendampingan, pelaporan dan monitoring evaluasi.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00	Baik

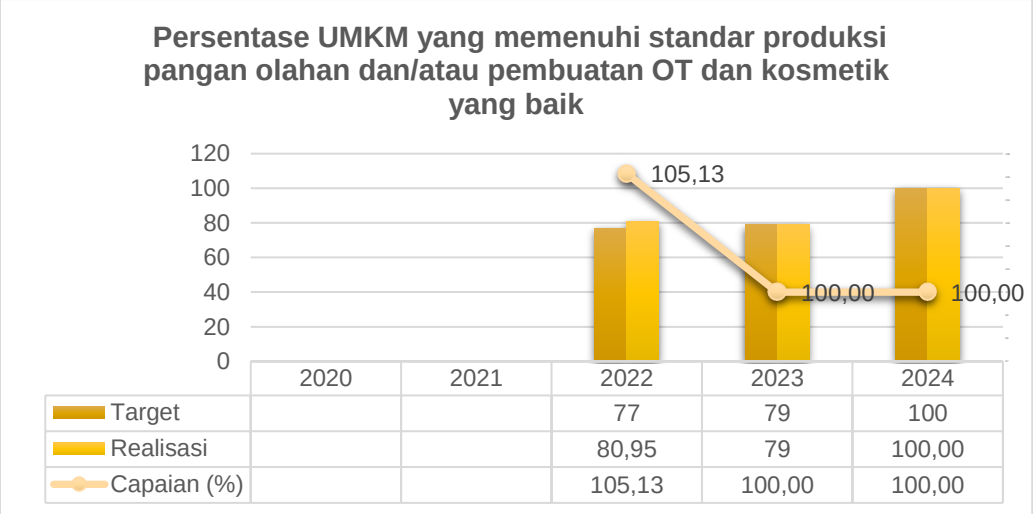
Gambar 59. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Provinsi DKI Jakarta*

Target sampai tahun 2024 dihitung dari rata-rata target pendampingan UMKM Obat Tradisional, UMKM Kosmetika dan UMKM pangan olahan. Adapun target rata-rata pendampingan UMKM obat tradisional, kosmetika dan pangan tahun 2024 sebesar 100 % berupa kegiatan penetapan target, bimtek, sertifikasi dan pendampingan, monitoring dan pelaporan. Realisasi rata-rata pendampingan UMKM kosmetika sebesar 100 % berupa penetapan target, bimtek, dan pelaksanaan pendampingan monitoring dan pelaporan. Sehingga capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menjadi 100 % dengan kategori baik

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 dan tahun 2023, indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik baru dimilai tahun 2022.



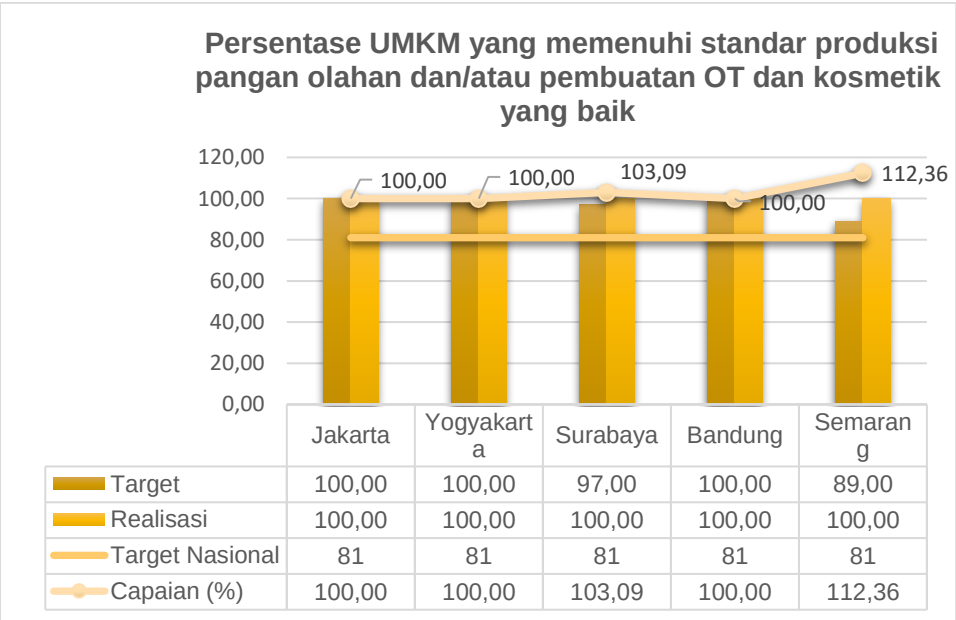


	2020	2021	2022	2023	2024
Target			77	79	100
Realisasi			80,95	79	100,00
Capaian (%)			105,13	100,00	100,00

Gambar 60. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik*

Capaian tahun 2024 jika dibanding tahun 2022 mengalami penurunnan dan jika dibanding tahun 2023 tetap. Hal tersebut terjadi karena tahun 2024 mengalami kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari 77% pada tahun 2022, 79% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	100,00	100,00	97,00	100,00	89,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	81	81	81	81	81
Capaian (%)	100,00	100,00	103,09	100,00	112,36

Gambar 61. *Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik*



Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 semua BBPOM pembanding sama, UPT dengan capaian paling tinggi BBPOM di Semarang yaitu 112,36% sedangkkan pada urutan kedua adalah BBPOM di Surabaya yaitu 103,09% dan tiga UPT yang lain yaitu BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Bandung memperoleh capaian yang sama yaitu 100 %. Hal ini terjadi karena target BBPOM di Semarang paling kecil dibanding UPT lain yaiti 89% dan target BBPOM di Surabaya menempati urutan kedua yaitu 97 % dan target tiga UPT lain dengan nilai yang sama yaitu 100%. Realiasasi kelima UPT melebih target nasional **.**

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Sumber daya yang digunakan dalam Perubahan sistem yang dilakukan dalam melakukan gap terhadap sarana yang akan dilakukan fasilitasi sangat membantu dalam pemilihan target sarana yang akan difasilitasi. Dengan penetapan target yang tepat sehingga sarana yang difasilitasi adalah sarana yang benar-benar mumpuni dan berkomitmen dalam mengikuti kegiatan ini. Perubahan sistem tersebut dimana percepatan pengumpulan sarana diawal tahun dengan advokasi bersama pentahelix.
b. Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta oleh Pusat telah dilaksanakan tepat waktu sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha juga dapat dilaksanakan tepat waktu
c. Bimbingan teknis bagi pelaku usaha peserta fasilitasi yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan pelaku usaha dapat segera mendapatkan sertifikat untuk fasilitas produksi yang pada akhirnya segera mendapatkan nomor izin edar untuk produk
d. Pemanfaatan Jak-Officer yang merupakan (tenaga pendamping kewirausahaan yang dimiliki Pemda yang ada di setiap kecamatan sehingga Balai Besar POM di Jakarta tidak bekerja sendiri dan mengemukakan kekuatan Kolaborasi mewujudkan Jakarta sebagai kota Kolaborasi dimana setiap tahun nya kemampuan para Jak-Officer yang



telah dilatih bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan dan menambah jumlah sarana yang difasilitasi

e. Inovasi UMKM Jaw@ra dengan segala percepatan dan kolaborasi yang dilakukan sangat membantu dalam memenuhi capaian. Inovasi UMKM Jaw@ra dimana dari tahun ketahun terdapat peningkatan dan pembaharuan seperti pada tahun 2024 dilakukan bimtek berkolaborasi dengan kementrian Parekraf

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 BBPOM di Jakarta :

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100,00	100,00%	394.513.600	347.948.205	88,20%	**1,13**	**0,13**	**100%**

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena nilai IE>1, persentase capaian output lebih besar dibanding persentase anggaran. NIlai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,13 dengan capaian tingkat efisiensi 100%.

Jumlah UMKM yang difasilitasi tahun 2024 adalah 113 UMKM, sementara target awal adalah 100 UMKM. Tentunya dengan target yang besar ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Balai Besar POM di Jakarta dimana SDM Balai Besar POM di Jakarta yang terlibat hanya 10 orang sementara target UMKM cukup besar. Adanya Inovasi UMKM Jaw@ra dengan pemanfaatan Jak-Officer tenaga yang dimiliki pemda sehingga dengan target sarana yg normalnya untuk 10 UMLM secara perhitungan ABK hanya sanggup memfasilitasi 30 UMKM mengingat penugasan lainnya di sertifikasi, capaian 113 UMKM yang harusnya membutuhkan sekitar 37 SDM. Kekurangan SDM itu dibantu oleh para Jak-Officer ini yang merupakan tenaga pendamping kewirausahaan yang dimiliki



pemerintah daerah sampai ketingkat kecamatan. Disini terlihat efisiensi SDM Balai Besar POM yang menangani fasilitasi UMKM.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja.

a. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD). Dengan adanya program kolaborasi tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan kemudahan berusaha dan perizinan. Pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha produsen pangan olahan beskala mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendapatkan izin edar.
b. Melakukan visitasi lebih awal bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM DKI Jakarta tahun 2024, sehingga diharapkan program fasilitasi dapat dimulai lebih awal.
c. Melakukan pelayanan prima berupa Kegiatan Pelayanan Sertifikasi dan Informasi Keliling (Kerling) yang dimanfaatkan untuk kegiatan desk CPPOB dalam rangka percepatan penyelelesaian perbaikan dokumen penerbitan Izin Penerapan CPPOB
d. Bimtek untuk UMKM kosmetik dan obat tradisional dilaksanakan sesuai target yaitu bulan Maret 2024
e. Selain dilakukan program fasilitasi kolaborasi dengan Dinas PPKUKM juga dilakukan fasilitasi secra mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dari BBPOM di Jakarta. Fasilitasi ini untuk menjangkau pelaku usaha di bidang pangan, kosmetik dan obat tradisional
f. Untuk menilai komitmen pelaku usaha produksi pangan peserta fasilitasi yang telah terbit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yan Baik (IP CPPOB) dilakukan audit dalam rangka verifikasi terkait pelaksanaan dan konsistensi pelaksanaan prosedur
g. Inovasi UMKM Jaw@ra yang pada tahun 2024 mengalami peningkatan dalam kegiatan yang dilakukan seperti kolaborasi dengan akademisi yaitu Universitas Pancasila



h. Pencanangan inovasi Jak-konek dimana pelaku usaha mendapatkan informasi tentang kegiatan fasilitasi dan persayaratan yang harus dipenuhi secara online bisa sampai Tingkat kelurahan. Dimana Jak-konek ini kolaborasi KIE digital sampai Tingkat kelurahan

G. Upaya Peningkatan Kinerja

a. Perlu peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik instnasi daerah terkait maupun pelaku usaha sehingga kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan produk yang baik semakin meningkat
b. Perlu terus dilakukan bimbingan kepada pelaku usahan maupun fasilitaor yang dimiliki oleh dinas terkait sehingga pelaku usaha semaikin meningkat pengetahuannya dalam proses pembuatan produk yang baik
c. Perlu meningkatkan Inovasi Jak-konek dimana KIE secara digital yang membantu pelaku usaha mendapatkan informasi tentang kegiatan fasilitasi UMKM dan mempercepat pelaku usaha mendapatkan informasi yang bisa diakses dimana saja dan juga melalui portal online yang dimiliki pemerintah daerah sampai ketingkat kecamatan
d. Untuk pengembangan tahun berikutnya adalah pengembangan UMKM Jaw@ra dimana direncanakan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dimana membuat rumah produksi bersama bakso di Rusunawa milik pemerintah Propinsi DKI Jakarta,Hal ini berkolaborasi dengan program pemberdayaan rusun dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Sehingga jumlah sarana yang difasilitasi akan semakin banyak



17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	100	105,26	Sangat Baik

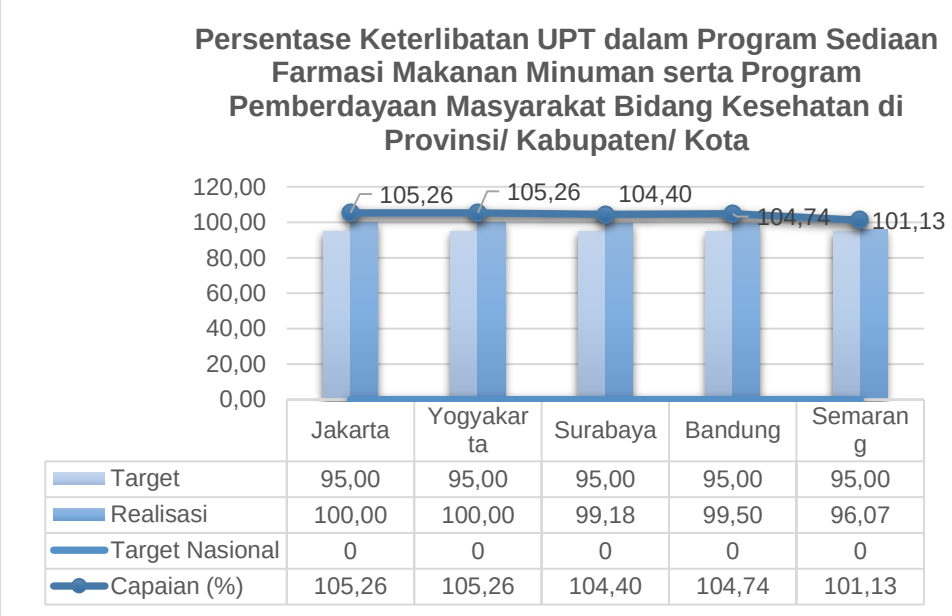
Nilai Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024 adalah 100%. Nilai tersebut mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 95%. Capaian kinerja yang diperoleh adalah 105,26% dengan kriteria sangat baik.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Capaian indikator ini belum bisa dibandingkan terhadap tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2024

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Realisasi	100,00	100,00	99,18	99,50	96,07
Target Nasional	0	0	0	0	0
Capaian (%)	105,26	105,26	104,40	104,74	101,13

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota, pada 4 balai setara tahun 2024 tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan Yogyakarta dengan nilai capaian 105,26% selanjutnya BBPOM di Bandung dengan nilai capaian 104,74%, BBPOM di Surabaya dengan nilai capaian 104,40% dan nilai terendah adalah BBPOM di Semarang dengan nilai capain 101,13%. Namun pada realisasi kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tidak terdapat target nasional di tahun 2024.



D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan perhitungan 2 aspek yaitu aspek Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), aspek Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Keberhasilan dalam mencapai target yang indikator kinerja persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada tahun 2024 dikarenakan adanya kegiatan koordinasi dan advokasi yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta dengan pihak terkait. Aspek TKPPOM dan DAK memiliki persentase bobot total sebesar 90% terhadap realisasi IKU, sehingga realisasi koordinasi 100% berdampak besar terhadap realisasi. BBPOM di Jakarta tidak ada aspek DAK, dengan perhitungan aspek TKKPOM dan TPPS tahun 2024 ini dapat terpenuhi realisasinya dengan baik

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	95,00	100,00	105,26%	338.181.950	335.982.762	99,35%	1,06	0,06	100%	Efisien

Berdasarkan nilai penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian output pada indikator ini dinilai tidak efisien. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator ini lebih besar yaitu 100 %. Realisasi keterlibatan UPT dalam progam sediaan farmasi makanan minuman serta pemberdayaan



masyarakat di bidang kesehatan di propinsi/kabupaten/kota masih rendah dibandingkan dengan terget yang ditetapkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan belum optimum sehingga perlu ditingkatkan lagi.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Jakarta antara lain :

a. Pembaruan Nota Kesepakatan dengan Provinsi DKI Jakarta tentang Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan secara erpadu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (30 Agustus 2024)
b. Koordinasi evaluasi stunting di DKI Jakarta oleh BPKP (April 2024)
c. Koordinasi TPPS DKI Jakarta terkait sosialisasi PMT Berbahan pangan lokal, intervensi serentak pencegahan stunting (Mei 2024)
d. Koordinasi ISPS dan Pengisian Laporan TPPS DKI Jakarta sem 1 2024 (Juni 2024)
e. Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut CRM Toko Obat Kuat di Jl. Samanhudi tanggal 16 Mei 2024
f. Pengawasan terpadu bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautam, Pertanian Kota Adm Jaksel, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm. Jaksel, OPD dan Satpol PP (Pengawasan keamanan pangan menjelang Idul Fitri 2024 di Pasar Santa
g. Pengawasan Toko Obat Tindak Lanjut Laporan Masyarakat bersama Sudinkes Jakarta Utara tanggal 4 Juni 2024



G. Upaya Peningkatan Kinerja

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan
b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Percepatan Penurunan Stunting

SASARAN STRATEGIS V

Capaian sasaran strategis V, yaitu meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

18. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
b. KIE langsung ke masyarakat; dan
c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei



dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Efektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

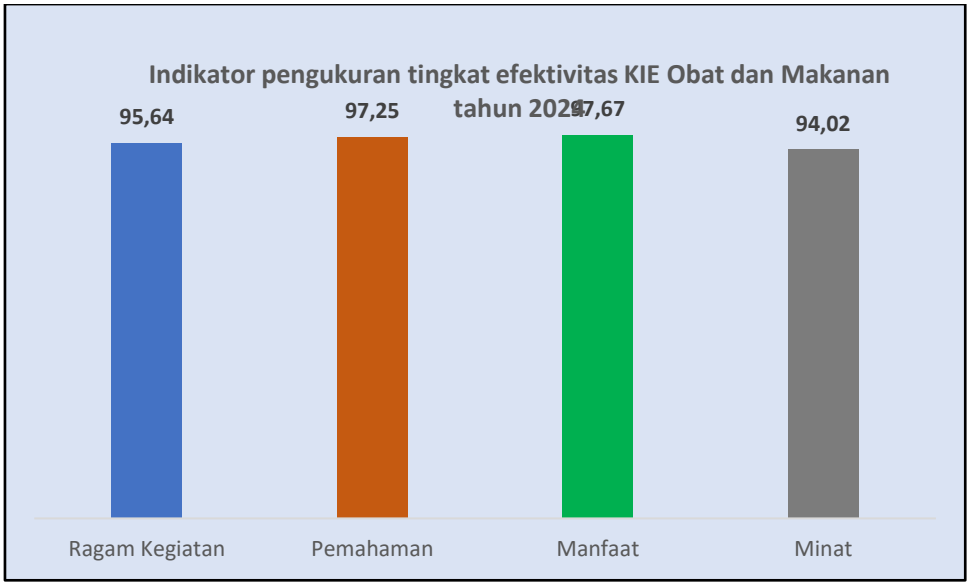
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,7	96,73	100,03	Sangat Baik

Tabel 1. Realisasi, Target dan Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 96,73 (Sangat Efektif Sekali) dan telah mencapai target sebesar 96,70 dengan capaian sebesar 100,03%, kriteria Sangat Baik. Nilai ini diperoleh dari 376 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan sepanjang tahun 2024.





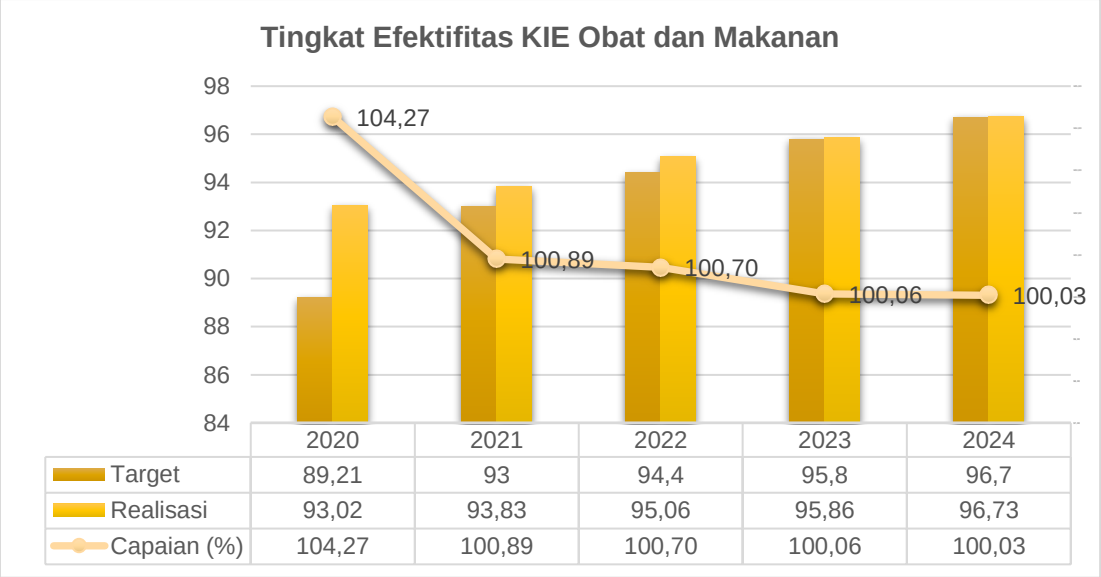
Gambar 1. Indikator Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Apabila dilihat dari masing-masing indikator pengukuran, diperoleh hasil indikator manfaat memiliki indeks tertinggi sebesar 97,67 kemudian diikuti indeks pemahaman sebesar 97,25, kemudian ragam kegiatan sebesar 95,64, dan minat sebesar 94,02.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta terus meningkat pada periode tahun 2020-2024 secara berturut-turut sebesar 93,02 (Sangat efektif); 93,83 (Sangat efektif); 95,06 (Sangat efektif sekali); 95,86 (Sangat efektif sekali); dan 96,73 (Sangat efektif sekali). Sehingga pada akhir periode RPJMN, diperoleh indeks tertinggi.



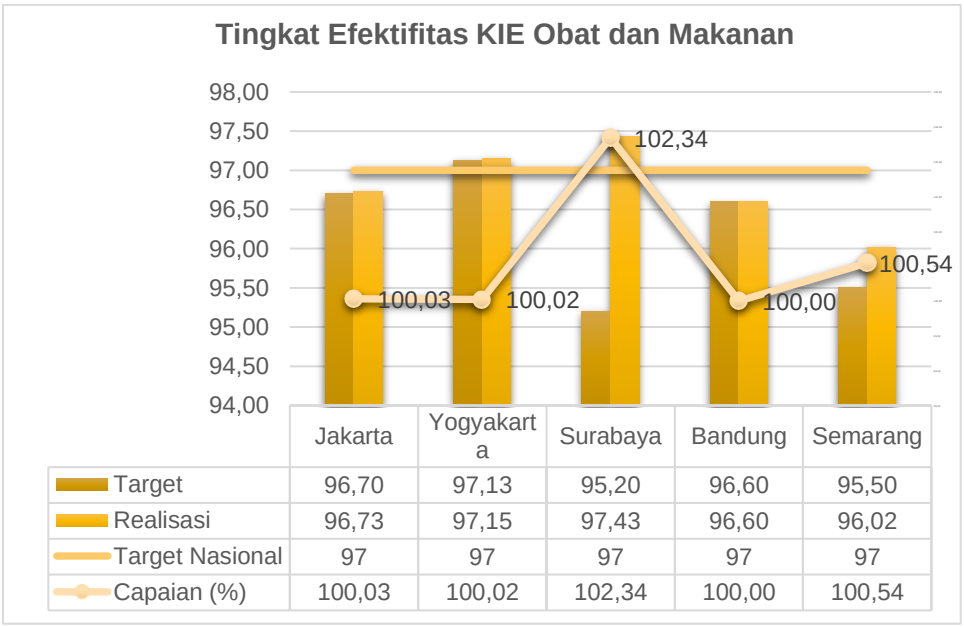


	2020	2021	2022	2023	2024
Target	89,21	93	94,4	95,8	96,7
Realisasi	93,02	93,83	95,06	95,86	96,73
Capaian (%)	104,27	100,89	100,70	100,06	100,03

Gambar 2. Indikator pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 tertinggi diperoleh oleh BBPOM di Surabaya sebesar 97,43 kemudian diikuti oleh BBPOM di Yogyakarta sebesar 97,15; BBPOM di Jakarta sebesar 96,73; BBPOM di Bandung sebesar 96,60; dan BBPOM di Semarang sebesar 96,02. Jika dibandingkan dengan target nasional, hanya BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Surabaya yang melampaui. Capaian indeks tahun 2024 semua UPT telah melampaui target masing-masing**.**



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	96,70	97,13	95,20	96,60	95,50
Realisasi	96,73	97,15	97,43	96,60	96,02
Target Nasional	97	97	97	97	97
Capaian (%)	100,03	100,02	102,34	100,00	100,54

Gambar 3. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jakarta



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Adanya implementasi inovasi Jak Konek, yaitu strategi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) digital melibatkan teknologi, edukasi dan kolaborasi yang terintegrasi dengan seluruh platform digital yang telah ada baik internal maupun terhubung dengan eksternal secara online dan offline/elektronik mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta serta swasta/pelaku usaha seperti asosiasi, komunitas dan akademisi (https://jakkonek.bbpomjakarta.id/).
b. Terselenggaranya kegiatan KIE Obat dan Makanan melalui kegiatan Pameran Jakarta Fair tahun 2024 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Obat dan Makanan melalui stan BBPOM di Jakarta yang menyediakan berbagai informasi berupa media televisi dan layar sentuh interaktif berisi iklan layanan informasi Obat dan Makanan, pajangan contoh produk Obat dan Makanan berizin edar BPOM, leaflet-leaflet informasi, brosur pelayanan publik, e-book sertifikasi Obat dan Makanan.
c. Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.
d. Publikasi informasi Obat dan Makanan terkait Cek KLIK, Kata BPOM, dan Jakkonek melalui media luar ruang (Videotron) yang ditayang di tempat-tempat publik dan strategis, media cetak, dan media daring untuk memperluas publikasi informasi Obat dan Makanan kepada masyarakat.

E. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan



anggaran dalam pencapaian target tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,70	96,73	100,03%	4.389.056.900	4.369.646.177	99,56%	1,00	0,00	100%	Efisien

Tabel 2. Analisis Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Target Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,00 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran "Efisien". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung sarana penyebaran informasi dan KIE Obat dan Makanan yang optimal, efisiensi penggunaan anggaran dengan cara mengoptimalkan strategi digitalisasi KIE melalui inovasi Jak Konek serta sumber daya manusia yang memadai pada fungsi komunikasi dan informasi Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**.**

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 ini antara lain:

a. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan.
b. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dan media digital lainnya dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, augmented reality (AR) dan reels melalui implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter) serta Kosidah Jakarta (Kilas Informasi Berfaedah BBPOM di Jakarta) yang berisi tips-tips praktis Obat dan Makanan.



c. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui layanan ULPK, media sosial, SMS Blast.
d. Adanya upaya penganekaragaman materi dan target KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial yang dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan pemahaman dan minat akan informasi yang telah disosialisasikan.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk menyempurnakan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilakukan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

a. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media digital dalam pemberian informasi dan KIE Obat dan Makanan serta implementasi inovasi Jak Konek.
b. Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.
c. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait pengembangan kehumasan, publikasi informasi melalui media informasi kepada masyarakat dengan menciptakan konten yang relevan, bermanfaat, mudah dipahami, dan menarik minat Masyarakat

19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Balai Besar POM di Jakarta

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.



Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Adapun kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; dan
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS aman seperti dijelaskan di atas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober-Desember



			(TW 4)
Total Skor		100%	

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115	116	100,87	Sangat Baik

Tabel 3. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sampai dengan tahun 2024 adalah 116 sekolah. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 115 sekolah, diperoleh capaian sebesar 100,87% dengan kategori tercapai/ melampaui. Jumlah realisasi sekolah intervensi ini merupakan akumulasi sekolah intervensi PJAS aman dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan intervensi kepada 26 sekolah.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Target jumlah Sekolah dengan PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 adalah sebanyak 115 sekolah. Pada tahun 2024 total capaian sekolah intervensi PJAS ama adalah 116 sekolah dengan rincian 12 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2020, kemudian bertambah 28 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 40 sekolah pada tahun 2021, bertambah sebanyak 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi 65 sekolah pada tahun 2022, bertambah 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi 88 sekolah pada tahun 2023, dan bertambah 26 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi 116 sekolah pada periode akhir RPJMN 2020-2024.





	2020	2021	2022	2023	2024
Target	16	40	65	88	115
Realisasi	12	40	65	88	116,00
Capaian (%)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,87

Gambar 4. Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	115,00	109,00	138	138,00	153,00
Realisasi	116,00	109,00	138	138,00	153,00
Target Nasional	3400	3400	3400	3400	3400
Capaian (%)	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 5. Realisasi, Target, Capaian Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman BBPOM di Jakarta

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang secara berturut-turut sebanyak 116 sekolah, 109 sekolah, 138 sekolah, 138 sekolah, dan 153 sekolah. Capaian BBPOM di Jakarta jika dibandingkan dengan keempat UPT lainnya memiliki nilai terbesar yaitu 100,87% karena pada tahun 2024 telah dilakukan intervensi

kepada 26 sekolah dengan target 25 sekolah. Program intervensi sekolah dengan PJAS aman di 34 provinsi memiliki target jumlah sekolah hingga tahun 2-24 secara nasional sebanyak 3400 sekolah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja program intervensi PJAS pada tahun 2024 ini tidak lepas dari adanya kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan OPD di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat (dalam hal ini Sudindik dan Sudinkes) serta Kementerian Agama sehingga terbentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan tahapan intervensi program PJAS aman pada sekolah dan madrasah intervensi. Dengan adanya komitmen bersama ini, maka pelaksanaan tahapan intervensi berjalan sesuai dengan pedoman dan timeline yang telah ditetapkan. Terlebih, adanya dorongan, semangat, dan antusiasme pelaksanaan bersama dalam mewujudkan pangan jajanan anak sekolah yang aman, capaian jumlah sekolah intervensi tahun 2024 telah melebihi target.

E. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115,00	116,00	100,87%	969.243.000	951.165.840	98,13%	1,03	0,03	100%	Efisien

Tabel 4. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,03 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa dengan sumber daya anggaran yang telah disediakan digunakan secara efisien guna memperoleh output kegiatan yang optimal yaitu dengan cara memanfaatkan



sistem informasi digital dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sebagai mitigasi risiko pencapaian kinerja di periode mendatang, telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi melalui kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Pemerintah, Suku Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama untuk menjaring komitmen keberlanjutan pelaksanaan program. Selain itu peningkatan pelibatan kader keamanan pangan sekolah dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan melalui pembuatan konten media sosial mampu meningkatkan peran kader keamanan pangan dalam pelaksanaan praktik dan kampanye keamanan pangan kepada masyarakat, khususnya terkait praktik keamanan pangan dan Cek KLIK di lingkungan sekolah.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai rekomendasi peningkatan kinerja pelaksanaan program intervensi PJAS aman pada periode selanjutnya antara lain peningkatan sinergi dengan lintas sektor melalui audiensi dan advokasi terkait replikasi program sebagai bentuk keberlanjutan dan integrasi program untuk mewujudkan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

20. Jumlah Desa Pangan Aman Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,



dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria sebagai berikut:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa; dan
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2023 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 28 kelurahan yang meliputi 7 kelurahan intervensi baru dan 21 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020-2022.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah desa/kelurahan baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, *rapid test,* dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	Mei-Agustus
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Juni-Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-Oktober
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Juni-Oktober - Post Intervensi: Oktober-November
7	Monitoring dan Evaluasi ● Survei post intervensi untuk kader dan komunitas ● Pertemuan lintas sektor	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember



No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
9	Pengawalan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
Total Skor		100%	

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 5. Realisasi Desa Pangan Aman Di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Jakarta Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah desa pangan aman	36	36	100,00	Baik

Realisasi Jumlah desa/ kelurahan pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sampai dengan tahun 2024 adalah 36 kelurahan. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 36 kelurahan, diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori tercapai/ melampaui. Jumlah realisasi kelurahan intervensi ini merupakan akumulasi kelurahan pangan aman dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan intervensi kepada 8 kelurahan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Target jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 adalah sebanyak 36 kelurahan. Pada tahun 2020, capaian Desa Pangan Aman adalah sebanyak 5 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah Desa pada tahun 2021 sebanyak 9 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 14 desa/kelurahan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi Desa Pangan Aman terhadap 7 desa/kelurahan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga total pada 2022 ialah 21 kelurahan. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 7 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga total kelurahan intervensi adalah 28. Pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 8 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total kelurahan intervensi 2020-2024



adalah 36 kelurahan. Dengan realisasi ini, diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00%.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4	14	21	28	36
Realisasi	5	14	21	28	36,00
Capaian (%)	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 6. Realisasi Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	36,00	36,00	45	45,00	46,00
Realisasi	36,00	36,00	45	45,00	46,00
Target Nasional	1105	1105	1105	1105	1105
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 7. Realisasi, Target dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Jakarta

Realisasi jumlah jumlah desa pangan aman oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang tahun 2024 secara berturut-turut adalah 36, 36, 45, 45, dan 46 desa/ kelurahan. Realisasi jumlah desa intervensi sudah sesuai dengan



target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi desa pangan aman di 34 provinsi memiliki target jumlah desa/kelurahan tahun 2024 secara nasional sebanyak 1105**.**

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan capaian program intervensi Desa/ Kelurahan Pangan Aman tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah daerah, Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan serta OPD terkait dalam hal ini Sudinkes melalui puskesmas, Sudin PPKUKM, Sudin PPAPP, dan Sudin KPKP. Dukungan yang diberikan antara lain adanya integrasi program keamanan pangan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan seperti kegiatan posyandu, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pertemuan PKK, program pendampingan Jakpreneur bagi pelaku usaha pangan, pelaksanaan PMT di posyandu. Keaktifan Tim dan Kader keamanan pangan kelurahan dalam pelaksanaan fasilitasi kepada komunitas serta dalam menyusun rencana aksi keamanan pangan menjadi faktor penentu pelaksanaan program intervensi Desa/ Kelurahan Pangan aman dapat berjalan sesuai dengan target pelaksanaan.

E. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
20	Jumlah desa pangan aman	36,00	36,00	100,00%	1.355.998.000	1.288.442.187	95,02%	1,05	0,05	100%	Efisien



Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,05 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah efektif dan efisien dalam mencapai output kegiatan**.**

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah adanya koordinasi dan sinergitas dengan kegiatan lintas sektor terutama program yang ada di kelurahan terkait keamanan pangan sehingga pelaksanaan intervensi Desa Pangan Aman dapat diintegrasikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Badan POM RI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersinergi untuk mengatasi permasalahan gizi khususnya untuk pencegahan stunting melalui sinergi antara program Desa Pangan Aman oleh Badan POM dan Program PMT Berbahan Pangan Lokal oleh Kemenkes. Program sinergi ini menjadi nilai tambah pelaksanaan intervensi keamanan pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari program ini dan pada akhirnya tujuan program intervensi keamanan pangan untuk pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian kinerja program Desa/Kelurahan Pangan Aman di periode selanjutnya dapat dilakukan dengan peningkatan sinergi dengan lintas sektor melalui audiensi dan advokasi terkait replikasi program sebagai bentuk keberlanjutan dan integrasi program untuk mewujudkan keamanan pangan di lingkungan kelurahan serta dengan meningkatkan pemantauan dan pengawalan terhadap rencana aksi keamanan pangan.



21. Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan cara ritel pangan yang baik (CRPB) oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya; dan



2. Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 ialah 6 (enam) pasar yaitu 2 (dua) pasar intervensi baru dan 4 (empat) pasar pengawalan intervensi tahun 2020-2023.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Maret (TW 1)
2	Survei Pasar	5%	Januari - Maret (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator	15%	Mei (TW 2)
4	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap I	15%	Mei - Juni (TW 2)
5	Penyuluhan	10%	Juli (TW 2)
6	Kampanye	10%	Juli (TW 2)
7	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 2	15%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Pengawalan	10%	Agustus (TW 3)
Total Skor		100%	

A. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100,00	Baik

Tabel 6. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitasdi Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sampai dengan tahun 2024 adalah 6 pasar. Jika



dibandingkan dengan target sebanyak 6 pasar, diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori tercapai/ melampaui. Jumlah realisasi pasar intervensi ini merupakan akumulasi kelurahan pangan aman dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan intervensi kepada 2 pasar, yaitu Pasar Ganefo dan Pasar Tomang Barat

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

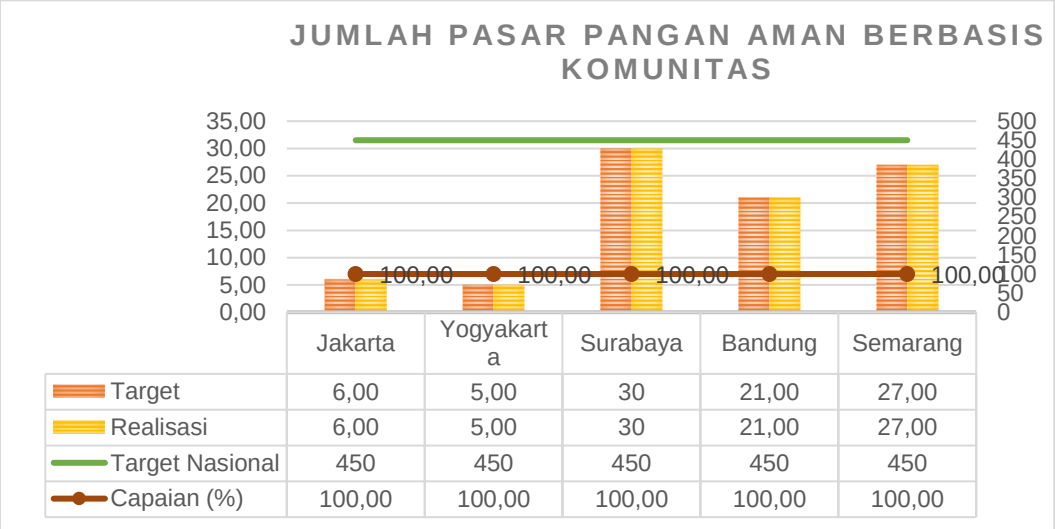
Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2020, capaian Pasar Pangan Aman ialah sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah pasar pada tahun 2021 sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 2 pasar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi pasar terhadap 1 pasar lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga total pada 2022 ialah 3 pasar. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Utara sehingga total pasar intervensi sebanyak 4 pasar. Kemudian pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 2 pasar di di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total intervensi pasar 2020-204 ialah 6 pasar.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1	2	3	4	6
Realisasi	1	2	3	4	6,00
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 8. Realisasi Kegiatan PasarAman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dan tahun sebelumnya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Unit Kerja Lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	6,00	5,00	30	21,00	27,00
Realisasi	6,00	5,00	30	21,00	27,00
Target Nasional	450	450	450	450	450
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 9. Realisasi, Target dan Capaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas di Lingkungan BBPOM di Jakarta dan balai lain

Realisasi jumlah intervensi program pasar pangan berbasis komunitas oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang tahun 2024 secara berturut-turut adalah 6 pasar, 5 pasar, dan 30 pasar, 21 pasar, dan 27 pasar. Realisasi jumlah pasar intervensi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga diperoleh capaian 100,00%. Program intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas di 34 provinsi memiliki target jumlah pasar tahun 2024 secara nasional sebanyak 450 pasar**.**

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain telah terbentuknya sinergi dan komitmen pelaksanaan program bersama Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya, adanya program pengawasan mandiri bagi pasar yang telah diintervensi, dan adanya pemantauan yang dilakukan terhadap pasar yang sedang dan sudah diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga pelaksanaan program intervensi dan pengawalan sesuai dengan pedoman.



E. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6,00	6,00	100,00%	170.684.000	159.112.004	93,22%	1,07	0,07	100%	Efisien

Tabel 7. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,07 dengan capaian tingkat efisiensi 100%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Hal ini menandakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah efektif dan efisien dalam mencapai output kegiatan.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui forum komunikasi yang telah terbentuk sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu serta peran Fasilitator Pasar Aman yang dapat melakukan tugas pengawasan keamanan pangan di pasar sesuai penugasan yang ditetapkan. Selain itu, telah adanya upaya replikasi program intervensi pasar panga naman berbasis komunitas oleh Perumda Pasar Jaya sebagai bentuk keberlanjutan program juga mendorong tercapainya capaian kinerja program yaitu meningkatkan jumlah pasar yang aman dari berbahaya berbasis komunitas di wilayah DKI Jakarta.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai rekomendasi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya yaitu peningkatan keterlibatan aktif fasilitator pasar dalam melaksanakan



pengawasan keamanan pangan secara mandiri dengan melakukan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pengawalan. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan peran asosiasi pedagang pasar (APPSI, IKAPPI) pada pelaksanaan program.

SASARAN STRATEGIS VI

Capaian sasaran strategis VI, yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.
c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

$$\text{Presentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat satu tahun}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah sampel obat yang masuk laboratorium dalam satu tahun}} \times 100\%$$



Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
   a. B01-B11 menggunakan target DIPA,
   b. B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
   a. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
   b. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut
   c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00	Sangat Baik

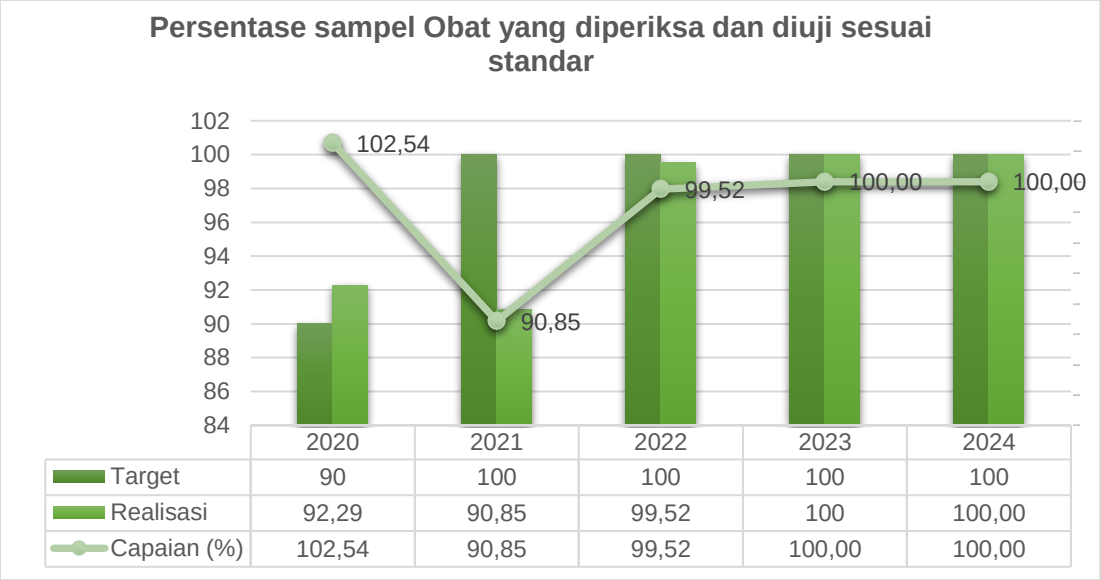
Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta adalah 120% dengan kriteria “Sangat Baik”. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%.

Presentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar menggambarkan pemeriksaan sampel yang dilakukan oleh fungsi Inspeksi BBPOM di Jakarta meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Sedangkan pengujian sesuai standar menggambarkan pengujian sampel di laboratorium yang dilakukan oleh fungsi pengujian BBPOM di Jakarta yang sesuai dengan standar yang



ditetapkan yaitu parameter uji kritis (PUK) dan timeline pengujian yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90	100	100	100	100
Realisasi	92,29	90,85	99,52	100	100,00
Capaian (%)	102,54	90,85	99,52	100,00	100,00

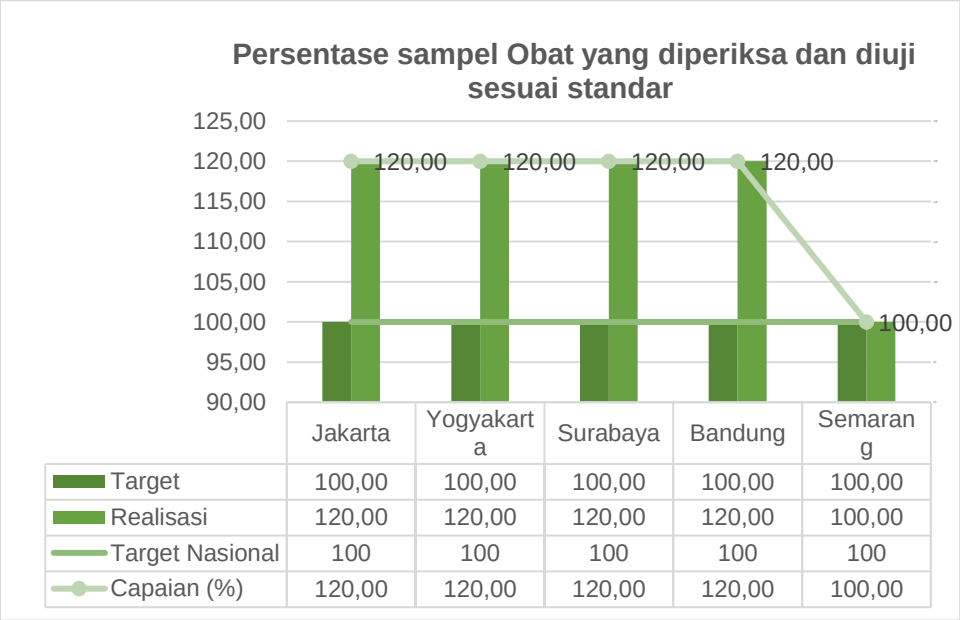
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 Tahun 2023 dan 2024 realisasi dan capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kategori capaian
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	120	Tercapai

Khusus untuk indikator ini, jika realisasi sebesar 100%, maka capaiannya dikonversi menjadi 120%. Presentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 120% dengan kategori “Tercapai”.



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
Target Nasional	100	100	100	100	100
Capaian (%)	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00

Gambar 78. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 untuk semua UPT yang masuk kategori klaster 1 adalah sama dengan capaian 120% dan semuanya memenuhi target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga tahun 2024 sebesar 100% mencapai target yang ditentukan yaitu 100%. Realisasi presentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 100%.

Dari 2248 sampel yang disampling oleh BBPOM Jakarta di wilayah kerjanya telah diperiksa sesuai standar sebanyak 100%. Sampel tersebut dilakukan pemeriksaan meliputi izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pemeriksaan pada saat pengambilan sampel di sarana meliputi izin edar, kadaluarsa dan kondisi kemasan. Sedangkan pemeriksaan penandaan / label dilakukan dengan cara membandingkan label kemasan



sampel dengan label kemasan yang telah disetujui dalam sharing folder dan aplikasi asrot untuk komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Untuk komoditi kosmetik, dilakukan tanpa membandingkan label kemasan yang disetujui, namun dilakukan penilaian terhadap kelengkapan label sesuai ketentuan serta penilaian terhadap klaim yang dicantumkan dalam label kemasan.

Sampel yang masuk ke laboratorium sebanyak 2300 yang berasal dari seluruh anggota Region Semarang sesuai dengan petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Sampel obat dengan kelas terapi Antiinfeksi dan Dermatologi, sampel Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Jakarta tahun 2024:

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00%	1.337.535.000	1.253.997.242	93,75%	1,28	0,28	95%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan nilai IE > 1. Presentase capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran dapat maksimal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh penguatan sistem secara internal untuk menunjang proses bisnis yang dilakukan antara lain dengan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai perencanaan, peningkatan standar kompetensi dan ruang lingkup pengujian



serta melakukan monitoring evaluasi kegiatan sampling dan pengujian secara rutin sehingga IKU Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada BBPOM di Jakarta dapat tercapai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

a. Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
b. Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
c. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metode yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat
d. Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
e. Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.



f. Pemanfaatan alat laboratorium dan sarana prasarana laboratorium secara maksimal.
g. Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja laboratorium BBPOM di Jakarta di tahun mendatang, perlu dilakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan sampel. Audit internal yang rutin serta evaluasi prosedur operasional juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perbaikan berkelanjutan. Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indicator. Dalam laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

23. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.

a. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.



b. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

c. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
   a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
   b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
   a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA)
   b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

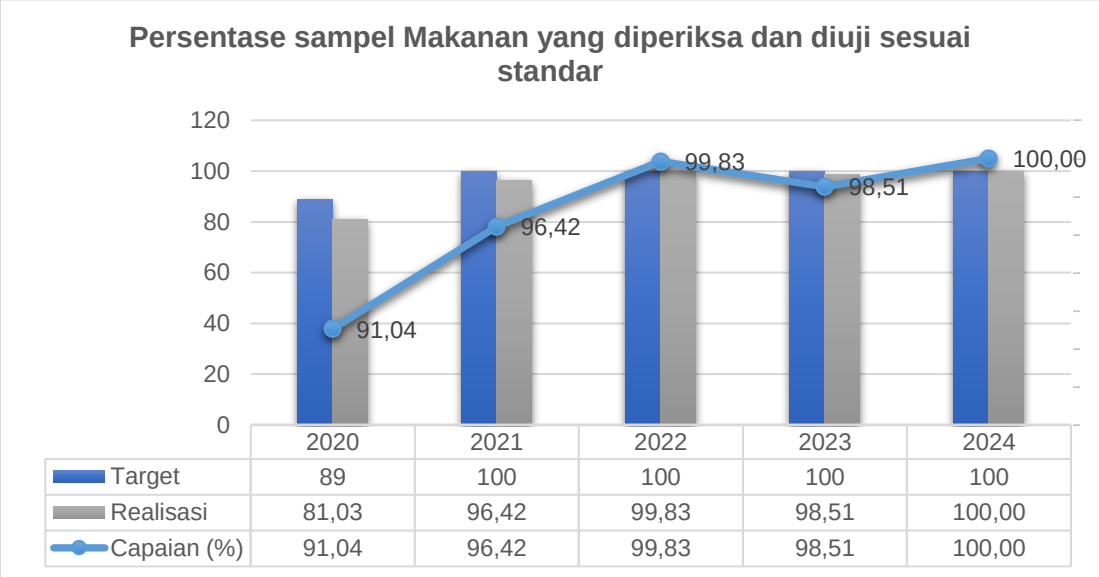
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120,00	Sangat Baik

Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM Jakarta adalah 120% dengan kriteria “Sangat Baik”. Capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan Badan POM yaitu 100%. Presentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar menggambarkan



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	89	100	100	100	100
Realisasi	81,03	96,42	99,83	98,51	100,00
Capaian (%)	91,04	96,42	99,83	98,51	100,00

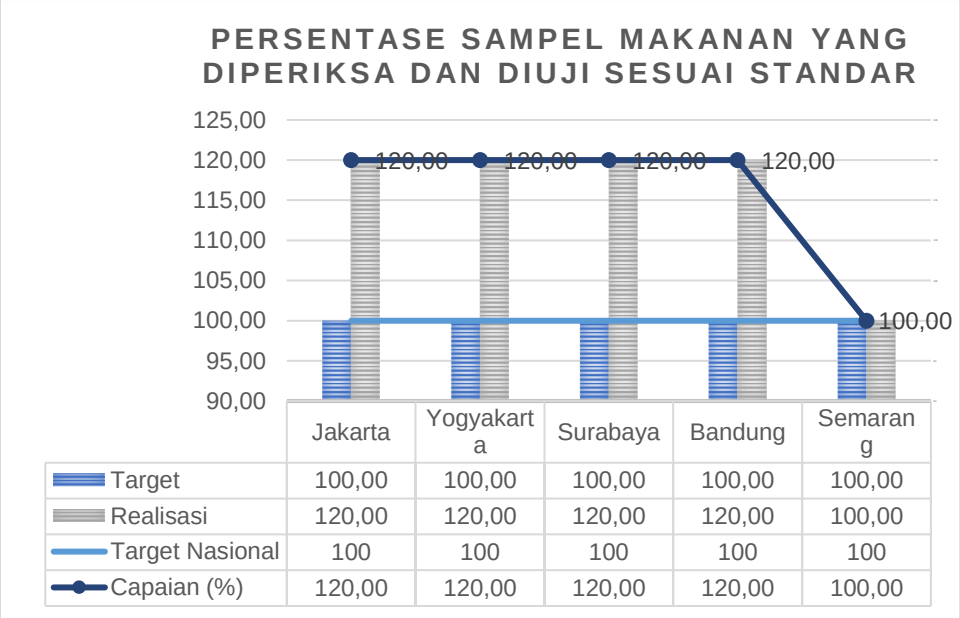
Capaian pada tahun 2020 sebesar 91,04% (akan tercapai), tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 96,42% (akan tercapai) dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 99,83% (akan tercapai). Peningkatan persentase capaian menunjukkan sampel yang sesuai standar semakin bertambah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 98,51% (akan tercapai). Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 120% dengan kriteria “sangat baik”.

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 120% sudah melebihi target jangka menengah 2024 yaitu 100%. Dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 120% dengan kriteria sangat baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Dari gambar dibawah ini diketahui bahwa realisasi tahun 2024 untuk Balai Besar POM Jakarta melebihi target tahunan dan target nasional dengan capaian 120% “Sangat Baik”. Begitu juga Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM Surabaya, Balai Besar POM Bandung dan Balai Besar POM Semarang mempunyai realisasi lebih tinggi dari target tahunan dan target nasional sehingga capaiannya 120% dengan kriteria “Sangat Baik”.





	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
Target Nasional	100	100	100	100	100
Capaian (%)	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga tahun 2024 sebesar 120% melebihi target yang ditentukan yaitu 100%. Dari 1061 sampel yang diperiksa sesuai standar, sebanyak 1221 sampel yang telah diuji sesuai standar. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Jakarta berbeda dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium, hal ini karena diterapkannya sistem regionalisasi laboratorium yang memungkinkan laboratorium mengirimkan sampel dari dan ke UPT lain sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan regionalisasi laboratorium

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024:



No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00 %	1.087.030.300	1.008.327.936	92,76%	1,29	0,29	95%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,29 dengan capaian tingkat efisiensi 95%, sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Tidak Efisien”. Hal ini menunjukkan sasaran strategis dalam peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing2 wilayah kerja UPT dapat ditingkatkan.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase makanan yang diuji sesuai standar dipengaruhi oleh kompetensi personal yang melakukan pengujian, validitas metode pengujian, kondisi peralatan yang digunakan, ketersediaan kebutuhan pengujian dan manajemen laboratorium.

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

a. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.
b. Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian.
c. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metode yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis,



mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat.

d. Perencanaan kebutuhan pengujian (reagen, baku pembanding, test kit dan lain-lain) harus dilakukan secara lebih tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Segala Upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta berupa kegiatan pengawasan, penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia belum efektif untuk memenuhi target indikator kinerja persentase pangan yang memenuhi syarat di tahun ini. Harapannya hal ini dapat terus ditingkatkan di tahun selanjutnya. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dan pembinaan kepada pelaku usaha pangan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap standar yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, rekomendasi perbaikan sistem dan usulan program kegiatan disusun dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta di masa mendatang.



SASARAN STRATEGIS VII

Capaian sasaran strategis VII, yaitu meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dapat dilihat sesuai dengan indikator sebagai berikut:

24. Tingkat persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

A. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	% CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	65	68.81	105.86	Sangat Baik

Tabel Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

{(15%xA) + (40%xB) + (30%xC) + (15%xD)} x (jumlah capaian / target perkara)

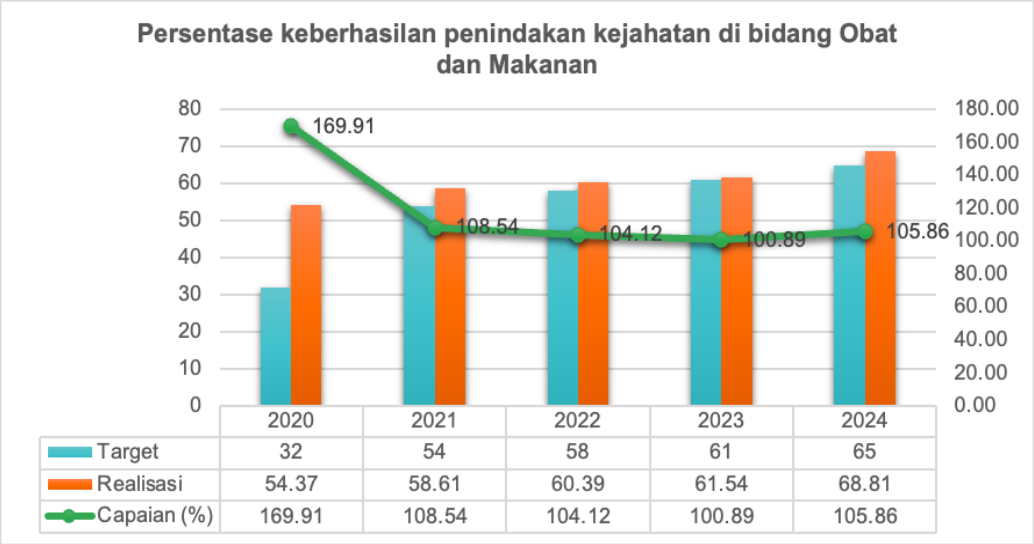
Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n & perkara *carry over*.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2024 adalah **Sangat Baik** dengan capaian sebesar 105,86%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan dengan kriteria **sangat baik**.



B. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022

Target indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” pada tahun 2024 ini adalah 65 dengan realisasi sebesar 68,81 atau 105,86% yang masuk dalam kriteria “**sangat baik**”. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja selama periode Renstra tahun 2020 hingga 2024 tercantum dalam tabel berikut:

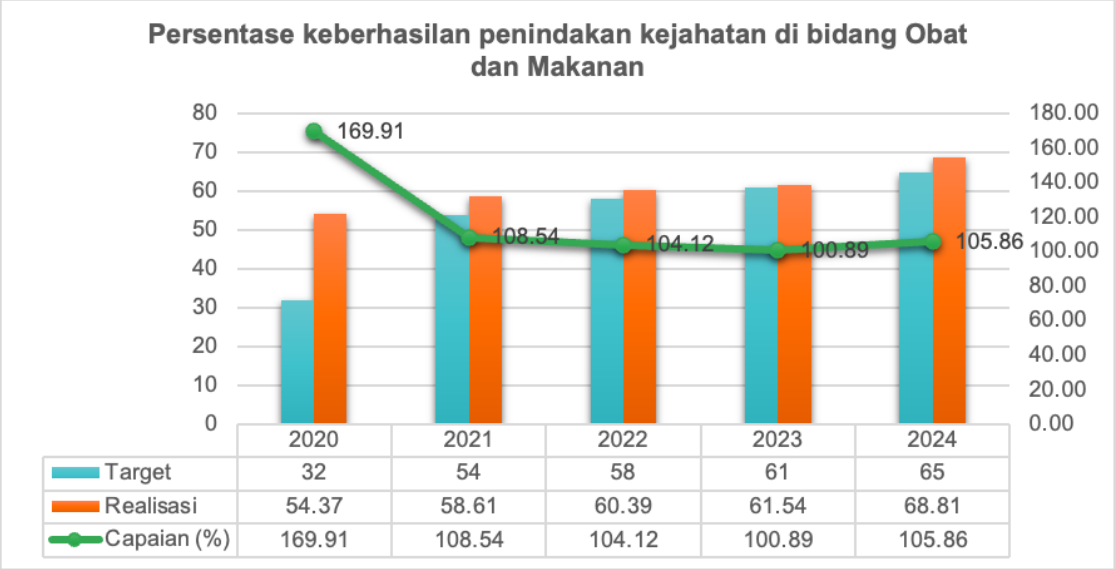


	2020	2021	2022	2023	2024
Target	32	54	58	61	65
Realisasi	54.37	58.61	60.39	61.54	68.81
Capaian (%)	169.91	108.54	104.12	100.89	105.86

Jika dianalisis, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding dengan tahun 2023.

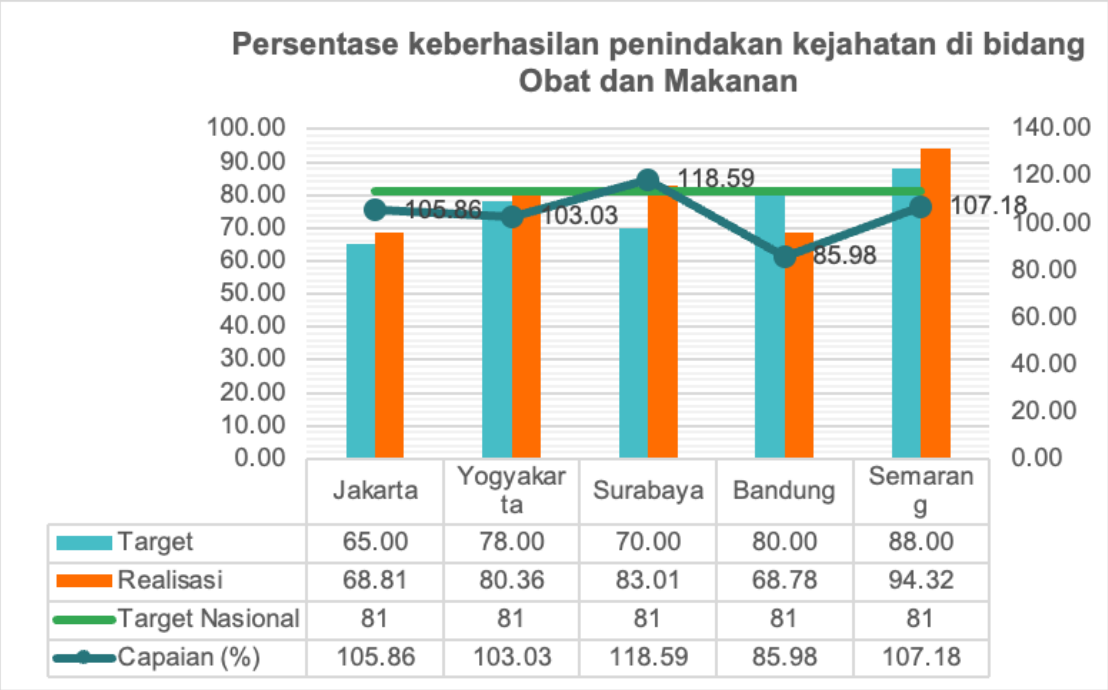
Pencapaian kinerja dari tim kerja Penindakan ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan penanganan perkara selama tahun 2020 hingga 2024.





C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Kinerja 5 (lima) UPT ini disajikan pada grafik di bawah ini. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa hanya capaian Balai Besar POM di Bandung yang masuk dalam kategori “cukup” karena capaiannya kurang dari 100%, sementara capaian Balai Besar POM di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya masuk dalam kategori “sangat baik” yakni lebih dari 100%. Balai Besar POM di Surabaya meraih capaian kinerja tertinggi tahun 2024 dengan 118.59%.



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	65.00	78.00	70.00	80.00	88.00
Realisasi	68.81	80.36	83.01	68.78	94.32
Target Nasional	81	81	81	81	81
Capaian (%)	105.86	103.03	118.59	85.98	107.18

Perbandingan realisasi kinerja ini memberikan peluang pada UPT BPOM untuk bisa melakukan *benchmark* baik dalam mengatasi kendala yang dihadapi maupun untuk mitigasi risiko yang dapat menghalangi tercapainya target kinerja yang ditetapkan. Efektivitas penanganan perkara kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja masing-masing merupakan hasil dari kerja sama tim penindakan dan juga lintas sektor terkait atau *Criminal Justice System* (CJS) terkait.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

Kinerja Tim Penindakan BBPOM di Jakarta menunjukkan peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana. Capaian ini merupakan hasil dari kerja tim dan implementasi atas rekomendasi perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya.

Analisa terhadap keberhasilan Tim Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

a. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif



Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni matriks pemantauan penyelesaian perkara. *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring maupun luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

Kinerja Tim Penindakan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan. Target jumlah perkara dapat tercapai apabila tahapan kegiatan tersebut bisa dijalankan dengan optimal. Dengan pemanfaatan sistem monev yang efektif maka Ketua Tim Penindakan dapat memaksimalkan potensi dan kinerja seluruh Tim Penindakan.

Selain itu diadakan juga dialog kinerja setiap periode bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Jakarta sehingga progres penyelesaian perkara dan kegiatan penindakan lainnya dapat dipantau dengan optimal.

b. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat penyelesaian atas beberapa perkara tunggakan yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2024.

Tindak pidana yang ditangani PPNS BBPOM di Jakarta merupakan ranah spesialis, yakni tindak pidana terkait obat dan makanan. Perlu adanya kesepahaman antara PPNS dengan CJS untuk persamaan persepsi dan tafsir dalam penyelesaian perkara. Pencapaian kinerja



tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penindakan dan penanganan perkara di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

c. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Tim Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada tahun 2024 ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap produksi kosmetik ilegal, obat tradisional mengandung BKO, peredaran pangan olahan impor ilegal, dan juga peredaran obat-obat tertentu secara bebas dilakukan di sarana tanpa kewenangan serta personel tanpa kewenangan dan keahlian.

Kerja sama juga dijalin dengan Bea Cukai Pasar Baru dalam upaya cegah tangkal terhadap masuknya produk obat dan makanan ilegal dari luar negeri yang disalahgunakan dari tujuan pemakaian pribadi menjadi tujuan komersial.

Selain itu juga dilakukan upaya penggalangan yang melibatkan jajaran penyidik di wilayah kerja Polda Metro Jaya, mulai dari Polsek hingga Polres. Penggalangan juga dilakukan terhadap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, Satpol PP, serta satuan kerja lainnya. Tujuan kegiatan penggalangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

d. Pelaksanaan kegiatan operasi terkait penindakan secara optimal

Sepanjang tahun 2024 ini, kegiatan intelijen dan siber dilakukan lebih intensif. Kegiatan pelaporan dan analisis atas hasil verifikasi informasi yang diperoleh dilakukan sesuai rencana. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut menjadi rumusan untuk penyusunan rencana operasi penindakan. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan kinerja.



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kelompok Substansi Penindakan masuk ke dalam **kategori efektif.** Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Penggunaan anggaran untuk indikator persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di Jakarta mencapai 90,73%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.272.352.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.154.342.883. Perhitungan TE menunjukkan angka 0.17 yang tergolong kategori **efisien**.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala,
b. Revisi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai *timeline* untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan secara cermat dan tepat
c. Meskipun pemanfaatan sumber daya yang mendukung kinerja penindakan tahun 2024 dinyatakan efektif dan efisien, namun perlu dilakukan evaluasi untuk capaian yang lebih optimal di tahun mendatang.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Tim Penindakan ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan. Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis dan pemetaan rawan kasus hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal.

Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, rekomendasi dari BPOM, pengaduan masyarakat, dan juga akses informasi. Setelah kebenaran informasi dapat diverifikasi dan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Tindak lanjut yang berupa kegiatan penyidikan berkontribusi



terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi dari 4 (empat) fungsi ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tim Penindakan.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Capaian yang maksimal juga didukung oleh semakin efektifnya kerja sama dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut dari Kejati DKI Jakarta. Program yang dijalankan adalah ekspose perkara antara PPNS dengan Jaksa yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut sehingga berkas perkara yang ditangani PPNS bisa segera dinyatakan lengkap dan bisa dilimpahkan.

Tim Penindakan juga masih secara aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan cegah tangkal yakni verifikasi barang kiriman untuk penggunaan pribadi yang masuk melalui jasa kiriman pos di Kantor Pos Besar Pasar Baru. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa upaya pencegahan peredaran produk yang terkena Larangan Pembatasan BPOM yang disalahgunakan untuk kegiatan komersil. Upaya pencegahan ini melibatkan UPT BPOM di wilayah lain dengan penyampaian informasi untuk ditindaklanjuti.

G. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tim Penindakan BBPOM di Jakarta di tahun mendatang, berikut dirumuskan upaya peningkatan kinerja:

1. Peningkatan kompetensi petugas

   Tren kejahatan obat dan makanan semakin berkembang baik modus maupun teknik kejahatan yang dilakukan. Untuk meningkatkan intensitas dan kualitas penanganan kejahatan obat dan makanan maka diperlukan peningkatan kompetensi petugas. Perlu dilakukan pemetaan atas kebutuhan kompetensi petugas sehingga dapat tepat sasaran dan efektif. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan dengan *sharing knowledge* dengan sesama petugas, baik di lingkungan BPOM maupun dengan K/L



lain, pelatihan baik teori dan teknis, dan pendidikan baik dengan gelar maupun non gelar.

Intensifikasi patroli siber obat dan makanan

2. Peningkatan transaksi jual beli obat dan makanan ilegal secara daring dapat menimbulkan resiko peningkatan peredaran obat dan makanan ilegal pula. Patroli siber yang dilakukan petugas bertujuan untuk mencegah kejahatan, melakukan pelacakan, dan pengumpulan informasi untuk ditindaklanjuti sebagai kegiatan intelijen. Dengan upaya intensifikasi patroli siber maka diharapkan kinerja penindakan akan lebih efektif.
3. Penggalangan *stakeholder*

   Upaya cegah tangkal menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya kejahatan obat dan makanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penggalangan terhadap berbagai kalangan. Lintas sektor yang dapat dijadikan sasaran penggalangan antara lain K/L yang terkait kegiatan pengawasan BBPOM di Jakarta, pelaku usaha termasuk pelaku usaha daring, komunitas, dan organisasi profesi. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BBPOM di Jakarta dapat diatasi dengan pelaksanaan penggalangan secara intensif.
4. Koordinasi yang efektif dan efisien

   Dalam penyelesaian penanganan berkas perkara, koordinasi dengan CJS menjadi salah satu kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pelaksanaan koordinasi yang efektif dan efisien juga menjadi salah satu upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



SASARAN STRATEGIS VIII

Capaian strategis VIII, yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal Indeks reformasi birokrasi Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

25. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Balai Besar POM di Jakarta telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan terus berupaya untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Predikat ini diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Perhitungan Indeks RB didasarkan pada penjumlahan komponen pengungkit dan komponen hasil. Berikut adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	Aspek pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
1	Manajemen Perubahan	8%	3.39%	4%	7.39%



No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	Aspek pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai
2	Penataan Tatalaksana	7%	3.5%	3.5%	7.00%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4.42%	5%	9.42%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	4.84%	4.14%	8.98%
5	Penguatan Pengawasan	15%	5.98%	6.88%	12.86 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	4.79%	5%	9.79%

Nilai Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020.Terdapat penyesuaian target Indeks RB, sesuai dengan Reviu Renstra yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Jakarta	91,41	93,01	101,75	Sangat Baik

Gambar 85. *Grafik Perbandingan realisasi kinerja dengan target*

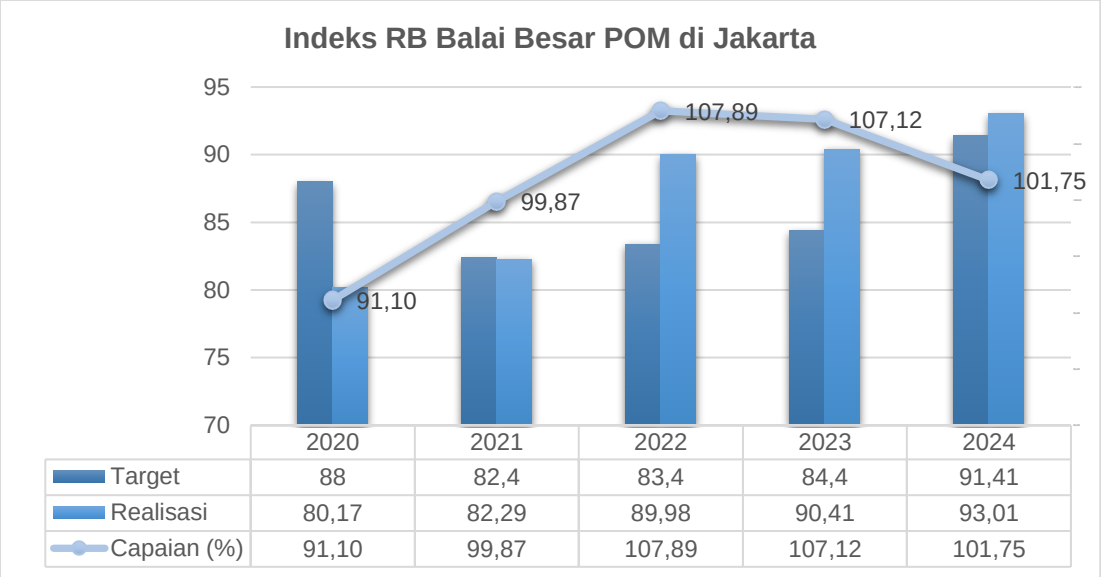
Berdasarkan hasil reviu Lembar kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) oleh Balai Besar POM di Jakarta diperoleh nilai sebesar 93,01.

Hasil ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 91,41.

Capaian kinerja yang diperolah pada indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta adalah 101,75 dengan kriteria Sangat Baik.



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



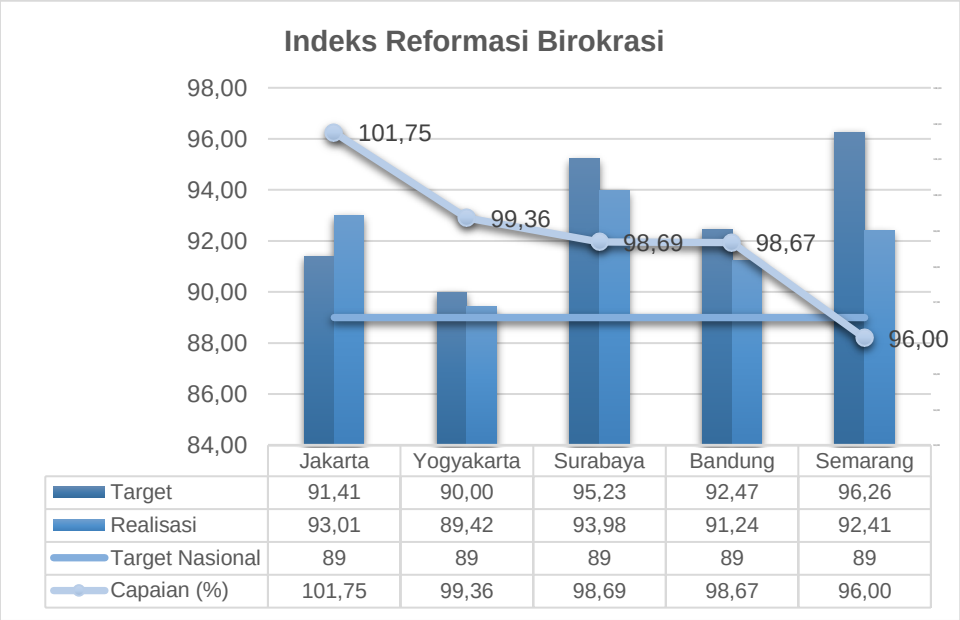
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	88	82,4	83,4	84,4	91,41
Realisasi	80,17	82,29	89,98	90,41	93,01
Capaian (%)	91,10	99,87	107,89	107,12	101,75

Gambar 86. *Grafik Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya*

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Jakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra tidak menunjukkan garis linier (fluktuatif) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja naik, selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian kinerja menurun. Pada capaian tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian masih cukup. Pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 capaian menurun dikarenakan meningkatnya target secara signifikan. Namun nilai realisasi meningkat sebesar 2.6 poin dengan Nilai Akhir pada kriteri sangat baik. Hal ini disebabkan pemenuhan dokumen dan persyaratan pembangunan ZI sebagai data dukung RB telah lebih optimal serta didukung inovasi yang mendukung Zona Integritas serta capaian kinerja.



C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	91,41	90,00	95,23	92,47	96,26
Realisasi	93,01	89,42	93,98	91,24	92,41
Target Nasional	89	89	89	89	89
Capaian (%)	101,75	99,36	98,69	98,67	96,00

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Jakarta merupakan satu satunya unit dalam cluster pembanding yang memiliki capaian dengan kriteria sangat baik. Sedangkan BBPOM di Yogyakarta dengan nilai capaian 99,36%, BBPOM di Bandung dengan nilai capaian 99,67% BBPOM di Surabaya dengan capaian 98,69 dan BBPOM di Semarang belum mencapai target yang ditetapkan.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 sudah melampaui target 100%. Keberhasilan peningkatan kinerja ini disebabkan oleh:

a. Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2020 dan mempertahankan sampai dengan saat ini;
b. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan zona integritas dan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja;
c. Telah memiliki SOP untuk setiap proses bisnis yang dilaksanakan dan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik;



d. Unit kerja telah melakukan upaya penataan sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan pegawai, mutasi internal, dan pemutakhiran informasi kepegawaian secara berkala;
e. Pimpinan unit kerja telah terlibat dalam pengeolaan kinerja dari proses perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja;
f. Upaya penguatan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan diantaranya telah tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada September 2022 serta membangun inovasi SI_AGAKU pada portal Jak Digital untuk mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
g. Inovasi yang dilakukan telah mendorong upaya perbaikan pelayanan publik yang (lebih cepat dan mudah) serta mendekatkan diri kepada masyarakat diantaranya melalui inovasi SIMANTEN (Sistem Mesin Antrean), SABBENI (Sarana Balai Buat Edukasi dan Informasi Obat dan Makanan), dan Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta);

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
25	Indeks RB BBPOM di Jakarta	91,41	93,01	101,75%	6.100.708.950	5.725.162.130	93,84%	1,08	0,08	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran adalah efisien karena persentase capaian anggaran lebih besar dari persentase capaian indikator kinerja sehingga capaian tingkat efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar 100%. Hal ini disebabkan hasil evaluasi pembangunan ZI di BBPOM di Jakarta dengan nilai mencapai target yang diharapkan.



F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Target kinerja Indeks RB yang telah terlampaui dapat tercapai melalui berbagai kegiatan diantaranya:

a. Terselenggaranya rencana aksi Agen Perubahan yang menekankan pada implementasi Core Values ASN dengan komprehensif;
b. Komunikasi internal terkait Reformasi Birokrasi yang disampaikan melalui apel yang dilaksanakan tiap minggu;
c. Berbagai program peningkatan awareness dan Implementasi Zona Integritas Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 diantaranya Workshop Implementasi Core Values ASN Ber-Akhlak pada 14-16 September 2023 dan Komitmen Penguatan Integritas pada 13 Desember 2023 yang melibatkan seluruh pegawai;
d. Implementasi Sistem Mutu secara konsisten baik untuk ISO IEC 17025: 2017, QMS 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2017

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka membangun Zona Integritas:

a. Mengakomodir usulan-usulan dari seluruh anggota dalam pembangunan Zona Integritas sebagai bentuk keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI secara berkala serta mengupayakan seluruh rencana kerja pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana.
c. Merencanakan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai untuk mengurangi gap kompetensi masing-masing pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai secara berkala.
d. Memastikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja telah diimplementasikan dan didokumentasikan serta mengunggah data dukung hanya pada folder yang telah disediakan.
e. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala dan berkelanjutan



f. Memastikan inovasi yang dibangun telah diimplementasikan dan memiliki dampak bagi unit kerja dalam penilaian dan pengendalian risiko
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan secara berkala termasuk rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang dilakukan
h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan public
i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Publik terhadap daftar informasi publik yang dipublikasi secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan.
j. Memastikan keterlibatan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja.
k. Menjadikan seluruh capaian kinerja sebagai kriteria dalam pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.
l. Menetapkan hasil penilaian dari pengguna layanan sebagai kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pemberi layanan.
m. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama dan administrasi pemerintah yang memuat kendala implementasi dan tindak lanjutnya.
n. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan inovasi pelayanan publik termasuk dampak pemanfaatan inovasi
o. Menyusun dan menyampaikan laporan implementasi pemanfaatan inovasi yang dimiliki secara mutakhir.
p. Melaksanakan continuousimprovement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima



26. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
    a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%); dan
    b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
    a. Pemenuhan pengukuran (5%);
    b. Kualitas pengukuran (12,5%); dan
    c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
    a. Pemenuhan pelaporan (3%);
    b. Kualitas pelaporan (7,5%); dan
    c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
    a. Pemenuhan evaluasi (2%);
    b. Kualitas evaluasi (5%); dan
    c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
    a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
    b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%); dan
    c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%).



Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	9,84
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	16,20
5.	Capaian Kinerja	20	18,30	16,66
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	82,34	83,02
Predikat			**A**	**A**

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,66	83,02	99,23	Cukup

Pada tahun 2024, nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta berhasil memperoleh kategori nilai A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Namun capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan dan mendapat kategori Cukup dikarenakan turunnya nilai komponen pelaporan kinerja dan capaian kinerja.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tren realisasi Nilai AKIP sejak awal RPJMN pada Tahun 2020 semakin meningkat secara signifikan semula 78.08 pada Tahun 2020 menjadi 83.02 pada Tahun 2024.

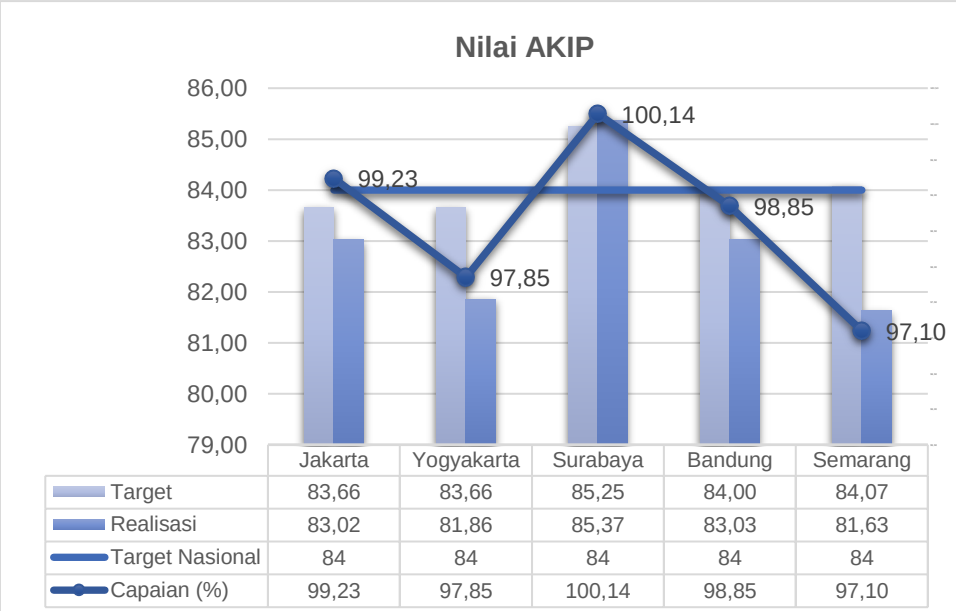




	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81	79,1	80	81	83,66
Realisasi	78,08	79,85	80,34	82,34	83,02
Capaian (%)	96,40	100,95	100,43	101,65	99,23

Hal ini menunjukkan komitmen Balai Besar POM Jakarta untuk selalu meningkatkan kapabilitas AKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja untuk mendukung Indikator AKIP Badan POM pada sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama Badan POM yang efektif". Perbandingan capaian tahun 2020-2024 menunjukkan hasil adanya sedikit penurunan pada Tahun 2024 dengan ditetapkannya target yang cukup tinggi sebesar 83.66. Peningkatan target pada Tahun 2024 terjadi pada hampir semua Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan baseline capaian pada Tahun 2023.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	83,66	83,66	85,25	84,00	84,07
Realisasi	83,02	81,86	85,37	83,03	81,63
Target Nasional	84	84	84	84	84
Capaian (%)	99,23	97,85	100,14	98,85	97,10



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa hanya BBPOM di Surabaya yang berhasil melampaui target nasional dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Sedangkan BBPOM di Jakarta dan Balai pembanding lain belum mencapai target nasional dan target unit kerja masing masing. Hal positif yang dapat diambil adalah seluruh Balai pembanding telah berhasil memperoleh kategori nilai A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat peningkatan nilai komponen capaian kinerja yang cukup signifikan pada Tahun 2024 sebesar 0,68 poin. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, hal-hal yang berhasil meningkatkan nilai AKIP, yaitu:

1. Perencanaan

Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level dan telah disusun rencana aksi perjanjian kinerja yang dilengkapi perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja serta telah dilakukan reviu renstra dalam rangka upaya perbaikan perencanaan kinerja.

2. Pengukuran

Dalam rangka pengukuran kinerja, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, telah terdapat manual IKU untuk mengukur target pada PK dan RAPK setiap bulan dan triwulan dan telah menyusun SOP mikro pelaporan data kinerja

3. Pelaporan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta telah disusun secara triwulanan dan tahunan dengan menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, target jangka menengah, dan capaian kinerja Satuan kerja yang setara.

4. Evaluasi internal



Balai Besar POM di Jakarta telah melaksanakan evaluasi internal atas kinerja setiap triwulanan dengan menyajikan data realisasi dan capaian kinerja serta rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja.

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi 50% dari capaian kinerja tahun 2023

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,66	83,02	99,23%	7.858.495.050	7.115.941.585	90,55%	1,10	0,10	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, nilai tingkat efisiensi (TE) diperoleh sebesar 0,10 dengan capaian tingkat efisiensi 100% sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran “Efisien”. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Meningkatnya Nilai AKIP dihasilkan oleh kesinambungan program dan kegiatan yang menunjang diantaranya:

1. Dialog kinerja yang dilaksanakan secara aktif antara Pimpinan Unit, Ketua Tim dan Anggota Tim
2. Rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan berkala setiap bulan untuk membahas capaian, kendala beserta tindak lanjut perbaikannya
3. Komunikasi intensif terkait pengelolaan kinerja melalui grup diskusi
4. Peningkatan kompetensi personal dilakukan secara kontinu
5. Penggunaan matriks data online untuk memudahkan pengisian dan pemantauan data kinerja



G. Upaya Peningkatan Kinerja

Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja nilai AKIP pada tahun 2024 terutama pada komponen pelaporan dan capaian kinerja Hal hal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi laporan kinerja tepat waktu pada aplikasi E SAKIP Reviu esr.menpan.go.id
2. Melakukan usulan reviu target berdasarkan baseline capaian untuk menetapkan target yang SMART
3. Menyempurnakan SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja dengan mekanisme perubahan data kinerja
4. Memastikan kesesuaian data antara data sumber dan laporan terkait (Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Interim, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Tahunan)
5. Memastikan analisis kertas kerja penetapan target disusun dengan lebih cermat
6. Memastikan setiap unsur yang dipersyaratkan pada laporan kinerja telah dipenuhi (termasuk analisis efisiensi sumber daya dan matriks tindak lanjut rekomendasi)
7. Memastikan perubahan berupa penambahan Indikator Kinerja dijelaskan secara detail pada Laporan Kinerja

27. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Kegiatan pengawasan kearsipan dilakukan berdasarkan Peraturan Arsip Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa pengawasan kearsipan dilakukan dalam rangka penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Fokus dan sasaran pengawasan kearsipan tahun 2021 – 2024 diarahkan pada implementasi kebijakan untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip pada setiap entitas dengan indikator keberhasilan dapat menyediakan arsip dengan kualitas



autentik, utuh dan terpercaya. Pelaksanaan pengawasan kearsipan oleh Unit Kearsipan I Badan POM di Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dilaksanakan secara luring (*onsite*) dan berbeda dari tahun tahun sebelumnya 2019 hingga 2023 yang dilaksanakan secara daring. Instrumen yang digunakan dalam pengawasan kearsipan berdasarkan pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan dengan menitikberatkan pada program alih media arsip dinamis.

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan dimulai dari penciptaan arsip, pemberkasan dan penataan arsip aktif, program alih media, program arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, pengolahan arsip inaktif, layanan dan akses arsip dinamis dan penyusutan arsip;
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana.

Perbandingan target dan realisasi nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 tergambar dalam tabel di bawah ini

Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024 yaitu 95,49 melebihi target yang ditetapkan yaitu 93,42. Capaian pada tahun 2024 adalah 102,22 dengan kategori sangat baik. Pengawasan kearsipan internal pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dilaksanakan terhadap 1 (satu) Unit Kearsipan dan 5 (lima) Unit pengolah yaitu ketatausahaan, penindakan, pengujian, pemeriksaan, dan infokom.

Kategori hasil penilaian kearsipan terhadap objek pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Nilai 90 s.d 100 dengan kategori AA (sangat Memuaskan)
b. Nilai 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan)
c. Nilai 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik)
d. Nilai 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik)
e. Nilai 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup)
f. Nilai 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang)



g. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

A. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target n kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	93,42	95,49	102,22	Sangat Baik

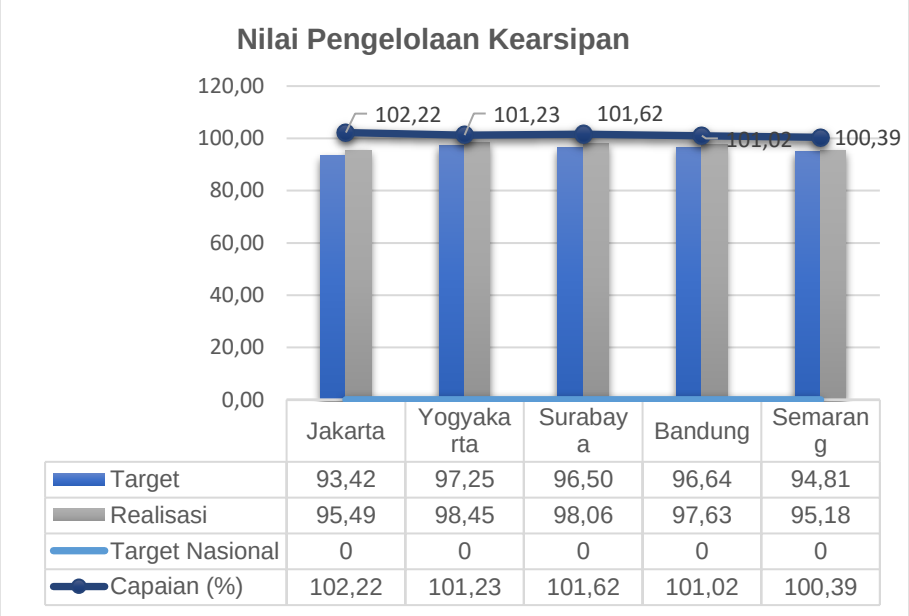
Pengawasan Kearsipan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Organisasi, sedangkan pada tahun 2023 nilai pengelolaan kearsipan termasuk dalam sasaran strategis tambahan berupa direktif penugasan. Sehingga untuk nilai hasil pengelolaan kearsipan sebagai capaian indikator kinerja utama baru tersedia di tahun 2024 sesuai dengan Gambaran grafik di bawah ini:

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 sebesar 95,49 dengan capaian 102,22 kategori Baik. Nilai tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dikarenakan nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator kinerja utama baru di tahun 2024.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	93,42	97,25	96,50	96,64	94,81
Realisasi	95,49	98,45	98,06	97,63	95,18
Target Nasional	0	0	0	0	0
Capaian (%)	102,22	101,23	101,62	101,02	100,39

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi nilain pengelolaan kearsipan tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta menempati urutan ke-4 dengan nilai sebesar 95,49 setelah Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung. Akan tetapi persentase capaian yang diperoleh Balai Besar POM di Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan keempat Balai Besar POM pembanding lainnya yaitu sebesar 102,22%. Hal ini dikarenakan perbedaan target yang ditetapkan pada masing-masing Balai Besar POM.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, Nilai Pengelolaan Kearsipan belum menjadi sasaran strategis indikator kinerja utama namun telah ditetapkan sebagai direktif penugasan pada Kepala Balai Besar POM di Jakarta. Realisasi pada tahun 2023 adalah 93,42 dari target 93,2, dan capaian yang diperoleh pada tahun 2023 sebesar 100,23. Pada tahun 2024, nilai pengelolaan kearsipan merupakan Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal. Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan di tahun 2024



telah melebihi dari target, hal ini didukung oleh beberapa faktor pemenuhan diantaranya:

a. Pemantauan dan Monitoring pada Aspek Penciptaan Arsip dimana pada seluruh unit pengolah telah optimal dalam mengimplementasikan aplikasi persuratan srikandi, hanya Sebagian kecil naskah dinas belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas. Sedangkan pada Unit Kearsipan, telah sepenuhnya mengimplementasikan aplikasi persuratan Srikandi terhadap penanganan surat masuk dan surat keluar.
b. Pemantauan dan Monitoring pada Aspek Penggunaan, dimana Unit Kearsipan telah mengimplementasikan ketentuan pengelolaan arsip menjadi informasi arsip sesuai klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang berlaku, akan tetapi belum seluruh arsip inaktif dikelola menjadi informasi dengan tersusunnya daftar informasi arsip inaktif.

   Pada unit pengolah, kelima Unit Pengolah telah melaksanakan kegiatan pelayanan arsip sesuai ketentuan, namun belum Menyusun daftar informasi arsip aktif terhadap seluruh arsip yang tercipta. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan monitoring secara berkala kepada setiap pengelola kearsipan di setiap unit pengolah untuk Menyusun daftar informasi arsip aktif pada unit pengolah.
c. Pemantauan dan Monitoring pemenuhan pada Aspek Penyusutan terhadap seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam ketentuan pemidnahan arsip inaktif pada unit pengolah. Upaya yang akan dilakukan yaitu membuat memorandum Kepala Balai kepada pengelola arsip di Unit pengolah untuk teratur dalam melakukan penyusutan arsip dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
d. Pemantauan dan Monitoring pemenuhan pada Aspek Sumber Daya Kearsipan baik SDM maupun sarana dan prasarana terhadap seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Pada aspek SDM, unit pengolah belum memiliki arsiparis yang sesuai dengan beban kerja, sehingga beberapa tugas pengelolaan kearsipan dibebankan pada jabatan fungsional non kearsipan dan atau pegawai pemerintah non PNS. Pengelola kearsipan yang ditunjuk belum memenuhi persyaratan kompetensi lulus Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan yang biasanya pelatihan ini dikhususkan bagi pejabat fungsional kearsipan.



Pada Unit Kearsipan, ditemukan pejabat struktural kearsipan belum seluruhnya mengikuti dan lulus diklat teknis dan arsiparis pada unit kearsipan belum mengikuti pembinaan kearsipan dan seluruh pengelola arsip yang ditunjuk belum mengikuti dan lulus sertifikasi kearsipan. Upaya yang dilakukan yaitu prioritas keikutsertaan pejabat struktural maupun pengelola kearsipan untuk dapat mengikuti pelatihan teknis kearsipan dengan memanfaatkan platform digital pelatihan yang dimiliki BPOM (IDEAS).

e. Pemantauan dan monitoring pemenuhan aspek sarana dan prasarana dimana 3 (tiga) Unit pengolah dari total 5 (lima) unit pengolah telah optimal dalam mengimpelemntasikan ketentuan sarana dan prasarana kearsipan. Masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pemenuhan sarana prasarana yaitu belum seluruh UP menggunakan filling cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip aktif. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah filling cabinet dan akan diupayakan penganggaran pembelian filling cabinet di setiap unit pengolah.

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
27	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	93,42	95,49	102,22%	25.935.450	25.420.814	98,02%	**1,04**	**0,04**	**100%**	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, bahwa tahun 2024 nilai pengelolaan kearsipan telah menunjukkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Akan tetapi tetap perlu upaya untuk peningkatan kinerja dan pemenuhan aspek aspek pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program atau kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja diantaranya adalah dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Digital dengan mengundang narasumber ahli dari Instansi Pembina Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang melibatkan seluruh pengelola kearsipan baik di Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dan Pejabat Sturktural. Dilakukan usulan penyusutan arsip inaktif kepada BPOM untuk



persetujuan penyusutan arsip. Selain itu juga dilakukan alih media terhadap arsip vital tidak hanya di Unit Pengolah Tata usaha tetapi juga diseluruh fungsi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan alih media arsip vital. Penciptaan inovasi SPARTA yang merupakan integrasi arsip aktif dari seluruh Unit Pengolah di BBPOM di Jakarta, dan dapat dikembangkan sebagai aplikasi untuk daftar arsip aktif dan daftar informasi aktif.

Peningkatan kompetensi sumberdaya kearsipan dilakukan dengan mengusulkan keikutsertaan Arsiparis dan calon Arsiparis untuk memgikuti Pendidikan dan pelatihan kearsipan serta kegiatan pembinaan kearsipan. Seluruh program kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perbaikan setiap tahunnya.

G. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan monitoring dan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Pemenuhan pada aspek kearsipan yaitu aspek pencipataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip serta pemenuhan sumber daya kearsipan (SDM dan sarana prasarana)
2. Pengumpulan dokumen data dukung pengawasan kearsipan sesuai timeline yang ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS IX

Capaian sasaran strategis IX, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Jakarta yang Berkinerja Optimal terdiri dari 1 (satu) indikator sebagai berikut:

28. Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

A. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN serta Peraturan Badan Kepegawaian



Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2024, terdapat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	91,5	87,79	95,95	Cukup

perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bedasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dalam rangka transformasi pengukuran IP ASN berbasis meritokrasi.

Berikut ini adalah realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024:

Tabel 119. *Realisasi indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024*

Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif Tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur berdasarkan riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai pegawai.
2. Kompetensi, diukur berdasarkan data riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
3. Kinerja, diukur berdasarkan data riwayat penilaian kinerja PNS.
4. Disiplin, diukur berdasarkan data riwayat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun terakhir.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
3. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).



Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
2. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
3. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
4. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
5. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024 termasuk pada kategori tinggi yaitu 87,79. Akan tetapi, nilai ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 91,5. Perhitungan nilai indeks profesionalitas ASN di Badan POM menggunakan aplikasi IP-ASN yang terintegrasi dengan data-data kepegawaian yang terdapat dalam aplikasi SIASN dan Sistem Informasi di Badan Kepegawaian Negara (My ASN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2024 adalah 87,79 dengan capaian 95,95% pada kategori “CUKUP”.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dari 4 (empat) dimensi tersebut di atas, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin, perubahan perhitungan terletak pada dimensi kualifikasi dimana saat ini telah memperhitungkan kualifikasi Pendidikan formal untuk persyaratan jabatan serta dimensi kompetensi dimana saat ini mempertimbangkan hasil predikat kinerja.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang ditetapkan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk mengukur sasaran strategis terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal. Terdapat penyesuaian target Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan reviu renstra yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor PR.01.02.11A.11A5.12.21.13478 tanggal 18 November 2021.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun 2020 hingga 2024 dan target akhir periode renstra RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:





Gambar…….. *Perbandingan indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya*

Target pada tahun 2024 adalah 91,5 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dari tahun 2020 hingga 2023, hal ini dikarenakan realisasi indeks profesionalitas ASN setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dan pada tahun 2023 persentase capaian indeks profesionalitas mencapai 107,28%. Realisasi indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 87,79 dengan capaian 95,95%. Penurunan nilai ini dikarenakan perubahan perhitungan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, diantaranya :

1) Dimensi kualifikasi, dimana pada tahun tahun sebelumnya perhitungan kualifikasi didasarkan pada indikator jenjang Pendidikan formal yang dicapai PNS dengan bobot nilai sebagai berikut :
   - Pendidikan S-3 memperoleh nilai maksimal yaitu 25.
   - Pendidikan S-2 memperoleh nilai 20.
   - Pendidikan S-1 memperoleh nilai 15.
   - Pendidikan D-3 memperoleh nilai 10.
   - Pendidikan D-1/SLTA memperoleh nilai 5.
   - Pendidikan dibawah SLTA memperoleh nilai 1.

   Dalam hal ini apabila pegawai meningkatkan kualifikasi Pendidikan Formal setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar maka dapat meningkatkan nilai pada Dimensi Kualifikasi.



Perubahan perhitungan dimensi kualifikasi tahun 2024, mempertimbangkan syarat jabatan yang saat ini diduduki oleh pegawai dengan rincian berikut:

- Nilai 25, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/diatas persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.
- Nilai 20, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.
- Nilai 10, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.

Berdasarkan data perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Jakarta, rata-rata nilai untuk dimensi kualifikasi pada tahun 2024 adalah 22,75. Belum maksimalnya nilai pada dimensi kualifikasi ini dikarenakan masih terdapat 1 (satu) orang pegawai yang Pendidikan terakhir saat ini di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki. Sebanyak 63 pegawai memperoleh nilai maksimal (25) pada dimensi kualifikasi ini dimana, Pendidikan formal terakhir yang diperoleh Nilai pada dimensi kualifikasi sebanyak lebih tinggi/diatas persyaratan jabatan yang diduduki dan sebanyak 48 orang yang memperoleh nilai 20, dimana ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki.

Perbedaan hasil perhitungan pada dimensi kualifikasi tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 21,31 dan 22,75 mengalami peningkatan nilai.

2) Dimensi Kompetensi, dimana pada tahun tahun sebelumnya perhitungan dimensi kompetensi didasarkan pada riwayat pengembangan kompetensi yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Ketercapaian Pengembangan Kompetensi 20 JP. Sedangkan Pada tahun 2024, dimensi kompetensi dengan bobot nilai 40 memperhitungkan hasil penilaian kinerja selain dari riwayat pengembangan kompetensi. Hasil penilaian kinerja yang dimasukkan dalam dimensi kompetensi memiliki bobot dasar sebagai berikut:

- Predikat Kinerja Sangat Baik, memperoleh nilai 25
- Predikat Kinerja Baik, memperoleh nilai 20
- Predikat Kinerja Butuh Perbaikan, memperoleh nilai 15
- Predikat Kinerja Kurang (Misconduct), memperoleh nilai 10
- Predikat Kinerja Sangat Kurang, memperoleh nilai 5

Perhitungan komponen pengembangan kompetensi dengan menyumbang bobot maksimal 15 pada Dimensi Kompetensi adalah sebagai berikut:



- Bagi JPT/Administrator/Pengawas, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5**;
- Bagi Pejabat Fungsional, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat fungsional mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5;**
- Bagi Pejabat Fungsional, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat fungsional mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5;**

Berdasarkan data perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Jakarta, rata-rata nilai untuk dimensi kompetensi pada tahun 2024 adalah 35,04. Belum maksimalnya nilai pada dimensi kompetensi ini disebabkan karena pada tahun 2024, nilai prestasi kinerja yang digunakan adalah nilai kinerja tahun 2023, dimana seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta mendapatkan predikat kinerja tahunan “Baik”, hal ini sangat berpengaruh pada realisasi nilai Dimensi Kompetensi tahun 2024.

Perbedaan hasil perhitungan pada dimensi kompetensi tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 39,61 dan 35,04 mengalami penurunan nilai sebesar 4,57. Perubahan cara perhitungan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, dimana penilaian kinerja dimasukkan pada komponen perhitungan dimensi kompetensi dengan nilai 25 (lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan riwayat pengembangan kompetensi), sehingga aspek kinerja menjadi sangat penting dalam pencapaian profesionalisme ASN. Sebagai upaya dalam meningkatkan komponen penilaian kinerja, Pada tahun 2024, terdapat 21 pegawai mendapatkan predikat kinerja “Sangat Baik” dan sisanya sebanyak 95 orang mendapatkan predikat kinerja “Baik”. Hal ini sejalan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta yang pada tahun 2024 mendapatkan predikat “Istimewa”, sehingga maksimal 20% pegawai dapat diberikan nilai predikat kinerja “Sangat Baik”.

3) Dimensi Kinerja, dengan perhitungan yang masih sama seperti tahun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:



- Predikat Kinerja Sangat Baik, memperoleh nilai 30
- Predikat Kinerja Baik, memperoleh nilai 25
- Predikat Kinerja Butuh Perbaikan, memperoleh nilai 20
- Predikat Kinerja Kurang (Misconduct), memperoleh nilai 15
- Predikat Kinerja Sangat Kurang, memperoleh nilai 10

Nilai predikat kinerja ini memberikan dampak pada perhitungan Dimensi Kinerja dan juga Dimensi Kompetensi. Dalam pencapaian nilai maksimal pada hasil kinerja diperlukan berbagai strategi dan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai supaya dapat mencapai nilai maksimal pada setiap Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta. Data pada dimensi kinerja didapat dari e-kinerja BKN atau Integrasi laporan kinerja ke SIASN.

4) Dimensi Disiplin, dengan perhitungan yang masih sama seperti tahun tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan riwayat disiplin pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir. Data pada dimensi disiplin diperoleh dari integrasi SIASN dengan bobot maksimal 5.

C. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Jakarta dengan unit kerja lain

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2024 dibandingkan dengan Unit Kerja lainnya tergambar pada grafik di bawah ini:



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	91,50	91,66	90,86	91,32	91,18
Realisasi	87,79	88,28	86,37	88,80	87,77
Target Nasional	86	86	86	86	86
Capaian (%)	95,95	96,31	95,06	97,24	96,26



Gambar. *Perbandingan indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 dengan Unit Kerja Lainnya*

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa target IP ASN 2024 Balai Besar POM di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan Balai Besar Surabaya, Balai Besar Bandung dan Balai Besar Semarang, akan tetapi target yang dtetapkan tersebut masih dibawah Balai Besar POM di Yogyakarta. Secara keseluruhan, pada 5 Balai Besar tersebut mengalami penurunan realisasi nilai IP ASN tahun 2024 dibandingkan dengan target. Hal ini disebabkan perubahan mekanisme perhitungan IP ASN pada tahun 2024, akan tetapi realisasi tersebut masih diatas nilai rata rata target Nasional yang ditetapkan dengan nilai 86.

Persentase capaian IP ASN tahun 2024, Balai Besar POM di Jakarta sebesar 95,95 berada pada urutan ke empat setelah Bandung, Yogyakarta dan Semarang. Dan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Balai Besar POM di Surabaya.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan perubahan tata cara pengukuran berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 serta upaya yang dilakukan, antara lain:

1) Dimensi kualifikasi, dimana pada tahun tahun sebelumnya perhitungan kualifikasi didasarkan pada indikator jenjang Pendidikan formal yang dicapai PNS sesuai dengan bobot nilai masing-masing jenjang Pendidikan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualifikasi Pendidikan Formal bagi pegawai setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar maka dapat meningkatkan nilai pada Dimensi Kualifikasi.

   Perubahan perhitungan dimensi kualifikasi tahun 2024, mempertimbangkan Pendidikan pada syarat jabatan yang saat ini diduduki oleh pegawai dengan rincian berikut:

   - Nilai 25, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/diatas persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.
   - Nilai 20, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.



- Nilai 10, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.

Berdasarkan data perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Jakarta, rata-rata nilai untuk dimensi kualifikasi pada tahun 2024 adalah 22,75. Belum maksimalnya nilai pada dimensi kualifikasi ini dikarenakan masih terdapat 1 (satu) orang pegawai yang Pendidikan terakhir saat ini di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki. Sebanyak 63 pegawai memperoleh nilai maksimal (25) pada dimensi kualifikasi ini, dimana Pendidikan formal terakhir yang diperoleh Nilai pada dimensi kualifikasi sebanyak lebih tinggi/diatas persyaratan jabatan yang diduduki dan sebanyak 48 orang yang memperoleh nilai 20, dimana ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki.

Upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

- Usulan Pencantuman gelar pegawai dengan jenjang jabatan fungsional Keterampilan yang telah menyelesaikan studi Pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- Usulan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri maupun pembiayaan dari Badan POM/ atau di Luar BPOM sebanyak 5 orang dan semua usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pusat Pengembangan SDM POM.
- Mendorong Pejabat Fungsional Keahlian dengan Pendidikan Terakhir S-1 untuk dapat melanjutkan Pendidikan ke S-2.

Hasil perhitungan pada dimensi kualifikasi tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 21,31 dan 22,75 mengalami peningkatan nilai. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Jakarta berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu dimana syarat jabatan Pendidikan telah terpenuhi pada saat diangkat dalam Jabatan fungsional.

2) Pada dimensi kompetensi, terdapat penurunan nilai dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun tahun sebelumnya perhitungan dimensi kompetensi didasarkan hanya pada riwayat pengembangan kompetensi yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Ketercapaian Pengembangan Kompetensi 20 JP. Sedangkan Pada tahun 2024, terjadi perubahan cara penilaian dimensi kompetensi dengan bobot nilai 40, memperhitungkan hasil penilaian kinerja selain dari riwayat pengembangan kompetensi. Sehingga capaian nilai pada dimensi kompetensi Balai Besar POM di



Jakarta tahun 2024 menurun menjadi 35,04 dari sebelumnya sebesar 39,61. Data penilaian kinerja yang digunakan pada dimensi kompetensi dihitung berdasarkan penilaian kinerja tahunan 2023, dimana seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta mendapatkan peringkat “Baik”. Hal ini mempengaruhi capaian dimensi kompetensi pada komponen penilaian kinerja yang memiliki bobot 25.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka pemenuhan indeks profesionalitas ASN pada pencapaian jumlah Jam Pelajaran (JP) minimal 20 JP diantaranya:

- Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi baik yang sudah direncanakan maupun yang belum direncanakan pada setiap kelompok fungsi.
- Melakukan monitoring kepada pegawai yang belum mencapai target 20 JP untuk memanfaatkan *platform* IDEAS (Pelatihan daring) secara mandiri dengan materi pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas jabatan.
- Mengimplementasikan inovasi KEMBANG KELAPA (Kertas kerja Evaluasi dan Monitoring pengemBANGan KompEtensi berkeLAnjutan PegAwai) dalam pengajuan nomor sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi kepada PPSDM. Inovasi ini mempermudah pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta.

3) Pada Dimensi Kinerja, nilai yang diperoleh pada tahun 2024 yaitu 25. Hal ini karena nilai kinerja yang digunakan sebagai perhitungan adalah nilai kinerja tahunan 2023 dimana seluruh pegawai mendapatkan predikat kinerja “Baik”. Oleh karena itu bobot nilai yang diperoleh belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja.
- Melakukan dialog kinerja pada saat perencanaan matriks peran dan hasil, membagi peran dan target sesuai dengan jenjang jabatan setiap pegawai.
- Melakukan pembinaan kinerja dimana setiap pegawai diwajibkan pembinaan kinerja dengan atasan langsung minimal 1 (satu) kali dalam setahun.



4) Pada dimensi Disiplin, telah dilakukan Upaya Pemberian *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absensi dan pelaporan daftar hadir secara tepat waktu. Pada tahun 2023, tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat etrkait pelanggaran terhadap kepatuhan jam kerja

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
			T	R	%	T	R	%				
28	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	91,50	87,79	95,95%	10.252.990.770	9.615.653.770	93,78%	**1,02**	**0,02**	**100%**	**Efisien**

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 adalah 87,79 dengan persentase capaian adalah Output adalah 95,95%. Tingkat efisiensi sebesar 0,02 dan capaian efisiensi adalah 100%. Capaian yang rendah di tahun 2024 disebabkan adanya perubahan tata cara perhitungan indeks profesionalitas ASN berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan baru disosialisasikan pada pertengahan tahun 2024, bahwa dimensi kompetensi memperhitungkan juga komponen hasil penilaian kinerja.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah pada dimensi kualifikasi, Pendidikan Formal pegawai telah sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki bahkan beberapa pegawai telah memiliki kualifikasi Pendidikan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan dalam jabatan yang sedang diduduki. Pengawalan pengusulan tugas belajar baik dengan biaya mandiri maupun melalui beasiswa dari berbagai sumber dana, dapat meningkatkan realisasi dimensi kualifikasi. Pada tahun 2024, sebanyak 5 (lima) orang telah disetujui untuk melanjutkan Pendidikan setingkat lebih tinggi.

Selain itu, tercapainya pengembangan kompetensi dengan target 20 Jam Pelajaran untuk seluruh pegawai serta diklat teknis fungsional yang wajib diikuti bagi pegawai yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu melalui inovasi KEMBANG KELAPA.



Penilaian prestasi kerja yang berpengaruh pada Dimensi Kompetensi dan DImensi Kinerja, dengan bobot masing – masing yaitu 20 dan 25, belum dapat dicapai sempurna mengingat data yang digunakan dalam perhitungan IP ASN 2024 adalah hasil penilaian kinerja tahun 2023 dan seluruh pegawai mendapatkan predikat kinerja "BAIK".

Nilai sempurna diperoleh pada dimensi disiplin karena seluruh pegawai telah tertib dalam pencatatan kehadiran maupun menjalankan kode etik sebagai PNS, sehingga tidak ada hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai. Hal ini dapat tercapai dengan adanya inovasi hukuman disiplin berupa IKRAR MANTAN TELATAN yang telah dilaksanakan selama 2 tahun berturut turut dan program tersebut efektif sebagai pencegahan pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja agar dapat diantisipasi supaya tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.

G. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja diantaranya yaitu:

1. Peningkatan Pendidikan formal pegawai melalui tugas belajar baik dengan pembiayaan beasiswa maupun pembiayaan mandiri.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis baik dilakukan secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform IDEAS pada subsite Pusat Pengembangan SDM POM
3. Menyelenggarakan bimtek teknis dan manajerial sesuai dengan gap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
4. Memberikan tantangan penugasan bagi pegawai yang dinilai mampu dalam melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya untuk memperkaya kompetensi pegawai.
5. Mengoptimalkan pola distribusi penilaian kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian nilai NPSS Unit Kerja.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kedisplinan pegawai melalui Inovasi IKRAR MANTAN TELATAN, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin akan potensi pelanggaran hukuman disiplin terkait jam kerja.



SASARAN STRATEGIS X

Capaian sasaran strategis X, yaitu menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (*Good Laboratory Procedure*)

a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Standar Ruang Lingkup > 65,
   2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
   3. Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88	91,24	103,68	Sangat Baik

Tabel 121. *Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024*

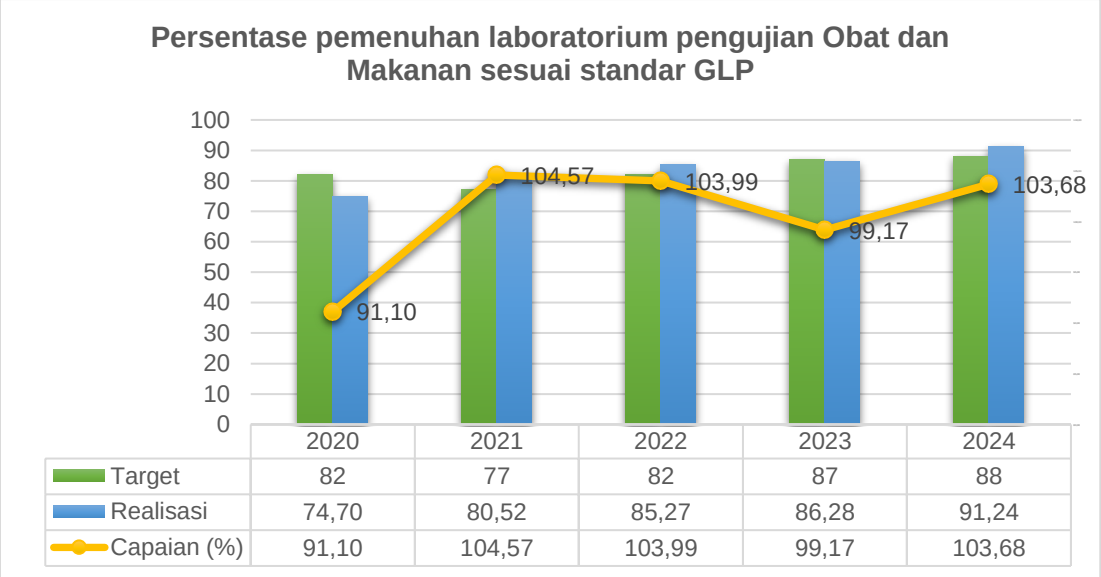
Persentase pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 103,68% dengan kriteria “Sangat baik”,



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Realisasinya juga mengalami peningkatan terus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adanya perubahan target menyebabkan presentase capaian menjadi fluktuatif. Namun demikian, presentase peningkatan capaian target pada tahun 2023 tidak mencapai 100% karena terjadi penyempurnaan konsep regionalisasi laboratorium (Keputusan Kepala BPOM Nomor 193 tahun 2023). Sebelum perubahan tersebut, laboratorium BBPOM di Jakarta menjadi laboratorium regional, namun pada tahun 2023 laboratorium regional dipindahkan ke Semarang dengan kriteria teknis antara lain kapasitas pengujian unggul dengan ruang lingkup pengujian paling banyak diantara balai lainnya dalam satu regional yang dilengkapi instrumen mutakhir dan SDM penguji yang kompeten dalam melakukan pengujian dengan instrument tersebut serta kemampuan penyelesaian pengujian sampel kasus lebih cepat. Dalam rangka mendukung penyempurnaan konsep regionalisasi laboratorium tersebut, beberapa alat laboratorium berteknologi tinggi ditransfer ke BBPOM di Semarang. Selain itu juga terjadi perpindahan penugasan kelas terapi pengujian sampel obat, dari kelas terapi organ sensoris menjadi kelas terapi dermatologis. Hal-hal tersebut mempengaruhi pencapaian pemenuhan standar nilai GLP. BBPOM di Jakarta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan sehingga realisasi dapat terus ditingkatkan.

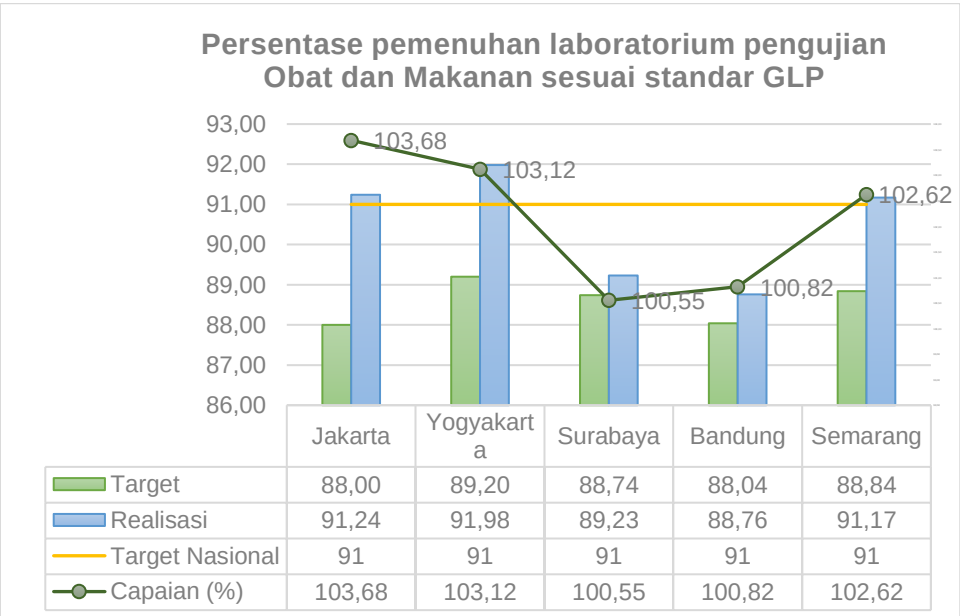




	2020	2021	2022	2023	2024
Target	82	77	82	87	88
Realisasi	74,70	80,52	85,27	86,28	91,24
Capaian (%)	91,10	104,57	103,99	99,17	103,68

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan. Namun upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk meningkatkan realisasi tahun berikutnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	88,00	89,20	88,74	88,04	88,84
Realisasi	91,24	91,98	89,23	88,76	91,17
Target Nasional	91	91	91	91	91
Capaian (%)	103,68	103,12	100,55	100,82	102,62

Berdasarkan Gambar 95, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM



Surabaya. Dari kelima BBPOM yang termasuk klaster 1, hanya BBPOM Surabaya dan Bandung yang realisasinya belum memenuhi target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala Badan POM No 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan penilaian nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang dilaksanakan oleh tim dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) pada 30 Desember 2024, Balai Besar POM di Jakarta mendapat hasil penilaian untuk presentase pemenuhan SKL laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 103,68% dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup: 93,44%
b. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi : 97,93
c. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan: 82,35%

BBPOM di Jakarta terus berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada Tahun 2024 untuk mencapai target antara lain:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium secara ketat.
b. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode analisis dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
c. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
d. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain adalah anggaran. Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2024

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,00	91,24	103,68%	2.462.606.500	2.211.110.879	89,79%	1,15	0,15	100%	Efisien

Berdasarkan Tabel 123, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi dengan IE > 1. Anggaran 2024 mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Pada tahun 2024, penggunaan anggaran telah disesuaikan untuk peningkatan capaian kinerja seperti pengadaan instrument laboratorium untuk pemenuhan standar peralatan, pengadaan reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding dan suku cadang dalam upaya pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium serta peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan internal maupun magang yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

a. Konsep Regionalisasi Laboratorium menambah luasnya daerah/lokasi sampling sehingga menambah jenis sampel dan sediaan yang diuji oleh Laboratorium Obat BBPOM di Jakarta dan ruang lingkup pengujian bertambah.



b. Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
c. Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat dan nappza serta 12 metode analisis dari laboratorium mikrobiologi. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.
d. Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun maupun 3 tahun untuk alat tertentu bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Internasional dan untuk memastikan kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar peralatan. Pengadaan alat laboratorium yaitu GCMS sebanyak 1 unit, oven 1 unit, ultrasonic degasser 1 unit dapat menambah standar peralatan yang telah ditetapkan.
e. Peningkatan presentase pemenuhan standar peralatan secara cepat agak sulit dicapai, karena kondisi luas ruangan laboratorium BBPOM di Jakarta yang kurang memungkinkan untuk penambahan jumlah alat yang sesuai standar.
f. BBPOM di Jakarta harus mengidentifikasi kembali alat-alat laboratorium yang sudah kurang berfungsi untuk diremajakan atau diganti dengan pengadaan alat lain yang lebih dibutuhkan sesuai perkembangan terkini. Perencanaan pengadaan alat harus mengacu pada Standar Peralatan yang telah ditetapkan
g. Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian sekaligus sebagai unjuk kerja eksternal dalam penjaminan mutu hasil pengujian.



h. Menjadi penyelenggara Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian, unjuk kerja eksternal dalam penjaminan mutu hasil pengujian dan menambah kompetensi personel pengujian**.**

G. Upaya Peningkatan Kinerja

BBPOM di Jakarta selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun perencanaan kegiatan selanjutnya.

Rekomendasi perbaikan sistem dan usulan program kegiatan disusun dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta di masa mendatang

30. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen berikut:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (*BPOM Command Centre*);
    1. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;
    2. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
    3. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor



dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan;

4. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;
5. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   1. Balai: e-mail, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai; dan

      Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

      Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan, kriteria yang digunakan adalah:

      1. 2,26 – 3 : Optimal
      2. 1,51 – 2,25 : Cukup
      3. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
      4. 0 – 0,75 : Sangat Kurang

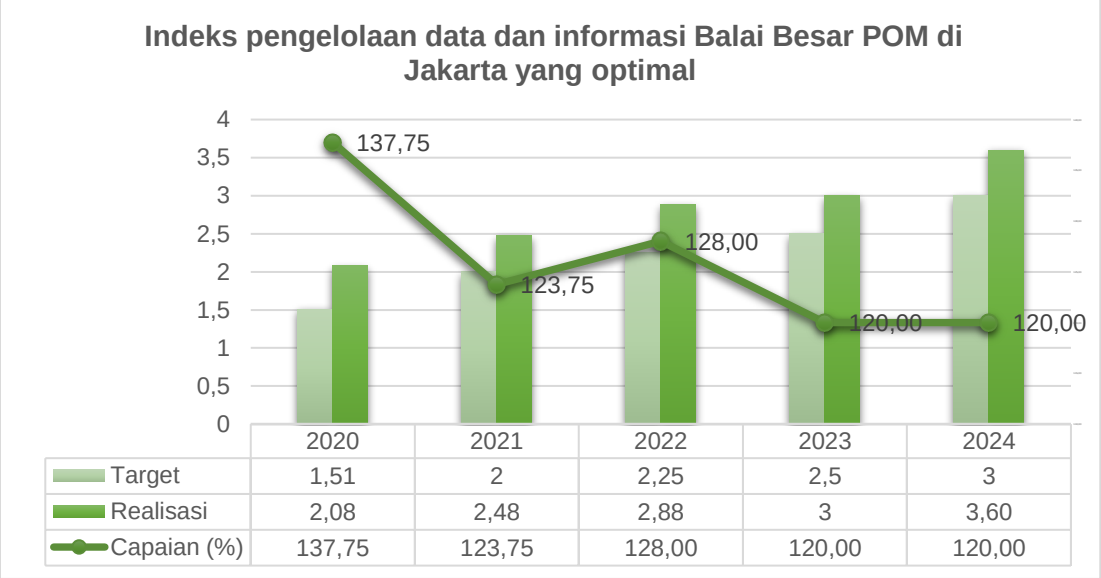
A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	3	3,6	120,00	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal telah melampaui target yang ditetapkan, realisasi di triwulan keempat sebesar 3 dengan kriteria “SANGAT BAIK”. Hal ini menunjukkan selama periode Januari sampai Desember 2024, jumlah akses data dalam satu bulan Balai Besar POM di Jakarta telah memenuhi untuk SIPT, SPIMker, e-mail, sharing folder, dashboard BCC dan berita aktual.



B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

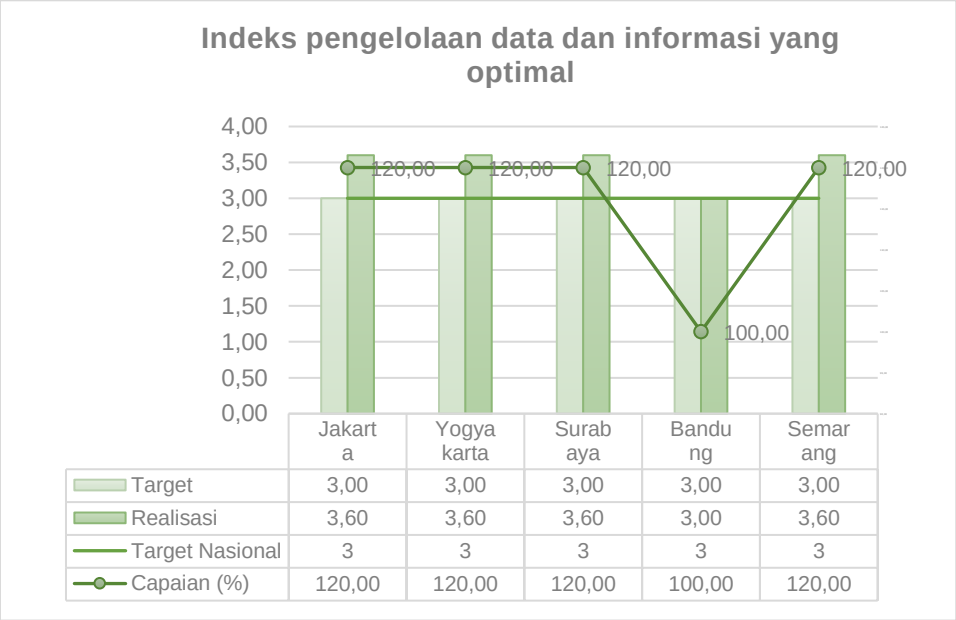


	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1,51	2	2,25	2,5	3
Realisasi	2,08	2,48	2,88	3	3,60
Capaian (%)	137,75	123,75	128,00	120,00	120,00

Tabel 126. *Target dan realisasi capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi*

Sejak ditetapkan pada tahun 2020, BBPOM di Jakarta secara konsisten melampaui target kinerja yang diberikan pada Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Target yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan tools untuk memastikan unit kerja dan ditetapkan target Unit Pelaksana Teknis pada kriteria 3. Pada Tahun 2024 ini 30.Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal medapatkan nilai capaian 120% dikarenakan adanya konversi nilai dari Sekretaris Utama Badan POM.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Realisasi	3,60	3,60	3,60	3,00	3,60
Target Nasional	3	3	3	3	3
Capaian (%)	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00

Gambar 97. *Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Balai Lain yang Sejenis/Setara*

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2024 untuk kelima Balai menunjukkan telah melampaui target. BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta telah memperoleh nilai maksimal 3,6. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pengelolaan Data dan Informasi perlu menetapkan formulasi baru untuk mengukur capaian kinerja yang lebih SMART**.**

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pemantauan indeks pengelolaan data dan informasi dilakukan oleh Tim Teknologi Informasi yang tercantum dalam SK Tim IT Balai Besar POM di Jakarta. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indek melalui rapat evaluasi bulanan. Masing masing penanggung jawab telah memahami dengan baik tugas fungsinya sehingga pelaksanaan rencana kerja menjadi lebih optimal.



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	3,00	3,60	120,00%	157.495.500	157.495.500	100,00%	1,20	0,20	100%	Efisien

Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 mengindikasikan tidak adanya pemborosan sumber daya dalam pencapaian target. Capaian efisiensi sebesar 100% mengonfirmasi bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sangat optimal dan sesuai perencanaan.

Kesimpulan akhir penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sangat efisien dan optimal.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Balai Besar POM di Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi;
2. Program pemanfaatan email corporate secara berkala oleh setiap pegawai dalam pengiriman link apel setiap minggunya telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara maksimal;
3. Pemanfaatan sharing folder dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk
4. Pemanfaatan sharing folder sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks maksimal;
5. Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/bulan dengan masing-masing minimal 101 viewer/berita actual



6. Verifikasi dan tindak lanjut petugas aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal.
7. Monitoring dan evaluasi terhadap input SIPT dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketuntasan pelaporan

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Membuat sistem reminder untuk pemanfaatan sistem informasi dengan frekuensi lebih sering (4x dalam sebulan) menggunakan whatsapp autosend ke grup balai dan petugas pengawas.

SASARAN STRATEGIS XI

Capaian sasaran strategis XI, yaitu terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

31. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Terdapat perubahan cara perhitungan Nilai NKA yang semula diperoleh dengan proporsi 60 % EKA ditambah 40% IKPA menjadi 50% EKA ditambah 50% IKPA. IKPA memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Penghitungan nilai EKA dilakukan pada level satker, level unit eselon 1, dan level Kementerian/Lembaga (K/L). Terdapat perubahan mekanisme penghitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dari PMK 22/PMK.02/2021 menjadi KMK 466/2023. Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART (https://monev.kemenkeu.go.id/).



A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	89,9	91,56	101,85	Sangat Baik

***Tabel 113**. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta*

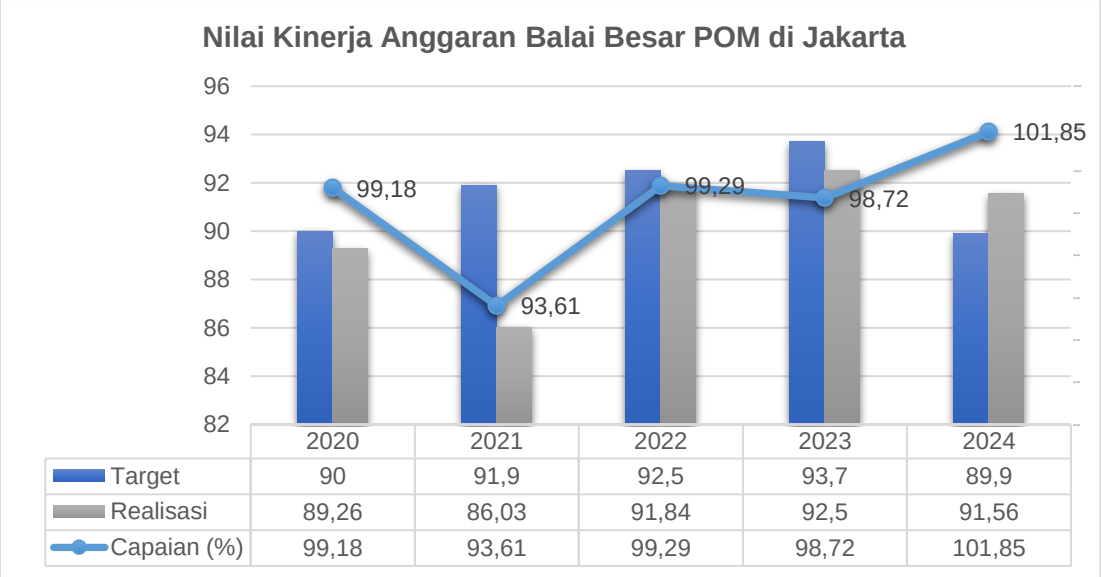
Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2024 adalah 91,59 diperoleh dari nilai IKPA 98,12 dan 85,05. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu 89,9% dengan kategori sangat baik**.**

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi grafik diperoleh bahwa terjadi penurunan target dibandingkan tahun 2020 sampai dengan 2023, karena terdapat perubahan formulasi perhitungan NKA. Secara umum realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2023, sedangkan terendah pada tahun 2021. Realisasi terendah di tahun 2021 selaras dengan capaian paling rendah pada periode renstra 2020-2024. Demikian pula realisasi tertinggi pada tahun 2024 telah sesuai capaian tertinggi nilai kinerja anggaran dalam periode renstra yang sama. Jika dianalisis, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja tersebut terwujud sebagai hasil dari peningkatan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA.



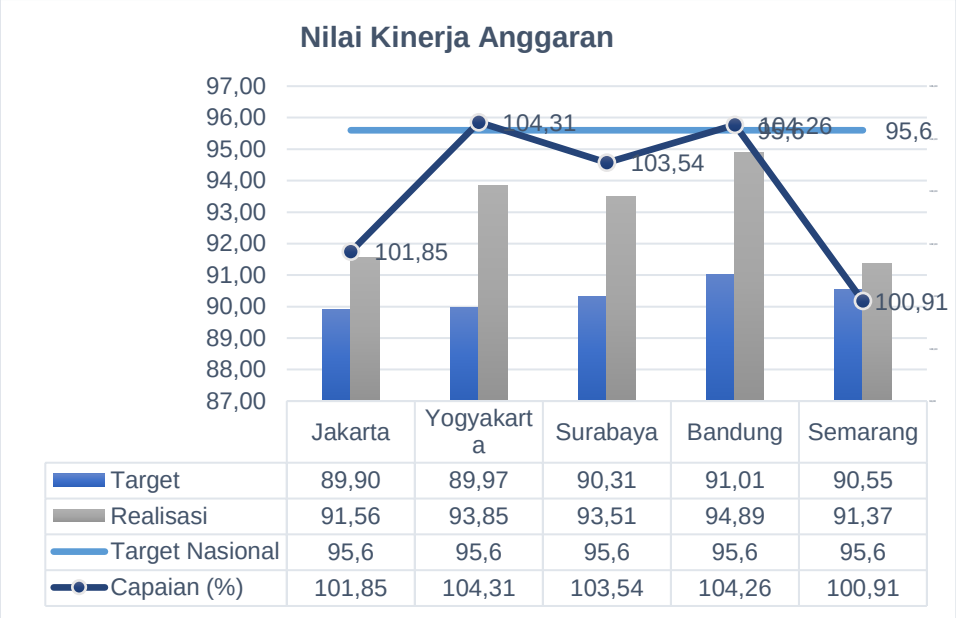


	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90	91,9	92,5	93,7	89,9
Realisasi	89,26	86,03	91,84	92,5	91,56
Capaian (%)	99,18	93,61	99,29	98,72	101,85

Tabel 128. *Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024*

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain

Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Kinerja 5 (lima) UPT ini disajikan pada grafik di atas. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa capaian kelima UPT Balai Besar POM di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang masuk dalam kategori “sangat baik” yakni lebih dari 100%. Balai Besar POM di Surabaya meraih capaian kinerja tertinggi tahun 2024 dengan 104,31%. Realisasi dari kelima balai yang diperbandingkan berada di bawah target nasional BPOM.



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	89,90	89,97	90,31	91,01	90,55
Realisasi	91,56	93,85	93,51	94,89	91,37
Target Nasional	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
Capaian (%)	101,85	104,31	103,54	104,26	100,91

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 telah mencapai target tahun 2024. Delapan indikator pada penilaian IKPA, terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Capaian Output. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya, tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP sebagaimana penjelasan berikut:

1. Tidak tercapainya nilai 100 pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan pada triwulan III terdapat deviasi sebesar 90,70% pada belanja modal (52) yang disebabkan rencana lebih tinggi daripada penyerapan anggaran karena pelaksanaan belanja alat laboratorium yang pada mulanya dijadwalkan pada triwulan I dan II baru bisa dilaksanakan secara intensif di triwulan III, namun tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III DIPA
2. Tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Belanja Kontraktual disebabkan karena terdapat 1 (satu) kontrak dengan nilai di bawah 200 juta rupiah sehingga menyebabkan penurunan nilai komponen akselerasi belanja 53 pada aspek belanja kontraktual di bulan September 2024.

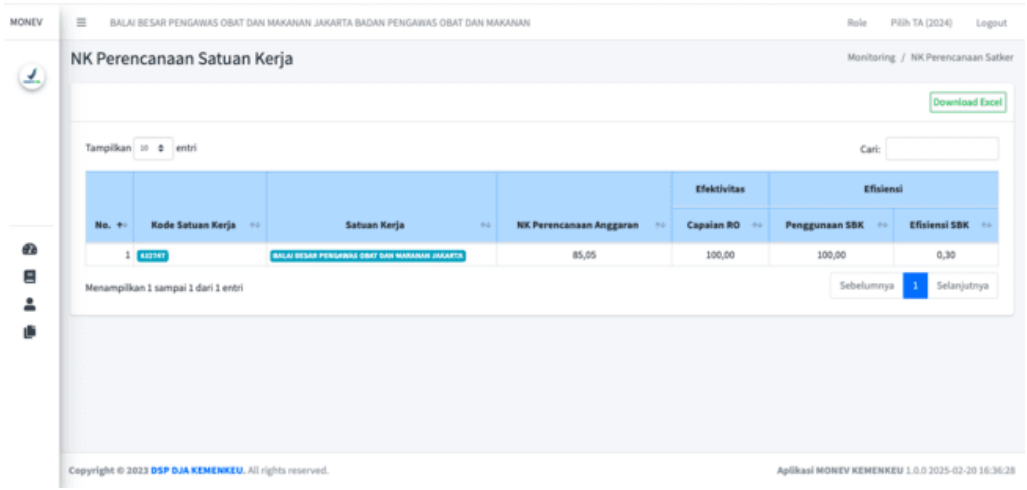


3. Kemudian, tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Pengelolaan UP dan TUP dikarenakan dipengaruhi oleh keterlambatan setoran pertanggungjawaban TUP pada bulan Februari 2024

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	170	063	432747 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100,00	94,87	97,29	96,00	100,00	98,37	100,00	98,12	100%	0,00	98,12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	14,23	19,46	9,60	10,00	9,83	25,00				
					Nilai Agguk	97,44		97,90				100,00				

Nilai EKA tahun 2024 adalah 85,05 dengan komponen efektivitas pencapaian RO 100; efisiensi penggunaan SBK 100; dan nilai efisiensi SBK 0,3. Nilai efisiensi SBK tersebut masih tergolong sangat rendah dibandingkan komponen penilaian yang lain. Hal ini karenakan realisasi anggaran berbanding terbalik dengan nilai efisiensi, pada saat realisasi anggaran tinggi maka nilai efisiensi akan rendah. Sedangkan realisasi anggaran anggaran menjadi indikator penilaian pada penilaian IKPA.





E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	89,90	91,56	101,85%	6.166.950.750	5.789.352.359	93,88%	1,08	0,08	100%	Efisien

Nilai Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di sasaran strategis Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara akuntabel termasuk ke dalam kategori efektif. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

Penggunaan anggaran untuk indikator nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta mencapai 93,33%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.166.950.750 dapat direalisasikan sebesar Rp5.789.352.359. Perhitungan TE menunjukkan angka 0,08 yang tergolong kategori efisien.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut:

1)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala,

2)Revisi anggaran yang tepat sasaran dan sesuai timeline untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan secara cermat dan tepat.



Meskipun pemanfaatan sumber daya yang mendukung nilai kinerja anggaran tahun 2024 dinyatakan efektif dan efisien, namun perlu dilakukan evaluasi untuk capaian yang lebih optimal di tahun mendatang.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain Pengelolaan Keuangan; Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Bimbingan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di UPT POM. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA sesuai jadwal dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Kemudian dengan selalu mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai upaya untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) agar bisa melebihi target tanpa menambah alokasi anggaran.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, dirumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) sebagai upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun mendatang yaitu:

1. Melakukan perubahan definisi operasional target Indikator Kinerja Utama Nilai Kinerja Anggaran oleh Biro Perencanaan dan Keuangan;
2. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100;
3. Dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Jakarta VI dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pengampu Nilai Kinerja Anggaran.



32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa (ITKP) digunakan untuk mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Satker di lingkungan Badan POM.

Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa pada unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);

b) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);

d) Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol)

No.	Nilai Anggaran PBJ (Rp)	Nilai PBJ yang diumumkan dalam SIRUP (Rp)	(%)	Keterangan
1	31.444.545.000	31.444.545.000	100%	Nilai PBJ yang diumumkan dalam SIRUP sudah sama dengan Nilai Anggaran PBJ sehingga mendapat bobot maksimal 20%



2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).

b) Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).

No.	Pagu pengadaan e- Tendering yang diumumkan (Rp)	Pagu pengadaan e-Tendering yang Direalisasikan (Rp)	(%)	Keterangan
1	0	0	100%	Mendapatkan skor maksimal 20% karena tidak terdaapt paket tender pada perencanaan

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);

b) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

d) Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.



No.	Paket pengadaan e-Purchasing dalam aplikasi e-katalog	Paket pengadaan melalui e-Purchasing yang diselesaikan	(%)	Keterangan
1	246	246	100%	Total Paket Purchasing di bandingkan dengan Total Paket Purchasing Status Selesai telah sama sehingga mendapat skor maksimal 20%

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

b) Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

d) Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0

No.	Pagu pengadaan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada apikasi SiRUP (Rp)	Pagu pengadaan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing yang telah dicatatkan (Rp)	(%)	Keterangan
1	3.550.426.000	3.550.426.000	100%	Pagu Non Tender Pemilihan di bandingkan dengan Pagu Non Tender SiRUP telah sama sehingga mendapat skor maksimal 20%

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

a) Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).



b) Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

No.	Jumlah Paket yang dibuat di aplikasi SPSE	Jumlah Paket yang telah diinput data kontrak	(%)	Keterangan
1	0	0	100%	Mendapatkan skor maksimal 20% karena tidak terdaapt paket tender dan E-PL

No	Satuan Kerja	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	E-Kontrak	Total	Status	Aksi
1	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Sangat Baik	

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

A. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

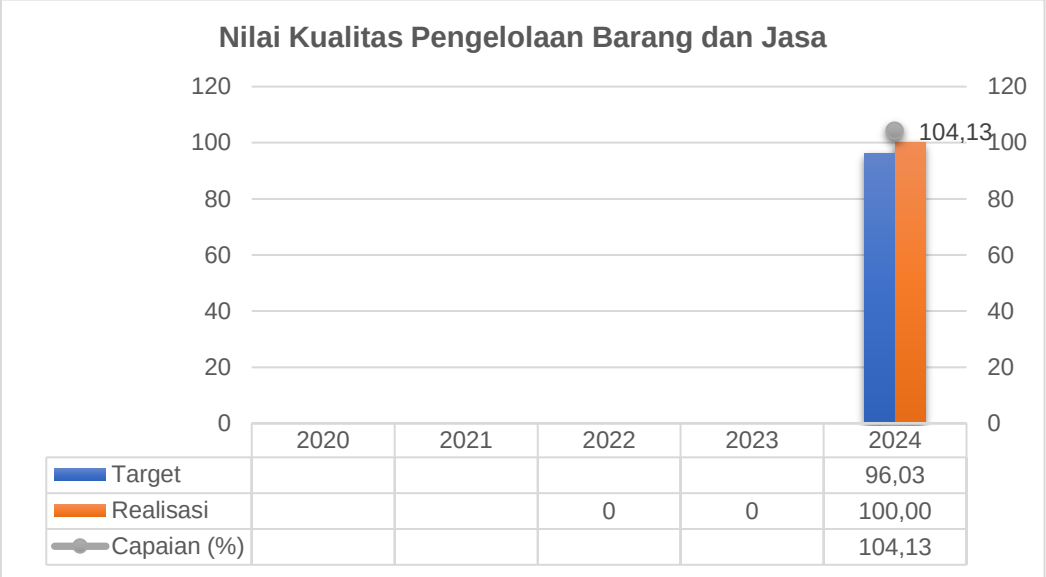
Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Jakarta tahun 2024 sebesar 100 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 96.03 sehingga diperoleh capaian sebesar 104.13 dengan kategori sangat baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,03	100	104,13	Sangat Baik

Tabel. *Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa*



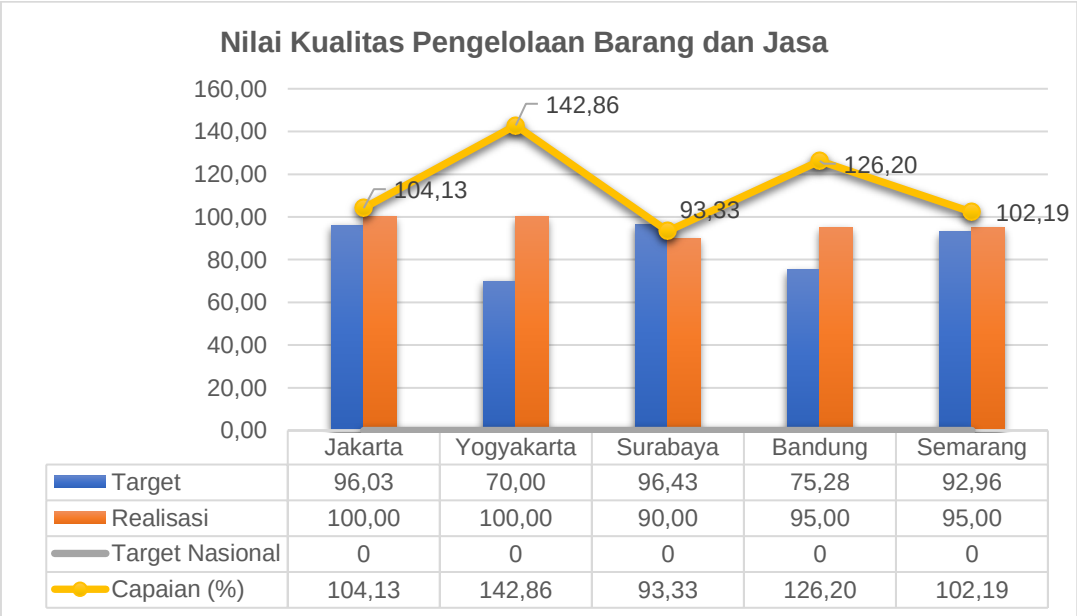
B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target					96,03
Realisasi			0	0	100,00
Capaian (%)					104,13

Indikator Kinerja Utama ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	96,03	70,00	96,43	75,28	92,96
Realisasi	100,00	100,00	90,00	95,00	95,00
Target Nasional	0	0	0	0	0
Capaian (%)	104,13	142,86	93,33	126,20	102,19

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Yogyakarta mendapat nilai maksimal yaitu 100. Perbedaan capaian disebabkan target nilai yang berbeda antara BBPOM di Jakarta dan BBPOM



di Yogyakarta. Terdapat satu unit yang tidak mencapai target yaitu BBPOM di Surabaya dengan capaian 93.33%.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa merupakan IKU yang baru ditetapkan pada Tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2023, indikator ini telah dicantumkan sebagai salah satu direktif penugasan dan mendapatkan nilai realisasi sebesar 100. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta berhasil mempertahankan nilai maksimal 100 dengan predikat sangat baik. Strategi yang telah dilaksanakan untuk mempertahankan nilai antara lain:

- Melakukan pemilihan penyedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada aplikasi SiRUP
- Melakukan percepatan pengadaan terutama untuk barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran dan belanja Modal
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No		Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
32	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,03	100,00	104,13%	145.121.050	128.727.166	88,70%	**1,17**	**0,17**	**100%**	Efisien

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan **pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa hal yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa antara lain:

- Melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
- Segera melakukan realisasi pengadaan baik melalui e-purchasing maupun pengadaan langsung



F. Upaya peningkatan kinerja

Capaian Kinerja Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa telah memperoleh nilai maksimal. Beberapa hal yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa serta mengefektifkan proses bisnis antara lain:

1. Menggunakan aplikasi permintaan pengadaan barang/jasa melalui CCBMN untuk mempermudah penelusuran riwayat dan proses pengadaan barang sebelum diproses melalui *e-purchasing* maupun swakelola
2. Segera melakukan penerimaan paket pada e-purchasing untuk paket pengadaan yang sudah dilakukan pengiriman dan melakukan penilaian kinerja penyedia agar status paket selesai.
3. Segera melakukan pencatatan pada SPSE untuk paket pengadaan non E-Tendering dan non e-Purchasing.

G. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa merupakan IKU yang baru ditetapkan pada Tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2023, indikator ini telah dicantumkan sebagai salah satu direktif penugasan dan mendapatkan nilai realisasi sebesar 100. Balai Besar POM di Jakarta akan selalu berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan POM (Satpel 1) dan Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Badan POM terkait dengan monitoring Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.



33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pengawasan. Aspek yang menjadi penilaian pengelolaan BMN yaitu Penatausahaan, Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

Nilai Pengelolaan BMN Balai Besar POM di Jakarta adalah nilai Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum BPOM atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penilaian pengelolaan BMN, Pelaporan BMN menjadi indikator yang dinilai dan diukur menggunakan parameter sebagai berikut:
   a) Kualitas pelaporan (Bobot 75%),
   b) Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 25%), yang diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
      1. Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
      2. Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
      3. H-3 < anggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
      4. Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
2. Perencanaan Kebutuhan BMN merupakan kegiatan merumuskan kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan atau biasa disebut RKBMN. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN menjadi indikator yang dinilai dan diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN yang dijelaskan sebagai berikut:
   a) Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   b) H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
   c) H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
   d) Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)



3. Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengguna Barang juga harus memastikan BMN yang ada dalam pengelolaannya telah ditetapkan status penggunaanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persentase Penetapan Status Penggunaan menjadi indikator yang dinilai dan diukur dengan cara menghitung "(Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%".
4. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan menjadi indikator yang dinilai dan diukur dengan cara menghitung "(Nilai Total Barang Rusak Berat yang diusulkan penghapusan / Total Barang Rusak Berat) x 100%".
5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan menjadi indikator yang dinilai dan diukur dengan cara menghitung "(Nilai Total Barang Rusak/Usang yang diusulkan pemusnahan / Total Barang Usang/Rusak) x 100%".

A. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	98.59	114.64	Sangat Baik

Tabel 8. *Perbandingan target dan realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024*

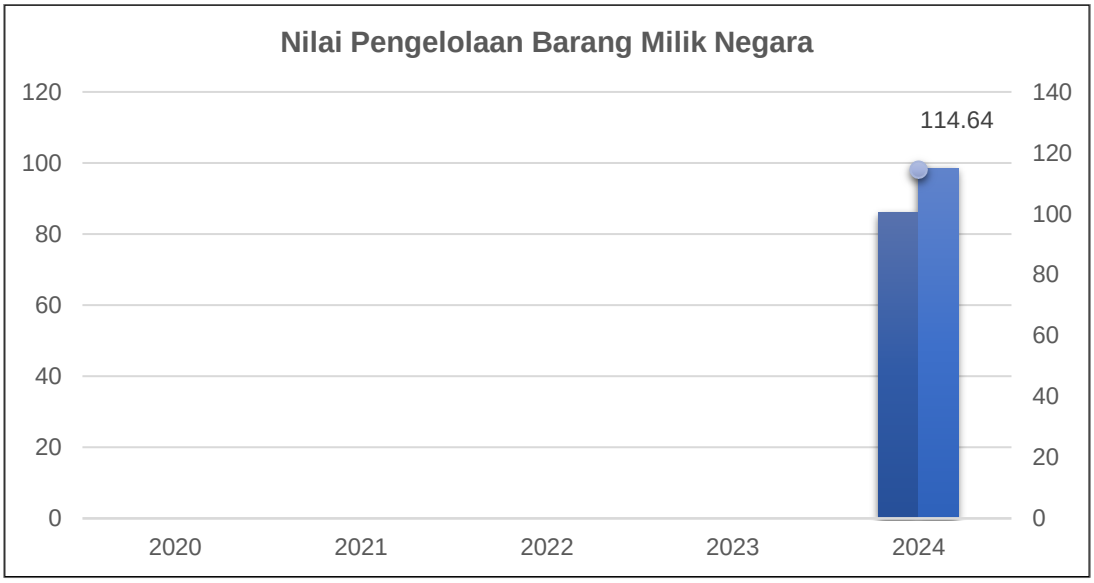
Rincian pembentuk capaian Nilai Pengelolaan BMN adalah sebagai berikut :

Parameter Penilaian	Bobot Nilai	Realisasi
Ketepatan Waktu	25	25
Kualitas	75	70.50
Pelaporan yang Baik	30	28.65



RKBMN	10	10
PSP	20	19.94
Penghapusan	20	20
Pemusnahan	20	20
Jumlah Total	100	98.59

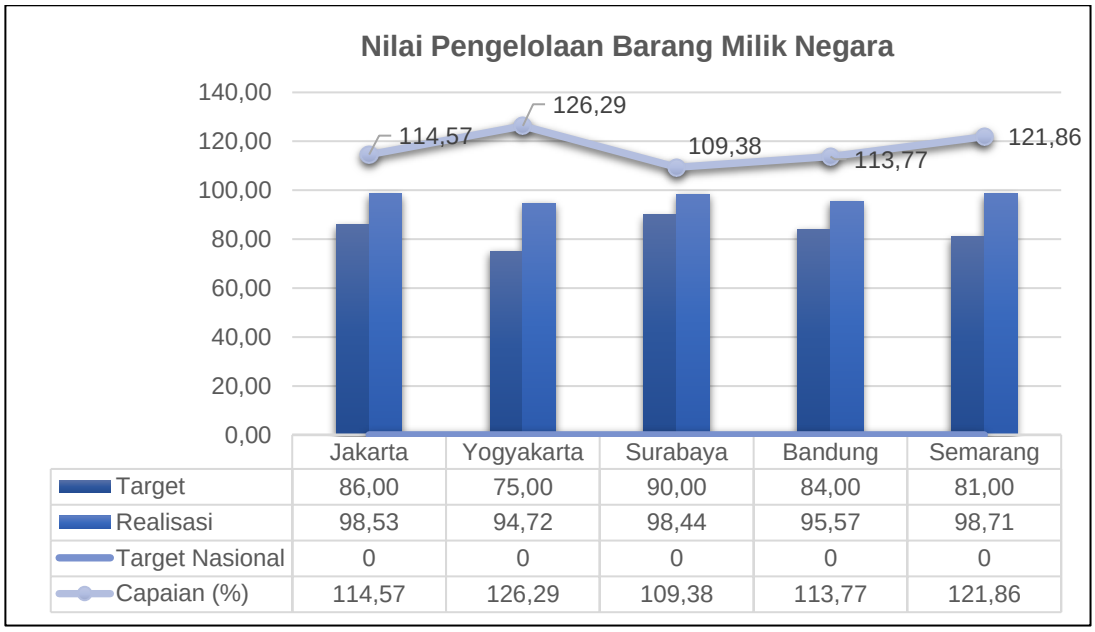
B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 1. *Perbandingan realisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 untuk Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Jakarta tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan indikator kinerja utama baru pada tahun 2024.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	86,00	75,00	90,00	84,00	81,00
Realisasi	98,53	94,72	98,44	95,57	98,71
Target Nasional	0	0	0	0	0
Capaian (%)	114,57	126,29	109,38	113,77	121,86

Gambar 2. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan unit kerja lain*

Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 yang paling tinggi adalah BBPOM di Semarang (98,71) sedangkan BBPOM di Jakarta menempati urutan kedua (98,53). Perbedaan target yang ditetapkan untuk masing-masing BBPOM menghasilkan nilai capaian kinerja yang berbeda. Presentase capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Yogyakarta (126,29%) sedangkan BBPOM di Jakarta menempati urutan ketiga (114,57%). Tidak terdapat Target Nasional yang ditetapkan pada tahun 2024.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023, Nilai Pengelolaan BMN belum menjadi sasaran strategis indikator kinerja utama namun telah ditetapkan sebagai direktif penugasan pada Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Balai Besar POM di Jakarta. Realisasi pada tahun 2023 adalah 87,69 dari target 70-79. Capaian ini telah memiliki kriteria sangat baik, namun tetap perlu dilakukan langkah langkah perbaikan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2024 yaitu 86. Berbagai upaya telah dilakukan pada tahun 2024 dan telah berhasil meningkatkan nilai BMN secara signifikan semula 87.69 menjadi 98.59, antara lain :

1. Melakukan pelaporan BMN pada ≤H-3 agar mendapat nilai maksimal;



2. Melakukan penyampaian Usulan RKBMN pada ≤H-3 agar memperoleh nilai maksimal;
3. Segera melakukan Pengusulan PSP BMN yang baru diperoleh agar SK persetujuannya keluar sebelum akhir tahun agar nilai perbandingan dengan total aset menjadi baik;
4. Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN Rusak Berat kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtangan BMN – lelang, setelah final prosesnya dilakukan update diaplikasi dan laporan penghapusan sehingga Total Aset Rusak Berat telah selesai ditindaklanjuti;
5. Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Persediaan usang/rusak kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtangan Persediaan Usang – pihak ke3, setelah final proses ya dilakukan update diaplikasi dan laporan pemusnahan sehingga Persediaan Usang/Rusak telah selesai ditindaklanjuti.

Sedangkan upaya perbaikan untuk penyempurnaan kinerja perlu dilakukan dengan menyusun rencana berdasarkan parameter penilaian yang belum mendapat nilai sempurna yaitu Kualitas Pelaporan dan PSP. Terhadap hal ini akan dilakukan rencana kegiatan sebagai berikut :

a. Mendorong pelaksanaan pengadaan aset di awal tahun agar pengusulan dan penetapan SK PSP dapat terselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir
b. Melakukan FGD bersama tim terkait dalam penyusunan laporan untuk peningkatan kualitas laporan

E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
			T	R	%	T	R	%				
33	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00	98,53	114,57%	351.141.030	331.411.960	94,38%	1,21	0,21	95%	**Efisien**

Tabel 2. *Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Jakarta*



F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Pengelolaan BMN antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap triwulan, mengadakan Bimtek BMN di satuan kerja dengan menghadirkan narasumber dari pusat dan DJKN, mengikuti Bimtek BMN yang diadakan oleh pusat, melakukan kegiatan pemutakhiran data BMN dan konsolidasi keuangan tingkat Satker tiap periode pelaporan dengan Satuan Wilayah Jakarta dan PIC dari Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, mengusulkan dan meneruskan permohonan PSP, penghapusan, dan pemusnahan sebagai satker dan korwil kepada Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan di setiap tahunnya.

G. Upaya peningkatan kinerja

a. Meningkatkan kualitas pelaporan
b. Meningkatkan pengusulan PSP dan monitoringnya

34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Sehingga terdapat Surat Sekretaris Utama No B-KP.09.01.24.01.24.40 hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan;



2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Indikator dihitung dengan Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%);
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%);
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Tahunan	Kategori/ Notifikasi Warna
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	68,68	114,47	Sangat Baik

Realisasi persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 adalah 68,68. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu 114,47% dengan kategori sangat baik.



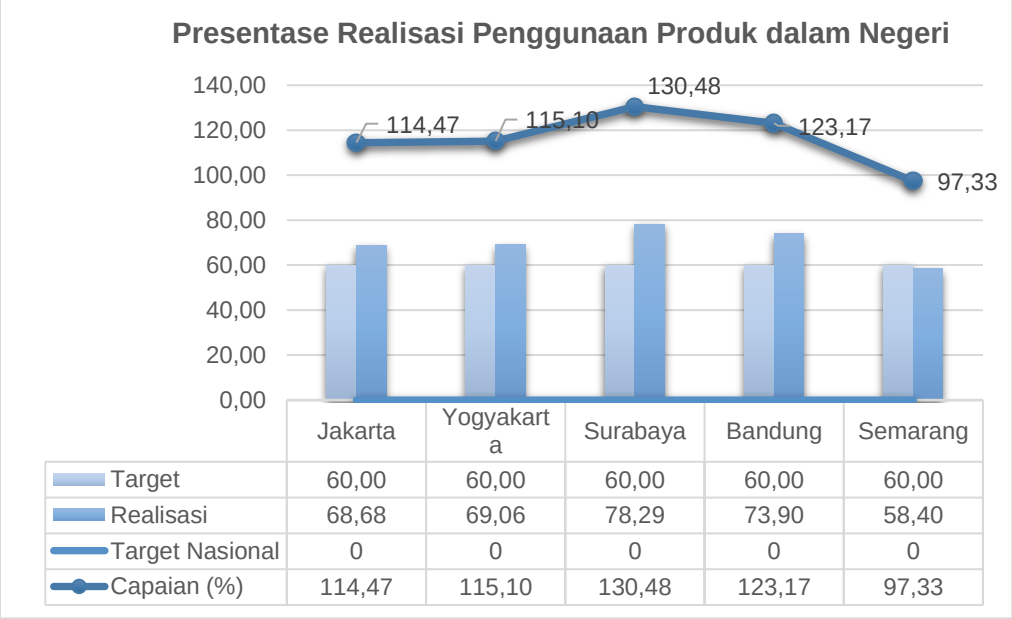
B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



	2020	2021	2022	2023	2024
Target					60,00
Realisasi			0	0	68,68
Capaian (%)					114,47

Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri merupakan direktif penugasan tahun 2024 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain



	Jakarta	Yogyakarta	Surabaya	Bandung	Semarang
Target	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Realisasi	68,68	69,06	78,29	73,90	58,40
Target Nasional	0	0	0	0	0
Capaian (%)	114,47	115,10	130,48	123,17	97,33



Perbandingan kinerja untuk capaian indikator kinerja ini membandingkan antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai Besar POM di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Kinerja 5 (lima) UPT ini disajikan pada grafik di bawah ini. Berdasarkan realisasi tersebut, diketahui bahwa hanya capaian Balai Besar POM di Semarang yang masuk dalam kategori “baik” karena capaiannya kurang dari 100%, sementara capaian Balai Besar POM di Jakarta dan Yogyakarta masuk dalam kategori “sangat baik” yakni lebih dari 100%. Balai Besar POM di Surabaya meraih capaian kinerja tertinggi tahun 2024 dengan 130,48%.
Perbandingan realisasi kinerja ini memberikan peluang pada UPT BPOM untuk bisa melakukan sinergi baik dalam mengatasi kendala yang dihadapi maupun untuk mitigasi risiko yang dapat menghalangi tercapainya target kinerja yang ditetapkan**.**

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serrta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan yang dilakukan BBPOM di Jakarta untuk mencapai persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri dilakukan dengan memprioritaskan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN) dan melaksanakan pengadaan melalui e-purchasing.
Upaya yang berkontribusi positif mendapatkan nilai terbaik sesuai target antara lain :

1) Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Sinergi antara dengan PPK dan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi paket antara PDN dan Impor;
3) Melakukan revisi paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan POK terakhir baik swakelola, penyedia maupun penyedia dalam swakelola;
4) Memeriksa dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan, apakah termasuk kategori PDN / TKDN atau Impor;
5) Melakukan percepatan pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal yang PDN



E. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	68,68	114,47%	145.121.050	128.727.166	88,70%	1,29	0,29	95%	Efisien

Hasil penilaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran di sasaran strategis Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara akuntabel termasuk ke dalam kategori efektif. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

Penggunaan anggaran untuk indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Jakarta mencapai 83,70%. Dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp145.121.050 dapat direalisasikan sebesar Rp128.727.166. Perhitungan TE menunjukkan angka 0,29 yang tergolong kategori efisien.

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran ini dapat terwujud dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri dalam rangka ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri antara lain pendampingan pengadaan di UPT POM. Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan.

G. Upaya Peningkatan Kinerja

Rencana tindak lanjut yang dilakukan BBPOM di Jakarta dalam meningkatkan capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, antara lain monitoring pelaksanaan kegiatan dalam



menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja BBPOM di Jakarta di tahun mendatang, berikut dirumuskan upaya peningkatan kinerja Nilai PDN antara lain dengan meningkatkan tagging PDN pada paket penyedia dan penyedia dalam swakelola yaitu:

1) paket jasa lainnya misalnya paket pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan;
2) kegiatan perjadin yaitu paket meeting, penginapan dan transport atau sewa kendaraan;
3) paket fasilitas perkantoran yaitu pembelian AC, reagen, alat laboratorium;
4) kegiatan perkantoran kebutuhan sehari-hari misalnya ATK, keperluan kantor;
5) pengadaan alat laboratorium



2.2. EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA (Evaluasi Tahun ke-5

1) Analisis Tren

Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)					PERKEMBANGAN KINERJA	
			2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)												
														1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,02	89,21	93,02	93,00	93,83	94,40	95,06	95,80	95,86	96,70	96,72		2022	80,95	2023	95,86	96,70	2	1	0,09	0,18	198,13	Meningkat (On The Track)
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	16,00	40,00	40,00	65,00	65,00	88,00	88,00	115,00	115,00		2020	16,00	2023	88,00	115,00	4	3	0,64	0,77	120,05	Meningkat (On The Track)
	Jumlah desa pangan aman	5,00	4,00	5,00	14,00	14,00	21,00	21,00	28,00	28,00	36,00	36,00		2020	5,00	2023	28,00	36,00	4	3	0,64	0,78	121,59	Meningkat (On The Track)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	6,00	6,00		2020	1,00	2023	4,00	6,00	4	3	0,57	0,59	103,95	Meningkat (On The Track)
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,29	90,00	99,29	100,00	90,85	100,00	99,52	100,00	100	100,00	100,00		2020	99,29	2023	100	100,00	4	3	0,00	0,00	133,37	Meningkat (On The Track)
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,03	89,00	81,03	100,00	96,42	100,00	99,83	100,00	98,51	100,00	100,00		2020	81,03	2023	98,51	100,00	4	3	0,05	0,07	124,60	Meningkat (On The Track)
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	54,37	32,00	54,37	54,00	58,61	58,00	60,39	61,00	61,54	65,00	65,00		2020	54,37	2023	61,54	65,00	4	3	0,05	0,04	92,34	Meningkat (Moderat)
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang	Indeks RB BBPOM di Jakarta	88,00	80,17	88,00	82,40	82,29	83,40	89,98	84,40	90,41	91,41	91,50		2020	88,00	2023	90,41	91,41	4	3	0,01	0,01	94,73	Meningkat (Moderat)
	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	81,00	78,08	81,00	79,10	79,85	80,00	80,34	81,00	82,34	83,66	83,70		2020	81,00	2023	82,34	83,66	4	3	0,01	0,01	67,62	Meningkat (Moderat)
SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	83,94	75,00	83,94	84,25	84,70	84,50	85,24	84,75	91,33	91,50	91,60		2020	83,94	2023	91,33	91,50	4	3	0,02	0,03	130,89	Meningkat (On The Track)
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	74,70	82,00	74,70	77,00	80,50	82,00	85,27	87,00	86,28	88,00	88,01		2020	74,70	2023	86,28	88,00	4	3	0,04	0,05	117,89	Meningkat (On The Track)
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	2,08	1,51	2,08	2,00	2,48	2,25	2,88	2,50	3,00	3,00	3,00		2020	2,08	2023	3,00	3,00	4	3	0,10	0,13	135,42	Meningkat (On The Track)
SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	89,26	90,00	89,26	91,90	86,00	92,50	91,84	93,70	92,50	89,90	90,00		2020	89,26	2023	92,50	89,90	4	3	0,00	0,01	668,78	Meningkat (On The Track)
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	95	100	95	95,00	100,00								2020	95	2023	0,00	0	4	3	-1,00	-1,00	100,00	Meningkat (On The Track)

Sasaran Program / Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program / Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (t*)					PERKEMBANGAN KINERJA	
			2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (tb)	Realisasi (rtb)	Tahun (t)	Realisasi (rt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)												
														1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76,74	86,00	76,74	80,00	74,88	81,00	83,39	82,00	87,48	87,50	88,50		2020	76,74	2023	87,48	87,50	4	3	0,03	0,04	133,83	Meningkat (On The Track)
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,26	78,00	95,26	95,00	94,73	95,5	94,16	96,00	92,90	96,50	96,50		2020	95,26	2023	92,90	96,50	4	3	0,00	-0,01	-257,13	Menurun
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,12	86,00	71,12	80,00	68,74	81,00	75,00	82,00	78,34	83,00	85,50		2020	71,12	2023	78,34	83,00	4	3	0,04	0,03	83,19	Meningkat (Moderat)
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,75	78,00	80,75	81,00	94,93	83,00	88,00	84,00	92,45	92,50	92,50		2020	80,75	2023	92,45	92,50	4	3	0,03	0,05	133,55	Meningkat (On The Track)
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				88,00	81,67	89,00	76,80	90,00	80,59	85,00	92,00		2021	81,67	2023	81,70	85,00	3	2	0,01	0,00	1,37	Stagnan
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	82,53	75,00	82,53	85,00	87,12	87,00	91,04	89,00	91,89	91,90	92,00		2020	82,53	2023	91,89	91,90	4	3	0,03	0,04	133,80	Meningkat (On The Track)
SK.3 Meningkatnya kepriasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Kepriasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	85,53	82,00	85,53	86,60	86,70	87,70	95,10	88,80	97,40	95,20	97,50		2020	85,53	2023	97,40	95,20	4	3	0,03	0,04	163,12	Meningkat (On The Track)
	Indeks Kepriasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,30	72,00	73,30	74,98	73,80	76,65	80,22	78,33	80,10	80,16	80,20		2020	73,30	2023	80,10	80,16	4	3	0,02	0,03	132,70	Meningkat (On The Track)
	Indeks Kepriasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,19	88,50	88,19	90,00	95,61	91,00	96,03	92,00	94,71	95,25	95,30		2020	88,19	2023	94,71	95,25	4	3	0,02	0,02	123,77	Meningkat (On The Track)
SK.4 Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan [illegible]	85,24	87,00	85,24	89,00	92,19	90,00	102,83	91,00	91,85	93,00	95,00		2020	85,24	2023	91,85	93,00	4	3	0,02	0,03	114,47	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	75,49	55,50	75,49	75,00	78,02	79,00	79,93	82,00	90,87	90,90	91,00		2020	75,49	2023	90,87	90,90	4	3	0,05	0,06	134,13	Meningkat (On The Track)
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepatwaktu	77,00	83,00	77,00	85,00	97,23	87,00	97,80	89,00	96,95	98,70	99,00		2020	77,00	2023	96,95	98,70	4	3	0,06	0,08	124,65	Meningkat (On The Track)
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	55,94	46,00	55,94	60,00	69,02	63,00	71,31	66,00	73,93	74,00	80,00		2020	55,94	2023	73,93	74,00	4	3	0,07	0,10	134,44	Meningkat (On The Track)
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,61	55,00	72,61	73,00	79,21	75,00	84,22	78,00	79,96	80,00	80,00		2020	72,61	2023	79,96	80,00	4	3	0,02	0,03	133,17	Meningkat (On The Track)
	Indeks Pelayanan Publik	4,00	3,51	4,00	4,20	4,54	4,30	4,72	4,40	4,84	4,90	4,94		2020	4,00	2023	4,84	4,90	4	3	0,05	0,07	126,05	Meningkat (On The Track)
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan [illegible]						77,00	80,95	79,00	79,00	100,00	100,00		2022	80,95	2023	79,00	100,00	2	1	0,11	-0,02	-21,61	Menurun

Analisis tren merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear menggunakan data target tahun 2024 dan prognosa realisasi tahun 2024 menggunakan kelompok analisis 1 dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra. Berdasarkan tabel analisis tren tersebut, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 5 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat. Dari hasil analisis tren terdapat 3 indikator dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 133,3%; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 131,88% dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan nilai perkembangan kinerja 135,31%.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 133,80%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya sebagai berikut: 1) Melaksanakan Lokus KIE Stunting di kabupaten yang belum pernah melaksanakan KIE secara luring ataupun daerah yang belum pernah di intervensi; 2) Menambah ragam KIE dan inisatif KIE serta pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah; dan 3) Melakukan revisi anggaran dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan KIE dan publikasi sampai keseluruh kabupaten

/kota.Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

3. Sasaran Strategis ini terdiri dari 3 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat. Dari hasil analisis tren terdapat 2 indikator dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 132,70% dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 122,30%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja pada 2 indikator tersebut dengan upaya sebagai berikut: 1) Meningkatkan *public relation* dan publikasi berbagai aktifitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai media; 2) Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi; 3) Meningkatkan *enggagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial (bagi bagi komisi); 4) Terus melakukan sosialisasi melalui KIE dan media sosial untuk memberi informasi lebih luas kepada masyarakat terkait semua jenis layanan yang diberikan BBPOM di Jakarta , termasuk waktu pelayanan, persyaratan, dan biaya/tarif dari setiap layanan; dan 5) meningkatkan kompetensi petugas layanan untuk dapat melayani semua customer, termasuk kelompok renta.

   Selanjutnya terdapat 1 indikator dengan hasil meningkat (moderat) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya 15 - < 100% dan diperkirakan tidak mencapai target pada tahun 2024 yaitu pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja 76%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pengisian survey untuk peserta daring dan luring agar dibuat bersamaan setelah panitia memberikan arahan cara pengisian survey kepada seluruh peserta bimbingan agar memiliki persepsi yang sama terhadap pertanyaan survey.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 7 indikator kinerja yang dianalisis, untuk indikator Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota tidak dilakukan analisis dikarenakan indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tren pada 7 indikator kinerja terdapat hasil bahwa seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan nilai perkembangan kinerja 114,67%; Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan nilai perkembangan kinerja 134,39%; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan nilai perkembangan kinerja 124,65%; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dengan nilai perkembangan kinerja 134,44%; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan nilai perkembangan 126,05%; Indeks Pelayanan Publik dengan nilai perkembangan kinerja 121,61%.

5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 4 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu pada indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan nilai perkembangan kinerja 120,05%; Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan nilai perkembangan kinerja 121,95%; Jumlah desa pangan aman dengan nilai perkembangan kinerja 119,76% dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan nilai perkembangan kinerja 103,95%.

6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Jakarta

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan nilai perkembangan kinerja 133,37% dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 133,85%.

7. Sasaran Strategis 6: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

   Diukur melalui indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 937,43 kategori Meningkat (moderat)

8. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja yang dianalisis, untuk indikator Nilai pengelolaan kearsipan tidak dilakukan analisis dikarenakan indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Pada hasil analisis tren terdapat hasil bahwa indikator Indeks RB BBPOM di Jakarta meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja pada indikator tersebut dengan upaya melakukan apel internal dan Gathering day.

9. Sasaran Strategis 9: Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal

   Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal dengan hasil meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun

2024 dengan nilai perkembangan kinerja sebesar 108,48%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Memberikan motivasi kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 2) Melakukan pendampingan intensif terhadap pegawai yang kinerjanya masih kurang.

10. Sasaran Strategis 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

    Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja dimana seluruh indikatornya memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024 yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan nilai perkembangan kinerja 117,69% dan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal dengan nilai perkembangan kinerja 135,42%. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemamouan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan; 2) Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat; 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat silakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya; 4) Terdapat penugasan PIC untuk masing- masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal; 5) Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji; 6) Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional maupun kegiatan mandiri yang diadakan di BBPOM di Jakarta

11. Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel

    Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja yang dianalisis sedangkan untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentasi Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tidak dilakukan analisis dikarenakan 3 indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra. Berdasarkan hasil analisis tren pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta terdapat hasil bahwa indikator tersebut memiliki perkembangan kinerja yang meningkat (*on the track)* dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya ≥100% dan diperkirakan dapat mencapai target tahun 2024.

2) Analisis Gap

No. Kode	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1 (2020)		T2 (2021)		T3 (2022)		T4 (2023)		T5 (2024 s.d TW III)		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
					T1	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	86,00	76,74	80,00	74,88	81,00	83,39	82,00	87,48	87,50	88,50	101,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase	78,00	95,26	95,00	94,73	95,5	94,16	96,00	92,90	96,50	96,50	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	86,00	71,12	80,00	58,74	81,00	75,00	82,00	78,34	83,00	85,50	103,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	78,00	80,75	81,00	94,93	83,00	88,00	84,00	92,45	92,50	92,50	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persentase			88,00	81,67	89,00	76,80	90,00	80,59	85,00	92,00	108,2	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diwilayah kerja BBPOM di	Indeks	75,00	82,53	85,00	87,12	87,00	91,04	89,00	91,89	91,90	92,00	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	82,00	85,53	86,60	86,70	87,70	95,10	88,80	97,40	95,20	97,50	102,4	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	72,00	73,30	74,98	73,80	76,65	80,22	78,33	80,10	80,16	80,20	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	88,50	88,19	90,00	95,61	91,00	96,03	92,00	94,71	95,25	95,30	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik diwilayah kerja BBPOM di Jakarta	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase	87,00	85,24	89,00	92,19	90,00	102,83	91,00	91,85	93,00	95,00	102,2	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase	55,50	75,49	75,00	78,02	79,00	79,93	82,00	90,87	90,90	91,00	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	83,00	77,00	85,00	97,23	87,00	97,80	89,00	96,95	98,70	99,00	100,3	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Persentase	46,00	55,94	60,00	69,02	63,00	71,31	66,00	73,93	74,00	80,00	108,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	55,00	72,61	73,00	79,21	75,00	84,22	78,00	79,96	80,00	80,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	4,00	4,20	4,54	4,30	4,72	4,40	4,84	4,90	4,94	100,8	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase					77,00	80,95	79,00	79,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1 (2020)		T2 (2021)		T3 (2022)		T4 (2023)		T5 (2024 s.d TW III)		Kinerja (Kolom 9)		Unit Pelaksana (Kolom 10)
					T1	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	89,21	93,02	93,00	93,83	94,40	95,06	95,80	95,86	96,70	96,72	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Nilai	16,00	16,00	40,00	40,00	65,00	65,00	88,00	88,00	115,00	115,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		19	Jumlah desa pangan aman	Nilai	4,00	5,00	14,00	14,00	21,00	21,00	28,00	28,00	36,00	36,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Nilai	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	6,00	6,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Jakarta	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	90,00	99,29	100,00	90,85	100,00	99,52	100,00	100	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	89,00	81,03	100,00	96,42	100,00	99,83	100,00	98,51	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase	32,00	54,37	54,00	58,61	58,00	60,39	61,00	61,54	65,00	65,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	24	Indeks RB BBPOM di Jakarta	Indeks	80,17	88,00	82,40	82,29	83,40	89,98	84,40	90,41	91,41	91,50	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		25	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	Nilai	78,08	81,00	79,10	79,85	80,00	80,34	81,00	82,34	83,66	83,70	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
9	SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	Indeks	75,00	83,94	84,25	84,70	84,50	85,24	84,75	91,33	91,50	91,60	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persentase	82,00	74,70	77,00	80,50	82,00	85,27	87,00	86,28	88,00	88,01	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	Indeks	1,51	2,08	2,00	2,48	2,25	2,88	2,50	3,00	3,00	3,00	100,0	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	Nilai	90,00	89,26	91,90	86,00	92,50	91,84	93,70	92,50	89,90	90,00	100,1	Sangat Baik	BBPOM di Jakarta
		30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	Nilai	100	95	95,00	100,00							0,0	Kurang Baik	BBPOM di Jakarta

Analisis gap merupakan perbandingan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis gap digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data realisasi tahun ke-5 dan target tahun ke-5. Analisis GAP merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Sangat Baik (>= 100% Pertahankan kinerja)	
2. Baik (91-99% Pertahankan kinerja)	
3. Cukup (60-90% Perlu upaya strategis)	
4. Kurang (< 60 % Perlu upaya strategis dan akselerasi perbaikan)	
5. Belum dapat disimpulkan (Tidak dapat disimpulkan)	

Berdasarkan tabel diatas pencapaian indikator kinerja Balai POM di Jakarta secara keseluruhan telah memperoleh hasil yang optimal. Rata-rata hasil pencapaian indikator dengan membandingkan target akhir Renstra telah memperoleh nilai kinerja diatas 100% dengan kategori Sangat Baik, masih terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai kinerja dibawah 100% namun masih pada kategori Baik. Hasil ini akan menjadi acuan Balai POM di Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dengan memperhatikan indikator dan kegiatan yang masih belum optimal sehingga dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya. Indikator tingkat efisiensi anggaran tidak dapat diukur pada metode analisis GAP ini karena indikator tersebut hanya diukur pada tahun 2020-2021, hal tersebut dilakukan karena ukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran pada sasaran ini sudah diukur secara lebih komprehensif pada indikator Nilai Kinerja Anggaran.



2.1. EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENCANA SRATEGIS

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	IKK 1.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Capaian Tahunan	75,00	82,53	110,04	85,00	87,12	102,49	87,00	91,04	104,64	89,00	91,89	103,25	91,90	92,00	100,11	104,11	103,48	Tercapai /On Track
	IKK 1.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	55,50	75,49	136,02	75,00	78,02	104,03	79,00	79,93	101,18	82,00	90,87	110,82	90,90	91,02	100,13	110,43		
	IKK 1.3 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	89,21	93,02	104,27	93,00	93,83	100,89	94,40	95,06	100,70	95,80	95,86	100,06	96,70	96,73	100,03	101,19		
	IKK 1.4 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian Tahunan	16,00	16,00	100,00	40,00	40,00	100,00	65,00	65,00	100,00	88,00	88,00	100,00	115,00	116,00	100,87	100,17		
	IKK 1.5 Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahunan	4,00	5,00	125,00	14,00	14,00	100,00	21,00	21,00	100,00	28,00	28,00	100,00	36,00	36,00	100,00	105,00		
	IKK 1.6 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Capaian Tahunan	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00		
Tujuan 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKK 2.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	Capaian Tahunan	75,00	83,94	111,92	84,25	84,70	100,53	84,50	85,24	100,88	84,75	91,33	107,76	91,50	87,79	95,95	103,41	108,62	Tercapai /On Track
	IKK 2.2 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Capaian Tahunan	82,00	74,70	91,10	77,00	80,50	104,55	82,00	85,27	103,99	87,00	86,28	99,17	88,00	91,24	103,68	100,50		
	IKK 2.3 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Capaian Tahunan	1,51	2,08	137,75	2,00	2,48	124,00	2,25	2,88	128,00	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100,00	121,95		
Tujuan 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	IKK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Tahunan	82,00	85,53	104,30	86,60	86,70	100,12	87,70	95,10	108,44	88,80	97,40	109,68	95,20	97,94	102,88	105,08	103,26	Tercapai /On Track
	IKK 3.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Capaian Tahunan	88,50	88,19	99,65	90,00	95,61	106,23	91,00	96,03	105,53	92,00	94,71	102,95	95,25	95,81	100,59	102,99		
	IKK 3.3 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Kumulatif							77,00	80,95	105,13	79,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	101,71		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Tujuan 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	IKK 4.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	86,00	76,74	89,23	80,00	74,88	93,60	81,00	83,39	102,95	82,00	87,48	106,68	87,50	87,86	100,41	98,58	102,52	Tercapai /On Track
	IKK 4.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78,00	95,26	122,13	95,00	94,73	99,72	95,50	94,16	98,60	96,00	92,90	96,77	96,50	92,73	96,09	102,66		
	IKK 4.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	86,00	71,12	82,70	80,00	58,74	73,43	81,00	75,00	92,59	82,00	78,34	95,54	83,00	84,24	101,49	89,15		
	IKK 4.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	78,00	80,75	103,53	81,00	94,93	117,20	83,00	88,00	106,02	84,00	92,45	110,06	92,50	86,10	93,08	105,98		
	IKK 4.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata				88,00	81,67	92,81	89,00	76,80	86,29	90,00	80,59	89,54	85,00	90,55	106,53	93,79		
	IKK 4.6 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Tahunan	72,00	73,30	101,81	74,98	73,80	98,43	76,65	80,22	104,66	78,33	80,10	102,26	80,16	85,89	107,15	102,86		
	IKK 4.7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti	Rata-rata	87,00	85,24	97,98	89,00	92,19	103,58	90,00	102,83	114,26	91,00	91,85	100,93	93,00	95,23	102,40	103,83		
	IKK 4.8 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	55,50	75,49	136,02	75,00	78,02	104,03	79,00	79,93	101,18	82,00	90,87	110,82	90,90	91,02	100,13	110,43		
	IKK 4.9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	46,00	55,94	121,61	60,00	69,02	115,03	63,00	71,31	113,19	65,00	73,93	113,74	74,00	83,23	112,47	115,21		
	IKK 4.10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	55,00	72,61	132,02	73,00	79,21	108,51	75,00	84,22	112,29	78,00	79,96	102,51	80,00	77,32	96,65	110,40		
	IKK 4.11 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	90,00	99,29	110,32	100,00	90,85	90,85	100,00	99,52	99,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,14		
	IKK 4.12 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kumulatif	89,00	81,03	91,04	100,00	96,42	96,42	100,00	99,83	99,83	100,00	98,51	98,51	100,00	100,00	100,00	97,16		
Tujuan 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	IKK 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	32,00	54,37	169,91	54,00	58,61	108,54	58,00	60,39	104,12	61,00	61,54	100,89	65,00	68,81	105,86	117,86	117,86	Tercapai /On Track
Tujuan 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	IKK 6.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kumulatif	32,00	54,37	169,91	54,00	58,61	108,54	58,00	60,39	104,12	61,00	61,54	100,89	65,00	68,81	105,86	117,86	117,86	Tercapai /On Track
Tujuan 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	IKK 7.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Capaian Tahunan	88,50	88,19	99,65	90,00	95,61	106,23	91,00	96,03	105,53	92,00	94,71	102,95	95,25	95,81	100,59	102,99	103,22	Tercapai /On Track
	IKK 7.2 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	83,00	77,00	92,77	85,00	97,23	114,39	87,00	97,80	112,41	89,00	96,95	108,93	98,70	99,53	100,84	105,87		
	IKK 7.3 Indeks Pelayanan Publik	Capaian Tahunan	3,51	4,00	113,96	4,20	4,54	108,10	4,30	4,72	109,77	4,40	4,84	110,00	4,90	4,94	100,82	108,53		
	IKK 7.4 Indeks RB UPT	Capaian Tahunan	80,17	88,00	109,77	82,40	82,29	99,87	83,40	89,98	107,89	84,40	90,41	107,12	91,41	93,01	101,75	105,28		
	IKK 7.5 Nilai AKIP UPT	Capaian Tahunan	78,08	81,00	103,74	79,10	79,85	100,95	80,00	80,34	100,43	81,00	82,34	101,65	83,66	83,02	99,23	101,20		
	IKK 7.6 Nilai Kinerja Anggaran UPT	Capaian Tahunan	90,00	89,26	99,18	91,90	86,00	93,58	92,50	91,84	99,29	93,70	92,50	98,72	89,90	91,56	101,85	98,52		
	IKK 7.7 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *	Rata-rata	100,00	95,00	95,00	95,00	100,00	105,26										100,13		

Tabel 9. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Srategis

Berdasarkan hasil analisis ketercapaian tujuan, semua tujuan mendapatkan nilai dengan kategori tercapai/on track dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



1) Tujuan 1: Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 103,48%
2) Tujuan 2: Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 108,62%
3) Tujuan 3: Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 103,26%
4) Tujuan 4: Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 102,52%
5) Tujuan 5: Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 117,86%
6) Tujuan 6: Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 117,86%
7) Tujuan 7: Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima dengan Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan 103,22%



2.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Masih banyak ditemukan produk kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan.	Desember 2024	Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional	selesai	Desember 2024	Dengan adanya tindak lanjut dan peningkatan kinerja terkait pengawasan produk kosmetik dan obat tradisional terutama produk yang tidak memenuhi syarat, maka jumlah produk yang TMK penandaan dan TMS hasil uji yang beredar di wilayah Jakarta dapat dikurangi.
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik TMK maupun TMS hasil uji	Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.	Desember 2024	koordinasi dengan Poksi Pemeriksan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan (Telah dilakukan pembinaan terhadap 63 sarana pangan olahan selama tahun 2024)	selesai	Desember 2024	Dengan adanya tindak lanjut dan peningkatan kinerja terkait pengawasan produk pangan, terutama temuan terkait produk pangan yang dinyatakan TMS maupun TMK, terdapat peningkatan kepatuhan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK penandaan.	Desember 2024	Melakukan koordinasi dengan pemeriksaan dalam pelaksanaan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK penandaan. (Telah dilakukan pembinaan terhadap 63 sarana pangan olahan selama tahun 2024)	selesai	Desember 2024	Dengan adanya penguatan investigasi, pemberian edukasi, pemantauan terhadap produk yang beredar maupun hasil uji, terdapat peningkatan kepatuhan para produsen terhadap produk pangan yang TMS hasil uji maupun TMK penandaan.
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Masih banyak ditemukan produk kosmetik dan obat tradisional yang TMK penandaan dan TMS hasil uji beredar di wilayah Jakarta	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan penandaan.	Desember 2024	Pembinaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional untuk selalu memenuhi ketentuan penandaan.	selesai	Desember 2024	Dengan adanya pendampingan pre market terhadap UMKM produksi kosmetik dan obat tradisional maka jumlah produk yang TMK penandaan dan TMS hasil uji yang beredar di wilayah Jakarta dapat dikurangi.
					Melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksaan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional	selesai	Desember 2024	



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Perlu adanya pemantauan dan pengawasan lebih lanjut terkait sarana produksi makanan sebagai pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sesuai perencanaan Masih banyak ditemukan produk Pangan yang tidak memenuhi syarat baik TMK penandaan maupun TMS hasil uji	Akhir tahun 2024	Melakukan Pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pangan	selesai	Desember 2024	Terdapat peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Capaian persentase sampel fortifikasi yang memenuhi syarat masih belum mencapai angka yang ditetapkan sesuai dengan target indikator kinerja	Peningkatan kemampuan uji sampel fortifikasi	Akhir tahun 2024	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN serta melakukan uji banding antar personel terkait sampel fortifikasi berupa garam dan minyak goreng sawit	selesai	Desember 2024	Terdapat peningkatan kapasitas pengujian dan capaian persentase sampel fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun ini sebesar 90,55% (capaian sebelumnya 89,54%)
		Perlu adanya pemantauan dan inspeksi lebih lanjut oleh bagian pemeriksaan terkait capaian sampel fortifikasi yang diuji di laboratorium	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	Akhir tahun 2024	Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap Standar yang ditetapkan maupun ketentuan CPPB dan Penandaan	selesai	Desember 2024	Pemantauan dan evaluasi hasil uji melalui SIPT terdapat peningkatan capaian sampel fortifikasi yang memenuhi syarat sebelum ditindaklanjuti oleh bagian pemeriksaan terkait ketentuan CPPB dan penandaan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan secara tatap muka/ langsung serta melakukan pemberian informasi melalui media sosial	Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mendorong Masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menggencarkan pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan terutama terkait kebiasaan membaca informasi pada label dan Cek KLIK	Triwulan I-IV	Melaksanakan KIE Obat dan Makanan bersama dengan Tokoh Masyarakat, Anggota DPR RI dan melakukan publikasi informasi berupa infografis dan video edukatif Obat dan Makanan melalui akun media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, X, Tiktok, dan Youtube) serta KIE secara daring dengan beragam tema dan materi sesuai dengan target KIE.	-	-	Intensifikasi pelaksanaan pemberian informasi melalui media sosial bersifat tematik dengan tujuan edukatif dengan bentuk konten yang lebih beraneka ragam. Pelaksanaan KIE dengan tema khusus terkait stunting, berkolaborasi dengan stakeholder terkait Optimalisasi KIE secara online atau elektronik melalui pengembangan inovasi JakKonek (KIE online atau elektronik) yang terhubung dengan platform digital stakeholder terkait.



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor hanya pada kegiatan KIE dan Penyuluhan tatap muka.	Penguatan koordinasi dan sinergi dalam melakukan penyuluhan dan KIE Obat dan Makanan dengan Stakeholder terkait terutama unsur penta heliks dalam pengawasan Obat dan Makanan, yaitu unsur akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, lintas sektor / pemerintah daerah, dan media.	Triwulan II-IV	Pelaksanaan forum konsultasi publik yang melibatkan unsur pentahelix dalam rangka penyusunan standar pelayanan BBPOM di Jakarta serta media untuk publikasi kegiatan strategis dan inovasi BBPOM di Jakarta Pelaksanaan KIE stunting untuk sasaran ibu hamil, ibu dengan balita stunting, dengan kolaborasi stakeholder terkait sebagai bagian aksi konvergensi TPPS. Publikasi melalui Videotron Pemprov DKI Jakarta yang merupakan bagian dari kolaborasi BBPOM Jakarta dengan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta	-	-	Terjalinnya koordinasi yang baik terkait informasi Obat dan Makanan publikasi kegiatan strategis BBPOM di Jakarta dengan stakeholder secara rutin serta terjalin kolaborasi terkait penyusunan konten materi Obat dan Makanan. Pelaksanaan KIE stunting bentuk kolaborasi dengan stakeholder terkait sebagai bagian dari aksi konvergensi TPPS Pelaksanaan KIE dengan tema khusus terkait stunting, berkolaborasi dengan stakeholder terkait Optimalisasi KIE secara online atau elektronik melalui pengembangan inovasi JakKonek (KIE online atau elektronik) yang terhubung dengan platform digital stakeholder terkait Publikasi secara rutin berkala pada Videotron Pemprov DKI Jakarta

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		Hasil monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan belum optimal digunakan untuk masukan peningkatan kesadaran Masyarakat.	Melakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut program KIE dan hasil survei untuk peningkatan kesadaran Masyarakat di masa mendatang.	Triwulan I-IV	Menyusun laporan pelaksanaan KIE Obat dan Makanan yang mencantumkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.			Hasil monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan indeks kesadaran Masyarakat.
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Terdapat 27 (dua puluh tujuh) permohonan rekomendasi carry over dari tahun 2023	Melakukan pelayanan prima dalam bentuk desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen dalam rangka permohonan izin penarapan CPPOB maupun desk registrasi	Akhir tahun 2024	Melalukan desk CAPA dan desk CPPOB setiap triwulan untuk setiap permohonan agar penerbitan rekomendasi dapat lebih capat	selesai	Desember 2024	Pada akhir tahun sarana yang carry over tagun 2023 telah diselesaikan yaitu sebanyak 27 (dua puluh tjuuh) keputusan
		Terdapat pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi untuk proses produksi	Melakukan kegiatan fasilitasi pelaku usaha UMKM pangan, produksi obat tradisional dan produksi kosmetik	Akhir tahun 2024	Melakukan kegiatan fasilitasi pelaku usaha UMKM pangan, produksi obat tradisional dan produksi kosmetik	selesai	Desember 2024	Pelaku usaha mendapatkan fasilitasi berupa bimbingan yang dapat mempercepat penerbitan rekomendasi
		Pelaku usaha merasa kesulitan unguk menjangkau pelayanan di BBPOM di Jakarta	Kegiatan Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang bertujuan mendekatkan pelayanan dengan pelaku usaha	Akhir tahun 2024	Melakukan kegiatan kerlling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta	selesai	Desember 2024	Pelaku usaha dipermudah karena pelayanan dilakukan di wilayah masing-masing

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta melalui berbagai media belum optimal	Meningkatkan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan melalui berbagai media promosi yang mempunyai cakupan luas dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, misalnya melalui iklan layanan masyarakat di media cetak maupun elektronik serta media sosial.	Triwulan I-IV	Melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait Obat dan Makanan melalui media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, X, Tiktok, dan Youtube)	selesai	Desember 2024	Telah dilakukan publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta melalui media cetak, media elektronik, media digital, dan media sosial
		Belum mempertimbangkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan publikasi dan kegiatan public relation terkait aktivitas kinerja pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.	Triwulan I	Perencanaan dan pelaksanaan KIE serta sosialisasi keamanan obat dan makanan dalam kerangka Perspektif Gender serta mengusung tema yang berbeda-beda pada pelaksanaannya.	selesai	Desember 2024	Sudah mempertimbangkan perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan
		Pelaksanaan KIE mengenai keamanan pangan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan pangan melalui operasional mobil laboratorium keliling ke sekolah, pasar tradisional dan pasar modern publikasinya belum intensif / optimal	Menyebarluaskan informasi hasil pengawasan, penindakan, pemberdayaan masyarakat serta pendampingan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik melalui media digital, media sosial, maupun media luar ruang seperti poster/ pamphlet. □	Triwulan I-IV	Pelaksanaan KIE serta sosialisasi keamanan pangan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan pangan melalui operasional mobil laboratorium keliling ke sekolah, pasar tradisional dan pasar modern, dipublikasikan secara intensif pada kanal-kanal BBPOM di Jakarta	selesai	Desember 2024	Peningkatan kegiatan mobil laboratorium keliling secara terpadu dan melibatkan pramuka sebagai kader keamanan pangan serta publikasi kegiatan tersebut dilaksanakan secara intensif pada kanal-kanal media BBPOM Jakarta

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
			sesuai kan dengan kondisi awal dan rencana aksi dan kondisi akhir (komoditinya pangan saja).					
		Ragam konten media sosial dan interaksi di media sosial belum secara aktif dilakukan	Meningkatkan engagement dengan masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan fitur media sosial melalui penyusunan konten yang fokus pada cerita yang menarik dan relevan atau interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial	Triwulan I-IV	Menyusun dan mempublikasi Kuis Obat dan Makanan-Bang Kiki melalui media sosial setiap bulannya sesuai dengan tema agenda setting	selesai	Desember 2024	Terdapat wadah konten media sosial yang interaktif
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut belum dilakukan per jenis layanan dan belum memasukkan saran/ masukan responden	Menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL) per jenis layanan atas tiga unsur dengan nilai terendah dan memerhatikan saran/ masukan responden	Triwulan II-III	Penyusunan RATL dan melaporkannya kepada Sekretariat Utama cq. Biro Hukum Organisasi BPOM melalui https://sapaapip.pom.go.id	selesai	Desember 2024	Sudah mengimplementasikan perbaikan pelayanan publik berdasarkan monitoring dan evaluasi hasil SKM sebelumnya dengan mempertimbangkan rencana aksi tindak lanjut belum dilakukan per jenis layanan dan belum memasukkan saran/ masukan respond.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
					Memasukkan konten e-book ke dalam inovasi JAKKONEK agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha			
					Melakukan sosialisasi/pemberian informasi melalui media sosial, subsite dan media lainnya secara berkala dan terjadwal (seminggu 1 kali) tentang sistem, mekanisme dan prosedur alur pelayanan publik dalam JAK KONEK			
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi indikator 91,85	Meningkatkan koordinasi dengan unit pusat BPOM dan UPT lain	Desember 2024	Koordinasi dengan unit pusat BPOM dan UPT lain	selesai	Desember 2024	Peningkatan realisasi indikator menjadi 95,23
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Terdapat Sebagian pelaku usaha yang belum menindaklanjuti hasil inspeksi	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan	Desember 2024	Memantau CAPA dari Pelaku Usaha dan memberikan sanksi yang lebih berat bila Matriks CAPA tidak dibuat sesuai timeline	selesai	Desember 2024	Terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha yangmenindaklanjuti hasil inspeksi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Terdapat 27 (dua puluh tujuh) permohonan rekomendasi carry over dari tahun 2023	Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratab CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA	Akhir Tahun 2024	Melalukan desk CAPA dan desk CPPOB setiap triwulan untuk menyelesaikan setiap permohonan baik yang carry over maupun tahun berjalan	selesai	Desember 2024	Pada akhir tahun sarana yang carry over tagun 2023 telah diselesaikan yaitu sebnayak 27 (dua puluh tjuuh) keputusan
		Sejumlah pelaku usaha belum memilki Izin edar	Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penerapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Akhir Tahun 2024	melakukan desk registrasi bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan	selesai	Desember 2024	sejumlah 465 (empat ratus enam puluh lima) pelaku usaha telah dibantu untuk mendapatkan dengan jumlah izin edar 1254 (Seribu dua ratus lima puluh empat)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		Terdapat perbedaan pemahaman terkait pelayanan public yang dilakukan	Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan presepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di Kelompok subtansi Pemeriksaan dan Kelompok subtansi Infokom. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan penyegaran kembali bagi petugas	Akhir Tahun 2024	Desiminasi hasil training / pelatihan antara sertifikasi dan infokom	selesai	Desember 2024	Terdapat persepsi yang seragam antara petugas yang memberikan pelayanan
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Banyak sarana industri pangan dan kosmetik TMK	Melakukan pembinaan terhadap sarana industri kosmetik dan pangan	Desember 2024	Melakukan pembinaan terhadap sarana industri kosmetik dan pangan	selesai	Desember 2024	Target indikator tercapai
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Indikator mencapai target	Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, klinik dan apotek	Desember 2024	Melakukan pembinaan terhadap sarana Distribusi pangan, klinik dan apotek	selesai	Desember 2024	Indikator tidak mencapai target



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
15	Indeks Pelayanan Publik	Informasi pelayanan publik sudah terpenuhi dan mutakhir pada subsite	Optimalisasi pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite secara harian dan lengkap.	Triwulan I 2025	Pemutakhiran informasi melalui media sosial dilakukan secara rutin harian	Pemutakhiran informasi pelayanan publik pada subsite dan Jak Digital dilakukan secara harian dan lengkap.	Januari 2025	Informasi pelayanan publik pada subsite dan portal Jak Digital lebih lengkap, mudah dijangkau, dan mutakhir
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Orkestrasi agenda setting edukasi obat dan makanan melalui media sosial belum rutin dilakukan dan jumlah konten nya masih terbatas.	Optimalisasi pemanfaatan media digital dalam pemberian informasi dan KIE Obat dan Makanan	Triwulan IV 2024	Publikasi informasi obat dan makanan sesuai dengan orkestrasi agenda setting BPOM dalam rangka edukasi kepada masyarakat terkait imbauan Cek KLIK, Kata BPOM, stunting, dan BPOM Mobile.	selesai	Desember 2024	Peningkatan orkestrasi agenda setting edukasi obat dan makanan melalui media sosial dengan memperbanyak konten dan variasi tema dengan memanfaatkan tren (riding the wave).
		Pengawalan kader keamanan pangan masih terbatas pada pelaksanaan pelaporan kegiatan secara mandiri	Optimalisasi pemanfaatan Kader Keamanan Pangan dan Kader Pramuka Sadar Obat dan Makanan sebagai kepanjangan tangan BBPOM di Jakarta dalam melakukan KIE Obat dan Makanan kepada Masyarakat.	Triwulan IV 2024	Terlaksana refreshment materi keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan serta mengakomodasi keterlibatan Kader pramuka dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan sekaligus sebagai media amplifikasi informasi obat dan makanan (seperti pesan Cek KLIK) yang berperan sebagai agen perubahan pada komunitas masyarakat.	selesai	Desember 2024	Intensifikasi kegiatan pengawalan dilakukan dengan refreshment pembinaan untuk mengajak Kader sebagai agen perubahan BPOM pada komunitas masyarakat.



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Belum adanya koordinasi terkait teknis keseragaman dokumen pengumpulan dokumen dalam rangka sertifikasi sekolah dengan PJAS aman sehingga masih ada sekolah yang belum memenuhi kriteria dokumen secara lengkap	Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman.	Triwulan IV 2024	Sudah dilakukan koordinasi terkait teknis keseragaman dokumen pengumpulan dokumen dalam rangka sertifikasi sekolah dengan PJAS aman melalui grup Whatsapp yang mudah diikuti oleh sekolah.	selesai	Desember 2024	Pelaksanaan penilaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman berjalan lebih efektif karena sudah ada keseragaman dokumen sehingga penilaian dapat dilakukan dengan lebih objektif.
20	Jumlah desa pangan aman	Pengawalan program rencana aksi dilakukan melalui pelaporan kegiatan melalui forum komunikasi dan aplikasi pelaporan.	Penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi terhadap program keamanan mandiri oleh kelurahan-kelurahan intervensi tahun sebelumnya dalam rangka pengawalan	Triwulan IV 2024	Pelaksanaan pengawalan keamanan pangan dengan pemberian refreshment materi keamanan pangan kepada kader keamanan pangan kelurahan intervensi 2020-2023 sekaligus monitoring dan evaluasi program keamanan pangan mandiri melalui forum pertemuan tatap muka	selesai	Desember 2024	Monitoring dan evaluasi program rencana aksi dilakukan dengan lebih efektif sekaligus mendorong Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan dalam memberikan edukasi keamanan pangan kepada komunitas kelurahan.
		Penyusunan program rencana aksi dilakukan oleh Tim dan Kader Keamanan Pangan Kelurahan masing-masing	Pendampingan terhadap Tim dan Kader Keamanan Pangan kelurahan intervensi tahun 2024 dalam melakukan penyusunan program keamanan pangan mandiri	Triwulan IV 2024	Pendampingan penyusunan program rencana aksi keamanan pangan mandiri secara tatap muka sehingga dihasilkan program rencana aksi yang lebih relevan dan dapat dilaksanakan.	selesai	Desember 2024	Kelurahan intervensi tahun 2024 telah memiliki program rencana aksi keamanan pangan kelurahan mandiri.
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Masih ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian oleh peugas pasar karena kesalahan penentuan parameter uji	Intensifikasi komunikasi dengan petugas pengelola pasar dalam rangka monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian tahap 2 sesuai dengan sasaran	Triwulan IV 2024	Monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian dilakukan dengan lebih intens terhadap petugas pasar dan dilakukan pendampingan dalam prosesnya.	selesai	Desember 2024	Penurunan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian oleh petugas pasar.



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
			dan kerangka acuan kerja.					
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 sudah diterapkan namun masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan	Desember 2024	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan	selesai	Desember 2024	Sudah terpenuhinya penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 dengan mengadakan refreshment dan bimbingan teknis terkait
		Sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 sudah diterapkan namun masih perlu ditingkatkan	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Desember 2024	Melakukan program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor	selesai	Desember 2024	Dengan adanya program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor, diharapkan kerusakan alat dapat dikurangi dan penggantian spare part dapat dilakukan tepat waktu sebelum terjadi kerusakan.
		Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	Pengembangan kompetensi personil baik personal lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal	Desember 2024	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN	selesai	Desember 2024	Sudah terlaksananya pengembangan kompetensi personil dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal sesuai perencanaan



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 sudah diterapkan namun masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan.	Akhir tahun 2024	Penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan	selesai	Desember 2024	Kompetensi personal masih perlu ditingkatkan dengan melakukan bimbingan teknis sesuai dengan perencanaan
		Kondisi alat laboratorium seringkali mengalami kerusakan dan memerlukan penggantian spare part	Program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor).	Akhir tahun 2024	Melakukan program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor			Dengan adanya program pemeliharaan alat yang bekerjasama dengan vendor, diharapkan kerusakan alat dapat dikurangi dan penggantian spare part dapat dilakukan tepat waktu sebelum terjadi kerusakan.
		Kompetensi personal masih perlu ditingkatkan dengan melakukan bimbingan teknis sesuai dengan perencanaan	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal.	Akhir tahun 2024	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN			Sudah terlaksananya pengembangan kompetensi personil dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal sesuai perencanaan
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Diperlukan peningkatan koordinasi dengan CJS untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penindakan	Pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan dalam perkara dan koordinasi dengan CJS yang lebih intensif	Triwulan I-IV	Telah dilakukan gelar perkara dan koordinasi secara periodik	selesai	Desember 2024	Telah terwujud persamaan persepsi dan pemahaman dalam upaya pembuktian dan pemenuhan unsur-unsur yang disangkakan melalui pelaksanaan gelar perkara dan ekspose perkara



No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Presentase pemenuhan standar ruang lingkup (khususnya obat) masih relatif rendah	Penambahan sampel kelas terapi antiinfeksi dan dermatologis yang belum pernah dilakukan pengujiannya	Desember 2024	Koordinasi dengan tim sampling dalam region Semarang untuk penambahan jenis sampel yang belum pernah dilakukan pengujian	selesai	Desember 2024	Presentase pemenuhan standar ruang lingkup dapat meningkat menjadi 93,44%
		Presentase pemenuhan standar kompetensi masih belum maksimal	Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara secara internal maupun eksternal.	Desember 2024	Melakukan Bimtek Internal dan magang di P3OMN untuk semua Laboratorium	selesai	Desember 2024	Standar kompetensi dapat ditingkatkan menjadi 97,93%
		Presentase pemenuhan standar peralatan masih belum maksimal	Pengadaan alat laboratorium supaya dapat memenuhi standar peralatan	Desember 2024	Pengadaan alat laboratorium yaitu GCMS sebanyak 1 unit, oven 1 unit, ultrasonic degasser 1 unit dapat menambah standar peralatan yang telah ditetapkan	selesai	Desember 2024	Standar peralatan dapat ditingkatkan menjadi 82,35%

2.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Balai Besar POM di Jakarta senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran tahun 2024 untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Jakarta pada tahun selanjutnya dalam bentuk Laporan evaluasi internal bulanan, Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
2. Informasi pada laporan kinerja tahun 2024 ini digunakan sebagai dasar reviu dan revisi target kinerja tahun selanjutnya serta mengidentifikasi perkembangan kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan kinerja periode selanjutnya
3. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Balai POM di Jakarta tahun 2024, terdapat beberapa Indikator yang akan dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis 2025-2029. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penerapan indikator yang SMART dan target kinerja berbasis data yang relevan dengan kondisi terkini



Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
A. Perencanaan Kinerja			
a.1	Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai termasuk mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya.	Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, ataupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	Sudah terlampir pada link data dukung Matriks A.2 Reviu Target
a.2	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja (perubahan indikator dan target) secara memadai.	1. Menyelaraskan indikator kinerja dan target indikator kinerja terhadap PK, evaluasi rencana strategis, dan Manual IKU sampai ke level eselon II antara lain dengan melakukan kaji ulang dokumen perencanaan ; 2. Menyertakan data dukung dan/atau baseline capaian yang memadai jika ada perubahan target maupun nomenklatur	Sudah terlampir pada link data dukung matriks dentifikasi penyebab, rencana dan bukti/progres tindak lanjut atas ketidakselarasan indikator kinerja pada renstra/reviu renstra, IKU, PK, RAPK tahun 2023 sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2023
a.3	Menyusun MPH dengan memastikan seluruh indikator Kepala Unit Kerja telah diturunkan sampai ke level individu/anggota tim.	Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2024	Sudah terlampir pada link data dukung
B. Pengukuran Kinerja			
b.1	Menyempurnakan SOP pengumpulan/pelaporan data kinerja dengan menambahkan mekanisme dan otorisasi yang jelas dalam hal terjadi kesalahan/perubahan data dan menetapkan mutu baku waktu untuk setiap aktivitas.	Melakukan revisi SOP dengan menambahkan mutu baku waktu untuk setiap aktivitas dan mencantumkan penjelasan pada SOP No.POM.12.01.CFM.02.SOP.01.IK.07A.01 perihal kegiatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja	Sudah terlampir pada link data dukung

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
b.2	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga terdapat keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.	Membangun wadah pengumpulan data dukung kinerja yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada https://bit.ly/Sipitung24	Sudah terlampir pada link data dukung
b.3	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi dengan baik serta konsisten dalam terkait arahan dalam kendala pengukuran/pencapaian kinerja terutama pada kinerja yang targetnya belum tercapai.	Membuat notulen pada rapat monitoring dan evaluasi serta menyertakan foto kehadiran pimpinan pada saat pembahasan.	Sudah terlampir pada link data dukung
C. Pelaporan Kinerja			
c.1	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi: 1) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; 2) Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan Informasi 1. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 2. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.	Sudah terlampir pada link data dukung
c.2	Memastikan keselarasan penyajian data realisasi/capaian kinerja antara RHPK, laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim dan laporan tahunan.	Melakukan kaji ulang data kinerja RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan sudah untuk memastikan sudah selaras	Sudah terlampir pada link data dukung
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ RATL	Timeline
d.1	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai, khususnya pada indikator yang targetnya tidak tercapai setiap triwulannya.	Menyempurnakan Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan hambatan/kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang memadai	Sudah terlampir pada link data dukung
d.2	Memanfaatkan hasil pelaksanaan evaluasi internal dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	Sudah terlampir pada link data dukung
E. Capaian Kinerja			



2.3. REALISASI ANGGARAN

Pagu Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per 31 Desember 2024 dengan pagu sebesar 96,16% dari pagu Rp50.625.276.000,00, maka realisasi periode ini di atas target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada triwulan IV sebesar 92%. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1082/MK.02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, total automatic adjustment (AA) BBPOM di Jakarta sebesar Rp1.661.174.000,00. Kemudian atas dasar surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas (perjadin) Kementerian/Lembaga TA 2024, jumlah blokir perjadin Balai Besar POM di Jakarta sebesar Rp588.526.000,00. Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 dengan pagu dikurangi blokir (AA dan perjadin) adalah sebesar 99,89% dari pagu Rp48.729.265.000,00.

Terdapat 12 (dua belas) kali revisi DIPA di tahun 2024 sebagai berikut:

Revisi ke-	Tanggal	*Digital Stamp*	Pagu (dalam Rupiah)
12	31 Des 24	*8597 6609 4886 1414*	50.625.276.000
11	30 Nov 24	8597 6609 4886 1414	50.625.276.000
10	06 Nov 24	3761 7510 0490 6047	50.625.276.000
9	04 Nov 24	6912 6685 0789 2310	50.625.276.000
8	14 Okt 24	6912 6685 0789 2310	50.625.276.000
7	06 Sept 24	0355 3500 4223 5050	50.625.276.000
6	16 Agst 24	0355 3500 4223 5050	50.119.096.000
5	16 Juli 24	4095 3078 3022 1037	51.319.096.000
4	05 Juni 24	4095 3078 3022 1037	51.319.096.000
3	23 April 24	4095 3078 3022 1037	51.319.096.000
2	21 Feb 24	4095 3078 3022 1037	51.319.096.000
1	31 Jan 24	4095 3078 3022 1037	51.319.096.000
0	14 Nov 23	9156 1208 5605 8093	51.319.096.000



Tabel 131. *Revisi DIPA BBPOM di Jakarta Tahun 2024*

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp50.625.276.000,00, telah direalisasikan sebesar 48.680.482.932,00 atau 96,16%. Realisasi ini berada di atas target penyerapan anggaran triwulanan yang ditetapkan pada periode ini sebesar 91,89%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132. *Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan*

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,86	100,41%	782.211.200	761.690.535	97,38%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96,50	92,73	96,09%	469.973.750	456.349.454	97,10%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	84,24	101,49%	782.211.200	761.690.535	97,38%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,50	86,10	93,08%	469.973.750	456.349.454	97,10%
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,55	106,53%	199.388.300	187.258.644	93,92%
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	91,90	92,00	100,11%	259.551.850	257.393.312	99,17%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95,20	97,94	102,88%	262.581.900	212.662.998	80,99%
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,16	85,89	107,15%	370.613.900	370.076.200	99,85%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,25	95,81	100,59%	115.919.900	99.327.344	85,69%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	95,23	102,40%	172.809.900	167.872.316	97,14%
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,90	91,02	100,13%	172.809.900	167.872.316	97,14%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,70	99,53	100,84%	1.204.810.400	983.663.385	81,64%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	83,23	112,47%	225.069.600	223.663.385	99,38%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	77,32	96,65%	984.599.700	951.442.825	96,63%
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	100,00	100,00%	394.513.600	347.948.205	88,20%
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	95,00	100,00	105,26%	338.181.950	335.982.762	99,35%
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,70	96,73	100,03%	4.389.056.900	4.369.646.177	99,56%
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	115,00	116,00	100,87%	969.243.000	951.165.840	98,13%
20	Jumlah desa pangan aman	36,00	36,00	100,00%	1.355.998.000	1.288.442.187	95,02%
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6,00	6,00	100,00%	170.684.000	159.112.004	93,22%
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00%	1.337.535.000	1.253.997.242	93,75%
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	120,00	120,00%	1.087.030.300	1.008.327.936	92,76%
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65,00	68,81	105,86%	1.272.352.000	1.154.342.883	90,73%
25	Indeks RB BBPOM di Jakarta	91,41	93,01	101,75%	6.100.708.950	5.725.162.130	93,84%
26	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	83,66	83,02	99,23%	7.858.495.050	7.115.941.585	90,55%
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	93,42	95,49	102,22%	25.935.450	25.420.814	98,02%
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	91,50	87,79	95,95%	10.252.990.770	9.615.653.770	93,78%
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,00	91,24	103,68%	2.462.606.500	2.211.110.879	89,79%
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	3,00	3,60	120,00%	157.495.500	157.495.500	100,00%
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	89,90	91,56	101,85%	6.166.950.750	5.789.352.359	93,88%

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,03	100,00	104,13%	145.121.050	128.727.166	88,70%
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86,00	98,53	114,57%	351.141.030	331.411.960	94,38%
34	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	68,68	114,47%	145.121.050	128.727.166	88,70%

Tabel 133. *Rincian realisasi anggaran per Indikator*

Berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 99,89% dan belanja barang sebesar 94,41%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja modal 88,70%. Dibandingkan dengan target penyerapan anggaran per triwulan IV, berdasarkan pasal 9 PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, belanja pegawai minimal 95%, belanja modal minimal 90%, dan belanja barang minimal 90%. Terdapat selisih lebih sebesar 9,89% pada belanja pegawai, terdapat selisih lebih 4,41% pada belanja barang dan terdapat selisih -1,30% pada belanja modal.

Untuk Mitigasi dan Early Warning Semester 1 tahun anggaran 2025, agar dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menetapkan pejabat pengelola keuangan
b. mengajukan permintaan UP sehingga realisasi anggaran dapat dimaksimalkan
c. meningkatkan koordinasi internal antara pihak yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan;
d. cermat dalam pengajuan SPM GUP/TUP,
e. segera mengeksekusi belanja kontraktual paling lama pada triwulan II.

3.16. EFISIENSI KINERJA DAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian *input* (realisasi anggarannya).

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$



Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE ≤ SE maka dianggap tidak efisien.

Tabel 134. *Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja*

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

No.	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Ket.
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	98,20	99,92	0,98	-0,02	75 %	Tidak Efisien
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	104,80	100,00	1,05	0,05	100 %	Efisien
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	100,88	99,36	1,02	0,02	100 %	Efisien
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	99,37	99,98	0,99	-0,01	75 %	Tidak Efisien
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	100,97	99,58	1,01	0,01	100 %	Efisien



No.	Sasaran Strategis	Output	Input (anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Ket.
	di wilayah kerja BBPOM di Jakarta						
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	100,00	99,93	1,00	0,00	100 %	Efisien
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	123,46	99,99	1,23	0,23	95 %	Efisien
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal	99,65	99,88	1,00	0,00	95 %	Efisien
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal	96,71	99,89	0,97	-0,03	75 %	Tidak Efisien
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	101,61	99,98	1,02	0,02	100 %	Efisien
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel	122,63	99,55	1,23	0,23	95 %	Efisien

Terlihat pada Tabel 135, terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang efisien dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang tidak efisien, yaitu SK1 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta (-0,01) dan SK4 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta (-0,01). Hal ini disebabkan realisasi kinerja sasaran strategis tersebut lebih rendah dari realisasi Terkelolanya keuangan BBPOM di Jakarta secara akuntabel anggarannya. Namun demikian, secara total terdapat Efektivitas Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Tingkat Efisiensi 0,26.

Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

1. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat prioritas;
2. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi, Rapat Koordinasi dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan lainnya;



3. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, sehingga menghemat biaya terutama untuk dokumentasi dan pencetakan;
4. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain sehingga capaian kinerja dapat meningkat.



BAB IV
PENUTUP



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Tahun 2024 merupakan tahun pamungkas periode RPJMN 2020-2024. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi untuk menyelesaikan target kinerja tahunan dan target RPJMN. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Tahun 2024 untuk 11 sasaran strategis diukur melalui 34 indikator kinerja utama. Balai Besar POM di Jakarta berhasil memperoleh NPSS Tahun 2024 sebesar 105.13 dengan predikat Istimewa. Keberhasilan ini adalah buah dari upaya pelaksanaan strategi capaian kinerja secara konsisten dan berkesinambungan serta dukungan berbagai pihak terkait.

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 2 sasaran strategis pada kategori Cukup yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT masih belum memenuhi target dengan nilai capaian 99.52% dan Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan nilai capaian 95.95%. Untuk sasaran strategis Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dikecualikan dari perhitungan NPSS sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 disebabkan perubahan definisi operasional indikator.

Sedangkan 9 Sasaran Strategis lain memperoleh kriteria “Sangat Baik” (100% < x < 120%) dengan range nilai terendah 100.11% pada sasaran strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan nilai tertinggi sebesar 120% pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah.

Capaian kinerja terhadap 34 indikator kinerja utama, didapat hasil 26 indikator mencapai target dengan kriteria “Sangat Baik” (100% < x < 120%), 3 indikator mencapai kriteria “Baik” (=100%) dan 5 indikator mempunyai capaian



“Cukup” (70% ≤ x < 100). Uraian terhadap capaian IKU dengan kategori cukup akan dijelaskan pada bagian Saran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar sebesar Rp 50.625.276.000 (lima puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan nilai *Automatic Adjustment* anggaran yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 1.896.011.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sebelas ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 48.680.482.932 (empat puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga persentase serapan anggaran dengan *Automatic Adjustment* sebesar 96,16% dan tanpa *Automatic Adjustment* sebesar 99,93%.

SARAN

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang memiliki kriteria Cukup pada Tahun 2024. Terhadap capaian ini, akan dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut :

1. **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

IKU ini diukur terhadap pengujian 757 sampel acak yang memberikan hasil 702 sampel memenuhi syarat (92,73%) dan terdapat 55 sampel tidak memenuhi syarat (7.26%) dengan uraian 45 sampel tidak memenuhi syarat pengujian kimia atau mikrobiologi dan 10 sampel tidak memenuhi ketentuan Penandaan (TMK Penandaan). Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pada tahun berikutnya adalah :

. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

a. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik *(GMP)* sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi



standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

b. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.

c. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

2. Persentase Makanan yang aman & bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKU ini diukur dari pengujian terhadap 187 sampel targeted dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 161 sampel (86,10 %) dan sebanyak 26 sampel (13,90%) tidak memenuhi syarat. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pada tahun berikutnya adalah :

. Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu

a. Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik *(GMP)* sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi

b. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak



memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta

c. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

3. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini adalah tingginya jumlah sarana TMK karena adanya program intensifikasi pengawasan antara lain intensifikasi pengawasan OOT di apotek dan PBF, Intensifikasi Pengawasan Depot Jamu, Intensifikasi Pengawasan Lebaran dan Nataru, Kasus diversi obat di apotek dan PBF serta Intensifikasi Pengawasan Kosmetika. Selain itu hasil tindak lanjut permintaan dari UPT Lain dan penelusuran memberikan hasil sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.

Upaya yang dilakukan BBPOM Jakarta untuk perbaikan ke depannya adalah :

a. Memberikan pembinaan dalam bentuk pendampingan penyusunan CAPA bagi sarana-sarana yang memperoleh sanksi Penghentian Sementara Kegiatan, memberikan pembinaan secara langsung pada saat pemeriksaan sarana, koordinasi dengan lintas sektor utamanya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Binwasdal
b. Memberikan sanksi yang tegas seperti pemusnahan produk tanpa izin edar, penghentian sementara kegiatan, dll.
c. Memberikan peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan yang berlaku harus selalu ditingkatkan dan diupdate sehingga kegiatan produksi obat dan makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Mengadakan pertemuan untuk persamaan persepsi petugas dalam pola tindak lanjut serta mengupdate peraturan-peraturan baru



4. Nilai AKIP

Realisasi nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 83.02 telah memperoleh predikat A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel). Capaian ini belum memenuhi target nilai 83.66 yang disebabkan menurunnya nilai pada komponen pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pada tahun mendatang adalah :

a. Melakukan publikasi laporan kinerja tepat waktu pada aplikasi E SAKIP Reviu esr.menpan.go.id
b. Melakukan usulan reviu target berdasarkan baseline capaian untuk menetapkan target yang SMART
c. Menyempurnakan SOP Mikro Pelaporan Data Kinerja dengan mekanisme perubahan data kinerja
d. Memastikan kesesuaian data antara data sumber dan laporan terkait (Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Interim, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Tahunan)

5. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta

Nilai Indeks Profesionalitas ASN belum mencapai target terutama disebabkan perubahan definisi operasional sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2024 menjadi tidak *achieveable*. Perubahan definisi operasional tertuang pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024. Perubahan definisi operasional pada pertengahan tahun ini tidak memungkinkan untuk melakukan revisi target. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun mendatang adalah :

a. Peningkatan Pendidikan formal pegawai melalui tugas belajar baik dengan pembiayaan beasiswa maupun pembiayaan mandiri.
b. Melakukan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform IDEAS pada subsite Pusat Pengembangan SDM POM
c. Menyelenggarakan bimtek teknis dan manajerial sesuai dengan gap kompetensi pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek



yang diselenggarakan oleh instansi pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

d. Memberikan tantangan penugasan bagi pegawai yang dinilai mampu dalam melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya untuk memperkaya kompetensi pegawai.
e. Mengoptimalkan pola distribusi penilaian kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian nilai NPSS Unit Kerja
f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kedisplinan pegawai melalui Inovasi IKRAR MANTAN TELATAN, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin akan potensi pelanggaran hukuman disiplin terkait jam kerja.



LAMPIRAN



PENGHARGAAN TAHUN 2024

Penghargaan atas dedikasi dan komitmennya secara proaktif mengimplementasikan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Lam Indonesia) memberikan pendampongan untuk naik kelas, sehingga berhasil menibgkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam (10 Desember 2024)



Penghargaan atas pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium s/d TW III tahun 2024 tertinggi ke-8 dengan nilai 88,47% (1 Oktober 2024)



Penghargaan Pelayanan Publik dengan kategori '' Pelayanan Prima''



Penghargaan UMKM Jawara Top 8 Inovasi 2024



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.8 Persentase
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.06 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81.7 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.52 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 45,651,891,000 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25,732,654,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,919,237,000

Jakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAKARTA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

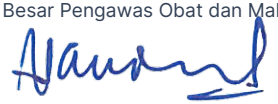
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,356,864,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	97,400,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	594,401,600
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48,950,720
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	55,943,680
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.5	80.2	92.64	92.98	93	93.77	93.77	94	95.5	96	100	100	28,893,750
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	26,327,160
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	193,065,840
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	95.52	587,506,250
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	317,831,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	28,893,750
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	31	38	46	53	59	64	13,680,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65.1	65.1	65.1	69.9	69.9	69.9	70.5	70.5	70.5	72.8	8,186,382,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	87.06	9,733,228,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			20	40	55	55	65	70	70	90	90	15	516,930,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			30	30	45	50	65	80	80	85	100	5	779,693,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			25	40	55	55	75	75	85	100	100	1	118,779,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1	7.43	14.86	22	29.72	37.15	44.58	52.01	59.44	66.87	74.3	81.7	341,171,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	43	45	48	50	53	55	58	60	63	66	70	392,564,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	452,653,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	577,890,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												93.5	5,750,710,750
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.52	5,150,710,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5,150,710,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.05	5,150,710,750
														Total	45,651,891,000

Jakarta, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta



SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	063-432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	175	PAGU	19,180,731,000	28,542,124,000	2,902,421,000	0	0	0	0	0	0	50,625,276,000
				REALISASI	19,159,627,750	26,946,311,862	2,574,543,320							48,680,482,932
				PERSENTASE	(99.89%)	(94.41%)	(88.70%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(96.16%)
				SISA	21,103,250	1,595,812,138	327,877,680	0	0	0	0	0	0	1,944,793,068
			TOTAL	**PAGU**	**19,180,731,000**	**28,542,124,000**	**2,902,421,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,625,276,000**
				REALISASI	**19,159,627,750**	**26,946,311,862**	**2,574,543,320**							**48,680,482,932**
				PERSENTASE	**(99.89%)**	**(94.41%)**	**(88.70%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(96.16%)**
				SISA	**21,103,250**	**1,595,812,138**	**327,877,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,944,793,068**

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	063	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	94.87	97.29	96.00	100.00	98.31	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.23	19.46	9.60	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	97.44		97.90				100.00				

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

NOMOR : PR.09.03.2.01.25.42

Yth. : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala UPT

Dari : Sekretaris Utama

Hal : Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan melalui aplikasi SIPT **paling lambat tanggal 31 Januari 2025** dengan status sudah kirim dari Kepala UPT ke Pusat. Data tersebut juga akan digunakan untuk penghitungan capaian IKU BPOM.
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang ditarik oleh aplikasi SIMAKIN untuk penilaian SKP triwulan IV tahun 2024 (evaluasi siklus pendek) merupakan **nilai sementara** karena terdapat beberapa indikator kinerja yang belum diperoleh realisasinya baik dari internal maupun eksternal BPOM. NPSS akan dilakukan pembaruan pada saat penilaian SKP tahunan (evaluasi siklus penuh).
3. Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” akan dikecualikan dari penghitungan NPSS karna terdapat perubahan definisi operasional indikator.
4. Konversi capaian indikator kinerja mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Beberapa indikator kinerja yang dapat dikonversi sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
a.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➢ Balai Besar/Balai POM 100% ➢ Loka POM 50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja	Ketentuan
		Realisasi: ➢ Balai Besar/Balai POM 100% ➢ Loka POM 50%
b.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target pada Perjanjian Kinerja: ➢ Balai Besar/Balai POM 100% ➢ Loka POM 50% Realisasi: ➢ Balai Besar/Balai POM 100% ➢ Loka POM 50%
c.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target pada Perjanjian Kinerja: ➢ Balai Besar/Balai/Loka POM 100% Realisasi: ➢ Balai Besar/Balai/Loka POM 100%
d	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	Target pada Perjanjian Kinerja: ➢ Seluruh unit kerja 3 Realisasi: ➢ Seluruh unit kerja 3

5. Indikator kinerja yang dilakukan konversi sebagaimana ketentuan pada poin 4, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance)* adalah 120%. Contoh target indikator A adalah 100%, maka realisasi yang diinput pada aplikasi Simetris (*e-performance)* adalah 120%.
6. Konversi capaian kinerja dilakukan pada saat pembaruan data pada aplikasi Simetris (*e-performance)* pada tanggal 3 – 7 Februari 2025.

Demikian kami sampaikan. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

${ttd}

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BADAN POM



Balai Besar POM di Jakarta

Jl. As'syafiiyah No.133
Cilangkap - Jakarta Timur 13870

1500533 HALOBPOM
@bpom.jakarta
@BPOMJakarta
082211267771
021-84304046
021-84304048
bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id